



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 22 April 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hani Purwaka, Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan, No. RNA - 7704

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan; dan
19. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 051/SE/BPKAD/20201 tanggal 8 November 2021 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi makro/ekonomi regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- 2.4 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Transisi laporan keuangan dari basis kas modifikasian ke basis akrual
- 3.5 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1 Pendapatan - LRA
 - 4.1.2 Belanja
 - 4.1.3 Pembiayaan
- 4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.3.1 Aset
 - 4.3.2 Kewajiban
 - 4.3.3 Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1 Pendapatan - LO
 - 4.4.2 Beban
 - 4.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 4.4.4 Pos Luar Biasa
- 4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

4.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

5.1 Informasi Tambahan

VI. Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 berada dalam koridor pencapaian Visi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah ***“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”*** yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah; dan
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, maka tema RKPD Tahun 2021 adalah ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia”*** Dalam rangka memenuhi tema yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah 5 (lima) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan, dan Pariwisata;
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP Tahun Anggaran 2021 memiliki empat fokus antara lain:

1. Pemulihan Industri, pariwisata, dan investasi;

2. Reformasi sistem kesehatan nasional;
3. Reformasi sistem jarring pengaman sosial; dan
4. Reformasi sistem ketahanan bencana.

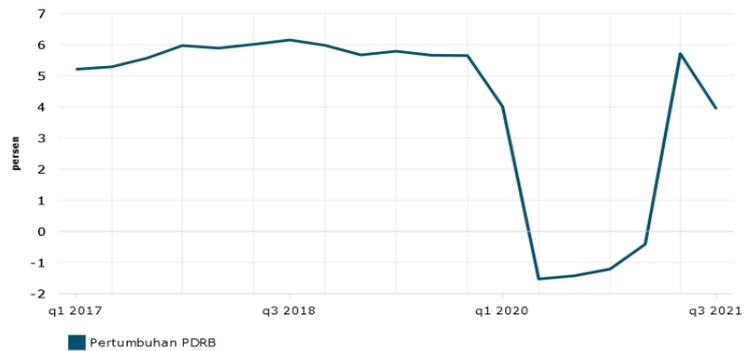
Pada RKP Tahun Anggaran 2021 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 antara lain:

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi;
2. Pengembangan Wilayah;
3. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM);
4. Peningkatan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Penguatan Infrastruktur;
6. Pembangunan Lingkungan Hidup; dan
7. Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Usaha

Perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) sempat mengalami resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Ekonomi di provinsi ini kembali bangkit pada kuartal II 2021 sebesar 5,71% dan tumbuh melambat menjadi 3,93% pada kuartal III 2021 (*year-on-year/yoy*). Secara rinci, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Sumsel jika diukur menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp126,99 triliun pada kuartal III - 2021. Sementara menurut besaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2021, perekonomian Sumsel tumbuh 3,93% menjadi Rp83,81 triliun pada kuartal III - 2021 dibandingkan dengan kuartal III - 2020 (*year on year/yoy*). Dari sisi lapangan usaha, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 7,43% (*yoy*), industri pengolahan 1,85% (*yoy*), serta sektor pertanian 1,85% (*yoy*) menjadi penopang produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel pada kuartal III tahun ini. Ketiga sektor itu berkontribusi 53,7% terhadap PDRB provinsi yang berjudukan Bumi Sriwijaya tersebut. Rinciannya, sektor pertambangan berkontribusi sebesar 18,63%, sektor industri pengolahan 19,26%, dan sektor pertanian 15,81%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, tumbuhnya komponen pengeluaran rumah tangga sebesar 2,21% (*yoy*), komponen konsumsi pemerintah 3,8% (*yoy*), serta komponen ekspor luar negeri 32,13% (*yoy*) yang mampu mendongkrak perekonomian Sumsel pada periode Juli-September 2021. Sebagai informasi, komponen pengeluaran rumah tangga berkontribusi sebesar 63,16% terhadap perekonomian Sumsel. Kemudian konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 6,92%, serta komponen ekspor luar negeri 12,42%.

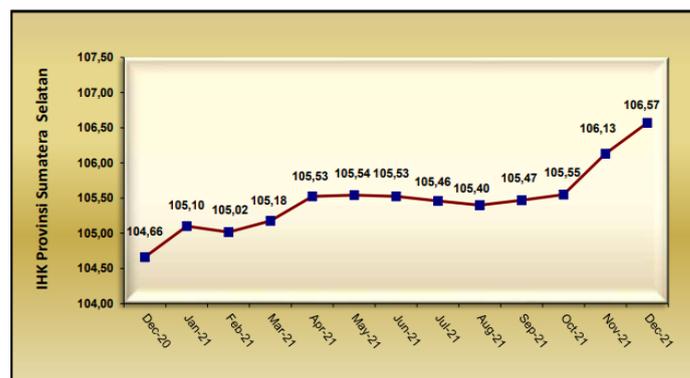


Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2021

2. Tingkat Perkembangan Inflasi Daerah

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,42%, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Desember 2021 sama dengan Inflasi Tahunan “Year on Year” (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,82%. Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Desember 2021 di Sumatera Selatan antara lain: minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit yang mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan rata-rata harga bulan November 2021. Perkembangan harga berbagai komoditas melalui Survei Harga Konsumen pada bulan Desember 2021 secara umum Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 0,42%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2021, yaitu 106,57 dibandingkan periode sebelumnya bulan November 2021, yaitu 106,13. Inflasi Tahun Kalender (kumulatif Januari 2021 sampai dengan Desember 2021) sama dengan Inflasi Tahunan “Year on Year” (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,82%. Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang andil inflasi signifikan pada bulan Desember 2021, yaitu Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.



Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 2. Perkembangan IHK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

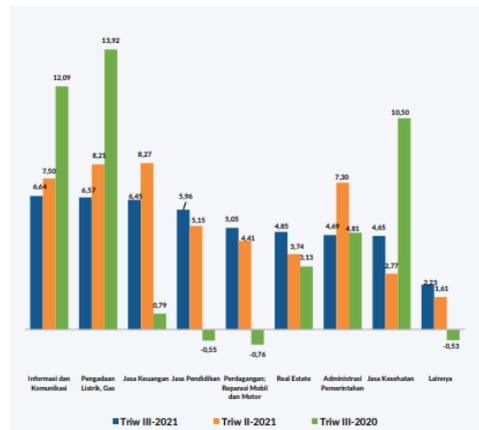
3. Relatif Terjaganya Stabilitas Ekonomi Daerah

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan III - 2021 dibanding triwulan III - 2020 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 3,93%. Pertumbuhan terjadi pada 13 (tiga belas) lapangan usaha, sedangkan kontraksi terjadi pada 4 (empat) lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,29% dan Jasa Pendidikan sebesar 7,57%. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan tertinggi ke-3 sebesar 7,43%. Sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Air mengalami kontraksi tertinggi sebesar 6,81%. Pertumbuhan tertinggi pada Jasa Kesehatan tidak terlepas dari besarnya realisasi belanja APBN dan APBD Sumatera Selatan yang dialokasikan untuk jasa kesehatan. Besarnya alokasi ini juga akibat peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pada triwulan III 2021.

404.1.



Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*y-on-y*) (persen)



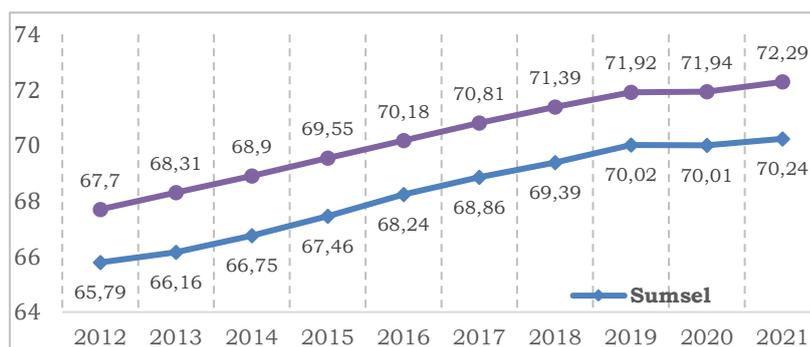
Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*c-to-c*) (persen)

Sumber: BPS Prov. Sumsel

Grafik 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tahun 2021

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

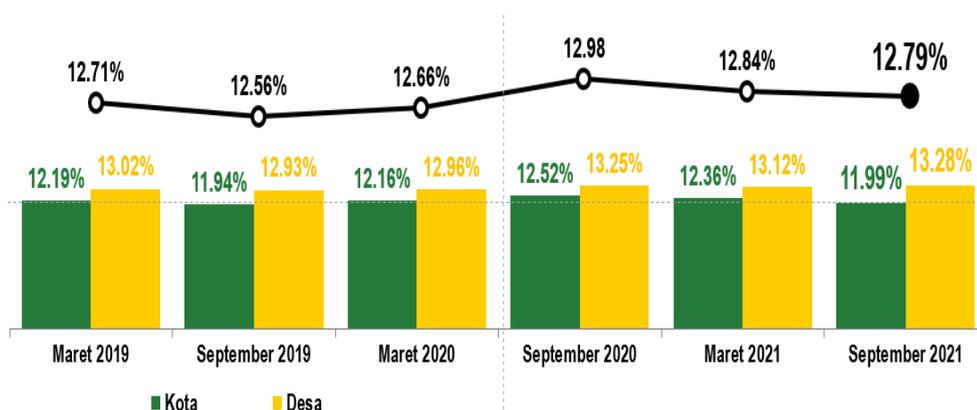
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 70,24% meningkat 0,33% dibandingkan tahun 2020 sebesar 70,01% yang masih dibawah kualitas IPM secara nasional yakni sebesar 72,29%. Sejak Tahun 2019 IPM Sumatera Selatan masuk kedalam kelompok status IPM tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$). Sejak Tahun 2014 disparitas IPM di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, namun mengalami kenaikan pada Tahun 2021 disebabkan karena pandemi Covid-19. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM di Provinsi Sumatera Selatan dengan memastikan ketepatan alokasi belanja APBN khususnya fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang secara khusus ditujukan untuk peningkatan IPM. (sumber Badan Pusat Statistik dan Laporan ALCo Regional Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)



Grafik 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia per 2012 - 2021

5. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Seiring dengan pemulihan ekonomi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada kurun satu tahun terakhir (September 2020 – September 2021) berkurang sebanyak 3,04 ribu orang. Nilai ini menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,19% dari tingkat kemiskinan sebesar 12,98% pada bulan September 2020. Sehingga jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sejumlah 1,11 ribu orang atau sebesar 12,79% dari jumlah total penduduknya. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinannya mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan program pengentasan kemiskinan belum dinikmati secara merata diantara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/pengeluaran diantara mereka semakin berjarak. (sumber Badan Pusat Statistik dan Laporan ALCo Regional Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

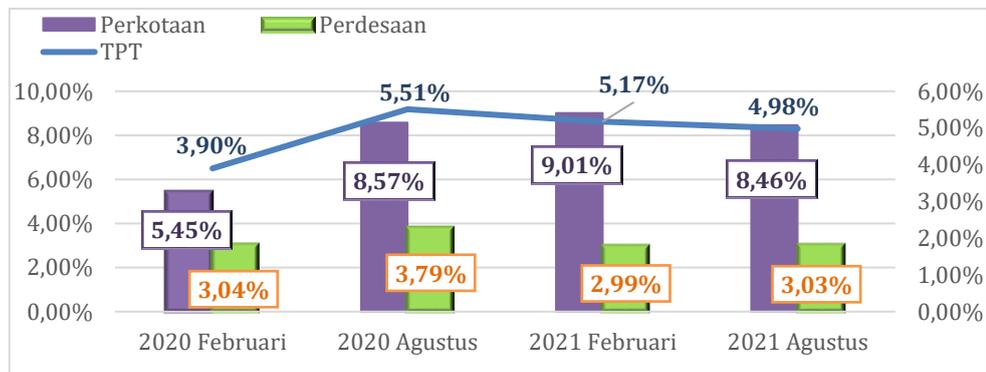


Grafik 5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Per 2019 - 2021

6. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 4,40 juta orang bertambah sebanyak 69,2 ribu orang sejak Agustus 2020. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri atas 4,18 juta orang penduduk yang bekerja dan 219,2 ribu orang pengangguran. Komposisi pengangguran menurun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 238,4 ribu orang dan jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 229,9 ribu orang.

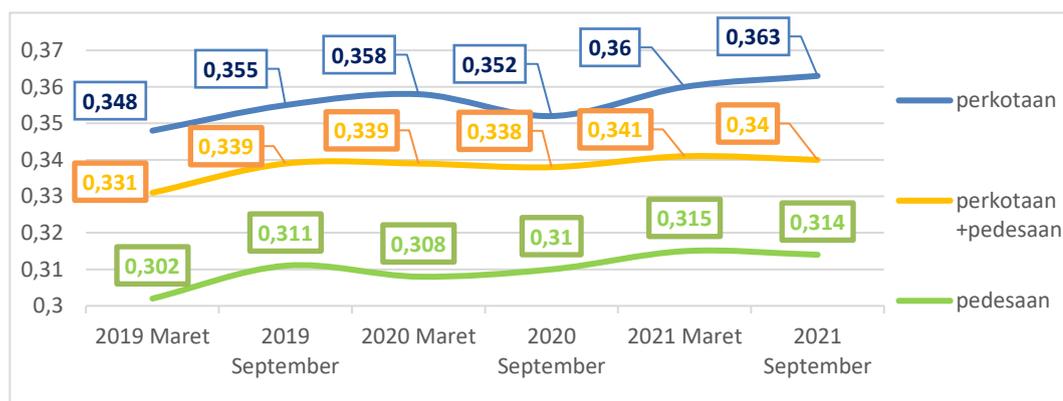
Jika ditinjau melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut hasil Sakernas Agustus 2021 TPT di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 4,98% artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan. Capaian TPT ini lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 dan Februari 2021 yang masing-masing sebesar 5,51% dan 5,17% jika ditinjau berdasarkan wilayah komposisi persentase TPT di perkotaan turun menjadi 8,47% sedangkan persentase TPT di pedesaan naik 0,04% sejak Februari 2021 menjadi 3,03%. (sumber Badan Pusat Statistik dan Laporan ALCo Regional Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)



Grafik 6. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan per 2021

7. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 hingga 1. Nilai *Gini Ratio* diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada September 2021 nilai *Gini Ratio* di Sumatera Selatan menurun tipis 0,001 menjadi 0,340 dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2021 yang sebesar 0,341. Jika ditinjau dari wilayahnya, tingkat ketimpangan di daerah perkotaan meningkat menjadi 0,363 pada Maret 2021 dibandingkan nilai *Gini Ratio* sebesar 0,355 pada bulan Maret 2021. Sedangkan ketimpangan di pedesaan turun menjadi 0,314 dibandingkan dengan *Gini Ratio* 0,315 pada bulan Maret 2021. Pada tiga tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan selalu berada di dalam kategori sedang ($0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$) baik di perkotaan maupun di pedesaan. (sumber Badan Pusat Statistik dan Laporan ALCo Regional Provinsi Sumatera Selatan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)



Grafik 7. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Secara Menyeluruh per 2019 - 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.611.291.244.667,17 mengalami peningkatan sebesar Rp332.771.184.605,14 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.278.520.060.062,03 atau 33,27% peningkatan terjadi pada komponen Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp615.159.551.422,81 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2020 (SiLPA) Rp121.593.374.660,10 menurun sebesar Rp227.640.995.810,32 dibanding SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp349.234.370.470,42 atau 65,00% dan Pinjaman Daerah sebesar Rp493.566.176.762,71 naik sebesar Rp367.822.666.426,71 dibandingkan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp125.743.510.336,00 atau 292,51%.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran hutang, bantuan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran pokok utang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penetapan capaian kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Tabel 1 di bawah ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun 2021.

Tabel 1. Indikator Target Kinerja APBD Tahun 2021

(dalam rupiah)

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN DAERAH	10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17	88,99
I.1	Pendapatan Asli Daerah	4.747.088.053.007,00	3.865.463.033.085,17	81,43
I.2	Pendapatan Transfer	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
II	BELANJA DAERAH	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,39	88,17
II.1	Belanja Operasi	5.830.058.901.452,00	5.365.031.503.749,49	92,02
II.2	Belanja Modal	2.191.283.655.818,00	1.836.834.114.021,94	83,82
II.3	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70
II.4	Belanja Transfer	3.373.834.784.602,00	2.844.809.545.045,96	84,32
	SURPLUS / (DEFISIT)	(609.233.322.485,00)	(449.439.016.312,22)	73,77
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
III.1	Penerimaan Pembiayaan	711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86,45
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98
	Pembiayaan NETTO	609.233.322.485,00	529.159.551.422,81	86,86
	SILPA	0,00	79.720.535.110,59	0,00

Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yaitu:

1. Dasar dalam rangka penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
2. Dasar untuk menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sumber dana dari Anggaran Daerah;
3. Instrumen untuk melaksanakan sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah yang berkeadilan dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
4. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu; dan
5. Optimalisasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp9.611.291.244.667,17 atau 88,99% dari anggaran sebesar Rp10.800.944.019.387,00 SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 21 SKPD dari 41 SKPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 2 berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 21 SKPD tersebut.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	97.000.000,00	46.500.000,00	47,94
2	Dinas Kesehatan	72.758.486.279,00	98.949.450.718,28	136,00
3	RS. Ernaldi Bahar	20.448.240.000,00	25.209.819.926,00	123,29
4	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	342.485.950,00	579.307.500,00	169,15
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	880.050.000,00	1.011.956.900,00	114,99
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	50.000.000,00	70.900.000,00	141,80
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	16.000.000.000,00	19.697.732.597,00	123,11
8	Dinas Perhubungan	3.618.000.000,00	5.555.963.446,00	153,56
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	98.200.000,00	125.401.000,00	127,70
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	25.000.000,00	0,00
11	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	222.194.000,00	528.241.000,00	237,74
12	Dinas Kehutanan	0,00	1.963.620,00	0,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	250.000.000,00	145.752.460,00	58,30
14	Dinas Perdagangan	90.000.000,00	164.305.000,00	182,56
15	Sekretariat Daerah	1.840.262.273,00	1.030.242.000,00	55,98
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.163.337.852.803,00	5.867.840.418.652,85	81,91
18	Badan Pendapatan Daerah	3.500.243.740.082,00	3.568.915.443.213,04	101,96
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.578.993.000,00	21.345.105.634,00	103,72
20	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	33.515.000,00	44.241.000,00	132,00
21	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	3.500.000,00	7,78
JUMLAH		10,800,944,019,387.00	9.611.291.244.667,17	88,99

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh 41 SKPD. BPKAD selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan, ditambah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang merupakan bagian dari SKPD Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah. Jumlah keseluruhan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp11.410.177.341.872,00 dan terealisasi sebesar Rp10.060.730.260.979,40 atau 88.17%, rincian Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Per SKPD Tahun 2021*(dalam rupiah)*

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	3,362,804,102,450.00	3,210,188,945,956.87	95.46
2	Dinas Kesehatan	550,186,829,149.00	451,528,304,043.64	82.07

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
3	RS. Ernaldi Bahar	76,876,411,140.00	66,919,729,175.00	87.05
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	164,320,324,763.00	139,659,575,624.00	84.99
5	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	1,533,681,792,608.00	1,250,497,858,967.79	81.54
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	208,363,818,038.00	189,412,074,338.58	90.90
7	Satuan Polisi Pamong Praja	38,135,925,000.00	37,356,190,496.00	97.96
8	Badan Penanggulangan Bencana	28,630,761,649.00	25,596,745,900.78	89.40
9	Dinas Sosial	36,047,811,000.00	31,802,883,761.00	88.22
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27,996,008,000.00	26,723,612,703.00	95.46
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,127,146,000.00	11,184,785,583.00	85.20
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	26,884,239,000.00	25,518,427,853.00	94.92
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	48,817,842,460.00	43,088,300,719.33	88.26
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,472,574,000.00	6,964,032,357.00	82.20
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43,915,765,700.00	42,106,320,192.00	95.88
16	Dinas Perhubungan	35,695,045,350.00	32,240,716,530.39	90.32
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	41,451,567,600.00	38,038,828,394.00	91.77
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15,881,301,000.00	15,089,609,274.68	95.01
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,996,808,000.00	23,977,435,951.00	92.23
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	93,134,076,950.00	88,290,709,619.00	94.80
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	42,822,997,000.00	40,507,099,594.00	94.59
22	Dinas Perpustakaan	21,598,873,000.00	20,062,899,109.00	92.89
23	Dinas Kearsipan	13,554,341,000.00	12,253,615,796.00	90.40
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	33,261,645,000.00	31,463,530,097.00	94.59
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	78,652,620,000.00	72,746,067,406.00	92.49
26	Dinas Perkebunan	16,749,803,200.00	15,013,251,536.60	89.63
27	Dinas Kehutanan	49,823,398,232.00	47,792,282,395.44	95.92
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26,553,629,000.00	24,463,189,031.00	92.13
29	Dinas Perdagangan	15,632,664,000.00	14,961,545,798.00	95.71
30	Dinas Perindustrian	14,760,320,000.00	14,291,238,731.00	96.82
31	Sekretariat Daerah	497,432,677,214.00	449,183,885,365.00	90.30
32	Inspektorat Daerah	33,865,372,000.00	29,024,726,026.00	85.71
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30,506,162,800.00	28,066,209,003.00	92.00
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3,505,470,361,135.00	2,943,154,241,202.96	83.96
35	Badan Pendapatan Daerah	217,396,726,000.00	183,149,841,625.00	84.25
36	Badan Kepegawaian Daerah	18,266,935,627.00	17,175,599,030.00	94.03
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	41,683,706,644.00	39,034,307,676.00	93.64
38	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	22,534,069,440.00	20,716,020,760.33	91.93
39	Sekretariat DPRD	306,196,745,123.00	270,419,113,840.00	88.32
40	Badan Penghubung	16,200,246,000.00	15,211,175,276.00	93.89
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26,793,899,600.00	15,855,334,241.00	59.18
JUMLAH		11,410,177,341,872.00	10,060,730,260,979.39	88.17

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan dalam LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan saldo akun-akun Tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4 Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi IFAC PSC mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat dua modifikasi yang dipakai, yaitu (1) dasar modifikasi kas (*modified cash basic*) dan (2) dasar akrual modifikasian (*modified accrual basic*).

1. Dasar Kas Modifikasian (*Modified Cash Basic*)

Pada dasarnya mirip dengan dasar kas dalam mengakui transaksi dan kejadian saat kas diterima atau dibayarkan. Hanya saja, perbedaannya, pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah

dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Pengakuan dan pelaporan saldo kas antara dasar kas modifikasian dengan dasar kas terdapat persamaan. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibukanya pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya.

2. Dasar AkruaI Modifikasian (*Modified Accrual Basic*)

Dasar akruaI modifikasian mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akruaI modifikasian dari dasar akruaI adalah:

- a. Aset fisik dibiayakan (*expensed*) pada waktu pembelian; dan
- b. Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akruaI.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akruaI modifikasian, adalah:

- a. Aset-aset Keuangan;
- b. Kewajiban;
- c. Kewajiban Bersih/Aset-aset Keuangan Bersih; dan
- d. Pendapatan dan Biaya Modifikasi AkruaI.

Dasar AkruaI Modifikasian menyediakan para pemakai Laporan Keuangan, dengan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber-sumber keuangan.

3.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan - LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan - LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1 Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2 Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3 Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4 Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen

penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan

- 5 Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan - LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan - LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan
Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, Pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima bersamaan dan disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan - LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pendapatan - LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- b. Pendapatan - LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan diterima di muka atas pajak daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding SKPD, atau SKPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku.

Pendapatan diterima di muka akibat adanya perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, retribusi pemanfaatan ruang jangka panjang, uang muka pelayanan BLUD-RSUD.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin

tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari satu tahun buku, namun jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

c. Pendapatan - LO Diakui setelah Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan - LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO adalah untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

Pengukuran

Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD maupun Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan Dana Transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di RKUD;
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu;
- c. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- d. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan;
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan

pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.

- 1) Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas pada RKUD.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar. Pengukuran Investasi Jangka Pendek berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerja sama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Jangka Panjang non permanen:
 - 1) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi Jangka Panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - 3) Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang, yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Kelebihan Transfer; dan
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- b. Dana Bagi Hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang Pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
4. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Lancar sebesar 0,5%
2. Kurang Lancar sebesar 10%
3. Diragukan sebesar 50%
4. Macet sebesar 100%

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerja sama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. Misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian

kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang

dibangun dengan cara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa/residu aset tetap. Penyusutan per periode dilakukan dengan membagi nilai perolehan/penilaian dengan masa manfaat.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat

dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi Dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria sebagai berikut.

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang, atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

b. Utang Bunga

Sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya

berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

e. Utang Beban

Diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

g. Utang Kepada Pihak Ketiga

Diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Barang yang dibeli sudah diterima;
- 2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan
- 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

h. Utang Transfer DBH

Terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

i. Kewajiban Jangka Panjang

Diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non

Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; dan
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

1. Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Utang Transfer

Dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

9. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dikurangi kewajiban pemerintah daerah ditambah dengan surplus/defisit-LO.

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1 Pendapatan - LRA

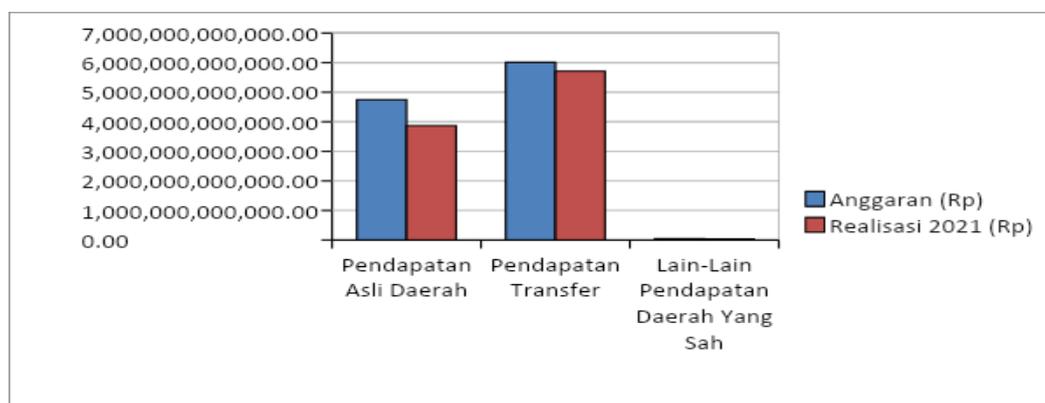
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp10.800.944.019.387,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp9.611.291.244.667,17 atau 88,99% dari anggaran yang ditetapkan. Dan naik sebesar Rp332.771.184.605,14 atau 3,59% bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp9.278.520.060.062,03. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Menurut Kelompok

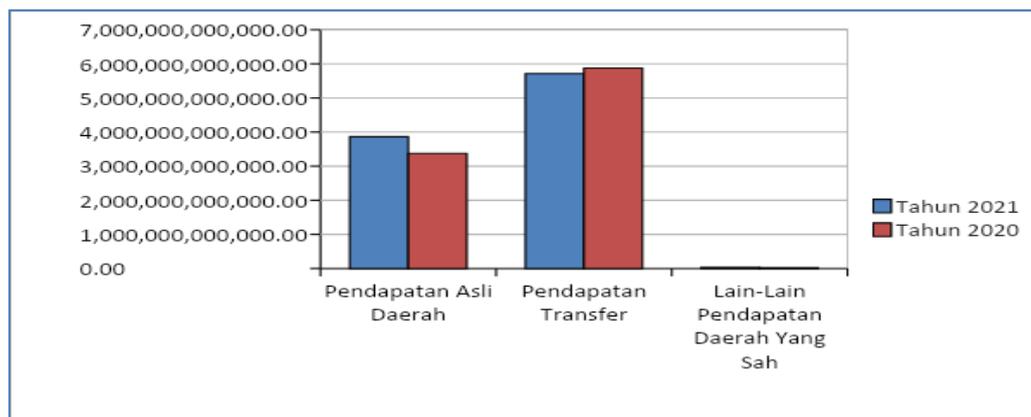
(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Asli Daerah	4.747.088.053.007,00	3.865.463.033.085,17	81,43	3.375.100.984.842,03
2	Pendapatan Transfer	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.875.896.342.538,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	27.522.732.682,00
Jumlah Pendapatan		10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17	88,99	9.278.520.060.062,03

Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada pada grafik 8 berikut.



Grafik 8. Komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021



Grafik 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

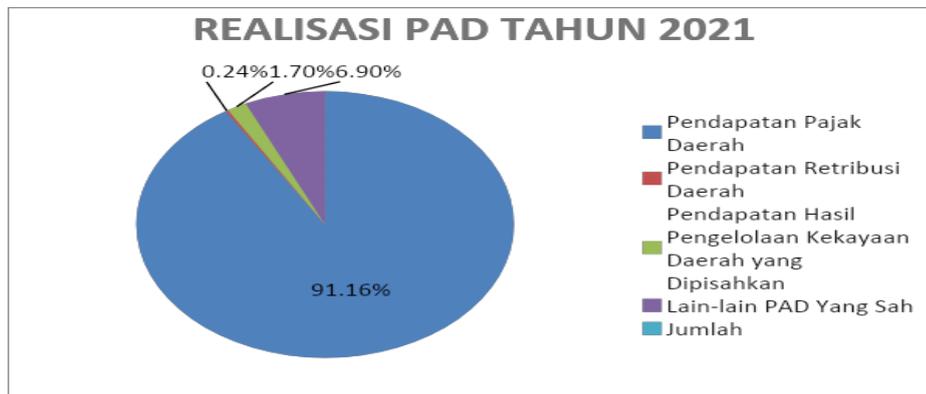
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.865.463.033.085,17 atau 81,43% dari anggarannya sebesar Rp4.747.088.053.007,00 naik sebesar Rp490.362.048.243,14 atau 14,53% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp3.375.100.984.842,03 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	PAD	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.500.243.740.082,00	3.523.785.342.246,24	100,67	3.081.800.984.699,61
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	8.234.552.913,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.209.528.648,00	65.714.183.659,07	64,93	82.836.132.369,66
4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.138.033.077.054,00	266.649.757.873,86	23,43	202.229.314.859,76
Jumlah		4.747.088.053.007,00	3.865.463.033.085,17	81,43	3.375.100.984.842,03

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 10. Komposisi Realisasi PAD Tahun 2021

Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar dalam realisasi PAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 91,16%.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2021 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan terealisasi sebesar Rp3.523.785.342.246,24 atau 100,67% dari anggarannya sebesar Rp3.500.243.740.082,00 naik sebesar Rp441.984.357.546,63 atau 14,34% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.081.800.984.699,61. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 pada tabel berikut.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Pajak daerah	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	958.536.913.000,00	1.050.846.360.960,00	109,63	1.069.302.341.956,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	865.679.168.000,00	957.251.353.845,00	110,58	664.861.456.250,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.135.000.000.000,00	939.777.027.499,04	82,80	751.357.346.082,81
4	Pajak Air Permukaan	12.065.000.000,00	12.628.973.571,20	104,67	12.595.457.344,80
5	Pajak Rokok	528.962.659.082,00	563.281.626.371,00	106,49	583.684.383.066,00
Jumlah		3.500.243.740.082,00	3.523.785.342.246,24	100,67	3.081.800.984.699,61

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp958.536.913.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.050.846.360.960,00 atau 109,63% turun sebesar Rp18.455.980.996,00 atau 1,73% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.069.302.341.956,00. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

memiliki kontribusi terbesar dalam keseluruhan pencapaian pajak daerah yaitu terealisasi sebesar Rp1.050.846.360.960,00 atau 29,82% dari seluruh pencapaian pajak daerah sebesar Rp3.523.785.342.246,24. Rincian realisasi Pajak kendaraan Bermotor terdapat pada tabel berikut.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi PKB

(dalam rupiah)

No	Pajak Kendaraan Bermotor	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Mobil Penumpang – Sedan	14.776.300.000,00	15.610.696.800,00	105,65	624.736.313.479,00
2	Mobil Penumpang – Jeep	50.896.400.000,00	114.838.782.475,00	225,63	507.986.250,00
3	Mobil Bus – Microbus	1.540.800.000,00	2.962.132.050,00	192,25	3.114.036.275,00
4	Mobil Bus – Bus	3.235.400.000,00	564.242.575,00	17,44	1.176.185.920,00
5	Mobil Barang/ Beban - Pick Up	163.591.000.000,00	94.191.550.490,00	57,58	226.468.118.876,00
6	Mobil Barang/ Beban - Light Truck	74.277.600.000,00	104.202.245.225,00	140,29	27.514.020.800,00
7	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	160.579.088.000,00	171.892.287.400,00	107,05	181.338.277.885,00
8	Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	36.913.000,00	38.633.800,00	104,66	166.931.112,00
9	Alat-alat Berat	0,00	86.281.862,00	100,00	4.280.471.359,00
10	Mobil Penumpang- Minibus	480.923.300.000,00	499.952.169.308,00	103,96	0,00
11	Mobil Barang/Beban-Truck	6.230.000.000,00	45.323.351.975,00	727,50	0,00
12	Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.313.600.000,00	965.786.425,00	41,74	0,00
13	Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	136.512.000,00	217.233.075,00	159,13	0,00
14	Mobil Roda Tiga	0,00	967.500,00	100,00	0,00
Jumlah		958.536.913.000,00	1.050.846.360.960,00	109,63	1.069.302.341.956,00

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan sebesar Rp865.679.168.000,00 dengan realisasi sebesar Rp957.251.353.845,00 atau 110,58% naik sebesar Rp292.389.897.595,00 atau 43,98% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp664.861.456.250,00. Anggaran dan realisasi BBNKB terdapat pada tabel berikut.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi BBNKB

(dalam rupiah)

No	BBNKB	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Mobil Penumpang – Sedan	10.890.000.000,00	4.113.320.000,00	37,77	344.970.596.150,00
2	Mobil Penumpang – Jeep	52.998.000.000,00	101.064.332.500,00	190,69	90.636.000,00
3	Mobil Bus – Microbus	1.306.800.000,00	2.068.815.000,00	158,31	5.700.990.050,00
4	Mobil Bus – Bus	2.520.000.000,00	1.559.045.000,00	61,87	447.268.000,00
5	Mobil Barang/ Beban - Pick Up	109.332.000.000,00	101.237.635.000,00	92,60	117.019.309.050,00

No	BBNKB	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
6	Mobil Barang/ Beban - Light Truck	61.912.500.000,00	42.427.734.000,00	68,53	31.045.480.650,00
7	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	205.569.067.200,00	243.776.975.750,00	118,59	164.988.091.900,00
8	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	2.749.300.800,00	877.670.700,00	31,92	1.661.250,00
9	Alat Berat	0,00	47.149.495,00	100,00	597.423.200,00
10	Mobil Barang/Beban Truck	4.305.000.000,00	55.440.335.000,00	1.287,81	0,00
11	Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.450.000.000,00	3.640.045.000,00	148,57	0,00
12	Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
13	Mobil Penumpang-Minibus	411.615.000.000,00	400.958.733.900,00	97,41	0,00
14	Mobil Roda Tiga	0,00	8.062.500,00	100,00	0,00
Jumlah		865.679.168.000,00	957.251.353.845,00	110,58	664.861.456.250,00

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) dianggarkan sebesar Rp1.135.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp939.777.027.499,04 atau 82,80% naik sebesar Rp188.419.681.416,23 atau 25,08% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp751.357.346.082,81. Realisasi PBB KB per jenis bahan bakar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi PBB KB

(dalam rupiah)

No	PBBKB	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Premium	0,00	0,00	0,00	363.017.074.628,00
2	Pertamax	0,00	0,00	0,00	34.306.196.612,00
3	Solar	0,00	0,00	0,00	114.030.675.842,81
4	Gas	0,00	0,00	0,00	81.873.637,00
5	Pertamax Racing	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pertamina Dex	0,00	0,00	0,00	2.747.556.348,00
7	Bio Solar	0,00	0,00	0,00	237.173.969.015,00
8	Bahan Bakar Bensin	644.658.509.500	736.258.844.345,34	114,21	0,00
9	Bahan Bakar Solar	489.691.783.985	203.112.407.850,70	41,48	0,00
10	Bahan Bakar Gas	649.706.515	405.775.303,00	62,46	0,00
Jumlah		1.135.000.000.000,00	939.777.027.499,04	82,80	751.357.346.082,81

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya mengganggarkan pada jenis golongan bahan bakar, dan tidak merincikan sampai dengan rincian jenis bahan bakar.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di

darat. PAP dianggarkan sebesar Rp12.065.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.628.973.571,20 atau 104,67% naik sebesar Rp33.516.226,40 atau 0,26% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp12.595.457.344,80.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah. Alokasi pajak rokok untuk masing-masing provinsi tahun 2021 diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-59/PK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang proporsi dan estimasi penerimaan pajak rokok untuk masing-masing provinsi Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, sesuai Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b PMK Nomor 41/PMK.07/2016 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok. PMK tersebut menyatakan bahwa penyetoran penerimaan pajak rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan setelah Gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil pajak rokok kepada kabupaten/kota dan Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan. Pendapatan Pajak Rokok Provinsi Sumatera Selatan dianggarkan sebesar Rp528.962.659.082,00 dengan realisasi sebesar Rp563.281.626.371,00 atau 106,49% turun sebesar Rp20.402.756.695,00 atau 3,00% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp583.684.383.066,00. Rincian realisasi penerimaan pajak rokok per triwulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rincian Penerimaan Pajak Rokok

(dalam rupiah)

No	Uraian	Bruto	Neto	Dasar Penerimaan
1	Desember 2020	76.060.725.572,00	69.553.001.416,00	Surat DJPK No. S-86/PK.4/2021 tanggal 30 April 2021
2	Triwulan I	148.741.173.090,00	144.500.928.573,00	Surat DJPK No. S-85/PK.4/2021 tanggal 30 April 2021
3	Triwulan II	125.465.136.485,00	124.294.989.580,00	Surat DJPK No. S-171/PK.4/2021 tanggal 27 Juli 2021
4	Triwulan III	122.915.424.251,00	121.774.510.405,00	Surat DJPK No. S-255/PK.4/2021 tanggal 29 Oktober 2021
5	Triwulan IV	103.158.196.397,00	103.158.196.397,00	Surat DJPK No. S-301/PK.4/2021 tanggal 20 Desember 2021
Jumlah		576.340.655.795,00	563.281.626.371,00	

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp7.601.707.223,00 dengan realisasi sebesar Rp9.313.749.306,00 atau 122,52% dari anggarannya, naik sebesar Rp1.079.196.393,00 atau 0,13% dari realisasi saldo Tahun 2020 sebesar Rp8.234.552.913,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Retribusi	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.000.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.150.950,00	1.703.961.960,00	113,59	1.502.979.305,00
3	Retribusi Tempat Penginapan	584.216.273,00	383.050.000,00	65,57	119.452.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	913.540.000,00	556.540.000,00	60,92	1.050.602.000,00
5	Retribusi Penyeberangan Air	0,00	0,00	0,00	11.614.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.800.000,00	185.900.000,00	99,52	0,00
7	Retribusi Terminal	800.000.000,00	893.801.530,00	0,00	0,00
8	Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	10.798.451,00	0,00	0,00
9	Retribusi Izin Trayek	2.815.000.000,00	4.648.363.465,00	165,13	3.635.208.851,00
10	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	800.000.000,00	926.333.900,00	115,79	1.499.354.000,00
11	Retribusi Penyewaan Lahan	0,00	0,00	0,00	107.421.215,00
12	Retribusi Penjualan Bibit/Benih	0,00	0,00	0,00	121.260.000,00
13	Retribusi Pengawasan dan Pengujian Mutu	0,00	0,00	0,00	153.590.000,00
14	Retribusi Penjualan Semen Beku/Straw	0,00	0,00	0,00	42.150.000,00
15	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
16	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	(10.168.458,00)
Jumlah		7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	8.234.552.913,00

Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**.

Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp9.313.749.306,00 merupakan realisasi pendapatan retribusi yang telah diterima di RKUD per 31 Desember 2021 termasuk realisasi pendapatan retribusi yang masih ada di kas bendahara penerimaan sebesar Rp13.231.924,00. Realisasi pendapatan retribusi di kas bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan Provinsi sebagai berikut.

- a. Pelayanan penyediaan fasilitas lainnya sebesar Rp1.943.000,00 disetor pada tanggal 3 Januari 2022;
- b. Pelayanan pelabuhan sebesar Rp13.035,00 disetor pada tanggal 3 Januari 2022; dan

- c. Izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp11.275.889,00 disetor pada tanggal 3 Januari 2022.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp65.714.183.659,07 atau 64,93% dari anggarannya sebesar Rp101.209.528.648,00 turun sebesar Rp17.121.948.710,59 atau 20,67% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp82.836.132.369,66. Pendapatan tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan milik swasta yang dikelola oleh BUD selaku PPKD, dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	61.033.917.861,00	56.866.949.483,07	93,17	47.166.325.240,66
-	PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	928.940.000,00	0,00	0,00	0,00
-	PT Sumsel Energi Gemilang	7.155.074.295,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
-	PT. Jamkrida	2.072.903.566,00	0,00	0,00	0,00
-	Lembaga Keuangan Bank Sumsel Babel	50.877.000.000,00	56.866.949.483,07	111,77	46.166.325.240,66
2	Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik BUMN/ Swasta	40.175.610.787,00	8.847.234.176,00	22,02	35.669.807.129,00
-	PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam	39.288.754.826,00	7.960.554.081,00	20,26	34.792.963.573,00
-	PT. Asuransi Bangun Askrida	166.555.961,00	94.350.095,00	56,65	94.803.556,00
-	PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna	720.300.000,00	792.330.000,00	110,00	782.040.000,00
	Jumlah	101.209.528.648,00	65.714.183.659,07	64,93	82.836.132.369,66

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.138.033.077.054,00 dengan realisasi sebesar Rp266.649.757.873,86 atau 23,43% naik sebesar Rp64.420.443.014,10 atau 31,86% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp202.229.314.859,76 dengan rincian tabel berikut.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	748.257.357.775,00	2.667.227.400,00	0,36	199.758.000,00

No	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2021	Tahun 2021		Tahun 2020
2	Penerimaan Jasa Giro	25.000.000.000,00	20.222.977.506,57	80,89	28.458.254.676,46
3	Pendapatan Bunga	62.500.000.000,00	0,00	0,00	8.607.123.214,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.000.000,00	8.600.000,00	57,33	1.000.000,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	167.500.000.000,00	1.292.484.565,48	0,77	195.323.769,76
6	Pendapatan Denda Pajak	0,00	45.130.100.966,80	0,00	41.614.935.477,20
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.305.364.843,00	0,00	401.517.314,40
8	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00	900.054.700,00
9	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.667.302.897,88	0,00	4.074.226.645,03
10	Pendapatan BLUD	129.760.719.279,00	165.191.108.875,28	127,30	104.174.138.247,34
11	Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	27.164.590.818,85	0,00	13.602.982.815,57
Jumlah		1.138.033.077.054,00	266.649.757.873,86	23,43	202.229.314.859,76

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direalisasikan sebesar Rp2.667.227.400,00 adalah setoran pelunasan penjualan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui lelang dan penjualan gedung dan bangunan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 14. Rincian Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	SK	Jumlah
1	Setoran pelunasan lelang kendaraan dinas roda empat BG 2332 LZ a.n Drs.Akhmad Gufran,M.Si	SK Nomor 689/KPTS/BPKAD/2014	1.000.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	SK Nomor 263/KPTS/BPKAD/2018	2.666.227.400,00
Jumlah			2.667.227.400,00

Lelang kendaraan sebesar Rp1.000.000,00 merupakan setoran pelunasan lelang kendaraan pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp2.666.227.400,00 dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Angsuran penjualan rumah dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.134.367.400,00 dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.090.000,00;
- 2) Setoran penjualan sisa bongkaran rumah dinas pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp9.600.000,00 dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.000.000,00;
- 3) Pembayaran kayu onglan hasil lelang CV Sinar Semendo pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.510.000.000,00; dan
- 4) Penjualan penghapusan barang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp670.000,00, penjualan inventaris barang rusak berat pada

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp500.000,00, penghapusan barang pada Ernaldi Bahar sebesar Rp4.000.000,00 dan pembayaran barang rusak/rongsokan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.000.000,00.

- b. Penerimaan Jasa Giro direalisasikan sebesar Rp20.222.977.506,57 adalah penerimaan jasa giro dari Rekening Kas Umum Daerah nomor 140-300-0001 dan nomor 140-300-00001 pada Bank Sumsel Babel dan semua penerimaan jasa giro pada rekening-rekening SKPD yang ada di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Jasa giro pada rekening pemegang kas daerah sebesar Rp20.107.882.072,00, jasa giro dana BOS sebesar Rp3.423.706,00 dan jasa giro pada kas bendahara sebesar Rp111.671.728,57 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Rincian Jasa Giro Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Jasa Giro	Jumlah
1	Jasa giro kas daerah	20.107.882.072,00
2	Jasa giro dana BOS	3.423.706,00
3	Jasa giro pada Kas di Bendahara	111.671.728,57
Jumlah		20.222.977.506,57

- c. Pendapatan Bunga Tahun 2021 sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp62.500.000.000,00.
- d. Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah direalisasikan sebesar Rp8.600.000,00 merupakan penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian daerah kendaraan dinas Nomor Plat BG 5242 NZ yang hilang pada tahun 2012.
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan direalisasikan sebesar Rp1.292.484.565,48 dari yang dianggarkan sebesar Rp167.500.000.000,00.
- f. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp45.130.100.966,80 dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 16. Rincian Pendapatan Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Denda + Bunga
A	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	43.104.944.608,00
1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan	23.437.556.595,00
2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	83.872.350,00
3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	70.292.800,00
4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	10.997.310.885,00
5	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	8.500.173.378,00
6	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	15.738.600,00
B	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.814.677.251,00
1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	715.300.806,00
2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus	743.000,00
3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	6.520.850,00
4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	3.581.000,00
5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	874.776.600,00

No	Uraian	Denda + Bunga
6	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	213.754.995,00
C	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	180.494.870,00
1	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	180.494.870,00
D	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	29.984.237,80
1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	29.984.237,80
Jumlah		45.130.100.966,80

- g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.305.364.843,00 merupakan realisasi pendapatan dari pengembalian pembayaran pajak PPh 21 sebesar Rp16.057.000,00, pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp456.923.047,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp832.384.796,00.
- h. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan realisasi pendapatan atas perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) dan pemanfaatan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.667.302.897,88. Terdiri dari hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp453.506.920,00 untuk sewa lahan dan gedung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas kehutanan sedangkan Bangun Guna Serah sebesar Rp3.213.795.977,88 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 17. Rincian Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
A	HASIL SEWA BARANG MILIK DAERAH	453.506.920,00
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.502.000,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.059.000,00
3	Dinas Kehutanan	1.963.620,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	422.982.300,00
a.	Pembayaran Pertama, Sewa 5 Thn Sekretariat (Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB)	20.000.000,00
b.	Pembayaran Sewa Lahan ATM <i>Drive Thru</i> Jakabaring, Lahan Parkir Jakabaring dan ATM <i>Drive Thru</i> Kampus	361.891.000,00
c.	Pembayaran kedua Sewa 5 Thn Sekretariat (Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB)	41.091.300,00
B	HASIL DARI BANGUN GUNA SERAH	3.213.795.977,88
1	Pembayaran Kontribusi Sekolah Palembang Harapan	1.227.708.000,00
2	Pembayaran Kontribusi Tetap Parkir Palembang Paragon Mall (PSX)	662.115.201,00
3	Pembayaran Kontribusi Parkir (GOR) Per Jan-Des 2020 PT. Griya Inti Sejahtera Insani	1.321.281.878,88
4	Pembayaran Kontribusi Mall dan parkir Tahun 2020 PT. Graha Pinaringan	2.690.898,00
Jumlah		3.667.302.897,88

- i. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp27.164.590.818,85 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 18. Rincian Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Dana BOS	22.381.281,00
2	Pengembalian Dana DAK	1.290.569,00
3	Pengembalian dana PSG	432.498.928,35
4	Tindak Lanjut Temuan BPK	15.067.421.396,42
5	Pengembalian Hibah	1.185.587.044,00
6	Lain-lain	10.455.411.600,08
Jumlah		27.164.590.818,85

Pengembalian Dana BOS, Dana DAK dan Dana PSG merupakan pengembalian tahun sebelumnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pengembalian Tindak Lanjut Temuan BPK merupakan pengembalian dari Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penghubung, dan Dinas Perumahan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Pengembalian Hibah merupakan Pengembalian Hibah tahun 2020 yang disetor pada Tahun 2021 dari KPID, PMI, Universitas PGRI, UIN Raden Patah Palembang dan STIE Prabumulih. Pengembalian lain-lain merupakan pengembalian yang surat tanda setorannya tidak dapat diidentifikasi antara lain setoran via transfer atm atau surat tanda setoran yang tidak jelas informasinya.

- j. Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp165.191.108.875,28 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19. Rincian Realisasi Pendapatan BLUD*(dalam rupiah)*

No	BLUD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	RS. MATA (BLUD)	23.000.000.000,00	22.619.042.381,00	98,34
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	23.000.000.000,00	22.619.042.381,00	98,34
2	RS. PARU-PARU (BLUD)	774.157.279,00	727.841.664,00	94,02
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	774.157.279,00	727.841.664,00	94,02
3	RS. GIGI DAN MULUT (BLUD)	3.300.000.000,00	4.382.778.991,00	132,81
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.300.000.000,00	4.382.778.991,00	132,81
4	RS. UMUM DAERAH SITI FATIMAH (BLUD)	43.884.329.000,00	69.098.731.465,28	157,46
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	43.884.329.000,00	69.098.731.465,28	157,46
5	BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI (BLUD)	1.800.000.000,00	2.121.056.217,00	117,84
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.800.000.000,00	2.121.056.217,00	117,84
6	RS. DR ERNALDI BAHAR (BLUD)	20.448.240.000,00	25.209.819.926,00	123,29
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	20.248.040.000,00	24.642.320.666,00	121,70
	Pendapatan Hasil Kerja sama	56.000.000,00	306.308.250,00	546,98
	Pendapatan Usaha Lainnya	144.200.000,00	261.191.010,00	181,13
	Pendapatan APBD/APBN	0,00	0,00	0,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN (BLUD)	16.000.000.000,00	19.697.732.597,00	123,11
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	16.000.000.000,00	19.697.732.597,00	123,11

No	BLUD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BLUD)	20.553.993.000,00	21.334.105.634,00	103,80
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	20.553.993.000,00	21.334.105.634,00	
	Jumlah	129.760.719.279,00	165.191.108.875,28	127,30

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.009.694.627.380,00 dengan realisasi sebesar Rp5.712.683.072.712,00 atau 95,06% turun sebesar Rp163.213.269.826,00 atau 2,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.875.896.342.538,00 yang dikelola oleh BUD selaku PPKD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.875.896.342.538,00
a	Dana bagi Hasil	2.090.318.706.818,00	1.891.734.449.581,00	90,50	1.933.269.369.100,00
-	Dana Transfer DBH Pajak	1.139.977.351.366,00	1.174.172.782.308,00	103,00	619.042.908.415,00
-	Dana Transfer DBH Sumber Daya Alam	950.341.355.452,00	717.561.667.273,00	75,51	1.314.226.460.685,00
b	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.569.812.039.000,00	1.563.041.287.000,00	99,57	1.568.602.615.000,00
c	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	246.085.361.448,00	220.514.359.267,00	89,61	203.718.863.552,00
d	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.103.478.520.114,00	2.037.392.976.864,00	96,86	2.130.083.845.886,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	40.221.649.000,00
	Jumlah	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06	5.875.896.342.538,00

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp6.009.694.627.380,00 dengan realisasi sebesar Rp5.712.683.072.712,00 atau 95,06% turun sebesar Rp163.213.269.826,00 atau 2,78% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.875.896.342.538,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.090.318.706.818,00 dengan realisasi sebesar Rp1.891.734.449.581,00 atau 90,50%. Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp1.139.977.351.366,00 dengan realisasi sebesar Rp1.174.172.782.308,00 atau 103,00%. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp665.779.669.800,00, Kurang Bayar Tahun 2020 sebesar

Rp336.076.219.300,00, dan Kurang Bayar Tahun 2019 sebesar Rp172.316.893.208,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	886.529.676.405,00	944.841.803.524,00	106,58	409.140.271.157,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	3.789.607.800,00	11.550.225.219,00	304,79	209.498.342.896,00
3	Cukai Hasil Tembakau	1.057.535.361,00	136.085.684,00	12,87	404.294.362,00
4	DBH PPh Pasal 21	248.600.531.800,00	217.644.667.881,00	87,55	0,00
Jumlah		1.139.977.351.366,00	1.174.172.782.308,00	103,000	619.042.908.415,00

- a) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp944.841.803.524,00 adalah Dana Bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat termasuk biaya pungutnya, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22. Rincian Realisasi Pendapatan DBH PBB Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	DBH PBB	Kurang Bayar 2019	Kurang Bayar 2020	Realisasi 2021	Jumlah
A	Biaya Pungut	5.820.916.549,00	8.225.881.484,00	13.633.770.000,00	27.680.568.033,00
1	PBB Perhutanan	110.214.747,00	270.513.919,00	299.725.000,00	680.453.666,00
2	PBB Perkebunan	711.692.011,00	990.485.914,00	864.155.000,00	2.566.332.925,00
3	PBB Panas Bumi	14.302.491,00	75.124.027,00	41.589.000,00	131.015.518,00
4	PBB Non Migas Lainnya	885.058.625,00	489.981.736,00	228.628.000,00	1.603.668.361,00
5	PBB Migas	0,00	5.341.231.347,00	12.192.412.000,00	17.533.643.347,00
6	PBB Sektor Lainnya	11.191.045,00	25.498.241,00	7.261.000,00	43.950.286,00
7	PBB Minyak Bumi	4.088.457.630,00	1.033.046.300,00	0,00	5.121.503.930,00
B	DBH PBB	166.471.823.926,00	275.136.496.565,00	475.552.915.000,00	917.161.235.491,00
1	PBB Perhutanan	2.398.131.207,00	5.601.264.715,00	7.193.393.000,00	15.192.788.922,00
2	PBB Perkebunan	14.517.651.948,00	18.846.656.579,00	19.443.481.000,00	52.807.789.527,00
3	PBB Panas Bumi	466.806.232,00	2.702.771.388,00	1.497.192.000,00	4.666.769.620,00
4	PBB Migas	0,00	192.275.583.103,00	438.926.843.000,00	631.202.426.103,00
5	PBB Non Migas Lainnya	28.886.601.617,00	17.650.328.499,00	8.230.608.000,00	54.767.538.116,00
6	PBB Sektor Lainnya	365.249.313,00	917.935.881,00	261.398.000,00	1.544.583.194,00
7	PBB Minyak Bumi	119.837.383.609,00	37.141.956.400,00	-	156.979.340.009,00
Jumlah		172.292.740.475,00	283.362.378.049,00	489.186.685.000,00	944.841.803.524,00

- b) Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Tahun 2021 sebesar Rp229.194.893.100,00 terdiri dari DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp217.644.667.881,00 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp11.550.225.219,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 23. Rincian Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (PPH)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kurang Bayar 2020	Realisasi 2021	Jumlah
A	PPH pasal 21	0,00	0,00	217.644.667.881,00
1	Kurang Bayar Tahun 2018	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00
3	Kurang Bayar Tahun 2020	48.285.442.881,00	0,00	48.285.442.881,00
4	Triwulan 1 Tahun 2021	0,00	33.871.845.000,00	33.871.845.000,00
5	Triwulan 2 Tahun 2021	0,00	33.871.845.000,00	33.871.845.000,00
6	Triwulan 3 Tahun 2021	0,00	33.871.845.000,00	33.871.845.000,00
7	Triwulan 4 Tahun 2021	0,00	67.743.690.000,00	67.743.690.000,00
B	PPH pasal 25 dan pasal 29	0,00	0,00	11.550.225.219,00
1	Kurang Bayar Tahun 2018	0,00	0,00	0,00
2	Kurang Bayar Tahun 2019	0,00	0,00	0,00
3	Kurang Bayar Tahun 2020	4.365.844.219,00	0,00	4.365.844.219,00
4	Triwulan 1 Tahun 2021	0,00	1.436.876.200,00	1.436.876.200,00
5	Triwulan 2 Tahun 2021	0,00	1.436.876.200,00	1.436.876.200,00
6	Triwulan 3 Tahun 2021	0,00	1.436.876.200,00	1.436.876.200,00
7	Triwulan 4 Tahun 2021	0,00	2.873.752.400,00	2.873.752.400,00
Jumlah		52.651.287.100,00	176.543.606.000,00	229.194.893.100,00

- c) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021 sebesar Rp136.085.684,00 terdiri dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp49.378.800,00, Kurang Bayar Tahun 2020 sebesar Rp62.554.151,00 dan Kurang Bayar Tahun 2019 sebesar Rp24.152.733,00.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp717.561.667.273,00 atau 75,51% dari anggarannya sebesar Rp950.341.355.452,00 turun sebesar Rp596.664.793.412,00 atau 45,40% dari saldo realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.314.226.460.685,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	17.734.130.677,00	23.775.620.678,00	134,07	6.737.832.836,00

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
3	Dana Reboisasi	857.834.000,00	1.193.749.539,00	139,16	1.524.690.487,00
4	Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	272.800.858.250,00	7.424.461.625,00	2,72	7.376.936.842,00
5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	140.396.429.450,00	304.808.262.780,00	217,11	331.342.900.124,00
6	Pertambangan Minyak Bumi	245.613.096.800,00	37.667.410.900,00	15,34	137.815.727.204,00
7	Pertambangan Gas Bumi	268.740.676.000,00	338.696.144.203,00	126,03	827.944.724.992,00
8	Pertambangan Panas Bumi	4.198.330.275,00	3.996.017.548,00	95,18	1.483.648.200,00
Jumlah		950.341.355.452,00	717.561.667.273,00	75,51	1.314.226.460.685,00

Realisasi DBH bukan pajak sebesar Rp717.561.667.273,00 adalah jumlah penerimaan transfer DBH bukan pajak yang masuk ke kas daerah pada tahun 2021 yang terdiri dari realisasi alokasi transfer pusat untuk tahun 2021, kurang bayar tahun 2020 dan tahun 2019. Rincian realisasi transfer DBH bukan pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 25. Realisasi Alokasi Transfer DBH Bukan Pajak Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	2019	2020	2021	Jumlah
1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	5.248.463.693,00	9.296.092.735,00	9.314.996.000,00	23.859.552.428,00
3	Dana Reboisasi	36.913.823,00	282.050.716,00	874.785.000,00	1.193.749.539,00
4	Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	0,00	996.294.625,00	1.607.041.750,00	2.603.336.375,00
5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	0,00	40.428.160.780,00	264.380.102.000,00	304.808.262.780,00
6	Pertambangan Minyak Bumi	0,00	2.762.627.900,00	34.904.783.000,00	37.667.410.900,00
7	Pertambangan Gas Bumi	0,00	133.513.086.203,00	205.183.058.000,00	338.696.144.203,00
8	Pertambangan Panas Bumi	61.263.475,00	201.684.073,00	8.470.263.500,00	8.733.211.048,00
Jumlah		5.346.640.991,00	187.479.997.032,00	524.735.029.250,00	717.561.667.273,00

b. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.563.041.287.000,00 atau 99,57% dari anggarannya sebesar Rp1.569.812.039.000,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

c. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp246.085.361.448,00 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113

Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

SKPD penerima Dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perpustakaan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp220.514.359.267,00 atau 89,61% dari anggaran sebesar Rp246.085.361.448,00, naik sebesar Rp16.795.495.715,00 atau 8,24% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp203.718.863.552,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Penerimaan DAK	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	48.512.362.000,00	47.641.880.400,00	98,21	0,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	35.645.000.000,00	34.219.689.979,00	96,00	18.387.798.683,00
3	DAK Bidang Kesehatan	30.556.649.000,00	24.676.093.576,00	80,76	18.793.200.207,00
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	9.769.507.000,00	9.360.435.115,00	95,81	840.373.000,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Pertanian	1.534.804.000,00	1.128.141.916,00	73,50	0,00
7	DAK Bidang Pendidikan	120.067.039.448,00	103.488.118.281,00	86,19	165.697.491.662,00
8	DAK Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		246.085.361.448,00	220.514.359.267,00	89,61	203.718.863.552,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik lebih terinci terdapat pada tabel berikut.

Tabel 27. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Bidang - bidang/SKPD	Pagu Anggaran DAK	DAK yang Telah Ditransfer Pusat ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	35.614.553.448,00	79.790.468.310,00	224,04
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	1.143.119.400,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	1.161.465.000,00	0,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	80.791.021.000,00	20.197.755.250,00	25,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-Perpustakaan Daerah	2.500.000.000,00	2.356.775.321,00	94,27
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	23.068.669.000,00	18.327.255.432,00	79,45
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.074.601.000,00	1.055.810.900,00	98,25
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.413.379.000,00	5.293.027.244,00	82,53

No	Bidang - bidang/SKPD	Pagu Anggaran DAK	DAK yang Telah Ditransfer Pusat ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan	%
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.534.804.000,00	1.128.141.916,00	73,50
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.769.507.000,00	9.360.435.115,00	95,81
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.488.983.000,00	12.301.523.700,00	98,50
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	36.023.379.000,00	35.340.356.700,00	98,10
13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	35.645.000.000,00	34.219.689.979,00	96,00
Total		246.085.361.448,00	220.514.359.267,00	89,61

Pendapatan transfer DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 diantaranya dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan fisik yang dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.103.478.520.114,00 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021.

SKPD penerima DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 yaitu Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.037.392.976.864,00 atau 96,86%, turun sebesar Rp92.690.869.022,00 atau 4,35% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.130.083.845.886,00, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.352.080.000,00	2.203.964.141,00	93,70	1.751.938.867,00
2	BOS Satuan Pendidikan Provinsi	1.769.879.933.114,00	1.706.127.182.000,00	96,40	1.811.813.800.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	315.777.737.000,00	321.381.050.000,00	101,77	289.894.275.000,00

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	100,00	2.444.625.000,00
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.368.941.000,00	1.362.056.457,00	99,50	183.443.000,00
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	20.372.523.000,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	4.850.000.000,00	3.700.622.266,00	76,30	3.623.241.019,00
8	Bantuan Operasional Kesehatan	6.171.721.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	460.006.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	533.102.000,00	533.102.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.103.478.520.114,00	2.037.392.976.864,00	96,86	2.130.083.845.886,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2020 yang direalisasikan sebesar Rp40.221.649.000,00 merupakan Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020. Pada Tahun 2021 Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) tersebut tidak diperoleh lagi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp44.161.339.000,00 dengan realisasi Rp33.145.138.870,00 atau 75,05% yang merupakan realisasi pendapatan hibah yang dikelola BUD selaku PPKD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Pendapatan Hibah	44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	26.967.232.682,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	555.500.000,00
Jumlah		44.161.339.000,00	33.145.138.870,00	75,05	27.522.732.682,00

1. Pendapatan hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 sebesar Rp33.145.138.870,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	28.268.138.866,00
1	Dana IPDMIP-AIF	4.278.236.076,00
2	Dana IPDMIP-ADB	21.386.047.529,00
3	Dana IPDMIP-IFAD	2.603.855.261,00
B	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	3.605.000.004,00
1	Jasa Raharja Bulan Januari s.d. desember 2021	3.605.000.004,00
C	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.272.000.000,00
1	Royalty PT.ADHYA TIRTA SRIWIJAYA tahun 2020	1.072.000.000,00
2	Royalty PT.ADHYA TIRTA SRIWIJAYA tahun 2021	200.000.000,00
Jumlah		33.145.138.870,00

Pendapatan hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten.

2. Pendapatan lainnya

Tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp555.500.000,00 merupakan kontribusi dari PT Adhya Tirta Sriwijaya (PT ATS) sesuai kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun, Pada tahun 2021 penerimaan kontribusi dari PT ATS tersebut dianggarkan dan direalisasi pada kelompok Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp1.272.000.000,00.

4.1.2 Belanja - LRA

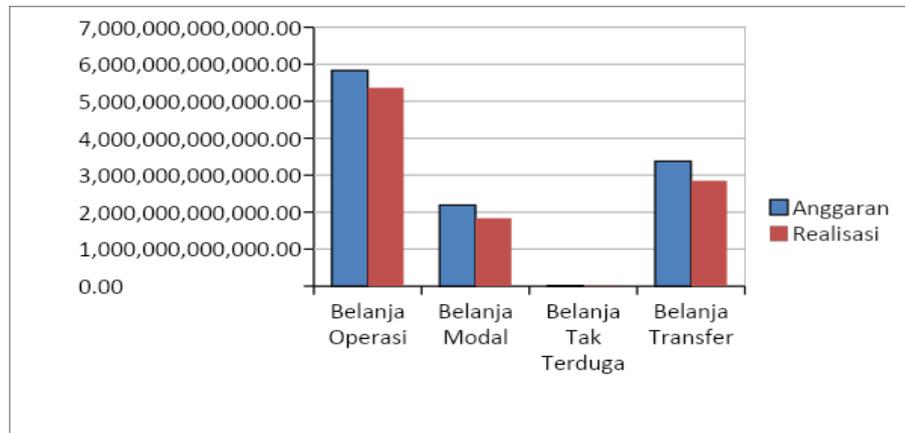
Belanja Daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp10.060.730.260.979,40 atau 88,17% dari Anggaran sebesar Rp11.410.177.341.872,00, turun sebesar Rp542.966.767.013,50 atau 5,70 % dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp9.517.763.493.965,89 seperti pada tabel berikut.

Tabel 31. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

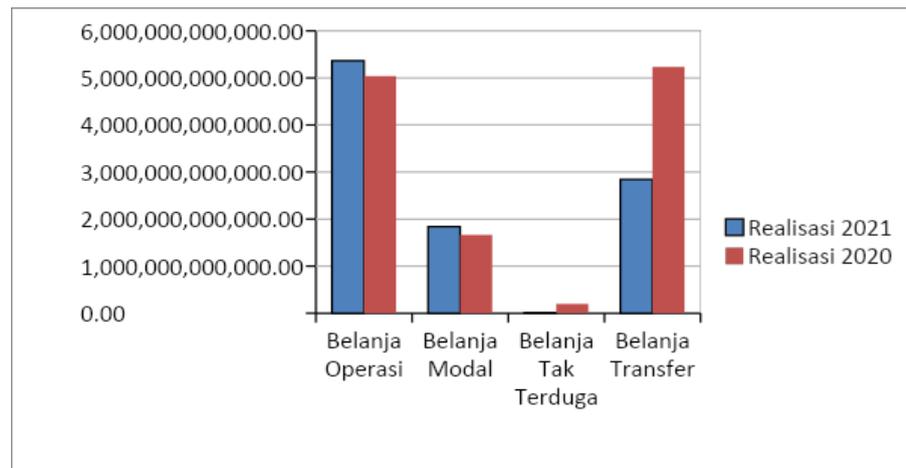
(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
		Tahun 2021	Tahun 2021	%	Tahun 2020
1	Belanja Operasi	5.830.058.901.452,00	5.365.031.503.749,49	92,02	5.038.670.309.775,65
2	Belanja Modal	2.191.283.655.818,00	1.836.834.114.021,94	83,82	1.664.700.767.363,54
3	Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	14.055.098.162,00	93,70	197.104.066.604,97
4	Belanja Transfer	3.373.834.784.602,00	2.844.809.545.045,96	84,32	2.617.288.350.221,73
Jumlah		11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40	88,17	9.517.763.493.965,89

Rincian Belanja Daerah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



Grafik 11. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021



Grafik 12. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Objek Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.365.031.503.749,49 atau 92,02% dari anggaran Rp5.830.058.901.452,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp326.361.193.973,84 atau 6,48% dari jumlah realisasi Tahun 2020 sebesar Rp5.038.670.309.775,65. Rincian Belanja Operasi Tahun 2021 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2021	Tahun 2021		Tahun 2020
1	Belanja Pegawai	2.089.417.475.499,00	1.923.290.549.742,00	92,05	1.771.524.397.218,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.062.603.115.941,00	1.811.885.209.417,49	87,84	1.392.760.537.519,30
3	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55	0,00
4	Belanja Hibah	1.673.935.310.012,00	1.629.473.647.674,00	97,34	1.873.445.636.520,56
5	Belanja Bantuan Sosial	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Biaya Provisi	0,00	0,00	0,00	939.738.517,79
Jumlah		5.830.058.901.452,00	5.365.031.503.749,49	92,02	5.038.670.309.775,65

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.089.417.475.499,00 dengan realisasi sebesar Rp1.923.290.549.742,00 atau 92,05%, naik sebesar Rp151.766.152.524,00 atau 8,57% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.771.524.397.218,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS, dan Belanja Pegawai BLUD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Tahun 2021	Tahun 2021		Tahun 2020
1	Gaji dan Tunjangan	1.109.270.216.699,00	999.720.287.095,00	90,12	1.329.085.129.604,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	816.725.955.000,00	763.352.861.761,00	93,46	331.590.138.614,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	69.275.601.000,00	68.717.575.320,00	99,19	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.378.637.000,00	5.809.870.202,00	78,74	23.705.600.000,00
5	Belanja Pegawai BOS	78.226.325.800,00	78.837.051.622,00	100,78	0,00
6	Belanja Pegawai BLUD	8.540.740.000,00	6.852.903.742,00	80,24	87.143.529.000,00
Jumlah		2.089.417.475.499,00	1.923.290.549.742,00	92,05	1.771.524.397.218,00

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.109.270.216.699,00 dan terealisasi sebesar Rp999.720.287.095,00 atau 90,12 % dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	834.913.900.210,00	766.516.074.911,00	91,81
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.824.964.000,00	73.732.542.995,00	89,02
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.866.392.000,00	14.303.352.986,00	96,21
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.310.804.000,00	50.695.025.837,00	96,91
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.909.164.000,00	11.491.423.000,00	77,08
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.494.310.000,00	43.181.411.701,00	89,04
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.905.058.000,00	2.084.534.818,00	71,76
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.369.000,00	10.665.230,00	49,91
9	Belanja Luran Jaminan Kesehatan ASN	45.734.661.699,00	31.422.526.854,00	68,71
10	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.979.417.000,00	1.570.682.193,00	79,35
11	Belanja Luran Jaminan Kematian ASN	5.938.247.000,00	4.712.046.570,00	79,35
12	Belanja Luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.371.929.790,00	0,00	0,00
Jumlah		1.109.270.216.699,00	999.720.287.095,00	90,12

- b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp816.725.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp763.352.861.761,00 atau 93,46% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 35. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.935.716.000,00	37.393.849.550,00	89,17
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.072.640.000,00	1.002.640.000,00	93,47
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	313.839.375.000,00	298.059.057.708,00	94,97
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	105.007.312.000,00	89.728.618.772,00	85,45
5	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	110.000.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	335.803.595.000,00	323.701.625.280,00	96,40
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.318.000.000,00	1.990.612.500,00	85,88

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.500.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Honorarium	16.422.817.000,00	11.476.457.951,00	69,88
10	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	200.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		816.725.955.000,00	763.352.861.761,00	93,46

Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp105.007.312.000,00 dan terealisasi sebesar Rp89.728.618.772,00 merupakan insentif pemungutan Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 36. Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	28.756.107.000,00	28.699.914.507,00	99,80
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.465.375.000,00	26.411.084.275,00	99,79
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.555.000.000,00	18.543.007.609,00	55,26
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	361.950.000,00	271.462.500,00	75,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	15.868.880.000,00	15.803.149.881,00	99,59
Jumlah		105.007.312.000,00	89.728.618.772,00	85,45

- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp69.275.601.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.717.575.320,00 atau 99,19% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Uang Representasi DPRD	2.389.545.000,00	2.372.550.000,00	99,29
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	303.061.000,00	300.894.000,00	99,28
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	230.260.000,00	228.340.260,00	99,17
4	Belanja Uang Paket DPRD	204.965.000,00	203.265.000,00	99,17
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.464.841.000,00	3.440.197.500,00	99,29

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	274.364.000,00	272.092.500,00	99,17
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.453.000,00	31.189.500,00	96,11
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.900.000.000,00	18.837.000.000,00	99,67
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000,00	4.707.150.000,00	99,62
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.034.583.000,00	1.027.090.320,00	99,28
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.915.579.000,00	19.756.206.240,00	99,20
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.040.000.000,00	16.980.000.000,00	99,65
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000,00	0,00	0,00
14	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	100,00
Jumlah		69.275.601.000,00	68.717.575.320,00	99,19

- d. Belanja Biaya Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp7.378.637.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.809.870.202,00 atau 78,74% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.490.000,00	70.200.000,00	90,59
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.610.000,00	7.800.000,00	90,59
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	139.482.000,00	126.360.000,00	90,59
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	4.707.300,00	90,58
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.888.000,00	7.801.602,00	71,65
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.300,00	65,00
7	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	15.091.000,00	0,00	0,00
8	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	311.000,00	0,00	0,00
9	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	933.000,00	0,00	0,00
10	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	7.120.633.000,00	5.593.000.000,00	78,55
Jumlah		7.378.637.000,00	5.809.870.202,00	78,74

- e. Belanja Pegawai BOS Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp78.226.325.800,00 dan terealisasi sebesar Rp78.837.051.622,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 39. Rincian Realisasi Pegawai BOS

(dalam rupiah)

No	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah
1	Kota Palembang	120.000.000,00	4.848.905.000,00	4.291.718.272,00	9.260.623.272,00
2	Kota Prabumulih	151.200.000,00	205.640.000,00	599.420.000,00	956.260.000,00
3	Kota Lubuklinggau	188.400.000,00	1.142.320.000,00	1.050.690.000,00	2.381.410.000,00
4	Kota Pagar Alam	134.400.000,00	447.750.000,00	792.995.000,00	1.375.145.000,00
5	Kab. Banyuasin	115.800.000,00	1.443.135.000,00	4.219.507.000,00	5.778.442.000,00
6	Kab. Musi Banyuasin	143.700.000,00	3.249.393.500,00	7.000.623.000,00	10.393.716.500,00
7	Kab. Ogan Ilir	75.600.000,00	939.456.000,00	1.443.712.000,00	2.458.768.000,00
8	Kab. Ogan Komering Ilir	13.500.000,00	3.078.451.900,00	4.852.904.000,00	7.944.855.900,00
9	Kab. Ogan Komering Ulu	105.600.000,00	762.061.000,00	3.080.021.000,00	3.947.682.000,00
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	496.540.000,00	3.444.880.000,00	3.941.420.000,00
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0,00	2.497.380.000,00	3.498.908.000,00	5.996.288.000,00
12	Kab. Muara Enim	115.200.000,00	2.798.460.000,00	4.616.710.000,00	7.530.370.000,00
13	Kab. Musi Rawas	103.200.000,00	742.680.000,00	3.260.123.000,00	4.106.003.000,00
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	79.920.000,00	133.520.000,00	213.440.000,00
15	Kab. Lahat	115.200.000,00	1.524.571.950,00	5.288.535.000,00	6.928.306.950,00
16	Kab. Empat Lawang	28.000.000,00	672.780.000,00	2.721.841.000,00	3.422.621.000,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	102.000.000,00	945.298.000,00	1.154.402.000,00	2.201.700.000,00
	Jumlah	1.511.800.000,00	25.874.742.350,00	51.450.509.272,00	78.837.051.622,00

- f. Belanja Pegawai BLUD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp8.540.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.852.903.742,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	RS. Mata (BLUD)	80.000.000,00	0,00	0,00
2	RS. Paru-Paru (BLUD)	0,00	0,00	0,00
3	RS. Gigi Dan Mulut (BLUD)	0,00	0,00	0,00
4	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	2.800.000.000,00	2.200.275.000,00	78,58
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	0,00	0,00	0,00
6	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	5.660.740.000,00	4.652.628.742,00	82,19
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.540.740.000,00	6.852.903.742,00	80,24

Rincian seluruh Belanja Pegawai per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.062.603.115.941,00 dengan realisasi sebesar Rp1.811.885.209.417,49 atau 87,84% naik sebesar Rp419.124.671.898,19 atau 30,09% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.392.760.537.519,30. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Barang	471.073.035.776,00	398.339.711.732,11	84,56	224.284.574.698,60
2	Belanja Jasa	809.684.886.496,00	699.114.690.959,63	86,34	487.614.795.194,00
3	Belanja Pemeliharaan	180.857.089.402,00	168.370.559.228,55	93,10	135.134.062.365,28
4	Perjalanan Dinas	238.513.890.025,00	197.528.102.603,00	82,82	188.262.087.749,00
5	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.471.222.000,00	10.210.447.141,00	81,87	1.367.370.000,00
6	Barang dan Jasa BOS	217.363.075.517,00	209.901.648.349,00	96,57	276.855.422.460,66
7	Barang dan Jasa BLUD	132.639.916.725,00	128.420.049.404,20	96,82	79.242.225.051,76
Jumlah		2.062.603.115.941,00	1.811.885.209.417,49	87,84	1.392.760.537.519,30

- a. Belanja Barang Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp471.073.035.776,00 dan terealisasi sebesar Rp398.339.711.732,11 atau 84,56% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 42. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Belanja Barang Pakai Habis	471.062.385.776,00	398.331.061.732,11	84,56
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	433.200.000,00	428.767.000,00	98,98
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.366.070.946,00	5.779.360.248,00	69,08
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.208.404.633,00	15.164.871.701,00	88,12
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	385.995.000,00	366.316.462,00	94,90
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.795.489.500,00	1.766.871.551,00	98,41
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	36.500.000,00	36.485.000,00	99,96

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	504.640.000,00	281.554.500,00	55,79
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	175.100.844,00	118.740.000,00	67,81
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.056.412.732,00	8.900.119.644,00	68,17
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.164.940.210,00	2.976.569.455,00	94,05
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.214.960.000,00	794.991.870,00	65,43
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	24.092.250,00	24.092.250,00	100,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	19.413.815,00	19.413.481,00	100,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.731.250,00	2.720.000,00	99,59
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	13.037.500,00	1.030.000,00	7,90
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.301.388.297,00	1.903.943.327,00	82,73
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	36.926.020.786,59	34.431.973.005,00	93,25
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	126.698.342,00	115.998.660,00	91,55
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	58.747.947.983,41	51.293.149.494,00	87,31
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	631.750.400,00	567.932.684,00	89,90
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	246.899.900,00	173.463.730,00	70,26
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.319.171.700,00	847.029.350,00	64,21
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.975.792.977,00	1.933.912.940,00	97,88
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.527.572.055,00	4.119.670.020,00	90,99
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	17.797.436.200,00	17.235.409.052,50	96,84
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	631.249.000,00	455.187.606,00	72,11
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	963.139.416,00	950.036.000,00	98,64
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.097.281.730,00	26.412.807.100,00	94,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	19.657.566.764,00	14.301.805.802,00	72,75
31	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.852.746.551,00	9.207.427.831,00	66,47
32	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85.437.567.119,00	81.627.607.357,45	95,54
33	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.388.857.250,00	13.949.974.450,00	80,22

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	110.000.000,00	103.359.828,00	93,96
35	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	150.000.000,00	149.976.500,00	99,98
36	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.267.269.450,00	8.945.660.894,16	87,13
37	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	231.271.362,00	39.740.000,00	17,18
38	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.531.000.000,00	2.528.243.600,00	99,89
39	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.806.745.766,00	16.034.775.656,00	70,31
40	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.427.221.400,00	18.009.604.977,00	88,16
41	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	89.000.000,00	13.875.000,00	15,59
42	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.276.143.208,00	11.339.298.800,00	79,43
43	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	11.006.557.200,00	2.963.288.040,00	26,92
44	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.941.490.000,00	9.831.184.525,00	98,89
45	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.428.940.247,00	9.557.816.505,00	58,18
46	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.600.000.000,00	1.579.150.000,00	98,70
47	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.201.144.000,00	899.644.500,00	74,90
48	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.874.832.620,00	6.680.147.000,00	97,17
49	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	214.808.880,00	213.951.000,00	99,60
50	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.802.134.840,00	4.665.544.204,00	97,16
51	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.505.079.652,00	2.363.896.997,00	94,36
52	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.700.000,00	1.675.000,00	98,53
53	Belanja Pakaian Penyelamatan	100.000.000,00	99.935.000,00	99,94
54	Belanja Pakaian Siaga	162.250.000,00	159.030.000,00	98,02
55	Belanja Pakaian Teknik	30.000.000,00	29.618.600,00	98,73
56	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	408.050.000,00	362.637.500,00	88,87
57	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	18.114.000,00	18.000.000,00	99,37
58	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
59	Belanja Pakaian KORPRI	65.000.000,00	64.013.400,00	98,48
60	Belanja Pakaian Adat Daerah	877.500.000,00	504.310.300,00	57,47
61	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.252.031.000,00	955.180.850,00	42,41
62	Belanja Pakaian Olahraga	4.400.930.000,00	3.778.424.485,00	85,86
63	Belanja Pakaian Paskibraka	199.597.000,00	199.547.000,00	99,97
64	Belanja Pakaian Jas/Safari	41.000.000,00	37.800.000,00	92,20
B	Belanja Barang Tak Pakai Habis	10.650.000,00	8.650.000,00	81,22

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	10.650.000,00	8.650.000,00	81,22
Jumlah		471.073.035.776,00	398.339.711.732,11	84,56

Rincian Belanja Barang per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

- b. Belanja Jasa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp809.684.886.496,00 dan terealisasi sebesar Rp699.114.690.959,63 atau 86,34% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 43. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Jasa Kantor	608.830.399.728,00	531.256.634.728,63	87,26
2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	73.032.899.140,00	70.338.071.883,00	96,31
3	Belanja Sewa Tanah	286.850.000,00	119.050.000,00	41,50
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	42.706.418.850,00	37.233.244.350,00	87,18
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.180.455.000,00	10.440.749.033,00	64,53
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	337.500.000,00	336.950.000,00	99,84
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	304.720.434,00	231.200.000,00	75,87
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	51.944.447.944,00	37.949.083.365,00	73,06
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.412.124.900,00	4.790.700.400,00	74,71
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	768.820.000,00	692.920.000,00	90,13
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	112.000.000,00	91.250.000,00	81,47
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.768.250.500,00	5.634.837.200,00	64,26
Jumlah		809.684.886.496,00	699.114.690.959,63	86,34

Rincian Belanja Jasa per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

- c. Belanja Pemeliharaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp180.857.089.402,00 dan terealisasi sebesar Rp168.370.559.228,55 atau 93,10% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	757.782.451,00	699.936.622,00	92,37
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.905.550.412,00	26.779.148.802,00	89,55
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.807.779.098,00	40.811.096.451,55	95,34
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.984.136.589,00	96.721.725.403,00	93,02
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.401.840.852,00	3.358.651.950,00	98,73
Jumlah		180.857.089.402,00	168.370.559.228,55	93,10

Rincian Belanja Pemeliharaan per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

- d. Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp238.513.890.025,00 dan terealisasi sebesar Rp197.528.102.603,00 atau 82,82% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.496.278.833,00	197.528.102.603,00	83,17
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.017.611.192,00	0,00	0,00
Jumlah		238.513.890.025,00	197.528.102.603,00	82,82

Rincian Belanja Perjalanan Dinas per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

- e. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp12.471.222.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.210.447.141,00 atau 81,87%, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/ Masyarakat**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.746.150.000,00	4.012.487.000,00	69,83
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.516.150.000,00	3.986.987.000,00	88,28
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00	25.500.000,00	85,00
3	Belanja Santunan Kematian	1.200.000.000,00	0,00	0,00
B	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.725.072.000,00	6.197.960.141,00	92,16
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.355.072.000,00	4.900.065.141,00	91,50
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.370.000.000,00	1.297.895.000,00	94,74
Jumlah		12.471.222.000,00	10.210.447.141,00	81,87

Rincian Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp209.901.648.349,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 47. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

NO	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah
1	Kota Palembang	680.603.416,00	12.644.496.936,00	21.338.215.793,00	34.663.316.145,00
2	Kota Prabumulih	300.946.000,00	3.402.457.500,00	5.059.539.850,00	8.762.943.350,00
3	Kota Lubuklinggau	157.735.400,00	4.279.118.700,00	5.656.481.760,00	10.093.335.860,00
4	Kota Pagar Alam	192.200.000,00	833.110.000,00	3.034.651.300,00	4.059.961.300,00
5	Kab. Banyuasin	240.950.000,00	3.171.749.500,00	10.765.899.400,00	14.178.598.900,00
6	Kab. Musi Banyuasin	214.794.080,00	7.029.665.600,00	10.132.861.460,00	17.377.321.140,00

NO	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah
7	Kab. Ogan Ilir	99.775.000,00	3.563.339.345,00	6.633.063.500,00	10.296.177.845,00
8	Kab. Ogan Komerang Ilir	135.950.000,00	7.495.473.600,00	10.729.522.301,00	18.360.945.901,00
9	Kab. Ogan Komerang Ulu	183.304.000,00	3.542.924.300,00	6.841.343.900,00	10.567.572.200,00
10	Kab. Ogan Komerang Ulu Selatan	0,00	1.062.909.000,00	5.763.307.600,00	6.826.216.600,00
11	Kab. Ogan Komerang Ulu Timur	178.390.500,00	3.794.555.600,00	9.386.716.100,00	13.359.662.200,00
12	Kab. Muara Enim	158.050.000,00	6.863.639.500,00	9.060.639.400,00	16.082.328.900,00
13	Kab. Musi Rawas	279.325.802,00	1.773.798.283,00	8.128.047.703,00	10.181.171.788,00
14	Kab. Musi Rawas Utara	0,00	723.753.680,00	5.083.122.650,00	5.806.876.330,00
15	Kab. Lahat	241.200.000,00	4.257.413.030,00	9.554.498.620,00	14.053.111.650,00
16	Kab. Empat Lawang	24.854.546,00	2.532.807.700,00	5.907.544.274,00	8.465.206.520,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	59.600.000,00	1.969.619.400,00	4.737.682.320,00	6.766.901.720,00
Jumlah		3.147.678.744,00	68.940.831.674,00	137.813.137.931,00	209.901.648.349,00

- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp132.639.916.725,00 dan terealisasi sebesar Rp128.420.049.404,20 atau 96,82%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	RS. Mata (BLUD)	33.022.386.466,00	17.382.709.506,00	52,64
2	RS. Paru-Paru (BLUD)	1.081.703.379,00	845.630.116,00	78,18
3	RS. Gigi Dan Mulut (BLUD)	3.732.047.661,00	3.512.018.025,00	94,10
4	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	32.089.160.773,00	53.150.741.261,20	165,63
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	2.036.872.813,00	1.354.351.330,00	66,49
6	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	28.823.449.529,00	23.354.304.130,00	81,03
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	11.340.010.460,00	9.674.517.925,00	85,31
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	20.514.285.644,00	19.145.777.111,00	93,33
Jumlah		132.639.916.725,00	128.420.049.404,20	96,82

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.096.916,00 atau 9,55%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
Bukan Bank (LKBB)- BUMN- Jangka Menengah				
-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) - PEN Pemda 2021	4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55
Jumlah		4.000.000.000,00	382.096.916,00	9,55

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.673.935.310.012,00 dengan realisasi sebesar Rp1.629.473.647.674,00 atau 97,34% turun sebesar Rp243.971.988.846,56 atau 13,02% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.873.445.636.520,56, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 50. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.661.972.268.412,00	1.624.510.606.074,00	97,75	1.868.450.650.920,56
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	11.963.041.600,00	4.963.041.600,00	41,49	4.994.985.600,00
Jumlah		1.673.935.310.012,00	1.629.473.647.674,00	97,34	1.873.445.636.520,56

a. Belanja Hibah kepada kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp1.624.510.606.074,00 atau 97,75% dari anggarannya sebesar Rp1.661.972.268.412,00. Realisasi belanja tersebut merupakan realisasi belanja uang, barang dan jasa yang diserahkan kepada kelompok anggota masyarakat/pihak ketiga, yang penganggarannya pada Belanja Operasi Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat/pihak ketiga terdapat pada tabel berikut.

Tabel 51. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Uraian/SKPD	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	217.813.379.112,00	198.950.652.406,00	91,34

No	Uraian/SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	180.000.000,00	169.100.000,00	93,94
2	Dinas Kesehatan	4.854.872.000,00	4.854.872.000,00	100,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.025.530.000,00	1.940.080.856,00	95,78
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	50.049.252.950,00	49.231.073.200,00	98,37
5	Sekretariat Daerah	157.510.924.162,00	142.755.526.350,00	90,63
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.192.800.000,00	0,00	0,00
B	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.442.358.889.300,00	1.425.009.480.000,00	98,80
1	Dinas Pendidikan	1.442.358.889.300,00	1.425.009.480.000,00	98,80
C	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial kemasyarakatan	1.800.000.000,00	550.473.668,00	30,58
1	Dinas Kesehatan	800.000.000,00	550.473.668,00	68,81
2	Dinas Sosial	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.661.972.268.412,00	1.624.510.606.074,00	97,75

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp198.950.652.406,00 dari anggaran sebesar Rp217.813.379.112,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 52. Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	SMK Setianegara Kab. Banyuasin	169.100.000,00
2	Palang Merah Indonesia Prov. Sumsel	4.854.872.000,00
3	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Sumsel	1.940.080.856,00
4	Gerakan Pramuka Kwarda Prov. Sumsel	5.281.073.200,00
5	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel	36.750.000.000,00
6	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	7.000.000.000,00
7	FKPPI Prov. Sumsel	200.000.000,00
8	Kodam II Sriwijaya dan Korem 044 Garuda Dempo	40.414.711.500,00
9	POLDA Sumsel	99.142.555.000,00
10	LPTQ Prov. Sumse	2.500.000.000,00
11	MUI Prov. Sumsel	698.259.850,00
Jumlah		198.950.652.406,00

2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.425.009.480.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.442.358.889.300,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 53. Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Program Sekolah Gratis	76.479.054.000,00
2	Hibah BOS	1.343.423.750.000,00
3	Program Kuliah Gratis	5.106.676.000,00
Jumlah		1.425.009.480.000,00

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp550.473.668,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 54. Rincian Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Dinas Kesehatan	800.000.000,00	550.473.668,00	68,81
2	Dinas Sosial	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.800.000.000,00	550.473.668,00	30,58

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 adalah Rp4.963.041.600,00 atau 41,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.963.041.600,00. Peruntukan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan hibah kepada Partai Politik dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 55. Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Partai Politik	Realisasi
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	365.407.200,00
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	185.349.600,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	688.500.000,00
4	Parta NasDem	417.618.000,00
5	Partai Perindo	206.053.200,00
6	Partai Demokrat	561.546.000,00
7	Partai Gerindra	642.676.800,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	327.783.600,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	451.326.000,00
10	Partai PDI Perjuangan	713.714.400,00
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	403.066.800,00
Jumlah		4.963.041.600,00

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp103.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 56 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	103.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		103.000.000,00	0,00	0,00

6. Belanja Biaya Provisi

Belanja Biaya Provisi tidak dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2021. Realisasi Belanja Biaya Provisi pada Tahun Anggaran 2020 merupakan biaya administrasi peminjaman kepada PT SMI sebesar Rp939.738.517,79.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

Belanja Modal terealisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp1.836.834.114.021,94 atau 83,82% dari anggaran Rp2.191.283.655.818,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp172.133.346.658,40 atau 10,34% dari jumlah realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.664.700.767.363,54 dengan uraian rincian belanja modal selama Tahun 2021 pada tabel berikut.

Tabel 57. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio %	Realisasi Tahun 2020
1	Belanja Modal Tanah	79.703.529.691,00	70.853.405.527,00	88,90	14.597.408.000,21
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.930.132.385,70	288.834.883.969,24	85,73	181.062.816.387,17
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	324.974.441.062,30	289.050.835.757,28	88,95	201.564.960.984,78
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.365.201.497.824,00	1.107.398.086.860,42	81,12	904.310.171.568,49
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.474.054.855,00	80.696.901.908,00	95,53	53.768.783.085,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	215.967.588.496,51
7	Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	12.330.403.046,38
8	Belanja Modal BOS	0,00	0,00	0,00	81.098.635.795,00
Jumlah		2.191.283.655.818,00	1.836.834.114.021,94	83,82	1.664.700.767.363,54

Rincian Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp79.703.529.691,00 dengan realisasi sebesar Rp70.853.405.527,00 atau 88,90%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 58. Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	75.943.629.691,00	67.583.685.577,00	88,99
2	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	3.759.900.000,00	3.269.719.950,00	86,96
Jumlah		79.703.529.691,00	70.853.405.527,00	88,90

Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	75.943.629.691,00	67.583.685.577,00	88,99
2	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (SKPD)	3.759.900.000,00	3.269.719.950,00	86,96
Jumlah		79.703.529.691,00	70.853.405.527,00	88,90

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp288.834.883.969,24 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp336.930.132.385,70, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 60. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Belanja Modal Alat Besar	5.197.276.313,00	5.073.835.500,00	97,62
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.757.987.123,00	2.751.356.000,00	99,76
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.439.289.190,00	2.322.479.500,00	95,21
B	Belanja Modal Alat Angkutan	63.153.159.999,70	51.187.270.449,70	81,05
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	62.353.159.999,70	50.489.045.449,70	80,97
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	800.000.000,00	698.225.000,00	87,28
C	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.858.962.500,00	253.377.909,00	13,63
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.162.500,00	12.110.000,00	92,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	1.835.800.000,00	231.267.909,00	12,60
D	Belanja Modal Alat Pertanian	1.211.276.650,00	910.265.066,00	75,15
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.211.276.650,00	910.265.066,00	75,15
E	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.143.903.438,00	75.099.853.566,00	83,31
1	Belanja Modal Alat Kantor	12.775.095.399,00	11.766.264.211,00	92,10
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.968.615.839,00	61.095.918.855,00	81,50

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.400.192.200,00	2.237.670.500,00	93,23
F	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.523.655.818,00	8.998.770.630,00	85,51
1	Belanja Modal Alat Studio	8.814.179.718,00	7.583.152.305,00	86,03
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.004.051.100,00	756.136.425,00	75,31
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	700.000.000,00	659.481.900,00	94,21
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	5.425.000,00	0,00	0,00
G	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.108.251.142,00	33.086.690.996,54	76,75
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	28.385.417.503,00	22.611.094.902,00	79,66
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.722.833.639,00	10.475.596.094,54	71,15
H	Belanja Modal Alat Laboratorium	51.776.803.500,00	48.356.182.494,00	93,39
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.186.898.500,00	3.418.018.400,00	81,64
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	40.392.465.000,00	38.128.166.505,00	94,39
3	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	250.000.000,00	248.750.000,00	99,50
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.367.440.000,00	6.073.364.309,00	95,38
5	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	580.000.000,00	487.883.280,00	84,12
I	Belanja Modal Komputer	67.251.707.821,00	63.268.864.183,00	94,08
1	Belanja Modal Komputer Unit	18.134.775.053,00	15.659.997.926,00	86,35
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	49.116.932.768,00	47.608.866.257,00	96,93
J	Belanja Modal Alat Eksplorasi	746.155.000,00	739.036.175,00	99,05
1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	746.155.000,00	739.036.175,00	99,05
K	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	40.729.350,00	30.857.500,00	75,76
1	Belanja Modal Sumur	40.729.350,00	30.857.500,00	75,76
L	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	142.518.700,00	133.125.000,00	93,41
1	Belanja Modal Alat Pelindung	142.518.700,00	133.125.000,00	93,41
M	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	200.000.000,00	195.563.500,00	97,78
1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	200.000.000,00	195.563.500,00	97,78
N	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.440.732.154,00	1.403.701.000,00	97,43
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.440.732.154,00	1.403.701.000,00	97,43
O	Belanja Modal Peralatan Olahraga	135.000.000,00	97.490.000,00	72,21
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	135.000.000,00	97.490.000,00	72,21
Jumlah		336.930.132.385,70	288.834.883.969,24	85,73

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp289.050.835.757,28 atau 88,95% dari anggarannya sebesar Rp324.974.441.062,30, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 61. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	307.642.407.972,30	272.954.784.462,28	88,72
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	94.539.204.763,30	83.614.403.823,45	88,44
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	510.000.000,00	288.550.500,00	56,58
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.074.601.000,00	1.055.810.900,00	98,25
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	610.154.944,00	595.197.063,33	97,55
5	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	48.733.265.688,00	44.911.345.288,00	92,16
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.658.931.410,00	3.513.937.395,00	75,42
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	975.000.000,00	921.414.600,00	94,50
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	86.868.303.000,00	76.618.050.161,37	88,20
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	19.777.031.233,00	15.982.106.380,13	80,81
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	727.932.000,00	709.800.000,00	97,51
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	983.500.000,00	833.322.893,00	84,73
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	408.190.200,00	408.190.200,00	100,00
13	Belanja Modal Bangunan Terbuka	7.907.335.220,00	7.105.206.650,00	89,86
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32.897.079.868,00	31.314.103.470,00	95,19
15	Belanja Modal Taman	962.603.646,00	960.603.646,00	99,79
16	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.009.275.000,00	4.122.741.492,00	68,61
B	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.920.417.500,00	11.831.269.000,00	99,25
1	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	11.920.417.500,00	11.831.269.000,00	99,25
C	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	495.000.000,00	144.145.155,00	29,12
1	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	495.000.000,00	144.145.155,00	29,12
D	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.916.615.590,00	4.120.637.140,00	83,81
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.197.212.540,00	815.247.540,00	68,10
2	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	570.036.500,00	567.560.850,00	99,57
3	Belanja Modal Pagar	2.904.566.550,00	2.495.676.250,00	85,92
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	244.800.000,00	242.152.500,00	98,92
	Jumlah	324.974.441.062,30	289.050.835.757,28	88,95

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.365.201.497.824,00 dengan realisasi sebesar Rp1.107.398.086.860,42 atau 81,12%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 62. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Belanja Modal Jalan	1.108.926.926.203,82	889.816.061.312,43	80,24
1	Belanja Modal Jalan Provinsi	1.107.221.326.203,82	888.145.660.612,43	80,21
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.705.600.000,00	1.670.400.700,00	97,94
B	Belanja Modal Jembatan	186.112.261.432,18	161.748.678.956,21	86,91
1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	186.112.261.432,18	161.748.678.956,21	86,91
C	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.906.511.454,82	19.928.088.030,60	87,00
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	21.109.324.526,00	18.130.901.102,00	85,89
2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.797.186.928,82	1.797.186.928,60	100,00
D	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.991.881.706,18	1.986.043.506,18	99,71
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.991.881.706,18	1.986.043.506,18	99,71
E	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	3.885.983.562,00	3.691.684.384,00	95,00
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	3.885.983.562,00	3.691.684.384,00	95,00
F	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.316.944.490,00	21.030.294.570,00	83,07
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	24.988.803.140,00	20.707.582.820,00	82,87
2	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	230.341.350,00	230.341.350,00	100,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	97.800.000,00	92.370.400,00	94,45
G	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	589.037.000,00	589.037.000,00	100,00
1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	589.037.000,00	589.037.000,00	100,00
H	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.650.201.975,00	2.252.115.278,00	33,87
1	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.650.201.975,00	2.252.115.278,00	33,87
I	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	6.028.800.000,00	4.289.758.500,00	71,15
1	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	6.028.800.000,00	4.289.758.500,00	71,15
J	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.041.200.000,00	924.284.015,00	88,77
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.041.200.000,00	924.284.015,00	88,77
K	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
L	Belanja Modal Instalasi Pengaman	45.000.000,00	24.295.000,00	53,99
1	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	45.000.000,00	24.295.000,00	53,99
M	Belanja Modal Instalasi Lain	1.000.000.000,00	625.486.808,00	62,55
1	Belanja Modal Instalasi Lain	1.000.000.000,00	625.486.808,00	62,55
N	Belanja Modal Jaringan Air Minum	50.250.000,00	49.000.000,00	97,51
1	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	50.250.000,00	49.000.000,00	97,51
O	Belanja Modal Jaringan Listrik	440.000.000,00	227.830.000,00	51,78
1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	440.000.000,00	227.830.000,00	51,78
P	Belanja Modal Jaringan Telepon	200.000.000,00	198.929.500,00	99,46
1	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	200.000.000,00	198.929.500,00	99,46
Jumlah		1.365.201.497.824,00	1.107.398.086.860,42	81,12

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Dinas Pendidikan	45.000.000,00	24.295.000,00	53,99
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	5.350.250.000,00	3.534.606.500,00	66,06
3	Dinas Kesehatan (BLUD)	800.000.000,00	487.269.608,00	60,91
4	RS Ernaldi Bahar (BLUD)	200.000.000,00	198.929.500,00	99,46
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	58.192.269.539,00	46.356.738.520,00	79,66
6	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	1.293.333.587.636,00	1.049.894.339.568,64	81,18
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	353.970.649,00	353.970.648,78	100,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00	0,00	0,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.554.920.000,00	6.358.362.315,00	97,00
10	Badan Pendapatan Daerah	200.000.000,00	138.217.200,00	69,11
11	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	51.500.000,00	51.358.000,00	99,72
Jumlah		1.365.201.497.824,00	1.107.398.086.860,42	81,12

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp80.696.901.908,00 atau 95,53% dari anggarannya sebesar Rp84.474.054.855,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 64. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
A	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	37.419.558.555,00	38.811.650.567,00	103,72
1	Belanja Modal Buku Umum	37.299.558.555,00	38.692.175.567,00	103,73
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	120.000.000,00	119.475.000,00	99,56
B	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	280.000.000,00	278.571.216,00	99,49
1	Belanja Modal Audio Visual	190.000.000,00	189.500.000,00	99,74
2	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	90.000.000,00	89.071.216,00	98,97
C	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.334.625.000,00	1.120.496.780,00	83,96
1	Belanja Modal Alat Musik	800.000.000,00	597.864.780,00	74,73
2	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	534.625.000,00	522.632.000,00	97,76
D	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	172.000.000,00	171.419.000,00	99,66
1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	145.000.000,00	144.700.000,00	99,79
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	27.000.000,00	26.719.000,00	98,96
E	Belanja Modal Hewan Piaraan	320.000.000,00	319.250.000,00	99,77
1	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya	320.000.000,00	319.250.000,00	99,77
F	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	35.775.428.150,00	32.958.916.600,00	92,13
1	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	35.775.428.150,00	32.958.916.600,00	92,13
G	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.172.443.150,00	7.036.597.745,00	76,71
1	Belanja Modal <i>Software</i>	6.088.158.150,00	4.794.692.370,00	78,75
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	150.000.000,00	147.785.000,00	98,52
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.934.285.000,00	2.094.120.375,00	71,37
Jumlah		84.474.054.855,00	80.696.901.908,00	95,53

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada tabel berikut.

Tabel 65. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Dinas Pendidikan	39.172.713.157,00	40.025.472.128,00	102,18
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	1.728.630.000,00	1.726.452.800,00	99,87
3	Dinas Kesehatan (BLUD)	1.017.820.000,00	645.856.875,00	63,45
4	RS Ernaldi Bahar (BLUD)	125.000.000,00	58.300.000,00	46,64
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.484.775.800,00	1.345.380.700,00	90,61
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.000.000,00	84.915.000,00	99,90

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
		Tahun 2021	Tahun 2021	
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	68.700.000,00	49.250.000,00	71,69
8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (SKPD)	50.000.000,00	48.500.000,00	97,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	42.000.000,00	41.690.000,00	99,26
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	310.000.000,00	308.724.000,00	99,59
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	300.000.000,00	193.025.000,00	64,34
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	314.000.000,00	311.949.000,00	99,35
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	341.150.000,00	268.750.000,00	78,78
14	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	587.500.000,00	584.541.220,00	99,50
15	Dinas Perpustakaan	419.200.398,00	415.805.755,00	99,19
16	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	254.000.000,00	49.500.000,00	19,49
17	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	40.000.000,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	35.076.663.150,00	32.656.139.900,00	93,10
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	389.902.350,00	384.302.600,00	98,56
20	Badan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	247.335.000,00	61,83
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	90.000.000,00	88.679.800,00	98,53
22	Sekretariat Dprd	2.150.000.000,00	1.135.613.130,00	52,82
23	Badan Penghubung	27.000.000,00	26.719.000,00	98,96
Jumlah		84.474.054.855,00	80.696.901.908,00	95,53

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2021 tidak dianggarkan karena terdapat kesalahan penganggaran belanja modal aset lainnya – aset tak berwujud yang dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal aset lainnya – aset tak berwujud dianggarkan sebesar Rp9.172.443.150,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.036.597.745,00 atau 76,71%. Atas realisasi kesalahan penganggaran belanja aset lainnya sebesar Rp7.036.597.745,00 telah dikoreksikan pencatatannya aset lainnya pada neraca per 31 Desember 2021.

7. Belanja Modal BLUD

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menganggarkan Belanja Modal BLUD sebagai akun tersendiri. Anggaran dan realisasi Belanja Modal BLUD telah dianggarkan pada masing masing akun belanja modal sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal BLUD yang telah dianggarkan pada masing-masing akun belanja modal adalah sebesar

Rp29.840.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.443.330.161,87 atau 85,27%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 66. Rincian Realisasi Belanja Modal BLUD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	RS. Mata (BLUD)	2.300.000.000,00	314.912.011,00	13,69
2	RS. Paru-Paru (BLUD)	35.000.000,00	32.242.200,00	92,12
3	RS. Gigi Dan Mulut (BLUD)	660.000.000,00	628.300.139,00	95,20
4	RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	13.800.000.000,00	12.623.853.150,54	91,48
5	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	3.245.000.000,00	2.951.508.039,00	90,96
6	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	8.500.000.000,00	7.592.514.622,33	89,32
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00
Jumlah		29.840.000.000,00	25.443.330.161,87	85,27

Sedangkan rincian Belanja Modal BLUD per jenis belanja berdasarkan LRA pada masing-masing BLUD terdapat pada tabel berikut.

Tabel 67. Rincian Belanja Modal BLUD per Jenis

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal BLUD	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	RS. Mata	314.912.011,00	0,00	0,00	0,00	314.912.011,00
2	RS. Paru-paru	32.242.200,00	0,00	0,00	0,00	32.242.200,00
3	RS.Gigi dan Mulut	619.390.139,00	0,00	0,00	8.910.000,00	628.300.139,00
4	RSUD Siti Fatimah	10.675.663.575,54	823.973.092,00	487.269.608,00	636.946.875,00	12.623.853.150,54
5	RS. Ernaldi Bahar	2.083.919.539,00	610.359.000,00	198.929.500,00	58.300.000,00	2.951.508.039,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7.384.905.609,00	207.609.013,33	0,00	0,00	7.592.514.622,33
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00
Jumlah		22.411.033.073,54	1.641.941.105,33	686.199.108,00	704.156.875,00	25.443.330.161,87

8. Belanja Modal BOS

Belanja Modal BOS adalah belanja modal yang diperuntukkan untuk sekolah penerima BOS. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menganggarkan Belanja Modal BOS sebagai akun tersendiri. Anggaran dan realisasi Belanja Modal BOS telah dianggarkan pada masing-masing akun belanja modal sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal BOS yang telah dianggarkan pada masing-masing akun belanja modal sebesar Rp38.895.055.592,00 untuk belanja peralatan dan mesin, dan Rp38.525.453.928,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan rincian per jenis sekolah pada tabel berikut.

Tabel 68. Rincian Belanja Modal BOS – per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

NO	Kab/Kota	SLB	SMK	SMA	Jumlah
1	Kota Palembang	118.852.500,00	3.116.779.768,00	4.439.370.392,00	7.675.002.660,00
2	Kota Prabumulih	34.354.000,00	443.989.500,00	624.908.450,00	1.103.251.950,00
3	Kota Lubuklinggau	58.000.000,00	863.874.800,00	261.437.000,00	1.183.311.800,00
4	Kota Pagar Alam	17.400.000,00	42.560.000,00	651.215.000,00	711.175.000,00
5	Kab. Banyuasin	83.500.000,00	551.146.500,00	1.697.290.000,00	2.331.936.500,00
6	Kab. Musi Banyuasin	57.700.000,00	1.595.422.893,00	1.769.746.200,00	3.422.869.093,00
7	Kab. Ogan Ilir	34.625.000,00	962.666.000,00	1.657.330.400,00	2.654.621.400,00
8	Kab. Ogan Komering Ilir	86.800.000,00	1.031.005.500,00	1.995.769.600,00	3.113.575.100,00
9	Kab. Ogan Komering Ulu	33.546.000,00	565.032.000,00	1.761.398.900,00	2.359.976.900,00
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		364.959.000,00	898.585.909,00	1.263.544.909,00
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	34.650.000,00	569.787.000,00	1.018.132.500,00	1.622.569.500,00
12	Kab. Muara Enim	18.000.000,00	1.326.965.000,00	1.540.298.500,00	2.885.263.500,00
13	Kab. Musi Rawas	15.110.000,00	430.291.000,00	1.458.379.000,00	1.903.780.000,00
14	Kab. Musi Rawas Utara		211.810.120,00	787.382.500,00	999.192.620,00
15	Kab. Lahat	33.500.000,00	898.625.600,00	1.247.719.500,00	2.179.845.100,00
16	Kab. Empat Lawang	10.145.454,00	482.845.000,00	988.944.226,00	1.481.934.680,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	49.000.000,00	663.303.500,00	1.380.901.380,00	2.093.204.880,00
Jumlah		685.182.954,00	14.121.063.181,00	24.178.809.457,00	38.985.055.592,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BOS adalah untuk pembelian buku, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 69. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

(dalam rupiah)

No	Kab/Kota	SLB	SMA	SMK	Grand Total
1	Kota Palembang	0,00	5.843.420.310,00	1.718.049.600,00	7.561.469.910,00
2	Kabupaten Muba	22.455.920,00	2.172.379.500,00	1.353.801.000,00	3.548.636.420,00
3	Kabupaten Banyuasin	0,00	2.249.137.800,00	879.889.000,00	3.129.026.800,00
4	Kabupaten OKI	0,00	1.418.047.000,00	969.875.000,00	2.387.922.000,00
5	Kabupaten Ogan Ilir	0,00	1.173.263.200,00	382.094.400,00	1.555.357.600,00
6	Kabupaten OKU	21.000.000,00	1.495.986.200,00	295.922.700,00	1.812.908.900,00
7	Kabupaten OKU Selatan	0,00	1.076.967.400,00	261.392.000,00	1.338.359.400,00
8	Kabupaten OKU Timur	34.759.500,00	843.493.400,00	444.374.400,00	1.322.627.300,00
9	Kabupaten Muara Enim	15.000.000,00	1.939.202.100,00	775.758.000,00	2.729.960.100,00
10	Kabupaten Prabumulih	0,00	1.103.031.700,00	141.153.000,00	1.244.184.700,00
11	Kabupaten Lahat	0,00	1.066.653.380,00	688.428.920,00	1.755.082.300,00
12	Kota Pagar Alam	6.000.000,00	632.207.000,00	152.580.000,00	790.787.000,00
13	Kabupaten MURA	6.714.198,00	2.553.798.550,00	222.196.500,00	2.782.709.248,00
14	Kota Lubuklinggau	0,00	1.599.681.600,00	720.286.500,00	2.319.968.100,00
15	Kabupaten Empat Lawang	0,00	1.079.970.500,00	226.757.200,00	1.306.727.700,00
16	Kabupaten Muratara	0,00	1.558.974.850,00	248.356.200,00	1.807.331.050,00
17	Kabupaten PALI	0,00	835.164.300,00	297.231.100,00	1.132.395.400,00
Jumlah		105.929.618,00	28.641.378.790,00	9.778.145.520,00	38.525.453.928,00

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp14.055.098.162,00 atau 93,70% dari anggarannya sebesar Rp15.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp197.104.066.604,97 mengalami penurunan sebesar Rp183.048.968.442,97 atau 92,87%. Rincian Belanja Tak Terduga terdapat pada tabel berikut.

Tabel 70. Belanja Tak Terduga Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	SK Gubernur	Jumlah
1	Pengembalian Dana Hibah <i>Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project-Asian Development Bank (IPDMIP-ADB)</i> Tahap 12 SK Gub Sumsel No:110/KPTS/BPKAD/2021 tgl 8 Feb 2021	SK Gub Sumsel No:110/KPTS/BPKAD/2021 tgl 8 Feb 2021	1.829.478.735,00
2	Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial di Prov. Sumsel keperluan Dinas Sosial Prov. Sumsel.	Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 495/KPTS/BPKD/2021 tgl. 22 Juli 2021	9.997.370.000,00
3	Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Uang Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. OKI Pulp & Paper Mills Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 288/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 30 April 2021	Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 288/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 30 April 2021	63.992.127,00
4	Belanja Tak Terduga untuk Bantuan kepada Individu/Keluarga yang terdampak atau mengalami Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan	Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 780/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 3 Desember 2021	150.000.000,00
5	Belanja Tak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2020/2021, berdasarkan	Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 813/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 14 Desember 2021	14.257.300,00
6	Belanja Tak Terduga untuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat yang terdampak COVID-19, Banjir, Tanah Longsor, serta Puting Beliung di Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 819/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 15 Desember 2021	2.000.000.000,00
Jumlah			14.055.098.162,00

4.1.2.4 Belanja Transfer

Transfer Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.373.834.784.602,00 dengan realisasi sebesar Rp2.844.809.545.045,96 atau 84,32%, naik sebesar Rp227.521.194.824,23 atau 8,69% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp2.617.288.350.221,73, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 71. Anggaran dan Realisasi Transfer

(dalam rupiah)

No	Transfer	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio %	Realisasi Tahun 2020
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.849.505.412.624,00	1.579.375.912.863,60	85,39	1.455.636.933.603,00
-	Bagi Hasil Pajak Daerah	1.849.505.412.624,00	1.579.375.912.863,60	85,39	1.455.636.933.603,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.524.329.371.978,00	1.265.433.632.182,36	83,02	1.161.651.416.618,73
-	Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	1.515.113.959.978,00	1.258.433.632.182,36	83,06	1.153.951.416.618,73
-	Bantuan Keuangan ke Desa	9.215.412.000,00	7.000.000.000,00	75,96	7.700.000.000,00

No	Transfer	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio %	Realisasi Tahun 2020
-	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.373.834.784.602,00	2.844.809.545.045,96	84,32	2.617.288.350.221,73

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp1.579.375.912.863,60 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp370.273.861.357,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan kepada kabupaten/kota sebesar Rp1.209.102.051.506,60.

Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp370.273.861.357,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kurang salur Tahun 2020 sebesar Rp46.734.783.744,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2021 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp323.539.077.613,00 dengan rincian per kabupaten/kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 72. Rincian Transfer DBH Pajak Rokok Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur 2020	Alokasi 2021	Total Penyaluran DBH Pajak Rokok di Tahun 2021
1	Kota Palembang	7.322.410.792,00	46.654.729.074,39	53.977.139.866,39
2	Kab. Muba	3.808.405.271,00	22.999.841.039,01	26.808.246.310,01
3	Kab. Banyuasin	4.447.315.365,00	27.729.454.621,92	32.176.769.986,92
4	Kab. OKI	4.127.860.318,00	26.989.038.647,55	31.116.898.965,55
5	Kab. Ogan Ilir	2.850.040.129,00	17.756.876.864,85	20.606.916.993,85
6	Kab. OKU	2.530.585.081,00	16.282.865.037,95	18.813.450.118,95
7	Kab. OKU Selatan	2.063.824.544,00	14.894.484.567,09	16.958.309.111,09
8	Kab. OKU Timur	0,00	22.153.357.166,97	22.153.357.166,97
9	Kab. Muara Enim	3.488.950.223,00	22.521.423.583,25	26.010.373.806,25
10	Kota Prabumulih	1.891.674.987,00	12.112.181.628,02	14.003.856.615,02
11	Kab. Lahat	2.850.040.129,00	17.320.212.666,41	20.170.252.795,41
12	Kota Pagar Alam	1.883.411.687,00	11.081.654.120,40	12.965.065.807,40
13	Kab. Musi Rawas	2.836.875.116,00	17.267.812.962,40	20.104.688.078,40
14	Kota Lubuklinggau	2.211.130.034,00	13.271.795.232,30	15.482.925.266,30
15	Kab. Empat Lawang	2.530.585.081,00	13.855.012.096,80	16.385.597.177,80
16	Kab. Muratara	1.891.674.987,00	12.199.514.467,35	14.091.189.454,35
17	Kab. PALI	0,00	8.448.823.836,34	8.448.823.836,34
	Jumlah	46.734.783.744,00	323.539.077.613,00	370.273.861.357,00

Sedangkan rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan sebesar Rp1.209.102.051.506,60 terdiri dari kurang salur tahun 2020 sebesar Rp100.570.243.223,00 dan penyaluran DBH pajak kendaraan alokasi tahun 2021 sebesar Rp1.108.531.808.283,60 rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 73. Rincian Transfer DBH Pajak Kendaraan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur 2020	Alokasi 2021	Total Penyaluran DBH Pajak Kendaraan di Tahun 2021
1	Kota Palembang	25.696.763.406,00	256.794.593.139,60	282.491.356.545,60
2	Kab Muba	6.721.718.851,00	78.386.817.504,00	85.108.536.355,00

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur 2020	Alokasi 2021	Total Penyaluran DBH Pajak Kendaraan di Tahun 2021
3	Kab Banyuasin	5.627.593.480,00	64.909.530.659,00	70.537.124.139,00
4	Kab OKI	7.155.235.528,00	81.272.997.753,00	88.428.233.281,00
5	Kab Ogan Ilir	4.173.164.535,00	46.730.895.116,00	50.904.059.651,00
6	Kab OKU	4.802.777.647,00	51.759.052.117,00	56.561.829.764,00
7	Kab OKU Selatan	3.109.813.406,00	34.859.863.354,00	37.969.676.760,00
8	Kab OKU Timur	4.052.064.771,00	47.747.991.509,00	51.800.056.280,00
9	Kab Muara Enim	8.293.802.828,00	109.321.963.160,00	117.615.765.988,00
10	Kota Prabumulih	4.543.538.914,00	47.176.197.375,00	51.719.736.289,00
11	Kab Lahat	5.815.617.723,00	64.107.894.078,00	69.923.511.801,00
12	Kota Pagar Alam	3.119.849.544,00	34.471.091.314,00	37.590.940.858,00
13	Kab MURA	4.026.590.515,00	45.097.456.827,00	49.124.047.342,00
14	Kota Lubuklinggau	4.410.212.663,00	47.480.020.302,00	51.890.232.965,00
15	Kab Empat Lawang	2.760.230.866,00	31.612.947.931,00	34.373.178.797,00
16	Kab Muratara	3.012.250.013,00	33.437.926.566,00	36.450.176.579,00
17	Kab. PALI	3.249.018.533,00	33.364.569.579,00	36.613.588.112,00
Jumlah		100.570.243.223,00	1.108.531.808.283,60	1.209.102.051.506,60

2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.265.433.632.182,36 atau 83,02% dari anggarannya sebesar Rp1.524.329.371.978,00 yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp1.258.433.632.182,36 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp7.000.000.000,00.

a. Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.258.433.632.182,36 dari anggaran sebesar Rp1.515.113.959.978,00 yang merupakan transfer bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berupa Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp1.239.814.277.363,84 dan Bantuan Keuangan untuk kurang salur Jamsoskes sebesar Rp18.619.354.818,52, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 74. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus dan Kurang Salur Jamsoskes

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur Jamsoskes	Bankeu Khusus	Jumlah
1	Kota Palembang	2.273.289.398,44	91.704.827.670,00	93.978.117.068,44
2	Kab Muba	0,00	76.556.339.692,00	76.556.339.692,00
3	Kab Banyuasin	0,00	84.579.747.558,00	84.579.747.558,00
4	Kab OKI	1.398.618.652,43	65.068.050.000,00	66.466.668.652,43
5	Kab Ogan Ilir	0,00	59.374.023.208,25	59.374.023.208,25
6	Kab OKU	1.779.094.386,37	51.243.170.988,66	53.022.265.375,03
7	Kab OKU Selatan	2.465.763.100,72	26.593.940.767,93	29.059.703.868,65
8	Kab OKU Timur	0,00	264.071.088.266,00	264.071.088.266,00
9	Kab Muara Enim	4.955.139.205,49	7.121.505.690,00	12.076.644.895,49
10	Kota Prabumulih	1.264.257.955,87	22.111.658.800,00	23.375.916.755,87
11	Kab Lahat	4.483.192.119,20	98.012.595.662,00	102.495.787.781,20
12	Kota Pagar Alam	0,00	62.986.973.000,00	62.986.973.000,00

No	Kabupaten/Kota	Kurang Salur Jamsoskes	Bankeu Khusus	Jumlah
13	Kab MURA	0,00	48.366.504.600,00	48.366.504.600,00
14	Kota Lubuklinggau	0,00	41.430.397.725,00	41.430.397.725,00
15	Kab Empat Lawang	0,00	81.812.043.800,00	81.812.043.800,00
16	Kab Muratara	0,00	78.867.160.200,00	78.867.160.200,00
17	Kab. PALI	0,00	79.914.249.736,00	79.914.249.736,00
Jumlah		18.619.354.818,52	1.239.814.277.363,84	1.258.433.632.182,36

b. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah belanja bantuan keuangan kepada 70 (tujuh puluh) Desa Persiapan di 7 (Tujuh) Kabupaten di Sumatera Selatan Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 503/KPTS/DPMD/2021. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per kabupaten/kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 75. Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Persiapan	Besaran Bantuan	Jumlah Diterima
1	Ogan Komering Ilir	16	100.000.000,00	1.600.000.000,00
2	Ogan Komering Ulu	2	100.000.000,00	200.000.000,00
3	Ogan Komering Ulu Timur	20	100.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Musi Banyuasin	2	100.000.000,00	200.000.000,00
5	Banyuasin	3	100.000.000,00	300.000.000,00
6	Penukal Abab Lematang Ilir	26	100.000.000,00	2.600.000.000,00
7	Muara enim	1	100.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah		70		7.000.000.000,00

4.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 76. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Pembiayaan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio %	Realisasi Tahun 2020
1	Penerimaan Pembiayaan	711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86.44	474.977.880.806,42
2	Pengeluaran Pembiayaan	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83.98	114.114.901.552,00
Pembiayaan netto		609.233.322.485,00	529.159.551.422,81	86.86	360.862.979.254,42

4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 77. Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Rasio %
A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020	121.594.476.750,00	121.593.374.660,10	100,02
1.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.025.857.720,00	108.567.546,29	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	598.260.000,00	71.182.956.102,86	11.898,33
3	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	41.136.938.383,00	0,00	0,00
4	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	75.211.945,00	0,00	0,00
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	41.259.937.446,00	41.259.937.445,85	100
6	Sisa Dana BOS	18.498.271.256,00	9.041.913.565,10	48,88
B	Penerimaan Pinjaman Daerah	590.048.845.735,00	493.566.176.762,71	83,65
1	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	590.048.845.735,00	493.566.176.762,71	83,65
Jumlah		711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86,44

1. Pelampauan penerimaan dana transfer merupakan pelampauan penerimaan transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp108.567.546,29;
2. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp71.182.956.102,86 adalah saldo kas per 31 Desember 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp.41.259.937.445,85, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Saldo Kas di BLUD RS Ernaldi Bahar sebesar Rp11.620.209.529,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2020;
 - b. Saldo Kas di BLUD RS Mata sebesar sebesar Rp12.402.386.466,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2020 di rekening BLUD RSK Mata Masyarakat pada rekening Bank Sumsel Babel nomor 140-301-1895;
 - c. Saldo Kas di BLUD RS Paru sebesar Rp342.546.100,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2020 di rekening BLUD RSK Paru pada Bank Sumsel Babel nomor rekening 140-301-1896;
 - d. Saldo Kas di RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp1.092.047.661,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2020 di rekening BLUD RSK Gigi dan Mulut pada Bank Sumsel Babel nomor140-301-8501;

- e. Saldo Kas di RSUD Siti Fatimah sebesar Rp4.804.831.772,62 adalah saldo kas per 31 Desember 2020 di rekening BLUD RSUD Siti Fatimah dengan nomor rekening 140-310-0196 pada Bank Sumsel Babel;
 - f. Saldo Kas di Badan Pelatihan Kesehatan sebesar Rp236.872.813,00 adalah saldo kas di rekening BLUD Badan Pelatihan Kesehatan dengan nomor rekening 174-310-00044 pada Bank Sumsel Babel;
 - g. Saldo Kas di BLUD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) sebesar Rp9.500.750.460,23 adalah saldo kas di rekening dengan nomor 174-301-5001 pada Bank Sumsel Babel; dan
 - h. Saldo Kas di BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) sebesar Rp1.260.292.644,00 adalah saldo kas di rekening dengan nomor 0821818899 pada Bank Negara Indonesia.
4. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.041.913.565,10; dan
 5. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2021 sebesar Rp493.566.176.762,71 merupakan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk mengurangi dampak Covid-19 yang berdampak pada ekonomi.

4.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp86.000.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp102.410.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 78. Rincian Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Perhitungan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %
1	PT. Askrida	210.000.000,00	0,00	0,00
2	PT. Bank Sumsel Babel	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
3	PT. Jakabaring Sport City	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
4	PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan	29.200.000.000,00	16.000.000.000,00	54,79
5	PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6	PT. Syailendra Investasi Gemilang 4	1.000.000.000,00	0,00	0,00
7	PT. Syailendra Investasi Gemilang 5	1.000.000.000,00	0,00	0,00
8	PT. Syailendra Investasi Gemilang 6	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98

4.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun 2021 sebesar Rp79.720.535.110,59 yang merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 79. Rincian Perhitungan SILPA

(dalam rupiah)

No	Perhitungan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %
1	Pendapatan	10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17	88,99
2	Belanja	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40	88,17
3	Surplus/ (Defisit)(1-2)	(609.233.322.485,00)	(449.439.016.312)	73,77
4	Penerimaan pembiayaan	711.643.322.485,00	615.159.551.422,81	86,44
5	Pengeluaran Pembiayaan	102.410.000.000,00	86.000.000.000,00	83,98
6	Pembiayaan netto (4-5)	609.233.322.485,00	529.159.551.422,81	86,86
	SILPA (4+7)	0,00	79.720.535.110,59	0,00

Perhitungan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 menunjukkan SILPA Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar Rp79.720.535.110,59 dan Rp121.619.545.350,56 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80. Rincian SILPA Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas di BUD -RKUD Nomor Rekening 140-30-00001 pada Bank Sumsel Babel	32.892.544.600,53	71.182.956.102,86
2	Kas di BUD - Sub RKUD Nomor Rekening 140-30-000001 pada Bank Sumsel Babel	47.045.250,00	75.211.945,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.287.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	13.231.924,00	24.959.467,00
5	Kas di Bendahara BOS dan PSG tidak termasuk utang PFK	1.032.950.323,00	9.068.084.255,56
6	Kas BLUD	45.734.763.013,06	41.259.937.445,85
	SILPA	79.720.535.110,59	121.619.545.350,56

- Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp32.892.544.600,53 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor rekening 140.30.00001 pada Bank Sumsel Babel;
- Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp47.045.250,00 adalah saldo kas per 31 Desember 2021 pada Rekening Kas Umum Daerah – Sub RKUD Provinsi Sumatera Selatan nomor rekening 140.30.000001 pada Bank Sumsel Babel;
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp13.231.924,00 adalah saldo kas pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 81. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah	keterangan
1	Dinas Perhubungan		
A	Retribusi Terminal Tipe B	1.943.000,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2022

No	SKPD	Jumlah	keterangan
B	Retribusi Jasa Kepelabuhan Penyebrangan Tanjung Api- Api	13.035,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2022
C	Retribusi Izin Trayek	11.275.889,00	Telah disetor ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2022
Jumlah		13.231.924,00	

- Saldo Kas di Bendahara BOS dan PSG tidak termasuk Utang PFK sebesar Rp1.032.950.323,00;
- Saldo Kas di Bendaharan BLUD sebesar Rp 45.734.763.013,06 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82. Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir per 31 Des 2021
1	RS. Dr Ernaldi Bahar	10.524.217.286,00
2	RS. Mata	17.323.807.330,00
3	RS. Paru-Paru	192.515.448,00
4	RS. Gigi Dan Mulut	1.334.508.488,00
5	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	5.928.693.826,16
6	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi	1.003.577.700,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7.278.821.767,90
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.148.621.167,00
Jumlah		45.734.763.013,06

4.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunans Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi tahun-tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp121.619.545.350,56.

4.2.1.1 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp121.593.374.660,10.

4.2.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp79.720.535.110,59 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Surplus/(defisit) anggaran	Rp	(449.439.016.312,22)
2. Pembiayaan netto	Rp	529.159.551.422,81
3. SILPA tahun berjalan	Rp	79.720.535.110,59

Komponen pembentuk SiLPA adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan PAD yang tidak tercapai	Rp	(881.625.019.921,83)
b. Penerimaan Dana Perimbangan yang tidak cair	Rp	(297.011.554.668,00)
c. Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tidak terealisasi	Rp	(11.016.200.130,00)
d. Penerimaan Pembiayaan yang tidak terealisasi	Rp	(96.483.771.062,19)
e. Belanja Operasi yang tidak terealisasi	Rp	465.027.397.702,51
f. Belanja Modal yang tidak terealisasi	Rp	354.449.541.796,06
g. Belanja Tak terduga yang tidak terealisasi	Rp	944.901.838,00
h. Transfer yang tidak terealisasi	Rp	529.025.239.556,04
i. Pengeluaran Pembiayaan yang tidak terealisasi	Rp	<u>16.410.000.000,00</u>
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	79.720.535.110,59

Adapun saldo kas di Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp79.822.998.000,59 sehingga terdapat perbedaan antara SILPA di LRA dengan saldo kas di Neraca sebesar Rp102.462.890,00 yang merupakan utang pajak BOS dan PSG sebesar Rp35.245.427,00, Utang PFK Lainnya BOS dan PSG sebesar Rp66.371.504,00 pada Dinas Pendidikan dan rekening pasif sebesar Rp845.959,00 pada Dinas Kesehatan.

4.2.1.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp26.170.690,46) merupakan koreksi tambah saldo awal Dana BOS sebesar Rp52.509.949,52 dan koreksi kurang saldo awal dana PSG sebesar Rp78.680.639,98 pada Dinas Pendidikan.

4.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut.

4.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp33.308.080.822.030,92 dan Rp31.995.191.846.614,10 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 83. Rincian Aset Pemerintah per 31 Desember 2021*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ (penurunan)
1	Aset lancar	206.852.240.873,52	263.889.725.861,12	(57.037.484.987,60)
2	Investasi Jangka Panjang	7.442.535.027.852,15	7.267.323.138.467,60	175.211.889.384,55
3	Aset tetap	22.563.173.385.495,61	21.371.820.120.036,50	1.191.353.265.459,11
4	Aset lainnya	3.095.520.167.809,64	3.092.158.862.248,83	3.361.305.560,81
	Jumlah	33.308.080.822.030,92	31.995.191.846.614,05	1.312.888.975.416,87

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp206.852.240.873,52 dan Rp263.889.725.861,12 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 84. Rincian Aset lancar per 31 Desember 2021*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2021	2020	kenaikan/ (penurunan)
1	Kas dan Bank	79.801.398.000,59	124.537.952.473,58	(44.736.554.472,99)
2	Piutang	28.199.000.660,96	46.695.097.231,77	(18.496.096.570,81)
3	Penyisihan Piutang	(4.441.184.050,08)	(3.803.231.913,37)	(637.952.136,71)
4	Beban Dibayar Dimuka	3.718.075.722,06	2.600.265.276,57	1.117.810.445,49
5	Persediaan	99.574.950.539,99	93.859.642.792,57	5.715.307.747,42
	Jumlah	206.852.240.873,52	263.889.725.861,12	(57.037.484.987,60)

1. Kas

Kas merupakan saldo Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD, Bendahara pada SKPD, Bendahara BOS dan PSG dan Kas (BUD), BLUD, berupa uang Tunai rekening giro bank, dan tabungan yang seluruhnya merupakan kas daerah Saldo kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp79.801.398.000,59 dan Rp124.537.952.473,58 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 85. Rincian Saldo Kas*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2021	2020
1	Kas di Kas Daerah	23.462.357.600,53	61.752.769.102,86
2	Kas di Bendahara Penerimaan	13.231.924,00	24.959.467,00
3	Kas di bendahara Pengeluaran	0,00	76.450.634,00
4	Kas di BLUD	45.734.763.013,06	41.259.937.445,85
5	Kas di Bendahara BOS	1.112.967.254,00	11.917.590.919,58
6	Kas Lainnya	9.478.078.209,00	9.506.244.904,29
	Jumlah	79.801.398.000,59	124.537.952.473,58

a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp23.462.357.600,53 dan Rp61.752.769.102,86 yang merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumsel Babel Nomor 140-30-00001 sebesar Rp32.892.544.600,53 dikurangi kas lainnya (kas yang dibatasi penggunaannya) sebesar Rp9.430.187.000,00 yang merupakan sisa dana BOS yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.231.924,00 dan Rp24.959.467,00 merupakan pendapatan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan yang disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2022 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 86. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	2021	2020
1	Dinas Perhubungan	13.231.924,00	21.859.467,00
-	Retribusi Terminal Tipe B	1.943.000,00	12.635.825,00
-	Retribusi Jasa Kepelabuhan Peyeberangan Tanjung Api-Api	13.035,00	9.223.642,00
-	Retribusi Izin Trayek	11.275.889,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	600.000,00
3	Dinas Pendidikan	0,00	2.500.000,00
Jumlah		13.231.924,00	24.959.467,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp76.450.634,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebesar Rp8.287.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp109.134,00 telah disetor ke kas daerah pada bulan Januari dan April tahun 2021 sedangkan saldo kas Rp68.054.500,00 pada Sekretariat DPRD yang merupakan kupon BBM telah dibayarkan pada bulan Januari 2021.

Tabel 87. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	SKPD	2021	2020
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.287.000,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	109.134,00
3.	Sekretariat DPRD	0,00	68.054.500,00
Jumlah		0,00	76.450.634,00

d. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp45.734.763.013,06 dan Rp41.259.937.445,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88. Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal 1 Januari 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2021
1	RS. Dr Ernaldi Bahar	11.620.209.529,00	25.209.819.926,00	26.305.812.169,00	10.524.217.286,00
2	RS. Mata	12.402.386.466,00	22.619.042.381,00	17.697.621.517,00	17.323.807.330,00
3	RS. Paru-Paru	342.546.100,00	727.841.664,00	877.872.316,00	192.515.448,00
4	RS. Gigi Dan Mulut	1.092.047.661,00	4.382.778.991,00	4.140.318.164,00	1.334.508.488,00
5	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	4.804.831.772,62	69.098.731.465,28	67.974.869.411,74	5.928.693.826,16
6	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi	236.872.813,00	2.121.056.217,00	1.354.351.330,00	1.003.577.700,00
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	9.500.750.460,23	19.697.732.597,00	21.919.661.289,33	7.278.821.767,90
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.260.292.644,00	21.334.105.634,00	20.445.777.111,00	2.148.621.167,00
Jumlah		41.259.937.445,85	165.191.108.875,28	160.716.283.308,07	45.734.763.013,06

1) RS. Dr Ernaldi Bahar

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.524.217.286,00 adalah saldo kas di rekening Bank Sumsel Babel dengan nomor 140-30-11894.

2) RS. Khusus Mata

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.323.807.330,00 adalah saldo kas direkening Bank Sumsel Babel nomor 140-301-1895.

3) RS. Khusus Paru

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp192.515.448,00 adalah saldo kas di rekening Bank Sumsel Babel nomor 140-301-1896.

4) RS. Gigi dan Mulut

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.334.508.488,00 adalah saldo kas di rekening Bank Sumsel Babel nomor 140-301-8501.

5) RS. Umum Daerah Siti Fatimah

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.928.693.826,16 adalah saldo kas direkening Nomor rekening 140-310-0196 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp5.919.682.608,87, saldo kas di rekening nomor rekening 113-0044-8888-44 pada Bank Mandiri sebesar Rp6.730.217,29 dan kas tunai berupa pendapatan BLUD yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.281.000,00.

6) Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.003.577.700,00 adalah saldo kas direkening Nomor rekening 174-310-00044 pada Bank Sumsel Babel.

7) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.278.821.767,90 adalah saldo kas di rekening nomor rekening 174-301-5001 pada Bank Sumsel Babel.

8) **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**

Saldo kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.148.621.167,00 adalah saldo kas di rekening pada Bank Negara Indonesia Tbk nomor rekening 0821818899.

e. Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp Rp1.112.967.254,00 dan Rp11.917.590.919,58. Saldo Kas tersebut terdiri dari sisa saldo kas di Bendahara BOS Transfer Pusat SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri sebesar Rp904.663.166,00 dan sisa saldo kas di Bendahara BOS Daerah (PSG) sebesar Rp208.304.088,00 yang merupakan saldo rekening Bank Dana BOS sebesar Rp710.567.480,00, saldo rekening Bank Dana PSG sebesar Rp163.550.179,00, saldo tunai di bendahara BOS sebesar Rp194.095.685,00, saldo tunai di bendahara PSG sebesar Rp9.508.483,00 dan pajak yang belum disetor sebesar Rp35.245.427,00.

1) **Kas di Bendahara BOS (pusat)**

Pada Tahun Anggaran 2021 telah direalisasikan Belanja BOS Pusat pada 462 sekolah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (SMA/SMK /SLB Negeri) sebesar Rp366.249.209.491,00 yang menggunakan dana penyaluran dari pusat ditahun 2021 sebesar Rp362.703.432.000,00 dan sisa kas BOS 2020 sebesar Rp4.450.441.234,00 sehingga terdapat penyaluran BOS yang belum direalisasikan sebesar Rp904.663.743,00.

Realisasi Belanja BOS Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp366.249.209.491,00 per Sekolah dan per jenis belanja terdapat pada **Lampiran 13.a dan 13.b.**

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp904.663.166,00 adalah sisa salur BOS 2021 sebesar Rp904.663.743,00 ditambah dengan kurang setor pajak tahun 2020 Rp1,00 pada SMK Negeri 2 Muara Enim dan utang PFK lainnya pada SMK Negeri 2 Talang Ubi sebesar Rp920,00 dan dikurangi dengan biaya administrasi bank pada SMA Negeri 1 Palembang sebesar Rp1.498,00.

Tabel 89. Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS (Pusat)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1 (1.a+1b)	Saldo Awal 2020 Audited	5.568.196.366,92
1.a	-Saldo Kas	4.444.351.380,48
1.b	-Utang Pajak 2020	1.123.844.986,44
2 (2.a+2.b+2.c)	Koreksi Saldo Awal	(14.610.763,92)
2.a	-Koreksi Saldo Awal Kas	46.509.949,52
2.b	-Pengembalian Ke Rekening Sekolah	6.000.000,00
2.c	- Koreksi Saldo Awal Utang Pajak 2020	(67.120.713,44)
3. (3.a+3.b)	Saldo awal setelah koreksi	5.553.585.603,00
3.a	-Saldo kas 2020 setelah Koreksi	4.496.861.330,00
3.b	- Saldo Utang 2020 setelah koreksi	1.056.724.273,00

No	Uraian	Jumlah
4.	Setor Ke Kas Daerah (Silpa Kas 2020)	46.420.096,00
5.	Pembayaran Utang Pajak 2020	1.056.724.272,00
6 (3a-4)	Sisa Kas 2020	4.450.441.234,00
7 (3b-5)	Sisa Utang Pajak 2020	1,00
8.	Penerimaan Penyaluran dari Pusat (2021)	362.703.432.000,00
9.	Pengeluaran (SPJ belanja) dari sisa kas 2020 + salur 2021	366.249.209.491,00
9.a (6+8-9)	Sisa Salur 2021	904.663.743,00
10.	Penerimaan Pajak 2021	13.800.311.987,18
11.	Pengeluaran Pajak 2021	13.800.311.987,18
12 (10-11)	Saldo Pajak 2021	0,00
13.	Biaya ADM Bank	1.498,00
14.	jasa Giro belum disetor ke Kas daerah	0,00
15 (9.a+12-13+14)	Saldo Akhir Keg. Yang menggunakan Dana BOS	904.662.246,00
16.	Utang Pfk Lainnya 2021	920,00
17 (15+16)	SALDO AKHIR KAS BOS NERACA	904.663.166,00
	-Saldo Rek Bank	710.567.480,00
	-Saldo Tunai	194.095.685,00
	-Sisa Utang Pajak 2020	1,00

Saldo akhir kas BOS sebesar Rp904.663.166,00 terdapat pada masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90. Daftar Saldo Kas BOS pada sekolah

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Saldo Rekening Giro	Saldo tunai	Utang Pajak	Jumlah
1	SMAN 2 Sanga Desa	0,00	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
2	SMAN 4 Lais	0,00	40,00	0,00	40,00
3	SMAN Karya Sakti	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4	SMA Negeri 1 Kandis	0,00	180.400,00	0,00	180.400,00
5	SMAN 1 Kayuagung	0,00	200,00	0,00	200,00
6	SMAN 12 Ogan Komering Ulu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7	SMAN 1 Simpang	0,00	709.091,00	0,00	709.091,00
8	SMAN 1 Pagar Alam	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
9	SMAN 2 Pagar Alam	0,00	503.800,00	0,00	503.800,00
10	SMA Negeri 02 Palembang	0,00	79,00	0,00	79,00
11	SMAN Sumatera Selatan	1.050.000,00	107.941,00	0,00	1.157.941,00
12	SMKN 1 Gelumbang	0,00	22.477.000	0,00	22.477.000,00
13	SMKN 2 Muara Enim	0,00	0,00	1,00	1,00
14	SMKN Pertanian 2 Tugumulyo	89.316.560,00	0,00	0,00	89.316.560,00
15	SMKN 2 Talang Ubi	920,00	0,00	0,00	920,00
16	SLB Negeri Pembina Palembang	615.700.000,00	16.098.834,00	0,00	631.798.834,00
17	SLB Negeri Lubuklinggau	0,00	14.000	0,00	14.000,00
	Jumlah	710.567.480,00	194.095.685,00	1,00	904.663.166,00

2) Kas di Bendahara BOS daerah (Program Sekolah Gratis)

Saldo kas program sekolah gratis per 31 Desember 2021 adalah Rp208.304.088,00 yang terdiri dari saldo rekening giro sebesar Rp163.550.179,00, saldo tunai di bendahara Rp9.508.483,00 dan utang pajak sebesar Rp35.245.426,00. Pada saldo rekening giro sebesar Rp163.550.179,00 terdapat utang PFK lainnya yang antara lain merupakan gaji pegawai honorer diluar program kegiatan PSG sebesar Rp44.770.584,00 pada sekolah-sekolah sebagai berikut yaitu:

- SLB Negeri Kayuagung	Rp.	40.000,00
- SLB Negeri Muara Enim	Rp.	12.330.000,00
- SMA 3 Banyuasin III	Rp.	584,00
- SMA Negeri 20 Palembang	Rp.	5.400.000,00
- SMK Negeri 1 Bayung Lencir	Rp.	5.400.000,00
- SMK Negeri 1 Martapura	Rp.	<u>21.600.000,00</u>
Jumlah		44.770.584,00

Mutasi saldo kas program sekolah gratis terdapat pada tabel berikut.

Tabel 91. Rincian Mutasi Kas di Bendahara PSG

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1. (1.a+1.b)	Saldo Awal Kas Rek. Bank (Audited) Tahun 2020	6.349.394.552,66
1.a	- Saldo Kas 2020	4.623.732.875,08
1.b	-Utang Pajak 2020	1.725.661.677,58
2.(2.a+2.b)	Koreksi Saldo Awal	(59.326.715,98)
2.a	- Koreksi Saldo Kas 2020	(78.680.639,98)
2.b	- Koreksi Saldo Utang Pajak 2020	19.353.924,00
3.(3.a+3.b)	Saldo Kas setelah Koreksi	6.290.067.836,68
3.a	-Saldo Kas 2020	4.545.052.235,10
3.b	-Utang Pajak 2020	1.745.015.601,58
4.	Penggunaan saldo kas 2020 untuk Realisasi belanja 2021	3.622.421.376,00
5.	Pengembalian Saldo Kas 2020 Ke RKUD	819.585.447,10
6.	Pembayaran Utang Pajak 2020	1.725.811.555,58
7.(3.a-4-5)	Sisa Kas 2020	103.045.412,00
8(3.b-6)	Sisa Utang Pajak 2020	19.204.046,00
9.	Penerimaan Salur SP2D 2021	204.453.995.000,00
10.	SPJ belanja 2021	204.295.321.335,00
11.	Kontrapos 2021	133.494.165,00
12(9-10-11)	Sisa Penyaluran 2021 yg masih ada di Sekolah	25.179.500,00
13.	Penerimaan Pajak	8.582.906.405,00
14.	Pengeluaran Pajak	8.566.865.025,00
15.(13-14)	Pajak 2021 Belum Disetor	16.041.380,00

No	Uraian	Jumlah
16.	Penerimaan jasa giro yang belum disetor ke RKUD	63.166,00
17(7+8+12+15+16)	Saldo Akhir Kegiatan program Sekolah Gratis	163.533.504,00
18.	Utang PFK lainnya (gaji peg. Honorer non keg PSG, uang pribadi pegawai dll)	44.770.584,00
19 (17+18)	Saldo Akhir KAS PSG NERACA	208.304.088,00
	-Saldo Rekening Tabungan Akhir	163.550.179,00
	-Saldo Tunai Di Bendahara	9.508.483,00
	-Saldo Pajak Yg Belum Disetor	35.245.426,00

Saldo akhir kas PSG sebesar Rp208.304.088,00 terdapat pada masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92. Daftar Saldo Rekening PSG pada Sekolah

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2021	Saldo Tunai di bendahara	Utang Pajak	Jumlah
1	SLBN Pagar Alam	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
2	SLBN Sekayu	13.610.000,00	0,00	0,00	13.610.000,00
3	SLBN Kayuagung	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	SLBN Muara Enim	12.330.000,00	0,00	0,00	12.330.000,00
5	SMAN 3 Banyuasin III	584,00	0,00	0,00	584,00
6	SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu	0,00	18.609,00	2.028.735,00	2.047.344,00
7	SMAN 1 Merapi Selatan	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	SMAN 1 Batang Hari Leko	0,00	0,00	5.281.281,00	5.281.281,00
9	SMAN 2 Lalan	0,00	0,00	8.392.530,00	8.392.530,00
10	SMAN 1 Kandis	0,00	0,00	2.981.100,00	2.981.100,00
11	SMAN 2 Kayuagung	0,00	0,00	11.315.780,00	11.315.780,00
12	SMAN 6 Ogan Komering Ulu	0,00	120.067,00	0,00	120.067,00
13	SMAN 14 Ogan Komering Ulu	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
14	SMAN 1 Pulau Beringin	0,00	399.500,00	0,00	399.500,00
15	SMAN 1 Simpang	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
16	SMAN 1 Mekakau Ilir	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SMAN 1 Ranau Selatan	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
18	SMAN 1 Martapura	0,00	205,00	0,00	205,00
19	SMAN 1 Pagar Alam	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	SMAN 20 Palembang	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
21	SMAN 05 Palembang	6.939,00	0,00	0,00	6.939,00
22	SMAN 03 Palembang	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
23	SMAN 13 Palembang	0,00	0,00	1.261.500,00	1.261.500,00
24	SMKN Muara Kelingi	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
25	SMKN 1 Sungai Rotan	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
26	SMKN 1 Pemulutan	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	SMKN 1 Bayung Lencir	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
28	SMKN 1 Belida Darat	0,00	76.050,00	0,00	76.050,00
29	SMKN Pertanian 2 Tugumulyo	105.100.171,00	0,00	0,00	105.100.171,00
30	SMKN 1 Air Kumbang	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00
31	SMKN 1 Martapura	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
32	SMKN 2 Talang Ubi	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00

No	Sekolah	Saldo rek. Giro per 31 Des. 2021	Saldo Tunai di bendahara	Utang Pajak	Jumlah
33	SMKN Purwodadi	25.145,00	0,00	0,00	25.145,00
34	SMKN 1 Tulung Selapan	0,00	4.912.615,00	0,00	4.912.615,00
35	SMKN 3 Prabumulih	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00
Jumlah		163.550.179,00	9.508.483,00	35.245.426,00	208.304.088,00

f. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.478.078.209,00 dan Rp9.506.244.904,29. Saldo Kas Lainnya Tahun 2021 merupakan sisa Dana BOS belum salur (kas yang dibatasi penggunaannya) sebesar Rp9.430.187.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, saldo kas pada sub rekening 140-000-00001 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp47.045.250,00 dan saldo rekening *Dormant* pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 93. Rincian Kas Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal 1 Januari 2021	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir per 31 Des 2021
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	9.505.398.945,29	47.045.250,00	75.211.945,29	9.477.232.250,00
-	Kas yang dibatasi penggunaannya	9.430.187.000,00	0,00	0,00	9.430.187.000,00
-	Saldo kas yang terdapat pada Sub-Rekening 140-000-00001	75.211.945,29	47.045.250,00	75.211.945,29	47.045.250,00
2.	Dinas Kesehatan	845.959,00	0,00	0,00	845.959,00
-	Pemegang Kas Gaji BKOKM	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Program Gigi	47.620,00	0,00	0,00	47.620,00
-	Klaim Obat Askes RSKMM	572.861,00	0,00	0,00	572.861,00
-	UPTD BKOKM	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
-	RS Khusus Paru	478,00	0,00	0,00	478,00
Jumlah		9.506.244.904,29	47.045.250,00	75.211.945,29	9.478.078.209,00

2. Piutang

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baik berupa penerimaan kas maupun yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas atau tagihan-tagihan lain. Saldo piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp28.199.000.660,96 dan Rp46.695.097.231,77 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 94. Realisasi Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		1 Januari 2021	Tambah	Kurang	31 Desember 2021
1,	Piutang Pendapatan	11.483.626.887,25	40.713.296.909,50	25.686.393.781,86	26.510.530.014,89

No	Jenis Piutang	Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir
		1 Januari 2021	Tambah	Kurang	31 Desember 2021	
-	Piutang Pajak	0,00	1.027.224.000,00	0,00		1.027.224.000,00
-	Piutang Retribusi	2.174.347.000,00	753.052.157,00	51.065.000,00		2.876.334.157,00
-	Piutang Lain-lain PAD yang sah	9.309.279.887,25	38.933.020.752,50	25.635.328.781,86		22.606.971.857,89
2	Piutang Lainnya	35.211.470.344,52	580.054.070,00	34.103.053.768,45		1.688.470.646,07
	Total	46.695.097.231,77	41.293.350.979,50	59.789.447.550,31		28.199.000.660,96

Penjelasan atas piutang pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Piutang Pajak

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.027.224.000,00 merupakan pendapatan PBB-KB oleh PT Cahaya Petro Energi yang belum dipungut sampai 31 Desember 2021 dan telah dibayarkan pada tanggal 12 April 2022.

b. Piutang Retribusi

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.876.334.157,00 dengan mutasi piutang sebagai berikut.

Tabel 95. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Piutang retribusi	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
Sekretariat Daerah					
1	Piutang Retribusi - PT Sriwijaya Optimis Mandiri	258.282.000,00	0,00	0,00	258.282.000,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2010 s/d 1 April 2011	86.070.500,00	0,00	0,00	86.070.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2011 s/d 1 April 2012	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2012 s/d 1 April 2013	86.070.500,00	0,00	0,00	86.070.500,00
-	Sewa Mess Pertiwi 1 April 2013 s/d 1 April 2014	86.070.500,00	0,00	0,00	86.070.500,00
2	Piutang Retribusi - PT Puti Ayu Ardiandi	1.495.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.490.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2014	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2015	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
-	Sewa Master Film Gending Sriwijaya Tahun 2016	495.000.000,00	0,00	5.000.000,00	490.000.000,00
3	Piutang Retribusi - PD Swarna Dwipa	405.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	575.000.000,00
-	Sewa Gedung Asrama Haji Tahun 2018	405.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	575.000.000,00
4	Piutang Retribusi - Dharma Wanita Prov, Sumsel	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Sewa Gedung Rajawali	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Retribusi - PT Karya Baru Manunggal	16.065.000,00	16.065.000,00	16.065.000,00	16.065.000,00

No	Piutang retribusi	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
6	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	0,00	521.987.157,00	0,00	521.987.157,00
-	Piutang Retribusi-Alat Berat	0,00	506.687.157,00	0,00	506.687.157,00
-	Piutang Retribusi-Laboratorium	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Piutang Retribusi-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Jumlah	2.174.347.000,00	753.052.157,00	51.065.000,00	2.876.334.157,00

c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.606.971.857,89 dan Rp9.309.279.887,25 yang terdiri dari saldo piutang pendapatan BLUD, piutang pendapatan atas pemanfaatan Bangun Guna Serah (BSG) dan piutang pendapatan bunga PBBKB. Rincian mutasi piutang lain-lain PAD yang sah terdapat pada tabel tersebut.

Tabel 96. Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Piutang Lain-Lain PAD	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
A	Piutang Pendapatan BLUD				
1,	kegiatan Operasional RS Ernaldi Bahar	2.675.996.999,00	23.695.341.396,00	20.544.938.615,00	5.826.399.780,00
2,	Kegiatan Operasional RS Khusus Mata	899.692.700,00	1.961.561.940,00	899.692.700,00	1.961.561.940,00
3,	Kegiatan Operasional RS Paru	22.638.900,00	29.303.500,00	31.248.900,00	20.693.500,00
4,	Kegiatan Operasional RS Gigi dan Mulut	341.325.800,00	317.162.100,00	344.496.500,00	313.991.400,00
5,	Kegiatan Operasional RS Siti Fatimah	668.060.648,86	6.480.864.900,50	668.060.648,86	6.480.864.900,50
6,	Kegiatan Operasional UPTD Lab Lingkungan Hidup DLHP	3.220.551.400,00	3.916.255.000,00	3.146.891.400,00	3.989.915.000,00
	Jumlah Piutang Pendapatan BLUD	7.828.266.447,86	36.400.488.836,50	25.635.328.763,86	18.593.426.520,50
B	Piutang Pendapatan atas Pemanfaatan BOT BPKAD				
1	PT,Griya inti sejahtera insani(Palembang icon)	0,00	562.281.762,00	0,00	562.281.762,00
2	PT,Paragon mall(Underground mall/PSX)	1.028.684.432,39	128.895.200,00	0,00	1.157.579.632,39
3	Kerja sama Pemanfaatan Bowling center	452.329.007,00	949.931.172,00	0,00	1.402.260.179,00
4	PT Rajawali Jasa Trirama (Sekolah Palembang Harapan)	0,00	543.000.000,00	0,00	543.000.000,00
	Jumlah Piutang BOT BPKAD	1.481.013.439,39	2.184.108.134,00	0,00	3.665.121.573,39
C	Pengembalian kelebihan	0,00	18,00	18,00	0,00

No	Piutang Lain-Lain PAD	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
	pembayaran pajak pada Dinas Kearsipan				
D	Piutang bunga PBB-KB	0,00	348.423.764,00	0,00	348.423.764,00
	Jumlah Piutang lain-lain PAD	9.309.279.887,25	38.933.020.734,50	25.635.328.781,86	22.606.971.857,89

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.688.470.646,07 dan Rp35.211.470.344,52 terdiri dari piutang Jamsoskes kepada Kabupaten/Kota, piutang pajak ganda dan potongan administrasi bank, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, Piutang TKI dan uang muka dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 97. Rincian Mutasi Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Piutang Lainnya	Piutang Audited Th 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi Kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	Piutang Jamsoskes	34.079.235.627,45	0,00	34.079.235.627,45	0,00
2	Piutang Pajak Ganda dan potongan administrasi Bank	4.218.141,00	0,00	4.218.141,00	0,00
3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - PPKD	19.030.000,00	0,00	1.000.000,00	18.030.000,00
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - PPKD	1.000.892.776,07	0,00	8.600.000,00	992.292.776,07
5	Piutang TKI - PPKD	108.093.800,00	0,00	10.000.000,00	98.093.800,00
6	Uang muka	0,00	580.054.070,00	0,00	580.054.070,00
	Jumlah	35.211.470.344,52	580.054.070,00	34.103.053.768,45	1.688.470.646,07

- 1) Piutang dana *sharing* Jamsoskes per 31 Desember 2020 pada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp34.079.235.627,45 berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900.440/935/KES/V/2019 Tanggal 5 Maret 2019 tentang hasil rekonsiliasi Jamsoskes Sumsel Semesta Tahun 2018 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 98. Rincian Mutasi Piutang Jamsoskes

(dalam rupiah)

No	Piutang Jamsoskes	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	OKI	7.008.725.997,33	0,00	7.008.725.997,33	0,00
2	Ogan Ilir	1.147.095.343,97	0,00	1.147.095.343,97	0,00
3	Palembang	20.539.843.138,33	0,00	20.539.843.138,33	0,00
4	OKU	1.791.649.811,32	0,00	1.791.649.811,32	0,00
5	Musi Rawas	2.043.506.150,00	0,00	2.043.506.150,00	0,00
6	Muara Enim	7.019.820,00	0,00	7.019.820,00	0,00
7	Empat Lawang	1.541.395.366,50	0,00	1.541.395.366,50	0,00
	Jumlah	34.079.235.627,45	0,00	34.079.235.627,45	0,00

- 2) Piutang atas pembayaran pajak ganda dan potongan biaya administrasi Bank sebesar Rp4.218.141,00 dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 99. Rincian Mutasi Piutang Pajak Ganda dan Potongan Administrasi Bank

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Ganda dan Potongan Administrasi Bank	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	Diskominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.188.141,00	0,00	4.188.141,00	0,00
3	Sekretariat DPRD (dibukukan di PPKD)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Jumlah		4.218.141,00	0,00	4.218.141,00	0,00

- 3) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp18.030.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 100. Rincian Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

(dalam rupiah)

No	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - PPKD	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	Penjualan Mobil Toyota Kijang KF71, Tahun Kendaraan 2000, Nomor Polisi BG2332LZ a.n Ahmad Gufron (SK Nomor 689/KPTS/BPKAD/2014)	19.030.000,00	0,00	1.000.000,00	18.030.000,00
Jumlah		19.030.000,00	0,00	1.000.000,00	18.030.000,00

- 4) Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp992.292.776,07 dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 101. Rincian Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	TP.an.Abdullah Sani Ar	258.543.507,07	0,00	0,00	258.543.507,07
2	Tp.an. Syahrul Somad, SH	370.765.269,00	0,00	0,00	370.765.269,00
3	TGR.an. Drs. Darwin Subandi (Alm)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4	TGR.an.Djunaidi	18.359.000,00	0,00	0,00	18.359.000,00
5	TGR.an.Drs. Budiman Zen	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6	TGR.an.Ir. Nandang Kusdinar, M. Si (Alm)	94.400.000,00	0,00	0,00	94.400.000,00
7	TGR.an.Taniri	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
8	TGR.an.A. Kadir Luthfie (Alm)	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
9	TGR.an.Ir. Syahriar Agustoni	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00
10	TGR.an.Ir. H. Trisbani Arief	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00
11	TGR.an.Drs. Zakaria Semendawai	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00
12	TGR.an.Drs. Farouk Barry, M. Si	65.200.000,00	0,00	0,00	65.200.000,00
13	TGR.an.Tarli Senuling, S. Sos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14	TGR.an.Ahdiat, SP. MM	9.425.000,00	0,00	500.000,00	8.925.000,00
15	TGR.an.R.A. Syamsul Bahri, MM (Pensiun Oktober 2012)	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
16	TGR.an.Ir. Lihandani	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00
17	TGR.an.Ir. Zulfikar, MM	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
18	TGR.an.Ahmad Nashir, SE. Ak	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	-
Jumlah		1.000.892.776,07	0,00	8.600.000,00	992.292.776,07

- 5) Piutang TKI sebesar Rp98.093.800,00 dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 102. Rincian Mutasi Piutang TKI

(dalam rupiah)

No	Piutang TKI	Piutang Audited Tahun 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Piutang Bruto 2021
1	Ir. H. Helman Effendi	14.200.000,00	0,00	10.000.000,00	4.200.000,00
2	Mustofa Tenar	46.920.100,00	0,00	0,00	46.920.100,00
3	Drs. H. Syafei Alim, MA.	11.877.700,00	0,00	0,00	11.877.700,00
4	Amrullah H. Munir	35.096.000,00	0,00	0,00	35.096.000,00
Jumlah		108.093.800,00	0,00	10.000.000,00	98.093.800,00

- 6) Uang muka sebesar Rp580.054.070,00 merupakan saldo uang muka yang menjadi temuan BPK terdapat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2022

3. Akumulasi Penyisihan Piutang

Saldo Akumulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.441.184.050,08 dan Rp3.803.231.913,37 yang merupakan penyisihan atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, dan Piutang Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 103. Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Pihak Ketiga	Saldo Piutang Bruto 2021	Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang				Piutang Netto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
A	Piutang Pajak	1.027.224.000,00					
	Badan Pendapatan Daerah	1.027.224.000,00	5.136.120,00	0,00	0,00	0,00	1.022.087.880,00
B	Piutang Retribusi	2.876.334.157,00	3.765.260,79	37.500.000,00	245.000.000,00	1.258.282.000,00	1.331.786.896,21
	Sekretariat Daerah	2.339.347.000,00	1.080.325,00	37.500.000,00	245.000.000,00	1.258.282.000,00	797.484.675,00
	PU Bina Marga dan Tata Ruang	521.987.157,00	2.609.935,79	0,00	0,00	0,00	519.377.221,21
	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	14.925.000,00
C	Piutang LLPAD						
C,I	Piutang Pendapatan BLUD						
1	RS Ernaldi Bahar	5.826.399.780,00	24.608.407,22	11.122.132,10	60.921.881,50	671.653.252,00	5.058.094.107,18
2	RS Khusus Mata	1.961.561.940,00	9.807.809,70	0,00	0,00	0,00	1.951.754.130,30
3	RS Paru	20.693.500,00	103.467,50	0,00	0,00	0,00	20.590.032,50
4	RS Gigi dan Mulut	313.991.400,00	1.569.957,00	0,00	0,00	0,00	312.421.443,00
5	RS Siti Fatimah	6.480.864.900,50	32.192.487,63	697.500,03	17.696.187,31		6.430.278.725,53

No	Pihak Ketiga	Saldo Piutang Bruto 2021	Daftar Perhitungan Penyisihan Piutang				Piutang Netto
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
			0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	
6	UPTD Lab Lingkungan Hidup DLHP	3.989.915.000,00	19.581.275,00	2.854.500,00	22.557.500,00	0,00	3.944.921.725,00
	Pendapatan BLUD	18.593.426.520,50	87.863.404,05	14.674.132,13	101.175.568,81	671.653.252,00	17.718.060.163,51
C,II	Piutang BOT BPKAD						
1	PT,Griya inti sejahtera insani(Palembang icon)	562.281.762,00	2.811.409,00	0,00	0,00	0,00	559.470.353,00
2	PT,Paragon mall(Underground mall/PSX)	1.157.579.632,39	344.476,00	11.000.000,00	84.277.527,00	750.129.379,00	311.828.250,39
3	KERJA sama Pemanfaatan Bowling center	1.402.260.179,00	4.749.656,00	45.232.900,70	0,00	0,00	1.352.277.622,30
4	PT, Rajawali Jasa Tritama (Sekolah Palembang Harapan)	543.000.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	538.470.000,00
	JUMLAH PIUTANG BOT BPKAD	3.665.121.573,39	12.435.541,00	56.232.900,70	84.277.527,00	750.129.379,00	2.762.046.225,69
C,III	Piutang Bunga PBB-KB	348.423.764,00	1.742.118,82	0,00	0,00	0,00	346.681.645,18
	Jumlah Piutang LLPAD	22.606.971.857,89	110.942.444,66	108.407.032,83	430.453.095,81	2.680.064.631,00	20.480.106.389,20
II	Piutang Lainnya						
A,	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	18.030.000,00	0,00
B,	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	992.292.776,07	0,00	0,00	0,00	992.292.776,07	0,00
C,	Piutang TKI	98.093.800,00	0,00	0,00	0,00	98.093.800,00	0,00
D,	Uang Muka	580.054.070,00	2.900.270,00	0,00	0,00	0,00	577.153.800,00
	Jumlah Piutang Lainnya	1.688.470.646,07	2.900.270,00	0,00	0,00	1.108.416.576,07	577.153.800,00
Jumlah Piutang dan Penyisihan Piutang		28.199.000.660,96	113.842.714,66	108.407.032,83	430.453.095,81	3.788.481.207,07	23.757.816.610,59

4. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.718.075.722,06 dan Rp2.600.265.276,57. yang terdiri dari Beban Sewa dan Beban Asuransi yang belum jatuh tempo pada beberapa SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 104. Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	SKPD	Total
1	Dinas Kesehatan (SKPD)	54.719.021,60
2	RS.DR Ernadi bahar (BLUD)	48.333.724,55
3	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	189.884.148,06

No	SKPD	Total
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	79.921.830,06
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	49.205.505,90
6	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	7.695.674,28
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (SKPD)	3.391.735,36
8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (BLUD)	22.287.964,64
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23.406.198,83
10	Dinas Perhubungan	29.718.654,76
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.781.793,20
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	60.024.657,68
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.832.590,94
14	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	48.912.879,18
15	Dinas Perkebunan	40.100.724,03
16	Dinas Kehutanan	4.810.806,41
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Miner	8.013.699,30
18	Dinas Perdagangan	28.097.312,57
19	Inspektorat	10.286.814,24
20	Sekretariat DPRD	233.974.862,10
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.996.826,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	26.066.050,96
23	Badan Pendapatan Daerah	1.894.119.682,97
24	Badan Kepegawaian Daerah	20.461.966,72
25	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	52.654.019,37
26	Sekretariat Daerah	742.376.578,35
Jumlah		3.718.075.722,06

5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp99.574.950.539,99 dan Rp93.859.792,57. Saldo Persediaan tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun dengan rincian persediaan per jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 105. Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.380.800,00	0,00	11.380.800,00
2	Bahan Kimia	1.446.665.422,15	1.462.988.808,50	(16.323.386,35)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	23.369.315,00	138.915.000,00	(115.545.685,00)
4	Bahan Baku	52.242.600,00	578.165.050,00	(525.922.450,00)
5	Persediaan Bibit Tanaman	35.000,00	80.000,00	(45.000,00)
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	950.000,00	0,00	950.000,00
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.423.032.000,00	1.229.099.625,00	193.932.375,00
8	Bahan Lainnya	3.453.957.627,00	3.922.419.883,35	(468.462.256,35)
9	Alat Tulis Kantor	3.081.075.986,22	3.764.689.029,00	(683.613.042,78)
10	Bahan Cetak	7.236.174.342,00	6.557.722.492,00	678.451.850,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan
11	Benda Pos	35.263.563,00	18.521.000,00	16.742.563,00
12	Perabot Kantor	95.594.349,00	694.822.912,00	(599.228.563,00)
13	Alat Listrik	379.020.628,00	346.307.119,00	32.713.509,00
14	Perlengkapan Dinas	19.878.750,00	0,00	19.878.750,00
15	Suvenir/Cendera Mata	33.370.000,00	0,00	33.370.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.460.198.255,00	0,00	1.460.198.255,00
17	Obat	77.395.057.406,62	72.811.423.118,72	4.583.634.287,90
18	Obat-obatan Lainnya	1.369.238.570,00	0,00	1.369.238.570,00
19	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.590.366.625,00	1.395.748.130,00	194.618.495,00
20	Persediaan Bahan Makanan dan Minuman	0,00	631.957.825,00	(631.957.825,00)
21	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	347.084.870,00	0,00	347.084.870,00
22	Pakan	120.994.431,00	124.419.600,00	(3.425.169,00)
23	Persediaan Pakaian Pasien	0,00	182.363.200,00	(182.363.200,00)
JUMLAH		99.574.950.539,99	93.859.642.792,57	5.715.307.747,42

Rincian persediaan masing-masing SKPD pada **Lampiran 14**.

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.7.442.535.027.852,15. Jika dibandingkan dengan nilai investasi Tahun 2020 sebesar Rp.7.267.323.138.467,60 terdapat peningkatan sebesar Rp. 175.211.889.384,55 atau 2,41%. Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen yang dinilai dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 106. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama Perusahaan	% Ke pemili kan	Metode Penilaian	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi	%
1	PT Bank Sumsel Babel	28,37%	Ekuitas	755.803.470.115,17	882.065.495.348,09	126.262.025.232,93	16,71%
2	PT. Sumsel Energi Gemilang/ eks PD Pertambangan dan Energi	100,00%	Ekuitas	98.472.050.245,00	99.415.772.015,00	943.721.770,00	0,96%
3	PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/ Eks PD Perhotelan Swarna Dwipa	59,62%	Ekuitas	487.035.994.168,80	488.609.821.301,17	1.573.827.132,37	0,32%
4	PD Prodexim	100,00%	Ekuitas	5.444.154.215,00	5.444.154.215,00	0,00	0,00%
5	BPR Sumatera Selatan	95,81%	Ekuitas	94.648.012.853,08	96.250.041.394,66	1.602.028.541,59	1,69%
6	PT Penjaminan Kredit Daerah	99,85%	Ekuitas	137.795.955.315,96	148.595.386.750,82	10.799.431.434,86	7,84%
7	PD Industri Grafika Meru	100,00%	Ekuitas	377.682.795,00	377.682.795,00	0,00	0,00%
8	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	100,00%	Ekuitas	0,00	63.184.439.034,70	63.184.439.034,70	0,00%
9	PT Jakabaring Sport City	99,97%	Ekuitas	5.667.686.792.207,60	5.642.142.730.677,71	(25.544.061.529,89)	(0,45%)
10	PT. Syailendra Investasi Gemilang 7	100,00%	Ekuitas	1.000.000.000,00	133.014.179,00	(866.985.821,00)	(86,70%)
11	PT. Sriwijaya Argo Industri (SAI)	100,00%	Ekuitas	4.114.901.552,00	1.372.365.141,00	(2.742.536.411,00)	(66,65%)

No	Nama Perusahaan	% Ke pemilikan	Metode Penilaian	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi	%
12	PT Asuransi Bangun Askrida	0,21%	Biaya	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00%
13	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	20,00%	Biaya	2.058.000.000,00	2.058.000.000,00	0,00	0,00%
14	PT Tambang Batubara Bukit Asam	1,06%	Biaya	12.256.125.000,00	12.256.125.000,00	0,00	0,00%
JUMLAH				7.267.323.138.467,60	7.442.535.027.852,15	175.211.889.384,55	2,41%

Investasi Jangka Panjang dalam penyertaannya ditetapkan dalam peraturan daerah dengan keterangan pada tabel berikut.

Tabel 107. Peraturan Daerah tentang Investasi Permanen

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
1	Bank Sumsel Babel	6 Tahun 2000	Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas
		16 Tahun 2005	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas
		14 Tahun 2011	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		15 Tahun 2016	Perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
2	PD Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG)	7 Tahun 2000	Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		37 Tahun 2001	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		12 Tahun 2017	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang
		5 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang
3	PD Industri Grafika Meru	6 Tahun 1982	Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
		3 Tahun 2010	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
		10 Tahun 2012	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru
4	PD Perhotelan Swarna Dwipa	1 Tahun 1962	Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		2 Tahun 1988	Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		8 Tahun 1990	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		2 Tahun 2005	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		9 Tahun 2013	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
		15 Tahun 2014	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa
10 Tahun 2015	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang		

No	Nama BUMD	Nomor	Tentang
		19 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa menjadi Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
5	PD Prodexim	7 Tahun 2000	Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		277 Tahun 1999	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi
		10 Tahun 1990	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		5 Tahun 1998	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		14 Tahun 2000	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim
		1 Tahun 2010	Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Prodexim
6	PT Asuransi Bangun Askrida	4 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada PT Asuransi Bangun Askrida
		10 Tahun 2013	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham Pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
7	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	14 Tahun 2002	Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas untuk Pembangunan Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
8	BPR Sumatera Selatan	7 Tahun 2004	Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		5 Tahun 2009	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		13 Tahun 2011	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan
		19 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015
9	PT Penjaminan Kredit Daerah	9 Tahun 2012	Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	4 Tahun 2007	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
11	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	5 Tahun 2016	Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan
		13 Tahun 2016	Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan
		11 Tahun 2017	Perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan
12	PT Jakabaring Sport City	8 Tahun 2017	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City
13	PT Syailendra Investasi Gemilang 7	6 Tahun 2016	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
14	PT Sriwijaya Agro Industri	12 tahun 2020	Pendirian Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri

a. PT Bank Sumsel Babel (PT BSB)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp430.000.565.445,19 kepada PT BSB per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 28,37% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari

penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT BSB Tahun 2021 adalah sebesar Rp882.065.495.348,09 meningkat sebesar Rp126.262.025.232,93 atau 15,72% dari nilai Investasi Tahun 2019 sebesar Rp755.803.470.115,17 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	28,37%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp755.803.470.115,17
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp50.000.000.000,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp133.128.974.716,00
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp56.866.949.483,07
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp126.262.025.232,93
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp882.065.495.348,09
% Kenaikan	:	16,71%

b. PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG) / Eks PD Pertambangan dan Energi (PD PDE)

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan daerah PD PDE yang telah diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum perusahaan daerah ini berdampak pada peningkatan nilai perolehan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) pada PT SEG sehingga menjadi sebesar Rp99.780.000.000,00, dengan nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SEG Tahun 2021 adalah sebesar Rp99.415.772.015,00 meningkat sebesar Rp943.721.770,00 atau 0,96% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp98.472.050.245,00 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	100,00%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp98.472.050.245,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp943.721.770,00
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp943.721.770,00
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp99.415.772.015,00
% Kenaikan	:	0,96%

c. PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/ Eks PD Perhotelan Swarna Dwipa

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan daerah PD Perhotelan Swarna Dwipa yang telah diubah badan hukumnya menjadi PT SDSG. Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp305.911.984.402,00 kepada PT SDSG per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 59,62% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SDSG Tahun 2021 adalah sebesar Rp493.409.446.623,72 meningkat sebesar Rp6.373.452.454,93 atau 1,31% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp487.035.994.168,80 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	59,62%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp487.035.994.168,80
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp5.000.000.000,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp(3.426.172.867,63)
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp1.573.827.132,37
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp488.609.821.301,17
% Kenaikan	:	0,32%

d. PD Prodexim

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp23.571.538.281,63 kepada PD Prodexim per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PD Prodexim Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.444.154.215,00.

e. BPR Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp113.868.389.000,00 kepada BPR Sumatera Selatan per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 95,81% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada BPR Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp96.250.041.394,66 meningkat sebesar Rp1.602.028.541,59 atau 1,69% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp94.648.012.853,08 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	95,81%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp94.648.012.853,08
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp1.602.028.541,59

Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp1.602.028.541,59
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp96.250.041.394,66
% Kenaikan	:	1,69%

f. PT Penjaminan Kredit Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp135.050.000.000,00 kepada PT Penjaminan Kredit Daerah per 31 Desember 2021 sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 99,85% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT Penjaminan Kredit Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp148.595.386.750,82 meningkat sebesar Rp10.799.431.434,86 atau 7,84% dari nilai Investasi Tahun 2021 sebesar Rp137.795.955.315,96 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	99,85%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp137.795.955.315,96
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp10.799.431.434,86
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp10.799.431.434,86
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp148.595.386.750,82
% Kenaikan	:	7,84%

g. PD Industri Grafika Meru

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PD Industri Grafika Meru sebesar Rp377.682.795,00 per 31 Desember 2020 merupakan nilai investasi yang belum diserahkan oleh PD Industri Grafika Meru. Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru. Namun sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan Daerah ini belum melakukan proses likuidasi dan belum menyerahkan aset yang telah disertakan ke PD Industri Grafika Meru tersebut.

h. PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp61.047.779.395,70 kepada PT SMS per 31 Desember 2021 sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode

Ekuitas. Penyertaan modal PT SMS terdiri dari Setoran modal Tunai sebesar Rp23.293.761.283,00 dan dalam bentuk aset tetap Tanah sebesar Rp37.754.018.112,70 Terhadap catatan tersebut maka nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SMS Tahun 2021 adalah sebesar Rp63.184.439.043,70 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	100,00%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp0,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp53.754.018.112,70
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp9.430.420.922,00
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp63.184.439.034,70
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp63.184.439.034,70
% Kenaikan	:	0,00%

i. PT Jakabaring Sport City

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp5.802.498.385.000,00 kepada PT Jakabaring Sport City per 31 Desember 2021 sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 99,97% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT Jakabaring Sport City Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.642.549.789.298,60 menurun sebesar Rp25.137.002.909,00 atau 0,44% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp5.667.686.792.207,60 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	99,97%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp5.667.686.792.207,60
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Peng. Pembiayaan 2021	:	Rp15.000.000.000,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	(Rp40.544.061.529,89)
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	(Rp25.544.061.529,89)
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp5.642.142.730.677,71
% Kenaikan	:	(0,45%)

j. PT Syailendra Investasi Gemilang 7 (PT SIG 7)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PT SIG 7 per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan

pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SIG 7 Tahun 2021 adalah sebesar Rp133.014.179,00 menurun sebesar Rp866.985.821,00 atau -86,70% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	100,00%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp1.000.000.000,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	(Rp866.985.821,00)
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	(Rp866.985.821,00)
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp133.014.179,00
% Kenaikan	:	(86,70%)

k. PT Sriwijaya Argo Industri (SAI)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp4.114.901.552,00 kepada PT SAI per 31 Desember 2021, sehingga nilai kepemilikan Pemprov Sumsel menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemprov Sumsel pada PT SAI Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.372.365.141,00 menurun sebesar Rp2.742.536.411,00 atau -66,65% dari nilai Investasi Tahun 2020 sebesar Rp4.114.901.552,00 dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	100,00%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp4.114.901.552,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	(Rp2.742.536.411,00)
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp0,00
Peningkatan/(penurunan)	:	(Rp2.742.536.411,00)
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp1.372.365.141,00
% Kenaikan	:	(66,65%)

l. PT Asuransi Bangun Askrida

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp630.000.000,00 kepada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2021, berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 0,21% dari total saham sebesar Rp297.510.000.000,00 dan

merupakan pemegang saham minoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Biaya dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	0,21%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp630.000.000,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp95.458.203,09
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp94.350.095,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp0,00
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp630.000.000,00
% Kenaikan	:	0,00%

m. PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.058.000.000,00 kepada PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna per 31 Desember 2021. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 20% dari total saham Perusahaan sebesar Rp10.290.000.000,00 dan merupakan pemegang saham minoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Biaya, dengan rincian sebagai berikut.

Nilai % Kepemilikan	:	20,00%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp2.058.000.000,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp0,00
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp792.330.000,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp0,00
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp2.058.000.000,00
% Kenaikan	:	0,00%

n. PT Tambang Batubara Bukit Asam

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp12.256.125.000,00 kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam per 31 Desember 2021. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 1,06% dari total saham sebesar Rp1.152.066.000.000,00 dan merupakan pemegang saham Minoritas dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 106.575.000 lembar saham atau 0,93% dari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar dengan metode penilaian investasi menggunakan metode Biaya.

Nilai % Kepemilikan	:	1,06%
Nilai Investasi Per 31 Des 2020	:	Rp12.256.125.000,00
Penambahan	:	
Koreksi Ekuitas	:	Rp0,00
Penyertaan Modal/Pengel Pembiayaan 2021	:	Rp0,00
Bagian Laba/Rugi Tahun 2021	:	Rp45.273.681.022,83
Pengurangan	:	
Deviden	:	Rp7.960.554.081,00
Peningkatan/(penurunan)	:	Rp0,00
Nilai Investasi Per 31 Des 2021	:	Rp12.256.125.000,00
% Kenaikan	:	0,00%

Rincian perhitungan investasi jangka panjang terdapat pada **Lampiran 15**.

4.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp22.563.173.385.495,61 dan Rp21.371.820.120.036,50. Nilai Aset tetap tersebut beserta akumulasi penyusutan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 108. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	11.329.490.821.739,56	10.573.586.020.615,60	755.904.801.123,95
2	Peralatan dan Mesin	2.768.373.058.986,04	2.460.507.732.869,82	307.865.326.116,22
3	Gedung dan Bangunan	4.462.812.938.458,99	4.215.821.795.215,00	246.991.143.243,99
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.991.502.065.603,37	12.175.895.778.611,60	815.606.286.991,70
5	Aset Tetap Lainnya	671.272.671.147,30	793.406.131.269,25	-122.133.460.121,95
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	323.103.432.987,30	100.163.923.630,28	222.939.509.357,02
7	Akumulasi Penyusutan	(9.983.381.603.426,95)	(8.947.561.262.175,54)	(1.035.820.341.251,41)
	Jumlah	22.563.173.385.495,61	21.371.820.120.036,50	1.191.353.265.459,01

Penjelasan pos-pos aset tetap pada 4.3.1.3 sebagai berikut.

1. Aset Tetap Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp10.573.586.020.615,60 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp11.329.490.821.739,56 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 109. Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 1 Januari 2021 (Audited)	10.573.586.020.615,60
1	Penambahan:	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	70.853.405.527,00
	b. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	396.460.000,00
	c. Hibah	429.646.988,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
	d. Kapitalisasi selain belanja modal	97.130.000,00
	e. Mutasi Antar OPD	278.817.634.630,38
	f. Reklasifikasi antar KIB	7.364.045.000,00
	g. Tindaklanjut temuan BPK RI	339.481.834.428,58
	h. Penilaian bernilai Rp0,00 dengan NJOP	212.104.714.500,00
	Jumlah	909.544.871.073,96
2	Pengurangan:	
	a. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap	(232.096.950,00)
	b. Pembayaran hutang tahun lalu yang asetnya telah dicatat	(8.343.245.000,00)
	c. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal 2021	(172.868.000,00)
	d. Penyertaan modal	(2.541.900.000,00)
	e. Penghapusan aset tetap tanah	(24.942.000.000,00)
	f. Mutasi antar OPD	(117.407.960.000,00)
	Jumlah	(153.640.069.950,00)
3	Saldo per 31 Desember 2021	11.329.490.821.739,56

- a. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2021 sebesar Rp909.544.871.073,95 antara lain:
- 1) Realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp70.853.405.527,00 berasal dari:
 - a) Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp67.583.685.577,00
 - b) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp3.269.719.950,00
 - 2) Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp396.460.000,00 terdapat di Sekretariat DPRD berupa pengerasan halaman yang di kapitalisasi ke aset tetap tanah sesuai Permendagri 108 Tahun 2016.
 - 3) Hibah tanah sebesar Rp429.646.988,00 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp 35.301.000,00 merupakan hibah dari Pemkab Muara Enim berupa tanah di UPTD Kab Muara Enim;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp35.000.000,00 merupakan tanah timbunan/urukan dan pengerasan halaman dari bantuan Pemerintah Pusat Kemendikbud RI; dan
 - c) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp359.345.988,00 merupakan hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk tanah Kantor Samsat Lubuklinggau.
 - 4) Kapitalisasi selain belanja modal terdapat di Sekretariat DPRD sebesar Rp97.130.000,00.
 - 5) Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp278.817.634.630,38 antara lain:
 - a) BPKAD sebesar Rp151.809.698.070,00 merupakan koreksi BPK RI berupa aset tetap renovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atas pekerjaan penimbunan tanah di Kramasan Musi II yang dikapitalisasi ke aset induknya;

- b) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp128.000.000,00 merupakan mutasi tanah kantor UPTD Palembang Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.935.000.000,00 merupakan mutasi tanah eks. Dinas Pertambangan dari BPKAD; dan
 - d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp121.944.936.560,38 merupakan mutasi tanah Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) dari Pengelola Barang sebesar Rp112.344.960.000,00 dan koreksi BPK RI berupa aset tetap renovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas pekerjaan penataan kawasan Monpera sebesar Rp9.599.976.560,38.
- 6) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp7.364.045.000,00 antara lain:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.564.200.000,00 merupakan reklas dari gedung kantor Gubernur berupa pengerasan halaman sebesar Rp955.100.000,00 dan pengerasan halaman di Griya Agung sebesar Rp609.100.000,00 sesuai Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Pengolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
 - b) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp5.593.345.000,00 merupakan reklas dari aset lainnya berupa pembayaran hutang pembebasan lahan di EXIT TOL Mesuji;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp146.600.000,00 merupakan pengerasan halaman yang dikapitalisasi ke aset tanah; dan
 - d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp59.900.000,00 merupakan pengerasan halaman yang dikapitalisasi ke aset tanah.
- 7) Tindak Lanjut temuan BPK RI sebesar Rp339.481.834.428,58 merupakan temuan atas tanah bernilai Rp0,00 yang dilakukan penilaian oleh DJKN antara lain:
- a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Danau OPI sebesar Rp306.648.036.428,58;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp32.833.798.000,00 antara lain:
 - SMKN 3 Sekayu sebesar Rp25.2333.347.000,00;
 - SMAN Tugu Sampurna sebesar Rp893.320.000,00;
 - SMAN 1 Lubuklinggau sebesar Rp2.969.632.000,00;
 - SMAN 1 Lempuing Jaya sebesar Rp1.616.779.000,00 dan sebesar Rp286.929.000,00; dan
 - SMAN 2 Banding Agung sebesar Rp1.833.791.000,00.
- 8) Penilaian bernilai Rp0,00 dengan NJOP sebesar Rp212.104.714.500,00 antara lain:
- a) Dinas Perhubungan sebesar Rp157.807.820.000,00;

- b) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp10.996.800.000,00;
 - c) BPKAD sebesar Rp42.782.996.000,00; dan
 - d) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.517.098.500,00.
- b. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2021 sebesar Rp153.640.069.950,00 antara lain:
- 1) Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp232.096.950,00 di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan berupa belanja ATK, makan minum, SPPD dan Dokumentasi.
 - 2) Pembayaran hutang tahun lalu yang asetnya telah dicatat Rp8.343.245.000,00 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp5.593.345.000,00; dan
 - b) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp2.749.900.000,00.
 - 3) Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal 2021 sebesar Rp172.868.000,00 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp73.095.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa jasa penaksir harga yang dikapitalisasi ke nilai induk;
 - b) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp99.773.000,00 yang direklasifikasi ke peralatan mesin berupa pembelian Laptop, GPS, Lemari dll.
 - 4) Penyertaan modal sebesar Rp2.541.900.000,00 berupa tanah milik Dinas Pendapatan Daerah yang telah dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang.
 - 5) Penghapusan aset tetap tanah sebesar Rp24.942.000.000,00 di Dinas Sosial merupakan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra yang telah dihibahkan kembali kepada Pemerintah Kota Palembang.
 - 6) Mutasi antar OPD sebesar Rp117.407.960.000,00 antara lain.
 - a) BPKAD sebesar Rp117.279.960.000 merupakan mutasi tanah Monpera sebesar Rp112.344.960.000 dan tanah eks. Dinas Pertambangan sebesar Rp4.935.000.000,00; dan
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp128.000.000,00 merupakan mutasi tanah Kantor UPTD ke Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.

Penjelasan lainnya terhadap aset berupa tanah

a. Tanah Lapangan Golf

Tanah lapangan golf yang terletak di Jalan AKBP Check Agus Kenten Palembang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pengelola Barang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan seluas 404.047 M² terjadi *double* catat antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina terhadap tanah tersebut telah dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina dengan Perjanjian Nomor 063/SPK/BPKAD/2020 – Nomor SP-37/C00000/2020-SO tanggal 13 Desember 2020 tentang Pendayagunaan Lahan di Kawasan Golf Kenten, sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penilaian tanah lapangan golf tersebut dengan pihak DJKN Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel dengan total nilai sebesar Rp4.061.151.032.000,00.

b. Tanah Asrama Haji

Terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jl. Letjen Harun Sohat Palembang Asrama Haji yang perolehan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Departemen Sosial RI dan pembebasan ganti rugi Tahun 2006 s.d 2007 (bersertifikat) saat ini diklaim oleh TNI AU Sri Mulyono Herlambang Palembang berdasarkan peta bodas, terhadap permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mediasi oleh Jaksa Pengeacara Negara Kejati Sumsel yang saat ini masih dalam proses.

c. Tanah Pelabuhan Tanjung Api-Api

Terdapat penambahan aset tanah kawasan Hutan Lindung (HL) yang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)/Bukan Kawasan Hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Sarana Penunjangnya seluas 621,17 Hektar sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.866/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai Berita Acara dan Peta Tata Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang tanggal 2 Oktober 2017 telah ditetapkan luas areal pelabuhan Tanjung Api-Api beserta sarana penunjang yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan yang dalam proses sertifikasi lahan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Jalan Negara	121,09
	Jalan Poros Muara Sungsang dsk	68,26
	Jalan Poros Karang Anyar dsk	52,83
2.	Jalan Penghubung	38,13
	Jalan Penghubung Pelabuhan	5,06
	Jalan Penghubung Docking Kapal	10,07
	Jalan Penghubung Pelabuhan Curah Cair	6,00
	Jalan Penghubung Pelabuhan General Kargo	4,39
	Jalan Penghubung Pelabuhan Penyeberangan	8,20
	Jalan Penghubung Pelabuhan Peti Kemas	4,41
3.	Pelabuhan	461,95
	Docking Kapal	5,57
	Pelabuhan Batubara	88,91
	Pelabuhan Curah Cair	83,34
	Pelabuhan General Kargo	77,00
	Pelabuhan Penyeberangan	124,33
	Pelabuhan Peti Kemas	82,80
	Jumlah 1+2+3	621,17

- d. Tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terjadi *overlapping*/tumpang tindih kepemilikan berupa sertifikat masyarakat/pihak lainnya yang diterbitkan oleh pihak BPN diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga timbul permasalahan hukum atas sengketa lahan antara lain:
- 1) Tanah yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Sinaraga Abiyasan sebesar Rp4.771.100.000,00 dengan luas 3.400 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 523/K Tahun 1979 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12498 Tahun 2014 luas 2.770 m² atas nama Theodora Betty Johan dan Fintang Gani;
 - 2) Tanah yang tercatat di Dinas Kesehatan di Jalan Merdeka sebesar Rp11.124.000.000,00 dengan luas 5.477 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 19 tahun 1997 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kesehatan RI tanah tersebut digunakan oleh Poltekkes Kesehatan RI;
 - 3) Tanah yang tercatat BPKAD di Jalan Kol. H. Burlian KM 7 Palembang sebesar Rp16.327.000.000,00 dengan luas 26.815 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Sukaremi Tahun 1994 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2639 Tahun 1995 atas nama Daniat bin Usaman seluas 7.963 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 1997 seluas 1.077 m² atas nama Kementerian Keuangan RI, tanah tersebut digunakan oleh PDAM Tirta Musi dan DPW PPP; dan
 - 4) Tanah yang tercatat di Dinas PU Bina dan Tata Ruang di Jalan Talang Kelapa RT 12 RW 05 KM 7 Palembang seluas 11.648 M² sebesar Rp1.456.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2004 terjadi *overlapping* dengan tanah masyarakat dan dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Palembang atas dugaan penyerobotan tanah oleh masyarakat.
- e. Tanah Kantor Samsat Palembang 2 Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Palembang sedang dalam proses upaya hukum kembali.
- f. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Dr. RM. Bhakti No. 1 RT 14 Kecamatan Sematang Borang seluas 92.622 m² dengan nilai Rp55.573.200,00 digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai Kantor Camat Sematang Borang dan menjadi penyertaan modal ke PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan sesuai surat Walikota Palembang Nomor 032/002525/BPKAD/2021 tanggal 22 November 2021 Pemerintah Kota Palembang mengajukan permohonan hibah atas tanah tersebut.
- g. Tanah bernilai Rp0,00 (nol) yang telah dilakukan penilaian dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat disajikan pada **Lampiran 16**.
- h. Aset P3D berupa 160 item tanah sekolah yang telah diserahkan namun tidak terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di database SIMDA BMD Kabupaten/Kota saat migrasi database ke Provinsi sehingga tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perlu penelusuran lebih lanjut terkait dokumen kepemilikan/dokumen sumber lainnya atas tanah tersebut dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 17**.

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp2.460.507.732.869,82 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp2.768.373.058.986,04 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 110. Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 1 Januari 2021 (Audited)	2.460.507.732.869,82
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2021	
1.	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	266.423.850.895,70
	b. Realisasi Belanja BLUD Tahun 2021	22.411.033.073,54
	c. Pengakuan Utang Tahun 2021	7.067.240.501,00
	d. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	1.667.069.069,50
	e. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	31.083.663.106,00
	f. Kapitalisasi selain Belanja Modal	62.300.000,00
	g. Mutasi antar OPD	8.028.381.350,00
	h. Tindaklanjut Temuan BPK RI	246.069.100,00
	i. Aset Ekstrakomptabel Mutasi/penghapusan	220.672.900,00
	Jumlah	337.210.279.995,74
2.	Pengurangan :	
	a. Belanja Modal Tahun 2021 Tidak Masuk Kriteria Aset Tetap	(1.836.526.369,56)
	b. Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui aset tetap di Tahun 2020	(2.390.868.999,70)
	c. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	(1.965.116.803,59)
	d. Tindaklanjut Temuan BPK RI	(1.771.515.750,00)
	e. Hibah Keluar	(2.585.000.000,00)
	f. Penghapusan	(1.047.289.573,00)
	g. Mutasi antar OPD	(8.028.381.350,00)
	h. Reklasifikasi antar KIB	(16.192.000,00)
	j. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi	(9.704.063.033,67)
	Jumlah	(29.344.953.879,52)
	Saldo per 31 Desember 2021	2.768.373.058.986,04

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp337.210.279.995,74 sebagai berikut.

- a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp266.423.850.895,70 antara lain:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp26.402.539.298,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp42.688.991.580,00;
 - 3) BPKAD sebesar Rp1.571.676.390,00;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp5.619.063.749,70;
- 5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp5.530.709.500,00;
- 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.677.083.400,00;
- 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.257.367.125,00;
- 8) Dinas Kesehatan sebesar Rp33.311.213.266,00;
- 9) Rumah Sakit DR. Ernaldi Bahar sebesar Rp1.772.247.200,00;
- 10) Dinas Pendidikan sebesar Rp94.912.151.704,00;
- 11) Dinas Perpustakaan sebesar Rp1.443.626.779,00;
- 12) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.315.241.280,00;
- 13) Dinas Sosial sebesar Rp2.049.062.500,00;
- 14) Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.254.730.130,00;
- 15) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp146.100.000,00;
- 16) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp171.238.000,00;
- 17) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp269.250.000,00;
- 18) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp174.586.600,00;
- 19) Dinas Pertanian TPH sebesar Rp1.636.654.316,00;
- 20) Dinas Perkebunan sebesar Rp839.500.000,00;
- 21) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp525.577.500,00;
- 22) Dinas Kehutanan sebesar Rp672.817.250,00;
- 23) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.307.613.250,00;
- 24) Dinas Perindustrian sebesar Rp1.275.910.400,00;
- 25) Dinas Perdagangan sebesar Rp2.285.445.859,00;
- 26) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.206.233.374,00;
- 27) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp4.006.142.500,00;
- 28) Badan Promosi dan perizinan Penanaman Modal sebesar Rp1.639.563.000,00;
- 29) Badan Pendapatan sebesar Rp7.090.187.390,00;
- 30) Inspektorat sebesar Rp2.524.127.988,00;
- 31) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp645.710.000,00;
- 32) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp963.251.000,00;
- 33) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp1.639.444.336,00;
- 34) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.955.379.520,00;

- 35) Badan kesatuan bangsa dan LINMAS sebesar Rp776.919.600,00;
 - 36) Satuan Pol PP sebesar Rp1.363.691.930,00;
 - 37) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp960.568.540,00;
 - 38) Badan Penghubung sebesar Rp 396.177.741,00;
 - 39) Dinas Arsip Daerah sebesar Rp1.611.795.000,00; dan
 - 40) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.534.261.900,00.
- b. Realisasi Belanja BLUD Tahun 2021 sebesar Rp22.411.033.073,54 antara lain:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.642.207.925,54;
 - 2) Rumah Sakit DR. Ernaldi Bahar sebesar Rp2.083.919.539,00;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp7.384.905.609,00; dan
 - 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.300.000.000,00.
- c. Pengakuan Utang Tahun 2021 sebesar Rp7.067.240.501,00 antara lain:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp139.640.200,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.527.100.635,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.175.087.840,00;
 - 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp205.201.826,00; dan
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.210.000,00.
- d. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp1.667.069.069,50 antara lain:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp611.944.780,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pembelian pompa air sebesar Rp14.080.000,00 dan reklasifikasi dari aset tetap lainnya sebesar Rp597,864,780,00 berupa Pembelian alat studio;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.000.000,00 merupakan pembelian nama papan intansi;
 - 3) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp74.700.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal Gedung berupa pengadaan papan nama dinas;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp62.084.000,00 merupakan pembelian gordena dan karpet;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 merupakan pembelian tedmon dan pompa;
 - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp71.815.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pembelian CCTV dll sebesar Rp24.295.000,00 dan reklasifikasi dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp47.520.000,00;

- 7) Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp34.940.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pembelian Laptop dan Printer;
 - 8) Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp189.500.000,00 berupa reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa peralatan studio seperti Mic, *Loaudspeaker*, Infocus dll;
 - 9) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp501.812.289,50.
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp99.773.000,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah berupa pembelian laptop, PC, Printer, UPS, GPS, Lemari Besi dan meja komputer.
- e. Hibah/Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp31.083.663.106,00 antara lain:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.083.000.000,00 merupakan Bantuan CSR PT Bukit Asam Tbk berupa Mobil Hyundai;
 - 2) BPKAD sebesar Rp19.685.839.000,00 merupakan penambahan aset karena perjanjian dengan PT ATS;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp170.852.500,00 merupakan hibah ke RSUD Fatimah sebesar Rp158.602.500,00 dan Rumah Sakit Paru-Paru sebesar Rp12.250.000,00;
 - 4) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp226.670.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan RI berupa berupa Termogun, Oxsimeter dan Oxygen Concentrator;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp7.966.092.166,00 merupakan bantuan Pemerintah Pusat (Banper) berupa peralatan sekolah;
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp592.790.000,00 berupa berupa Mobil Tangki bahan bakar dan tenda;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp16.100.000,00 merupakan hibah dari Kemeninves/BKPM RI berupa Laptop Acer 1 unit;
 - 8) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp544.800.000,00 merupakan bantuan CSR PT Bukit Asam Tbk berupa kendaraan dinas CR; dan
 - 9) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp797.519.440,00 merupakan hibah dari Kemenristek RI berupa peralatan dan mesin.
- f. Kapitalisasi selain Belanja Modal sebesar Rp62.300.000,00 antara lain:
- 1) Badan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp15.400.000,00 berupa pembelian CCTV dan APAR dengan BARJAS;
 - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp34.400.000,00; dan
 - 3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp12.500.000,00.

- g. Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp8.028.381.350,00 di Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas di beberapa OPD yang diserahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan.
- h. Tindak lanjut Temuan BPKP Perwakilan Prov. Sumsel sebesar Rp246.069.100,00 berupa peralatan mesin di sekolah antara lain:
 - 1) SMKN 4 PLG sebesar Rp144.052.100,00;
 - 2) SMKN 1 PLG sebesar Rp7.398.500,00;
 - 3) SMKN 6 PLG sebesar Rp10.816.000,00; dan
 - 4) SMKN 3 PLG sebesar Rp83.802.500,00.
- i. Aset ekstrakomptele yang dilakukan penghapusan dan di mutasi sebesar Rp220.672.900,00 antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp147.264.000,00 penghapusan aset di SMAN 8 Palembang dan SMAN 12 Palembang;
 - 2) Dinas Sosial sebesar Rp930.000,00 merupakan aset yang telah dihibahkan ke Pemerintah Kota Palembang; dan
 - 3) Badan Penghubung sebesar Rp72.478.900,00 merupakan penghapusan aset ekstrakomptele.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp29.344.953.879,52 berasal dari:

- a. Belanja Modal Tahun 2021 Tidak Masuk Kriteria Aset Tetap sebesar Rp1.836.526.369,56 antara lain:
 - 1) BPKAD sebesar Rp315.000,00 berupa pembelian selang air;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp 181.326.500,00 berupa belanja masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dll;
 - 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp248.750.000,00 berupa belanja habis pakai berupa masker, hand sanitizer, sar, cov-2 antigen, swab (PCR), baju APD dan disinfektant;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.319.823.000,00 berupa pembuatan marka jalan di Jalan Kewenangan Provinsi;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.742.500,00 berupa pembelian alat peraga trauma heling seperti hula hoop, skiping, bola kaki plastic, boneka tangan, dan puzzle mainan;
 - 6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp3.000.000,00 berupa pembelian aktivasi zoom meeting selama 1 tahun; dan
 - 7) Dinas Kearsipan Daerah sebesar Rp64.569.369,56 berupa pembelian pintu kayu, sewa perangkat jaringan internet dan *aces internet*.
- b. Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui aset tetap di Tahun 2020 sebesar Rp2.390.868.999,70 antara lain:
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp691.670.000,00;

- 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp1.515.973.999,70; dan
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp183.225.000,00.
- c. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp1.965.116.803,59 antara lain:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp293.534.820,00;
 - 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp15.859.500,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp896.477.912,16;
 - 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp 49.335.000,00;
 - 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp33.898.000,00;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp600.757.500,00;
 - 7) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp17.504.071,43; dan
 - 8) Dinas Kearsipan Daerah sebesar Rp57.750.000,00.
- d. Tindak Lanjut Temuan BPK RI sebesar Rp 1.771.515.750,00 antara lain:
- 1) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp 1.411.677.000,00 berupa temuan BPK terkait informasi kendaraan tidak lengkap berupa BPKB kendaraan yang telah dilelang dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Jeep Daihatsu Talf GT BG1103LZ;
 - b) Jeep Daihatsu BG1199LZ;
 - c) Jeep Daihatsu BG1350LZ;
 - d) Minibus Toyota BG2812AZ; dan
 - e) Sepeda Motor Honda Win BG8471LZ.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp 29.950.000,00 merupakan temuan BPK terkait kendaraan dinas yang tercatat lebih dari satu kali antara lain:
 - a) Bapelkes kendaraan dinas roda 2 BG4022PZ sebesar Rp14.250.000,00; dan
 - b) Dinkes kendaraan dinas roda 2 BG7581LZ sebesar Rp3.200.000,00 dan kendaraan dinas roda 2 BG4022PZ sebesar Rp12.500.000,00.
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa kendaraan dinas yang tercatat lebih dari satu kali sebesar Rp329.888.750,00.
- e. Hibah Keluar sebesar Rp2.585.000.000,00 terdapat di Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 yang dihibahkan kepada Polda Sumsel.
- f. Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.047.289.573,00 antara lain:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp247.968.850,00 berupa penghapusan peralatan mesin di SMA Negeri 8 Palembang sebesar Rp223.352.350,00 dan SMA Negeri 12 Palembang sebesar Rp24.616.500,00;

- 2) Dinas Sosial sebesar Rp 32.505.400,00 merupakan aset Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra yang telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Palembang;
 - 3) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp18.240.000,00 merupakan penghapusan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang sudah di sidang majelis TPTGR; dan
 - 4) Badan Penghubung sebesar Rp748.575.323,00 merupakan penghapusan aset di Graha Sumsel.
- g. Mutasi antar OPD sebesar Rp8.028.381.350,00 merupakan mutasi kendaraan dinas roda 4 yang digunakan oleh kepala OPD yang sudah ada pengantinya dan diserahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan antara lain:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp269.240.000,00 berupa kendaraan dinas BG1879RZ;
 - 2) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp 467.000.000,00 berupa kendaraan dinas BG1029IZ;
 - 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp315.620.000,00 berupa kendaraan dinas BG1322RZ;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp373.500.000,00 berupa kendaraan dinas BG1716MZ;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp450.865.350,00 berupa kendaraan dinas BG43;
 - 6) Dinas Pendidikan sebesar Rp372.800.000,00 berupa kendaraan dinas BG1272NZ;
 - 7) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp180.050.000,00 berupa kendaraan dinas BG1837MZ;
 - 8) Dinas Sosial sebesar Rp438.246.000,00 berupa kendaraan dinas BG1167IZ;
 - 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp314.700.000,00 berupa kendaraan dinas BG80 / BG1959RZ;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp163.500.000,00 berupa kendaraan dinas BG1829LZ;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp410.000.000,00 berupa kendaraan dinas BG44 / BG1674MZ;
 - 12) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp436.445.000,00 berupa kendaraan dinas BG1813RZ;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp401.850.000,00 berupa kendaraan dinas BG1969MZ;
 - 14) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp414.900.000,00 berupa kendaraan dinas BG1476RZ;
 - 15) Dinas Perkebunan sebesar Rp340.200.000,00 berupa kendaraan dinas BG38 / BG1813MZ;

- 16) Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal sebesar Rp279.950.000,00 berupa kendaraan dinas BG1312MZ;
 - 17) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp390.000.000,00 berupa kendaraan dinas BG1085IZ;
 - 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp373.500.000,00 berupa kendaraan dinas BG1752 MZ / BG 33;
 - 19) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp339.250.000,00 berupa kendaraan dinas BG1722MZ;
 - 20) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp439.320.000,00 berupa kendaraan dinas BG1170RZ;
 - 21) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp421.000.000,00 berupa kendaraan dinas BG 62 /BG1836MZ; dan
 - 22) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp436.445.000,00 berupa kendaraan dinas BG1251PZ.
- h. Reklas antar KIB sebesar Rp16.192.000,00 merupakan reklas ke aset lainnya berupa berupa infocus merk ACER 2 unit yang hilang di SMA Negeri 1 Rantau Panjang.
- i. Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp9.704.063.033,67 ke ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 111. Reklas Aset Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Kapitalisasi

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Penambahan ekstrakomptabel
1	Sekretariat DPRD	187.559.262,00
2	Sekretariat Daerah	610.415.957,00
3	BPKAD	43.723.900,00
4	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	22.899.000,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	30.240.000,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.801.146,64
7	Dinas Perhubungan	86.537.000,00
8	Dinas Kesehatan	1.854.560.516,70
9	RS DR. Ernaldi Bahar	77.052.710,00
10	Dinas Pendidikan	6.305.162.792,77
11	Badan Perpustakaan Daerah	2.557.500,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.885.000,00
13	Dinas Sosial	60.217.500,00
14	Badan Penanggulangan Bencana	16.350.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.000.000,00
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.300.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.886.000,00
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	850.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	37.800.000,00

No.	Nama OPD	Penambahan ekstrakompatebel
20	Dinas Perindustrian	614.000,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	5.000.000,00
22	Badan Promosi dan perizinan Penanaman Modal	2.295.000,00
23	Badan Pendapatan Daerah	164.687.120,00
24	Inspektorat	362.000,00
25	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.500.000,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	16.948.428,56
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	27.425.200,00
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.850.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1.323.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.928.000,00
31	Dinas Arsip Daerah	4.342.000,00
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	990.000,00
Jumlah		9.704.063.033,67

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp4.215.821.795.215,60. Setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 4.462.812.938.458,99 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 112. Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo per 1 Januari 2021 (Audited)	4.215.821.795.215,60
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2021	
1	Penambahan:	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	287.408.894.651,95
	b. Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2021	1.641.941.105,33
	c. Pengakuan Utang Tahun 2021	20.767.764.854,11
	d. Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	33.622.314.126,84
	e. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	7.746.564.029,00
	f. Kapitalisasi (selain belanja modal)	7.426.065.372,88
	g. Mutasi antar OPD	3.365.514.500,00
	h. Reklasifikasi antar KIB	674.931.000,00
	i. Aset perolehan lama yang baru dicatat	11.073.805.785,00
	j. Tindakan lanjut Temuan BPK RI	25.000.000,00
	k. Aset ekstrakompatebel reklasifikasi ke aset tetap	3.107.546.460,00
	l. Aset rusak berat reklasifikasi ke aset tetap	3.551.393.300,00
	Jumlah	380.411.735.185,11
2	Pengurangan:	
	a. Belanja Modal Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(820.215.000,00)

No	Uraian	Nilai
a.	Pembayaran Utang Tahun Lalu	(9.900.439.121,59)
b.	Reklasifikasi Antar KIB Belanja Modal Tahun 2021	(110.735.356.345,13)
c.	Penyertaan Modal	(2.526.379.000,00)
c.	Penghapusan aset tetap gedung bangunan	(1.522.751.600,00)
d.	Mutasi antar OPD	(3.365.514.500,00)
f.	Reklasifikasi antar KIB	(4.239.630.375,00)
g	Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi	(310.306.000,00)
Jumlah		(133.420.591.941,72)
Saldo per 31 Desember 2021		4.462.812.938.458,99

a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp380.411.735.185,11 sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp287.408.894.651,95 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp13.908.784.123,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp16.000.000,00;
 - c) BPKAD sebesar Rp417.080.350,00;
 - d) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp25.652.268.642,45;
 - e) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp29.429.000,00;
 - f) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp103.541.958.937,13;
 - g) Dinas Perhubungan sebesar Rp62.084.000,00;
 - h) Dinas Kesehatan sebesar Rp40.371.962.620,00;
 - i) Rumah Sakit DR. Ernaldi Bahar sebesar Rp2.478.333.988,00;
 - j) Dinas Pendidikan sebesar Rp84.299.439.136,37;
 - k) Dinas Perpustakaan sebesar Rp2.356.775.320,00;
 - l) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp149.900.000,00;
 - m) Badan Pemerdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp174.500.000,00;
 - n) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp872.909.435,00;
 - o) Dinas Perkebunan sebesar Rp1.362.172.800,00;
 - p) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp199.972.000,00;
 - q) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.599.836.750,00;
 - r) Dinas Perindustrian sebesar Rp652.000.000,00;
 - s) Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal sebesar Rp1.589.839.250,00;

- t) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp371.362.400,00;
 - u) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp99.788.000,00;
 - v) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.219.649.400,00;
 - w) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.457.050.000,00;
 - x) Badan Penghubung sebesar Rp2.350.914.500,00; dan
 - y) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp174.884.000,00.
- 2) Realisasi belanja modal BLUD Tahun 2021 sebesar Rp1.641.941.105,33 antara lain:
- a) Dinas Kesehatan sebesar Rp823.973.092,00;
 - b) Rumah Sakit DR. Ernaldi Bahar sebesar Rp610.359.000,00; dan
 - c) Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp207.609.013,33.
- 3) Pengakuan hutang Tahun 2021 sebesar Rp20.767.764.854,11 antara lain:
- a) Sekretariat DPRD sebesar Rp 84.503.800,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.667.452.750,00;
 - c) Dinas PU Tata Ruangan dan Bina Marga sebesar Rp5.567.319.182,11;
 - d) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp49.673.000,00;
 - e) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp112.355.450,00;
 - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.553.450.130,00;
 - g) Dinas Pendidikan sebesar Rp9.515.730.627,00;
 - h) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp26.282.565,00;
 - i) Badan Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal sebesar Rp83.675.750,00;
 - j) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp42.469.600,00; dan
 - k) Badan Penghubung sebesar Rp64.852.000,00.
- 4) Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp33.622.314.126,84 antara lain:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp32.100.030.400,00 merupakan reklas dari belanja modal aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp971.412.112,16;
 - c) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp185.052.543,25;
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp 18.900.000,00 merupakan reklas dari belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian rangka baja yang dijadikan bangunan pagar;

- e) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp329.415.000,00 merupakan reklas dari belanja modal BLUD peralatan dan mesin berupa rehab dan pembuatan partisi ruangan; dan
 - f) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp17.504.071,43.
- 5) Hibah/Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp7.746.564.029,00 antara lain:
- a) BPKAD sebesar Rp1.671.186.000,00 merupakan penyerahan aset PT ATS;
 - b) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp58.448.000,00 merupakan perolehan lama yang berasal hibah dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk UPTD Jalan dan Jembatan berupa bangunan gedung kantor;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.325.280.000,00 merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat; dan
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp2.691.650.029,00 merupakan Hibah dari Kemenristek RI.
- 6) Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp7.426.065.372,88 antara lain:
- a) Sekretariat DPRD sebesar Rp593.400.900,00 merupakan konsultan perencanaan;
 - b) BPKAD sebesar Rp61.451.500,00 merupakan pengawasan dan perencanaan kegiatan pembuatan tugu/plag nama;
 - c) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp175.859.000,00 merupakan Rehab Gedung Kantor Bagian Depan Resepsionis;
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp118.660.000,00 merupakan Pembuatan Bangunan Steger/ Garasi Kapal dan rehab Kantor BBI;
 - e) Dinas Perdagangan sebesar Rp198.467.500,00 merupakan rehab gedung kantor (ruang rapat) sebesar Rp99.552.117,45 dan Pembuatan Gapura sebesar Rp98.915.382,55;
 - f) Badan Perizinan, Promosi Penanaman Modal sebesar Rp119.600.000,00 merupakan jasa perencanaan dan pengawasan dari Barjas;
 - g) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.438.978.400,00 merupakan Rehab Berat Gedung Kantor Bapenda dan UPTB Palembang I;
 - h) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp954.255.000,00 merupakan rehab besar gedung Kantor Balitbangda dan UPTD STP;
 - i) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp334.800.000,00 merupakan rehab bangsal di Gedung Musium, Gedung Musium Bala Putra Dewa, dan rehab pagar subkos;

- j) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp80.690.541,06 merupakan bangun tempat pakir semi permanen;
 - k) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp979.613.500,00 merupakan rehab gedung kantor;
 - l) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp206.223.031,82 merupakan rehab bangunan Gedung Mayang Sari dari Barjas; dan
 - m) Badan Penghubung sebesar Rp164.066.000,00 merupakan konsultan perencanaan.
- 7) Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp3.365.514.500,00 antara lain:
- a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp120.800.000,00 merupakan mutas dari Dinas PKP berupa bangunan kantor UPTD Kota Palembang; dan
 - b) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.244.714.500,00 merupakan mutasi bangunan eks. Pertambangan dari BPKAD dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral.
- 8) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp674.931.000,00 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan renovasi lapangan tenis yang semula tercatat di aset tetap lainnya.
- 9) Aset perolehan lama yang baru dicatat sebesar Rp11.073.805.785,00 di Dinas Pendidikan berupa perolehan lama baru dicatat antara lain:
- a) SMKN 1 Babat Supat sebesar Rp6.695.482.785,00;
 - b) SMKN 1 Merapi Timur sebesar Rp1.363.716.000,00; dan
 - c) SMKN 1 Indralaya Utara sebesar Rp3.014.607.000,00.
- 10) Tindak lanjut temuan BPKP sebesar Rp25.000.000,00 berupa bangunan taman di SMK Negeri 1 Palembang.
- 11) Aset ekstrakomptabel yang direklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp3.107.546.460,00 antara lain:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.076.607.460,00 merupakan koreksi ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel berupa gedung Dharma Wanita di Jl. Kakak Tua;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp6.052.000,00;
 - c) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp14.900.000,00 merupakan rehab mushola yang semula tercatat di ekstrakomptabel pindah ke intrakomptabel; dan
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.987.000,00 merupakan rehab lapangan pakir yang semula tercatat di ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel.

- 12) Aset rusak berat yang direklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp3.551.393.300,00 terdapat di Dinas Pendidikan merupakan aset rusak berat yang direhab kembali menjadi baik
- b. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2021 sebesar Rp133.420.591.941,72 sebagai berikut.
- 1) Belanja modal Tahun 2021 tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp820.215.000,00 terdapat di Sekretariat DPRD merupakan bahan/kegiatan pembersih lantai, revitalisasi bangunan penutup lantai, Interior Islami Musolah, pembuatan fasade granit, pembuatan struktur *waterpfofing* dll di rumah dinas wakil ketua DPRD;
 - 2) Pembayaran utang tahun lalu dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2020 sebesar Rp9.900.439.121,59 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp2.501.912.123,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp418.428.150,00;
 - c) BPKAD sebesar Rp19.840.350,00;
 - d) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp3.827.078.157,26;
 - e) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp29.429.000,00;
 - f) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp922.784.690,00;
 - g) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.137.075.800,00;
 - h) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp147.988.988,00;
 - i) Dinas Pendidikan sebesar Rp603.503.850,00 merupakan pembayaran utang tahun lalu dengan menggunakan belanja modal Tahun 2021 namaun terdapat pembayaran utang tahun lalu dengan menggunakan belanja barang dan jasa sebesar Rp38.760.850,00;
 - j) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp84.789.000,00; dan
 - k) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp207.609.013,33 merupakan pembayaran hutang tahun lalu dengan dana BLUD.
 - 3) Reklasifikasi antar KIB Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp110.735.356.345,13 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.039.506.200,00 merupakan:
 - (1) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembayaran hutang Tahun 2021 Pekerjaan Cor Jalan dan Drainase Rumdin WK I sebesar Rp.178.775.000,00;
 - (2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pekerjaan instalasi lampu Rumdin Ketua sebesar Rp55.970.200,00;
 - (3) Pekerjaan WC Umum Rumdin WK I sebesar Rp198.069.000,00;
 - (4) Pek. Groundtank Rumdin WK I sebesar Rp196.152.000,00;

- (5) Reklasifikasi ke aset tanah berupa pengerasan halaman rumah dinas WK I sebesar Rp199.466.000,00;
 - (6) Pengerasan Halaman Kantor DPRD sebesar Rp196.994.000,00; dan
 - (7) Reklasifikasi ke Peralatan mesin berupa pembelian pompa air Rumdin WK I sebesar Rp14.080.000,00.
- b) BPKAD sebesar Rp16.000.000,00.
 - c) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp3.879.637.650,00 merupakan reklasifikasi ke peralatan mesin sebesar Rp74.700.000,00 berupa pengadaan papan nama instansi, reklasifikasi ke KDP sebesar Rp3.328.588.150,00 berupa pembangunan gedung di UPTD Kab OKI dan reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp476.349.500,00 berupa DED eks. Gudang aspal yang belum ada fisiknya.
 - d) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp100.235.120.697,13 merupakan antara lain:
 - (1) reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp5.835.292.725,00;
 - (2) reklasifikasi ke ATB sebesar Rp756.058.975,00;
 - (3) reklasifikasi ke aset tetap lainnya sebesar Rp35.978.590.843,00; dan
 - (4) pembayaran hutang yang asetnya telah dicatat 100% sebesar Rp57.665.178.154,13
 - e) Dinas Perhubungan sebesar Rp62.084.000,00.
 - f) Dinas Kesehatan sebesar Rp995.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa DED masjid dan Lap Pakir RSUD Fatimah.
 - g) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.622.495.998,00.
 - h) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.885.011.800,00.
- 4) Penyertaan Modal sebesar Rp2.526.379.000,00 terdapat di Dinas Pendapatan Daerah.
 - 5) Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.522.751.600,00 antara lain:
 - a) Dinas Pendidikan sebesar Rp36.152.000,00 merupakan penghapusan gedung SMK Negeri 2 Lahat;
 - b) Dinas Sosial sebesar Rp1.430.373.000,00 merupakan penghapusan gedung yang telah dihibahkan kembali ke Pemerintah Kota Palembang berupa bangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Tuna Netra; dan
 - c) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp56.226.600,00 berupa penghapusan pos jaga di STP sesuai SK Nomor 840/KPTS/BPKAD/2021.
 - 6) Mutasi antar OPD sebesar Rp3.365.514.500,00 antara lain:

- a) BPKAD senilai Rp1.782.900.000,00 merupakan mutasi bangunan eks. Pertambangan ke Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp120.800.000,00 merupakan mutasi bangunan di Jl. Rasid Sidik Kel 8 Ulu Palembang ke Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang; dan
 - c) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.461.814.500,00.
- 7) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.239.630.375,00 antara lain:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.567.600.000,00 merupakan reklasifikasi ke tanah sebesar Rp955.100.000,00, ke Jalan, Irigasi dan Jalan sebesar Rp3.400.000,00 dan reklasifikasi ke Tanah Griya Agung sebesar Rp609.100.000,00;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.465.530.375,00 merupakan DED Fakultas Kedokteran yang terkapitalisasi di gedung RSUD Fatimah;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp 146.600.000,00 merupakan reklas ke tanah berupa pengerasan halaman yang dikapitalisasi ke induk aset; dan
 - d) Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp59.900.000,00 merupakan pengerasan halaman yang dikapitalisasi ke nilai tanah.
- 8) Reklasifikasi aset gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp310.306.000,00 antara lain:
- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp45.400.000,00;
 - b) BPKAD sebesar Rp229.387.000,00;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp20.520.000,00; dan
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp14.999.000,00.

Penjelasan lainnya terhadap aset berupa bangunan:

Aset P3D berupa 19 unit bangunan sekolah yang telah diserahkan namun tidak terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) di database SIMDA BMD Kabupaten/Kota saat migrasi database ke Provinsi sehingga tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan perlu penelusuran lebih lanjut terkait dokumen pendukung/sumber lainnya atas bangunan tersebut dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 18**.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp12.175.895.778.611,60 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp12.991.502.065.603,37 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 113. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo per 1 Januari 2020 (audited)	12.175.895.778.611,60
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2021	
1	Penambahan:	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	1.106.711.887.752,42
	b. Pengakuan Utang tahun 2021	229.634.932.353,89
	c. Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2021	686.199.108,00
	d. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021	6.062.208.818,00
	e. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	43.647.492.031,00
	f. Kapitalisasi selain belanja Modal	5.780.523.693,94
	g. Reklasifikasi antar KIB	191.230.185.728,75
	h. Aset perolehan lama baru dicatat	161.000.000,00
	i. Koreksi Pencatatan	324.891.150,00
	Jumlah	1.584.239.320.636,00
2	Pengurangan:	
	a. Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2021	(408.831.308.395,54)
	b. Belanja modal tahun 2021 tidak memenuhi kriteria aset tetap	(17.581.585.658,10)
	c. Reklasifikasi belanja modal tahun 2021	(339.301.141.896,65)
	d. Penghapusan	(2.440.800.000,00)
	d. Reklasifikasi aset dibawah nilai kapitalisasi	(478.197.693,94)
	Jumlah	(768.633.033.644,23)
	Saldo per 31 Desember 2021	12.991.502.065.603,37

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp1.584.239.320.636,00 antara lain:

- 1) Realisasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp1.106.711.887.752,42 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp1.049.894.339.568,64;
 - b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp46.356.738.520,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.534.606.500,00;
 - d) Dinas Pendidikan sebesar Rp24.295.000,00;
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp353.970.648,78;
 - f) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.358.362.315,00;
 - g) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp138.217.200,00; dan
 - h) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp51.358.000,00.
- 2) Pengakuan Utang Tahun 2021 sebesar Rp229.634.932.353,89 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp227.619.332.010,89;
 - b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp1.926.512.343,00; dan

- c) Dinas Kesehatan sebesar Rp89.088.000,00.
- 3) Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2021 sebesar Rp686.199.108,00 terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp487.269.608,00 dan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp198.929.500,00
- 4) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp6.062.208.818,00 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp 922.501.020,00;
 - b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp15.859.500,00 berupa pembuatan sumur bor;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.643.995.998,00;
 - d) Dinas Perpustakaan sebesar Rp166.000.000,00 merupakan pemasangan jaringan komputer;
 - e) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.885.011.800,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa Pembuatan Dermaga UPTD PPI Sungsang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp14.998.000,00;
 - f) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp14.998.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal peralatan mesin berupa pembuatan sumur bor;
 - g) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp271.342.500,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin berupa pembuatan jaringan Gas dalam rangka penunjang analisa laboratorium BLUD; dan
 - h) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp142.500.000,00 berupa pemasangan jaringan internet.
- 5) Hibah/Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp43.647.492.031,00 antara lain:
 - a) BPKAD sebesar Rp39.044.109.000,00 merupakan penambahan aset dengan perjanjian dari PT ATS;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.520.000.000,00 merupakan Bantuan dari Pemerintah Pusat di SMA/SMK/SLB; dan
 - c) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp83.383.031,00 dari Kementerian Ristek RI.
- 6) Kapitalisasi selain belanja Modal sebesar Rp5.780.523.693,94 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp5.636.904.500,00 berupa perencanaan teknis dan amdal;
 - b) Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp100.000.000,00 berupa pemasangan instalasi listrik; dan
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp43.619.193,94 merupakan bangunan WC.

- 7) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp191.230.185.728,75 antara lain:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.400.000,00 merupakan reklasifikasi dari gedung bangunan berupa bak air di pakiran kantor gubernur; dan
 - b) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp191.226.785.728,75 merupakan reklasifikasi dari KDP sebesar Rp75.605.918.041,88 dan reklasifikasi dari aset lainnya berupa jalan yang semula diakui sebagai jalan non kewenangan provinsi namun berdasarkan surat keputusan gubernur Sumatera Selatan jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi sebesar Rp115.620.867.686,87.
- 8) Aset perolehan lama baru dicatat sebesar Rp161.000.000,00 terdapat di Dinas Pendidikan berupa MCK di SMKN 1 Indralaya Utara sebesar Rp47.000.000,- Jalan, Irigasi dan Jaringan di SMKN 1 Babat Supat sebesar Rp96.000.000,- dan di SMKN 1 Merapi Timur sebesar Rp18.000.000,00
- 9) Koreksi pencatatan sebesar Rp324.891.150,00 terdapat di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berupa nilai retensi Tahun 2018 yang belum tercatat
- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp768.633.033.644,23 antara lain:
 - 1) Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2020 sebesar Rp 408.831.308.395,54 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp 178.775.000,00;
 - b) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp382.874.199.615,76;
 - c) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp25.424.363.131,00; dan
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp353.970.648,78.
 - 2) Belanja modal Tahun 2021 tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp17.581.585.658,10 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp17.001.531.588,10 merupakan pekerjaan rehab rutin jembatan seperti pengecatan, pembersihan dan pasang nama jembatan; dan
 - b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp580.054.070,00 belanja modal yg tidak ada fisiknya temuan BPK RI Tahun 2021.
 - 3) Reklasifikasi belanja modal Tahun 2021 sebesar Rp339.301.141.896,65 antara lain:
 - a) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp338.585.482.063,90 merupakan reklasifikasi ke KDP sebesar Rp295.857.488.873,90 berupa konstruksi jalan dan jembatan dan reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp42.727.993.190,00 berupa jalan non kewenangan;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp4.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa pompa air dan tadmon;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp 24.295.000,00; dan

- d) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 686.864.832,75.
- 4) Penghapusan sebesar Rp2.440.800.000,00 terdapat di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang merupakan penghapusan jembatan mulak Kabupaten Lahat.
- 5) Reklas aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp478.197.693,94 antara lain:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.400.000,00;
 - b) BPKAD sebesar Rp1.311.000,00;
 - c) Dinas Kesehatan sebesar Rp44.500.000,00;
 - d) Dinas Pendidikan sebesar Rp 296.500.000,00;
 - e) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp88.867.500,00; dan
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp43.619.193,94.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp793.406.131.269,25 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp671.272.671.147,30 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 114. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo Per 1 Januari 2021 (audited)	793.406.131.269,25
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2021	
1	Penambahan:	
	a) Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	79.951.055.033,00
	b) Realisasi Belanja BLUD	645.856.875,00
	c) Pengakuan Utang tahun 2021	1.733.727.407,75
	d) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021	94.344.020.997,13
	e) Tindaklanjut Temuan BPK RI	98.440.000,00
	f) Aset ekstrakomptabel reklasifikasi ke aset tetap	203.500,00
	Jumlah	176.773.303.812,88
2	Pengurangan:	
	a) Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2020	(57.665.178.154,13)
	b) Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap	(320.876.400,00)
	c) Reklasifikasi belanja modal tahun 2021	(40.878.626.525,00)
	d) Mutasi antar OPD	(161.409.674.630,38)
	e) Reklasifikasi antar KIB	(20.682.079.770,32)
	f) Reklas aset dibawah nilai kapitalisasi	(17.950.328.455,00)
	Jumlah	(298.906.763.934,83)
	Saldo per 31 Desember 2021	671.272.671.147,30

- a. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp176.773.303.812,88 sebagai berikut.
 - 1) Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp79.951.055.033,00 antara lain:

- a) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.135.613.130,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp32.656.139.900,00;
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.345.380.700,00;
 - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.726.452.800,00;
 - e) Dinas Pendidikan sebesar Rp40.025.472.128,00;
 - f) Badan Perpustakaan sebesar Rp415.805.755,00;
 - g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp84.915.000,00;
 - h) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp49.250.000,00;
 - i) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp308.724.000,00;
 - j) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp49.500.000,00;
 - k) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp311.949.000,00;
 - l) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp268.750.000,00;
 - m) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp247.335.000,00;
 - n) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp384.302.600,00;
 - o) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp48.500.000,00;
 - p) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp584.541.220,00;
 - q) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp88.679.800,00;
 - r) Badan Penghubung sebesar Rp 26.719.000,00; dan
 - s) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp193.025.000,00.
- 2) Realisasi belanja BLUD Tahun 2021 sebesar Rp645.856.875,00 terdapat di Dinas Kesehatan;
- 3) Pengakuan Utang Tahun 2021 sebesar Rp1.733.727.407,75 terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp94.344.020.997,13 antara lain:
- a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp93.643.768.997,13 merupakan reklasifikasi dari belanja modal gedung bangunan berupa aset tetap renovasi aset milik Pemprov sebesar Rp.35.978.590.843,00 dan belanja modal gedung bangunan yang direklasifikasi ke Aset tetap lainnya berupa pembayaran hutang sebesar Rp57.665.178.154,13 yang asetnya telah di catat 100% ditahun sebelumnya; dan
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp700.252.000,00.

- 5) Tindak lanjut Temuan BPK RI sebesar Rp98.440.000,00 terdapat di Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura berupa TL BPK Tahun 2020 terkait Sapi belum tercatat BPHPT Sembawa.
 - 6) Aset ekstrakomptabel reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp203.500,00 di Dinas Pendidikan merupakan koreksi pencatatan nilai pada SMA 1 Martapura yang dihapuskan.
- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp298.906.763.934,83 antara lain:
- 1) Utang Tahun 2020 dibayar dengan Belanja Modal Tahun 2021 yang telah diakui sebagai aset di Tahun 2020 sebesar Rp57.665.178.154,13 terdapat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 2) Belanja Modal Tahun 2021 tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp320.876.400,00 antara lain:
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp296.876.400,00 merupakan pembelian lisensi Projek *Building Information Modelling* (BIM) yang hanya 1 tahun; dan
 - b) Dinas Perpustakaan Daerah sebesar Rp24.000.000,00 merupakan sewa *cloud* yang hanya berlaku 3 bulan.
 - 3) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp40.878.626.525,00 antara lain:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp986.151.030,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp32.336.889.900,00;
 - c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.048.504.300,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa ATB sebesar Rp247.728.500,00 dan pembayaran hutang yang asetnya telah dicatat 100% sebesar Rp800.775.800,00;
 - d) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.372.309.675,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa pembuatan aplikasi dan *Software*;
 - e) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.494.000.000,00;
 - f) Badan Perpustakaan sebesar Rp166.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pemasangan jaringan;
 - g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp84.915.000,00 merupakan reklasifikasi peralatan mesin sebesar Rp34.940.000,00 dan ke aset lainnya sebesar Rp49.975.000,00;
 - h) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp49.250.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa *Update Website*;
 - i) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp308.724.000,00 merupakan reklasifikasi ke peralatan mesin sebesar Rp189.500.000,00 dan ke aset lainnya sebesar Rp119.224.000,00;

- j) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp49.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa aplikasi;
 - k) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp311.949.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa pembelian *software*;
 - l) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp268.750.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa Pembuatan *Software* (Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Daerah dan *Software* Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Provinsi);
 - m) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp247.335.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa pembuatan *software*;
 - n) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebesar Rp384.302.600,00;
 - o) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp48.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa *software*;
 - p) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp439.841.220,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa pembelian *Software* sebesar Rp297.341.220,00 dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Jaringan Internet sebesar Rp142.500.000,00;
 - q) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp88.679.800,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa pembuatan *Website* Kediklatan; dan
 - r) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp193.025.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lainnya berupa *upgrade* aplikasi.
- 4) Mutasi antar OPD sebesar Rp161.409.674.630,38 merupakan koreksi BPK berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) antara lain:
- a) Penimbunan tanah di kramasan Musi II Palembang sebesar Rp151.809.698.070,00 yang dimutasi dan dikapitalisasi ke aset induk tanah milik BPKAD; dan
 - b) Penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) sebesar Rp9.599.976.560,38 yang dimutasi dan dikapitalisasi ke aset induk tanah milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 5) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp20.682.079.770,32 antara lain:
- a) BPKAD sebesar Rp20.007.148.770,32 merupakan reklasifikasi antar KIB ke Aset lainnya berupa bantuan CSR PT BA yang akan diserahkan ke Kab/Kota dan PT JSC untuk menjadi penyertaan modal; dan
 - b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp674.931.000,00 merupakan merupakan renovasi lapangan tenis yg direklas ke gedung bangunan.
- 6) Reklasifikasi aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp17.950.328.455,00 antara lain:

- a) Sekretariat DPRD sebesar Rp4.413.000,00;
- b) Dinas Pendidikan sebesar Rp17.765.502.588,00;
- c) Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp 173.712.867,00; dan
- d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp6.700.000,00.

6. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2021 sebesar Rp100.163.923.630,28 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp323.103.432.987,30 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 115. Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 1 Januari 2021 (audited)	100.163.923.630,28
1	Penambahan:	
	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2021	299.186.077.023,90
	Jumlah	299.186.077.023,90
2	Pengurangan:	
	Reklasifikasi antar KIB	(76.246.567.666,88)
	Jumlah	(76.246.567.666,88)
	Saldo per 31 Desember 2021	323.103.432.987,30

- a. Penambahan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp299.186.077.023,90 terdapat di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang yang merupakan reklasifikasi dari belanja modal gedung sebesar Rp3.328.588.150,00 berupa bangunan UPTD Kab. OKI dan reklasifikasi dari belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp295.857.488.873,90; dan
- b. Pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp76.246.567.666,88 terdapat di Dinas PUBMTR merupakan reklasifikasi ke aset Jalan, Irigasi dan Jembatan.

Perbandingan penambahan/pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2020 dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 116. Rincian KDP per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020	Penambahan/ Pengurangan
1	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	303.719.770.708,30	80.139.611.726,28	223.580.158.982,02
2	Dinas Perhubungan	15.387.021.200,00	15.387.021.200,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	895.908.250,00	1.536.557.875,00	(640.649.625,00)
4	Badan Pendapatan Daerah	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00	0,00
	Jumlah	323.103.432.987,30	100.163.923.630,28	222.939.509.357,02

Penjelasan Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP)

- a. Kontruksi dalam pekerjaan (KDP) Dinas Perhubungan merupakan bagian pekerjaan pembangunan di Bandara Silampari Lubuklinggau dan Bandara di Kab Lahat akan ditindaklanjuti dengan serah terima kepada pihak Kementerian Perhubungan RI; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah merupakan kontruksi pembangunan Kantor UPTB / Samsat Palembang II yang belum selesai dikarenakan terdapat gugatan masyarakat atas lahan pembangunan kantor UPTB/Samsat tersebut dan berdasarkan amar keputusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI Nomor 495 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas gugatan lahan seluas 3.472 m² yang akan dibangun kantor UPTD/SAMSAT Kota Palembang II telah dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan namun atas keputusan tersebut digugat kembali oleh masyarakat.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu Aset Tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang Aset Tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) Aset Tetap tersebut.

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan untuk seluruh aset adalah metode garis lurus yang dihitung secara bulanan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.983.381.603.426,95 dan Rp8.947.561.262.175,54 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 117. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	2021		2020	
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020
1	Tanah	11.329.490.821.739,56	0,00	10.573.586.020.615,60	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.768.373.058.986,04	1.863.436.402.849,15	2.460.507.732.869,82	1.621.134.399.297,71
3	Gedung dan Bangunan	4.462.812.938.458,99	774.347.279.518,67	4.215.821.795.215,60	681.098.520.069,67
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.991.502.065.603,37	7.344.413.312.856,13	12.175.895.778.611,60	6.644.581.207.734,16
5	Aset Tetap Lainnya	671.272.671.147,30	1.184.608.203,00	793.406.131.269,25	747.135.074,00
6	KDP	323.103.432.987,30	0,00	100.163.923.630,28	0,00
Jumlah		32.546.554.988.922,56	9.983.381.603.426,95	30.319.381.382.212,15	8.947.561.262.175,54

Rincian akumulasi aset tetap per 31 Desember 2021 sebagaimana pada **Lampiran 19**. Penjelasan lainnya:

- a. Terdapat permasalahan penyerahan aset P3D yang belum selesai yaitu Panti Asuhan Mawar Putih yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berdasarkan Akte Jual

Beli Nomor 355/PPAT/1994 dan Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 460/194/Dinsos/2017 tanggal 6 September 2017 bahwa tanah tersebut milik H. Domiri dan belum ada hibahnya dari keluarga H. Domiri hingga saat ini tanah dan bangunan Panti Mawar Putih masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk diserahterimakan kembali guna permasalahan klaim aset panti asuhan tersebut dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3825/BPKAD-V/2021 tanggal 03 Desember 2021.

- b. Barang extraopatabel yang disusutkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana pada **Lampiran 20.a – d**.
- c. Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditindaklanjuti antara lain:
 - 1) Aset tetap yang bernilai Rp0,00 telah ditindaklanjuti dengan menggunakan penilaian dari DJKN Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 21**;
 - 2) Tanah dengan luasan 0 m² telah ditindaklanjuti sesuai dokumen bukti kepemilikan dan hasil pengukuran di lapangan sebagaimana pada **Lampiran 22**;
 - 3) Kendaraan dinas yang tidak memiliki nomor polisi telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dokumen bukti kepemilikan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 23**;
 - 4) Tanah yang tidak memiliki informasi terkait bukti kepemilikan telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dokumen bukti kepemilikan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 24**;
 - 5) Kendaraan dinas tanpa informasi BPKB telah ditindaklanjuti dengan melengkapi informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dokumen bukti kepemilikan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 25**;
 - 6) Aset Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan berupa Puskesmas, Poskesdes, dan Rumah Sakit Kabupaten dan Kota yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi telah ditindaklanjuti dengan penyerahan ke Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 26**;
 - 7) Aset Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berupa Gedung dan Bangunan Transmigrasi yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi telah ditindaklanjuti dengan penyerahan ke Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 27**;
 - 8) Aset Jalan Bukan Kewenangan Pemerintah Provinsi telah ditindaklanjuti dengan penyerahan ke Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 28**;

- 9) Aset Tetap Lainnya (Kambing) yang diserahkan kepada masyarakat telah ditindaklanjuti dengan penyerahan ke Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 29**;
- 10) Kendaraan yang tercatat lebih dari sekali telah ditindaklanjuti dengan penghapusan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dokumen pendukung dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 30**; dan
- 11) Aset Dengan Keterangan Rusak/Hilang/Lelang telah ditindaklanjuti dengan usulan pemusnahan dan penghapusan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 31**.

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 menyajikan saldo sebesar Rp3.095.520.167.809,64 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.092.158.862.248,83. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 118. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)
1	Tagihan Ganti Rugi	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.668.304.573.000,00	1.669.475.073.000,00	(1.170.500.000,00)
3	Aset Tidak Berwujud	130.386.962.349,00	109.283.355.264,00	21.103.607.085,00
4	Aset lain-lain	2.401.307.817.956,64	2.526.741.647.765,70	(125.433.829.809,06)
5	Akumulasi mortisasi Aset Tidak Berwujud	(96.327.071.916,00)	(89.639.684.474,00)	(6.687.387.442,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.008.169.863.580,00)	(1.123.719.279.306,87)	115.549.415.726,87
Jumlah		3.095.520.167.809,64	3.092.158.862.248,83	3.361.305.560,81

Penjelasan lebih rinci terkait saldo aset lainnya adalah sebagai berikut.

- a. Tagihan Jangka Panjang pada Tahun 2021 menyajikan saldo sebesar Rp17.750.000,00 yang merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara an. AR yang belum diketahui dasar pembebanannya dan belum masuk dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2019 dan sampai Tahun 2021 belum diselesaikan;
- b. Aset Kemitraan berupa kerja sama dengan pihak ketiga menyajikan saldo pada Tahun 2021 sebesar Rp1.668.304.573.000,00. Terjadi penurunan nilai sebesar Rp1.170.500.000,00 dari saldo pada Tahun 2020 sebesar Rp1.669.475.073.000,00 yang merupakan penghapusan aset yang dikerjakan samakan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya. Aset Kemitraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikerjakan samakan kepada pihak sebagai berikut.
 - 1) PT Bayu Jaya Lestari Sukses

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT. Bayu Jaya Lestari Sukses dalam bentuk kerja sama Build Operate Transfer (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjakan samakan

adalah tanah seluas 56.362 m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Hotel Aryaduta dan fasilitas parkir dengan nomor perjanjian kerja sama 14/SPK/III/2002 dan SPK- 02/BJLS/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 dan addendum Nomor 16/Add/SK/IX/02 dan 030/BJLS/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu:

- a) Pasal 7 ayat (1) mulai tahun ke-18 menerima kontribusi setiap tahun atas hasil operasional hotel bintang 4 dan fasilitas parkir yang besarnya sesuai kesepakatan bersama; dan
- b) Pasal 7 ayat (5) menerima 1 (satu) kantor toko dengan desain khusus yang menghadap lapangan parkir Bumi Sriwijaya sebagai pengganti ruang tunggu VIP.

2) PT Palembang Paragon Mall

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkerja sama dengan PT Palembang Paragon Mall dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerja samakan adalah tanah seluas 23.285 m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan *Underground* Mall (PSx Mall), Rumah Sakit Siloam dan fasilitas parkir dengan perjanjian kerja sama Nomor 003/SPK/VI/2011 dan 001/PPM-DIR/I/2011 tanggal 25 Januari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp100.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini;
- b) Untuk Rumah Sakit, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp50.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini; dan
- c) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen.

3) PT Griya Inti Sejahtera Insani

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkerja sama dengan PT Griya Inti Sejahtera Insani dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerja samakan adalah bangunan seluas 6,819 m² dan tanah seluas 49.498 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Bangunan dan tanah tersebut digunakan untuk

revitalisasi gedung olahraga (Stadion Bumi Sriwijaya), Town Square I (Mall Palembang Icon), Town Square II (Mall Palembang Icon) dan fasilitas perparkiran dengan perjanjian kerja sama Nomor 015/ASPK/XII/2010 tanggal 30 April 2010 serta addendum Nomor 040.A/SPK/XII/2010 dan 020/GOR/GISI/XI/2010 (Addendum I) tanggal 8 Oktober 2010, Nomor 016/SPK/VI/2011 dan 034/GOR/GISI/III/2011 (Addendum II) tanggal 18 Maret 2011, dan Nomor 108/SPK/DPKAD/2014 dan 25/GISI-HO/XII/2014 (Addendum III) tanggal 24 Desember 2014. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;
- b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan
- c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

4) PT Graha Pinaringin

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkerja sama dengan PT Graha Pinaringin dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerja samakan adalah tanah seluas 60.156 m² dengan alamat di Jalan HA. Bastari Jakabaring Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk Gedung Pusat Perbelanjaan (Lippo Mall Jakabaring) dan fasilitas penunjang lainnya dengan perjanjian kerja sama Nomor 008/SPK/VI/2011 dan 001/GP-DIR/VI/2011 tanggal 24 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 29 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;
- b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan
- c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

5) PT Rajawali Jasa Tritama

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkerja sama dengan PT Rajawali Jasa Tritama dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerja samakan adalah tanah seluas 2.820 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk gedung sarana pendidikan (Sekolah Pelita Harapan) dan fasilitas penunjang lainnya dengan nomor perjanjian kerja sama 009/SPK/VI/2011 dan 001/RJT-DIR/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama

selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Sarana Pendidikan, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp330.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal;
 - b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen; dan
 - c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.
- 6) PT Magna Beatum

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkerja sama dengan PT. Magna Beatum dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerja samakan adalah tanah seluas 6.540m² dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk Pasar Modern Cinde dan fasilitas penunjang lainnya dengan perjanjian kerja sama Nomor 231/PKS/BPKAD/2016 dan MB014/PKS/DIRUT/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan Nomor 028/SPK/BPKAD/2018 dan MB103/ADD/DIRUT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu:

- a) Pasal 11 ayat (1) huruf e) menerima pendapatan dari hasil sewa tempat usaha (kios/los) pada bangunan kontribusi awal;
- b) Pasal 11 ayat (1) huruf g) dan Pasal 12 ayat (2) huruf j) menerima pembayaran kontribusi usaha setiap tahunnya dengan rumusan perhitungan pasal kontribusi usaha paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
- c) Pasal 11 ayat (1) huruf g) menerima penyerahan bangunan kontribusi akhir.
- d) Pasal 11 ayat (1) huruf g) dan Pasal 12 ayat (2) huruf j) menerima pembayaran kontribusi usaha setiap tahunnya dengan rumusan perhitungan pasal kontribusi usaha paling lambat bulan Februari tahun berikutnya;
- e) Pasal 11 ayat (1) huruf g) menerima penyerahan bangunan kontribusi akhir.

Rincian saldo Aset Kemitraan dengan pihak ketiga Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

- c. Aset Tak Berwujud berupa *software* atau sistem perangkat lunak komputer pada Tahun 2021 menyajikan saldo sebesar Rp130.386.962.349,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp109.283.355.264,00 karena adanya penambahan belanja, reklasifikasi, Koreksi, dan mutasi. Rincian saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 33**;
- d. Aset Lain-Lain Tahun 2021 menyajikan saldo sebesar Rp2.401.307.817.956,64. Saldo tersebut mengalami penurunan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp2.526.741.647.765,70 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 119. Rincian Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset Lain-lain	Saldo 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021
1	Aset Rusak Berat	701.992.637.614,74	0,00	3.551.393.300,00	698.441.244.314,74
2	Aset dimanfaatkan Pihak ketiga	37.754.018.112,70	0,00	37.754.018.112,70	0,00
3	Hewan Ternak bergulir	4.496.246.000,00	0,00	463.026.000,00	4.033.220.000,00
4	Piutang UMKM	620.354.037,00	0,00	0,00	620.354.037,00
5	Aset belum diserahkan ke Masyarakat/Pemerintah Lainnya	73.434.301.581,64	27.161.936.870,32	30.088.759.441,81	70.507.479.010,15
6	Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya	1.707.352.226.019,62	45.356.526.712,00	125.019.424.136,87	1.627.689.328.594,75
7	Persediaan Kayu Onglen	1.091.864.400,00	0,00	1.091.864.400,00	0,00
8	Barang dlm Proses Penghapusan	0,00	16.192.000,00	0,00	16.192.000,00
Jumlah		2.526.741.647.765,70	72.534.655.582,32	197.968.485.391,38	2.401.307.817.956,64

- 1) Aset Rusak Berat Tahun 2021 sebesar Rp698.441.244.314,74. Saldo tersebut mengalami penurunan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp701.992.637.614,74. yang disebabkan aset gedung bangunan pada Dinas Pendidikan yang telah direhabilitasi sehingga dapat dipergunakan sebesar Rp3.551.393.300,00, Rincian saldo aset rusak berat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 34**;
- 2) Aset yang dimanfaatkan pihak ketiga yaitu PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebesar Rp37.754.018.117,40. Jumlah tersebut merupakan nilai aset 33 bidang tanah yang telah dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 11 Juli 2017. Pada Tahun Anggaran 2016. hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan fisik atas yang menjadi aset penyertaan modal tersebut. sehingga nilai yang disajikan berbeda dengan Peraturan Daerah Penyertaan Modalnya yaitu sebesar Rp38.883.757.917,00. Sambil menunggu revisi perdanya maka aset yang dikelola sementara dicatat dalam Aset Lain-lain Aset yang dimanfaatkan pihak ketiga. Pada Tahun 2020 dilakukan koreksi pengurangan nilai sebesar Rp4,70 sehingga nilainya menjadi Rp37.754.018.112,70. Pada Tahun 2021 dilakukan reklasifikasi pencatatan tanah dari aset lainnya di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan ke Investasi Permanen pada PT. Sriwijaya Mandiri;
- 3) Hewan ternak bergulir Tahun 2021 sebesar Rp4.033.220.000,00. Saldo tersebut mengalami penurunan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp4.496.246.000,00 dikarenakan Hewan Ternak berupa sapi mati sebesar Rp52.626.000,00 dan penghapusan Hewan Ternak berupa Kambing sebesar Rp410.400.000,00 sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- 4) Piutang UMKM sebesar Rp620.354.037,00 yang merupakan nilai pokok Piutang bantuan modal kecil dan menengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 315/KPTS/DISKOP.UKM/2009 tanggal 15 April 2009. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo Tahun 2018;

- 5) Aset yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya merupakan aset lainnya berupa tanah, peralatan, gedung yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya sesuai dengan BAST pada SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 120. Rincian Aset Belum Diserahkan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Puskesmas/ Pustu/Pusdes	31.608.022.230,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bangunan rumah transmigran	0,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Bangunan lumbung desa	3.572.598.000,00
4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Peralatan pertanian	396.340.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	947.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	Aset P3D urusan UPPKB eks. Timbangan	10.904.461.600,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - PPKD	Kolam ikan	1.421.334.309,83
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	7.154.788.100,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Sarana Olahraga dan Peralatan Pemadam Kebakaran	14.502.934.770,32
Jumlah			70.507.479.010,15

Saldo Aset yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya per 1 Januari 2021 sebesar Rp73.434.301.581,64 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp70.507.479.010,15 dengan rincian pada sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 1 Januari 2021 (audited)		73.434.301.581,64
1	Penambahan:	
a)	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.835.292.725,00
b)	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.319.495.375,00
c)	Aset Renovasi CSR dari PT. BA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.007.148.770,32
Jumlah		27.161.936.870,32
2	Pengurangan:	
a)	Penghapusan Aset Lain-lain Berupa Rumah Transmigran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.398.403.103,00
b)	Penghapusan Aset CSR PT. BA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.504.214.000,00
c)	Penghapusan Aset berupa Bangunan Poskesdes pada Dinas Kesehatan	15.186.142.338,81
Jumlah		30.088.759.441,81
Saldo per 31 Desember 2021		70.507.479.010,15

- 6) Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya per 1 Januari 2021 sebesar Rp1.707.352.226.019,62 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp1.627.689.328.594,75 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 1 Januari 2021 (audited)		1.707.352.226.019,62
1	Penambahan:	
a)	Utang pembebasan lahan atas tanah pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	1.182.613.222,00
b)	Utang pembebasan lahan atas tanah pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	73.095.000,00
c)	Fisik dari Kapitasilasi Barang dan Jasa menambah Aset lain-lain pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	1.372.825.300,00
d)	Reklas dari Aset tetap Jalan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	42.727.993.190,00
	Jumlah	45.356.526.712,00
2	Pengurangan:	
a)	Reklas ke Aset Tanah pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	5.593.345.000,00
b)	Koreksi Pencatatan atas Aset Jalan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	115.620.867.686,87
c)	Penghapusan Aset berupa Jalan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.805.211.450,00
	Jumlah	125.019.424.136,87
Saldo per 31 Desember 2021		1.627.689.328.594,75

- 7) Persediaan berupa Kayu Onglen berasal dari Dinas Kehutanan sebesar Rp1.091.864.400,00. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.091.864.400,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 menjadi Rp0,00. Penurunan saldo dikarenakan penghapusan aset lain-lain oleh proses lelang kayu onglon pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.510.000.000,00; dan
- 8) Barang dalam proses penghapusan sebesar Rp16.192.000,00 merupakan barang yang hilang pada Dinas Pendidikan menunggu proses surat keputusan penghapusan.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 sebesar Rp96.327.071.916,00. Saldo tersebut mengalami peningkatan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp89.639.684.474,00. Saldo tersebut adalah Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Tidak Berwujud *Software*. Rincian saldo Akumulasi Amortisasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 35**.
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp1.008.169.863.580,00 Saldo tersebut mengalami penurunan dari saldo Tahun 2020 sebesar Rp1.123.719.279.306,87. Saldo tersebut berasal dari reklasifikasi aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan Irigasi, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan kepada masyarakat/pemerintah kabupaten/kota/pusat, atau aset yang bukan kewenangan pemerintah provinsi untuk melaksanakan pengadaannya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 121. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Dinas Kesehatan	11.677.631.375,00	11.677.631.375,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.006.344.592,00	6.006.344.592,00
3	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	963.086.144.550,00	1.078.707.012.236,87

No	SKPD	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
4	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	22.392.474.326,00	22.392.474.326,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	982.250.049,00	910.798.089,00
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	309.846.260,00	30.984.626,00
7	Dinas Perhubungan	3.715.172.428,00	3.715.172.428,00
Jumlah		1.008.169.863.580,00	1.123.440.417.672,87

4.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp1.449.569.292.272,20 dan Rp852.701.096.596,92, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.045.531.709.076,97 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp404.037.583.195,22.

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.045.531.709.076,97 dan Rp726.957.586.260,92 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 122. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Utang PFK	59.890.739.802,00	2.917.561.164,02
2	Utang Bunga	184.805.354,47	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	215.272.103.903,49	0,00
4	Pendapatan Diterima di Muka	1.203.651.638,07	1.185.425.170,83
5	Utang Belanja	501.637.475.328,69	226.526.680.931,55
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	267.342.933.050,26	496.327.918.994,52
Jumlah		1.045.531.709.076,97	726.957.586.260,92

Penjelasan atas kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp59.890.739.802,00 dan Rp2.917.561.164,02, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 123. Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No	Utang PFK	Utang PFK Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang PFK 2021
1	PPh Pasal Ayat 21	851.406.535,00	26.438.615,00	851.406.535,00	26.438.615,00
2	PPh Pasal Ayat 22	107.850.936,00	399.136,00	107.850.936,00	399.136,00
3	PPh Pasal Ayat 23	32.252.303,00	397.600,00	32.252.303,00	397.600,00
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	1.300.591,00	0,00	1.300.591,00	0,00
5	PPN	1.856.696.299,02	8.010.076,00	1.856.696.299,02	8.010.076,00
6	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	68.054.500,00	44.771.504,00	68.054.500,00	44.771.504,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan - BPJS	0,00	59.810.722.871,00	0,00	59.810.722.871,00
Jumlah		2.917.561.164,02	59.890.739.802,00	2.917.561.164,02	59.890.739.802,00

Saldo utang PFK sebesar Rp59.890.739.802,00 adalah pajak yang belum disetor yang terdapat pada bendahara BOS sebesar Rp1,00, bendahara PSG sebesar Rp35.245.426,00, utang PFK Lainnya BOS sebesar Rp920,00, utang PFK Lainnya PSG sebesar Rp44.770.584,00, serta Iuran Jaminan Kesehatan – BPJS sebesar Rp59.810.722.871,00.

Nilai Utang PFK Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp59.810.722.871,00 belum memperhitungkan komponen Tunjangan Jasa Pelayanan Kesehatan, dan TPP Beban Kerja pada Biro Umum, Biro Humas, dan Biro PBJ, serta belum memperhitungkan Tunjangan Insentif Pemungutan Pajak pada Bapenda. Nilai tersebut juga belum dilakukan validasi dan rekonsiliasi dengan pihak BPJS.

2. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp184.805.354,47 dan Rp0,00,-. Utang Bunga Tahun 2021 ini merupakan Utang Bunga yang belum dicatat mulai tanggal 26 Desember sampai dengan 31 Desember 2021 atas pinjaman Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp215.272.103.903,49 dan Rp0,00,-. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2021 ini merupakan Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dari yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.203.744.788,75 dan Rp1.185.425.170,83 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 124. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Pendapatan diterima dimuka	Pendapatan diterima dimuka Audited 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka 2021
1	RSUD Siti Fatimah	249.000.000,00	68.493,15	287.975.342,47	249.000.000,00	287.906.849,32
2	Dinas Perhubungan	30.665.837,50	0,00	25.979.472,00	30.665.837,50	25.979.472,00
3	Sekretariat Daerah	100.125.000,00	297.831,00	84.510.126,00	56.176.571,09	128.160.723,91
4	BPKAD	805.634.333,33	(276.416.723,29)	0,00	320.446.463,78	761.604.592,84
	Jumlah	1.185.425.170,83	276.050.399,14	398.464.940,47	656.288.872,37	1.203.651.638,07

a. RSUD Siti Fatimah sebesar Rp287.906.849,32 merupakan pendapatan diterima dimuka atas:

- 1) Pendapatan sewa Bakery Mouzie and Cake sebesar Rp16.493.150,69 dengan nomor kontrak 900/05713/BPKAD-V/2020 sebesar Rp30.000.000,00;
- 2) Pendapatan sewa Bank Sumsel Babel sebesar Rp176.438.356,16 dengan nomor kontrak 606/KPTS/BPKAD/2020 sebesar Rp230.000.000,00;

- 3) Pendapatan sewa Toko Kopi Subway sebesar Rp71.975.342,47 dengan nomor kontrak 020/3938/KES/I/2021 sebesar Rp81.000.000,00;
 - 4) Pendapatan sewa Toko Marsha (*snack corner*) sebesar Rp17.000.000,00 dengan nomor kontrak 445/011/4.1/RSUD-SF/PKS/I/2022 sebesar Rp17.000.000,00 dan pendapatan sewa sudah diterima tanggal 28 Desember 2021; dan
 - 5) Pendapatan sewa Toko Marsha (*fotocopy*) sebesar Rp6.000.000,00 dengan nomor kontrak 445/012/4.1/RSUD-SF/PKS/I/2022 sebesar Rp6.000.000,00 dan pendapatan sewa sudah diterima tanggal 28 Desember 2021.
- b. Dinas Perhubungan sebesar Rp25.979.472,00 adalah pendapatan diterima dimuka atas pendapatan sewa kios di terminal jakabaring sebesar Rp6.522.677,00 dan sewa ruangan di Pelabuhan Tanjung Api-Api sebesar Rp19.456.795,00.
- c. Sekretariat Daerah sebesar Rp128.160.723,91,00 merupakan pendapatan diterima dimuka atas:
- 1) Pendapatan sewa tanah median parkir Stadion Bumi Sriwijaya oleh PT. Quatro Internasional sebesar Rp15.927.434,00 dengan nomor kontrak 03/SK/PPA/2017 sebesar Rp150.000.000,00;
 - 2) Pendapatan sewa lahan belakang kantor gubernur oleh PT XL Axiata sebesar Rp22.714.180,00 dengan nomor kontrak 057/SPK/VII/2018 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3) Pendapatan sewa area halaman parkir Stadion Bumi Sriwijaya oleh PT RS Siloam sebesar Rp5.008.984,00 dengan nomor kontrak 51/PPA/VII/2018 sebesar Rp17.500.000,00; dan
 - 4) Pendapatan sewa lahan kantor gubernur oleh PT BPD Sumsel Babel sebesar Rp84.510.125,91 dengan nomor kontrak 019/SPK/VIII/2021 sebesar Rp100.000.000,00.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp761.604.592,84 merupakan pendapatan diterima di muka atas:
- 1) Pendapatan sewa PT. SAI (Pemanfaatan lahan parkir Kawasan Stadion Bumi Sriwijaya Jl. POM dan IX Kampus Palembang) sebesar Rp134.700.000,00 dengan nomor kontrak 026/SPK/BPKAD/2019 dan 0808-1/PT.SAI-PKS/VIII/2019 sebesar Rp673.500.000,00;
 - 2) Pendapatan sewa lahan Pemprov Sumsel jalan Kapt.A.Rivai Kel 26 Ilir dan Jalan Kapt. A. Rivai Kel Lorok Pakjo Palembang oleh PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp70.939.504,11 dengan nomor kontrak No. 044/SPK/BPKAD/2019 dan No. 324/UM/2/SPP/2019 sebesar Rp124.605.000,00;
 - 3) Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan Pemprov Sumsel di Jalan Kapten A Rivai No.51 Kel Sei Pangeran Kec IB 1 Palembang oleh PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp155.568.189,04 dengan nomor kontrak No.045/SPK/BPKAD/2019 dan No.325/UM/2/SPP/2019 sebesar Rp273.255.000,00;

- 4) Pendapatan sewa lahan di Jalan POM IX Kel Lorok Pakjo dan Jalan Palembang Darussalam Kec Bukit Kecil Palembang oleh PT Quattro Internasional sebesar Rp81.553.972,60 dengan nomor kontrak 0251/SPK/BPKAD/2019 dan No. 001/PKS-Quantro/Sumsel/VI/2019 sebesar Rp157.000.000,00.
- 5) Pendapatan Sewa lahan ATM Drive true Jakabaring, lahan parkir Jakabaring dan ATM *drive thru* kampus oleh PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp102.122.665,75 dengan nomor kontrak No. 593/115/KPTS/BPKAD-V/2021 dan 80/UMM/2/SPP/2021 sebesar Rp361.891.000,00;
- 6) Pendapatan sewa tanah dan bangunan rukan untuk kantor sekretariat Jalan Basuki Rahmat Palembang oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumsel sebesar Rp54.340.723,29 dengan nomor kontrak 028/SPK/BPKAD/2020 dan 002/MOU/AIA-SS/VI/2020 sebesar Rp77.660.000,00;
- 7) Pendapatan Sewa Paguyuban Nusantara Sumsel bersatu (PNSB) di Jl. Diponegoro Palembang disetor tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp52.622.204,71 dengan nomor kontrak 029/SPK/BPKAD/2021 dan 19/DPP-PNSB/IV/2021 sebesar Rp61.091.300,00;
- 8) Pendapatan sewa tanah dan bangunan Jl. Jenderal Sudirman, Jl Bay Salim Sekip Palembang untuk Alfamart depan Kodam, Apotik Kimia Farma samping lia, Kedai Pak Cik Man Sekip oleh Koperasi Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp13.740.894,98 dengan nomor kontrak 900/00573/BPKAD-V/2020 dan 273/06/KPRI-BP/SET/2020 sebesar Rp77.960.000,00; dan
- 9) Pendapatan sewa lahan kolam retensi Palembang Icon oleh PT. Grand Modern sebesar Rp96.016.438,36 dengan nomor kontrak 017/KONTRAK/BPKAD/2018 dan 0511/GM/V/2018 sebesar Rp354.000.000,00.

5. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp501.637.475.328,69 dan Rp226.526.680.931,55 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 125. Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
1	Utang Belanja Pegawai	506.517.586,00	0,00	0,00	506.517.586,00	0,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.705.773.144,40	2,32	29.428.007.709,17	12.620.140.493,25	30.513.640.358,00
-	Utang Belanja Rutin	1.100.000,00	0,00	125.250.000,00	1.100.000,00	125.250.000,00
-	Utang Belanja Barjas BLUD	638.946.437,49	0,00	11.892.055.609,00	620.252.220,49	11.910.749.826,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
-	Utang Belanja Pihak Ketiga	13.065.726.706,91	2,32	17.410.702.100,17	11.998.788.272,76	18.477.640.532,00
3	Utang Belanja Hibah	9.430.187.000,00	0,00	0,00	0,00	9.430.187.000,00
-	DAK Non Fisik BOS	9.430.187.000,00	0,00	0,00	0,00	9.430.187.000,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	100.570.243.223,00	0,00	157.767.683.766,00	100.570.243.223,00	157.767.683.766,00
-	Utang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	20.105.568.276,00	0,00	20.105.568.276,00
-	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah	100.570.243.223,00	0,00	137.662.115.490,00	100.570.243.223,00	137.662.115.490,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	102.313.959.978,15	0,00	233.913.957.014,11	32.301.952.787,57	303.925.964.204,69
-	Jamsoskes Kab/Kota	102.313.959.978,15	0,00	0,00	32.301.952.787,57	70.012.007.190,58
-	Integrasi Program BPJS Kesehatan	0,00	0,00	23.176.574.691,00	0,00	23.176.574.691,00
-	Bersifat Khusus	0,00	0,00	210.737.382.323,11	0,00	210.737.382.323,11
Jumlah		226.526.680.931,55	2,32	421.109.648.489,28	145.998.854.089,82	501.637.475.328,69

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp506.517.586,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 126. Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Pegawai Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2021
1	Dinas Perindustrian				
-	tagihan pembayaran pembelian beras premium untuk ASN kepada Perum Bulog	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	0,00
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				
-	Kekurangan Gaji Bulan Oktober-Nopember 2020	3.487.586,00	0,00	3.487.586,00	0,00
3	Badan Pendapatan Daerah				
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (BBN-KB) Triwulan IV Tahun 2020 untuk Bagian Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	495.000.000,00	0,00	495.000.000,00	0,00
Jumlah		506.517.586,00	0,00	506.517.586,00	0,00

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp30.513.640.358,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp13.705.773.144,40 terdiri dari utang belanja rutin,

utang belanja barang dan jasa BLUD dan utang belanja pihak ketiga sebagai berikut.

- 1) Utang Belanja Rutin adalah utang atas tagihan pembayaran langsung honor jasa tenaga laboratorium, honor narasumber dan jasa tenaga ahli pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp125.250.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 127. Rincian Mutasi Utang Belanja Rutin

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Rutin	Utang beban rutin Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Rutin Tahun 2021
1	Dinas Perindustrian				
-	Tagihan pembayaran pembelian beras premium untuk Honorer kepada Perum Bulog	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
-	Pembayaran Langsung Honor Jasa Tenaga Laboratorium Keg. Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0.00	Rp20,100,000.00	0.00	20,100,000.00
-	Pembayaran Langsung Honor Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli Keg. Pembayaran Langsung Honor Narasumber dan Jasa Tenaga Ahli Keg. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0.00	Rp30,400,000.00	0.00	30,400,000.00
-	Pembayaran Langsung Jasa Tenaga Ahli Keg. Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemb. Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0.00	Rp74,750,000.00	0.00	74,750,000.00
	Jumlah	1,100,000.00	125,250,000.00	1,100,000.00	125,250,000.00

- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp11.910.749.826,00 terdapat pada RS. Paru-Paru, RS. Gigi dan Mulut dan RSUD Siti Fatimah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 128. Rincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2021
A. RS. Paru-Paru					
1	Belanja Jasa pelayanan	17.301.418,00	14.753.595,00	17.301.418,00	14.753.595,00
2	Biaya Pemeriksaan laboratorium BBLK	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
	Jumlah	17.301.418,00	15.423.595,00	17.301.418,00	15.423.595,00
B. RS. Gigi dan Mulut					
1	PT. Rentokil (Fest control) bulan November 2020	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00
2	Jasa Pelayanan Dokter Bedah Mulut (BPJS Okt, Nov, Des dan Umum Des 2020)	16.078.843,00	0,00	16.078.843,00	0,00
3	Belanja Jasa Pelayanan lainnya	207.837.868,80	0,00	207.837.868,80	0,00
4	Jasa Pencucian Linen Kotor (RSMH) Bulan Desember 2020	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00

No	Utang Belanja Barjas BLUD	Utang Belanja Barjas BLUD Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Barjas BLUD Tahun 2021
5	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Prostodonti (BPJS Bulan Sept, BPJS Okt, BPJS Nov)	0,00	135.213.936,00	0,00	135.213.936,00
6	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Bedah Mulut (BPJS Sept, BPJS Okt, Umum Des)	0,00	23.602.070,00	0,00	23.602.070,00
7	Jasa Pencucian Linen Kotor (RSMH) Bulan Desember 2021	0,00	1.642.500,00	0,00	1.642.500,00
8	Jasa Pelayanan Pegawai RS (Bulan Nov dan Des)	0,00	441.195.924,00	0,00	441.195.924,00
9	Jasa Pemeriksaan Laboratorium BBLK (Bulan Desember)	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
10	Jasa Pengendalian Hama - PT. Rentokil (Nov 2021)	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00
	Jumlah	226.502.711,80	604.885.430,00	226.502.711,80	604.885.430,00
C. RSUD Siti Fatimah					
1	Belanja Obat-Obatan	0,00	6.259.342.658,00	0,00	6.259.342.658,00
2	Belanja Sewa Peralatan Medis/Non Medis	0,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	241.054.000,00	0,00	241.054.000,00
4	Belanja Persediaan Alkes	0,00	2.112.000,00	0,00	2.112.000,00
5	Belanja Jasa Asuransi Pegawai	40.835,00	0,00	40.835,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	16.280.000,00	0,00	16.280.000,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
8	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	61.283.600,00	0,00	61.283.600,00	0,00
9	Belanja Jasa Perizinan	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	0,00
10	Belanja kawat/faksimili/internet	1.551.000,00	321.210.000,00	1.551.000,00	321.210.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.400.000,00	440.601.000,00	18.400.000,00	440.601.000,00
12	Belanja Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	253.979.072,69	2.849.634.624,00	235.284.855,69	868.328.841,00
13	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.499.800,00	275.444.400,00	7.499.800,00	275.444.400,00
14	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	877.507.902,00	0,00	877.507.902,00
	Jumlah	395.142.307,69	11.271.746.584,00	376.448.090,69	11.290.440.801,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	638.946.437,49	11.892.055.609,00	620.252.220,49	11.910.749.826,00

- 3) Utang Belanja Pihak Ketiga sebesar Rp18.477.640.532,00 adalah utang belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 129. Rincian Mutasi Utang Belanja Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Pihak Ketiga/SKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga Audited 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	21,468,000.00	0,00	2,426,448,840.00	21,468,000.00	2,426,448,840.00
2	Dinas Kesehatan	225,276,650.00	0,00	871,659,413.72	88,927,200.00	1,008,008,863.72

No	Utang Belanja Pihak Ketiga/SKPD	Utang Belanja Pihak Ketiga Audited 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Belanja Pihak Ketiga Tahun 2021
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3,447,931,579.32	2.32	5,955,177,332.00	3,245,896,877.00	6,157,212,032.00
4	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	2,093,343,760.00	0,00	4,433,029,274.00	2,093,343,760.00	4,433,029,274.00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6,263,735,508.28	0,00	2,698,664,178.00	5,535,181,226.45	3,427,218,459.83
6	Dinas Perhubungan	3,949,350.00	0,00	3,984,500.00	3,949,350.00	3,984,500.00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	48,847,600.00	0,00	308,652,530.00	48,847,600.00	308,652,530.00
8	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	176,400,000.00	0,00	176,400,000.00
9	Dinas Perkebunan	44,606,200.00	0,00	0,00	44,606,200.00	0,00
10	Dinas Kehutanan	12,959,231.89	0,00	13,183,352.45	12,959,231.89	13,183,352.45
11	Sekretariat Daerah	235,984,000.09	0,00	24,399,650.00	235,984,000.09	24,399,650.00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	103,161,800.00	0,00	0,00	103,161,800.00	0,00
13	Badan Pendapatan Daerah	72,500,000.00	0,00	0,00	72,500,000	0,00
14	Badan Kepegawaian Daerah	174,950,587.00	0,00	0,00	174,950,587.00	0,00
15	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	231,762,440.33	0,00	499,103,030.00	231,762,440.33	499,103,030.00
16	Sekretariat DPRD	85,250,000.00	0,00	0,00	85,250,000.00	0,00
Jumlah		13,065,726,706.91	2.32	17,410,702,100.17	11,998,788,272.76	18,477,640,532.00

Rincian Utang Belanja Pihak Ketiga per kegiatan terdapat pada **Lampiran 36**.

c. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah atas sisa dana DAK Non Fisik BOS satuan pendidikan provinsi yang belum disalurkan ke kabupaten/kota Tahun 2019 sebesar Rp9.430.187.000,00. Saldo utang beban hibah ini merupakan akumulasi sisa dana BOS Lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2021 tidak berubah karena belum ada peruntukannya.

d. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp157.767.683.766,00 dan Rp100.570.243.223,00 yang merupakan kurang salur alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-Nopember (Triwulan IV) dan alokasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota bulan Desember 2021 yang belum disalurkan kepada kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Utang Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-Nopember (Triwulan IV) sebesar Rp20.105.568.276,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 197/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Kurang Salur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (bulan

Oktober sampai dengan bulan November 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Rincian mutasi utang bagi hasil pajak rokok per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 130. Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Utang Bagi hasil Pajak Rokok (Kab/Kota)	Saldo awal Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Rokok Tahun 2021
Palembang	0.00	3,250,368,231.61	0.00	3,250,368,231.61
Musi Banyuasin	0.00	1,202,248,584.99	0.00	1,202,248,584.99
Banyuasin	0.00	1,740,063,948.08	0.00	1,740,063,948.08
OKI	0.00	2,097,952,052.45	0.00	2,097,952,052.45
Ogan Ilir	0.00	1,109,937,941.15	0.00	1,109,937,941.15
OKU	0.00	1,184,756,981.05	0.00	1,184,756,981.05
OKU Selatan	0.00	584,238,249.91	0.00	584,238,249.91
OKU Timur	0.00	1,397,701,034.03	0.00	1,397,701,034.03
Muara Enim	0.00	1,661,232,783.75	0.00	1,661,232,783.75
Prabumulih	0.00	862,613,285.98	0.00	862,613,285.98
Lahat	0.00	941,444,450.59	0.00	941,444,450.59
Pagar Alam	0.00	464,968,647.60	0.00	464,968,647.60
Musi Rawas	0.00	921,225,231.60	0.00	921,225,231.60
Lubuklinggau	0.00	666,478,932.70	0.00	666,478,932.70
Empat Lawang	0.00	247,933,172.20	0.00	247,933,172.20
Musi Rawas Utara	0.00	896,311,983.65	0.00	896,311,983.65
PALI	0.00	876,092,764.66	0.00	876,092,764.66
Jumlah	0.00	20,105,568,276.00	0.00	20,105,568,276.00

- 2) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota bulan Desember 2021 sebesar Rp137.662.115.490,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitf, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Rincian mutasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 131. Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Utang Bagi hasil Pajak(Kab/Kota)	Saldo awal Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2021
Palembang	25.696.763.406,00	34.269.096.711,00	25.696.763.406,00	34.269.096.711,00
Musi Banyuasin	6.721.718.851,00	9.308.360.377,00	6.721.718.851,00	9.308.360.377,00
Banyuasin	5.627.593.480,00	8.031.128.310,00	5.627.593.480,00	8.031.128.310,00
OKI	7.155.235.528,00	9.475.725.158,00	7.155.235.528,00	9.475.725.158,00
Ogan Ilir	4.173.164.535,00	5.659.307.771,00	4.173.164.535,00	5.659.307.771,00
OKU	4.802.777.647,00	6.038.044.424,00	4.802.777.647,00	6.038.044.424,00

Utang Bagi hasil Pajak(Kab/Kota)	Saldo awal Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2021
OKU Selatan	3.109.813.406,00	4.273.605.500,00	3.109.813.406,00	4.273.605.500,00
OKU Timur	4.052.064.771,00	5.657.003.833,00	4.052.064.771,00	5.657.003.833,00
Muara Enim	8.293.802.828,00	13.610.740.910,00	8.293.802.828,00	13.610.740.910,00
Prabumulih	4.543.538.914,00	5.760.063.140,00	4.543.538.914,00	5.760.063.140,00
Lahat	5.815.617.723,00	8.195.014.302,00	5.815.617.723,00	8.195.014.302,00
Pagar Alam	3.119.849.544,00	4.092.063.047,00	3.119.849.544,00	4.092.063.047,00
Musi Rawas	4.026.590.515,00	5.479.369.865,00	4.026.590.515,00	5.479.369.865,00
Lubuklinggau	4.410.212.663,00	5.625.250.638,00	4.410.212.663,00	5.625.250.638,00
Empat Lawang	2.760.230.866,00	3.826.488.954,00	2.760.230.866,00	3.826.488.954,00
Musi Rawas Utara	3.012.250.013,00	4.105.450.805,00	3.012.250.013,00	4.105.450.805,00
PALI	3.249.018.533,00	4.255.401.745,00	3.249.018.533,00	4.255.401.745,00
Jumlah	100.570.243.223,00	137.662.215.490,00	100.570.243.223,00	137.662.115.490,00

Rincian mutasi utang bagi hasil pajak per jenis pajak terdapat pada tabel berikut.

Tabel 132. Rincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak

(dalam rupiah)

No	Utang Bagi hasil Pajak(Jenis Pajak)	Saldo awal Audited 2020	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2021
1	PKB R2 + R4	31,982,207,633.00	39,173,077,163.00	31,982,207,633.00	39,173,077,163.00
2	PKB A. BERAT	3,315,068.00	2,480,400.00	3,315,068.00	2,480,400.00
3	PKAA	1,592,640.00	272,925.00	1,592,640.00	272,925.00
4	BBN-KB R2 + R4	20,986,441,950.00	32,755,343,155.00	20,986,441,950.00	32,755,343,155.00
5	BBN-KB A. BERAT	00,0	00,0	00,0	00,0
6	BBN-KAA	00,0	00,0	00,0	00,0
7	PBB-KB	47,056,392,634.00	65,188,710,625.00	47,056,392,634.00	65,188,710,625.00
8	PAP	540,293,298.00	542,231,222.00	540,293,298.00	542,231,222.00
	Jumlah	100,570,243,223.00	137,662,115,490.00	100,570,243,223.00	137,662,115,490.00

e. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp303.925.964.204,69 dan 102.313.959.978,15. Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 merupakan Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota, Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan dan Utang Bantuan Keuangan bersifat khusus dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp70.012.007.190,58 merupakan utang jaminan kesehatan program Gubernur Sumatera Selatan dengan sistem *cost sharing*. Saldo utang Jamsoskes tersebut berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi pada tanggal 15 Februari 2018 dan pada Tahun 2021 telah dilakukan pembayaran kepada 11 kabupaten/kota dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 133. Mutasi Utang Jamsoskes Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Per 31 Desember 2020	Mutasi		Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	Lubuklinggau	00,0	00,0	00,0	00,0
2	OKU	5,349,838,584.06	00,0	3,570,744,197.69	1,779,094,386.37
3	OKU Timur	7,818,115,170.05	00,0	00,0	7,818,115,170.05
4	Banyuasin	00,0	00,0	00,0	00,0
5	Lahat	14,943,973,730.67	00,0	4,483,192,119.20	10,460,781,611.47
6	Mura	5,908,634,178.38	00,0	2,043,506,150.00	3,865,128,028.38
7	Empat Lawang	6,156,747,644.65	00,0	1,541,395,366.50	4,615,352,278.15
8	PALI	9,877,296,056.92	00,0	00,0	9,877,296,056.92
9	Muratara	7,577,631,328.13	00,0	2,273,289,398.44	5,304,341,929.69
10	OKI	11,670,788,172.10	00,0	8,407,344,649.76	3,263,443,522.34
11	Ogan Ilir	2,126,478,152.35	00,0	1,147,095,343.98	979,382,808.37
12	Prabumulih	4,214,193,186.23	00,0	1,264,257,955.87	2,949,935,230.36
13	Muara Enim	16,524,150,504.95	00,0	4,962,159,025.49	11,561,991,479.46
14	OKU Selatan	8,219,210,335.74	00,0	2,465,763,100.72	5,753,447,235.02
15	Pagar Alam	1,783,697,454.00	00,0	00,0	1,783,697,454.00
16	Palembang	143,205,479.92	00,0	143,205,479.92	00,0
	Jumlah	102,313,959,978.15	00,0	32,301,952,787.57	70,012,007,190.58

- 2) Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp23.176.574.691,00 merupakan Utang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 269/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Kurang Salur Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 134. Utang Integrasi Program BPJS Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Palembang	6,580,006,691.00
2	Musi Banyuasin	908,643,000.00
3	Banyuasin	1,571,259,000.00
4	Ogan Komering Ilir	1,624,446,500.00
5	Ogan Ilir	1,263,383,500.00
6	Ogan Komering Ulu	548,020,500.00
7	Ogan Komering Ulu Selatan	1,767,991,500.00
8	Ogan Komering Ulu Timur	1,318,936,500.00
9	Muara Enim	2,041,480,500.00
10	Prabumulih	699,643,500.00
11	Lahat	0,00
12	Pagar Alam	598,995,000.00
13	Musi Rawas	808,637,000.00

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
14	Lubuklinggau	434,708,000.00
15	Empat Lawang	1,519,188,000.00
16	Musi Rawas Utara	749,955,000.00
17	Penukal Abab Lematang Ilir	741,280,500.00
Total		23,176,574,691.00

- 3) Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2021 sebesar Rp210.737.382.323,11 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada APBD Tahun 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 135. Utang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Palembang	50,730,640,430.00
2	Musi Banyuasin	0,00
3	Banyuasin	37,508,863,168.79
4	Ogan Komering Ilir	4,974,000,000.00
5	Ogan Ilir	12,811,000,000.00
6	Ogan Komering Ulu	0,00
7	OKU Selatan	3,462,377,526.21
8	OKU Timur	50,365,940,588.11
9	Muara Enim	16,616,846,610.00
10	Prabumulih	12,543,061,200.00
11	Lahat	2,204,990,400.00
12	Pagar Alam	0,00
13	Musi Rawas	8,309,000,000.00
14	Lubuklinggau	0,00
15	Empat Lawang	7,630,120,400.00
16	Musi Rawas Utara	0,00
17	PALI	3,580,542,000.00
Jumlah		210,737,382,323.11

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp267.342.933.050,26 dan Rp496.327.918.994,52 merupakan Utang Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal SKPD yang belum dibayar sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang akibat kesalahan transfer pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2020 terdapat Utang akibat kesalahan transfer pendapatan Rp1.829.478.735,00 yang merupakan penerimaan pendapatan transfer milik

Provinsi Sulawesi Selatan sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-261/PK.4/2020 tanggal 30 Desember 2020 telah dikembalikan pada Tahun 2021.

- b. Utang belanja modal BLUD sebesar Rp8.347.231.365,00 adalah utang belanja modal pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, RS. Umum Siti Fatimah dan RS. Khusus Paru dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 136. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal BLUD

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Modal BLUD	Utang BM BLUD Audited 2019	Mutasi Tambah Tahun 2020	Mutasi kurang Tahun 2020	Saldo Akhir Utang BM BLUD Tahun 2020
1	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup				
-	PT. LEGEND BUKIT KONSTRUKSI	197.802.513,33	0,00	197.802.513,33	0,00
-	CV. PSMS KONSULTAN	9.806.500,00	0,00	9.806.500,00	0,00
	Jumlah	207.609.013,33	0,00	207.609.013,33	0,00
2	RS. Umum Siti Fatimah (BLUD)				
-	PT RAJAWALI NUSINDO	0,00	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00
-	PT AGTIFA DWI PUTRI	0,00	7.525.246,00	0,00	7.525.246,00
-	PT PARIT PANJANG	0,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00
-	PT INTI MEDIKA PERSADA	0,00	9.724.734,00	0,00	9.724.734,00
-	PT DIPA PHARMALAB	0,00	61.995.049,00	0,00	61.995.049,00
-	PT THAMRIN BROTHERS	0,00	103.440.000,00	0,00	103.440.000,00
-	PT ANUGERAH MEGALESTARI	0,00	8.574.000,00	0,00	8.574.000,00
-	PT Worckhardt Pharma Indo	0,00	263.146.343,00	0,00	263.146.343,00
-	PT Abhimata Manunggal	0,00	120.539.250,00	0,00	120.539.250,00
-	PT Tawada Healthcare	0,00	58.584.465,00	0,00	58.584.465,00
-	CV Anka	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
-	PT Rajawali Nusindo	0,00	80.763.000,00	0,00	80.763.000,00
-	PT Intergastra Nusantara	0,00	2.250.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00
-	PT Tawada Healthcare	0,00	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00
-	PT Enseval Putera Megatrading	0,00	520.021.204,00	0,00	520.021.204,00
-	PT Mulya Husada Jaya	0,00	230.600.000,00	0,00	230.600.000,00
-	PT Surgika Alkesindo	0,00	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00
-	PT Airindo Sentra Medika	0,00	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00
-	PT Labora Mandiri Indo Pratama	0,00	24.110.804,00	0,00	24.110.804,00
-	PT Indofarma Global Medika	0,00	177.000.000,00	0,00	177.000.000,00
-	PT Timur Raya Lestari	0,00	15.792.744,00	0,00	15.792.744,00
-	PT Karsa Ragraprima Sukses	0,00	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00
-	PT EMS Indoappliances	0,00	53.363.636,00	0,00	53.363.636,00
-	PT Duta Indo Omnitron	0,00	124.100.000,00	0,00	124.100.000,00
-	CV OSA	0,00	431.596.000,00	0,00	431.596.000,00
-	CV Tata P'Setya	0,00	152.539.750,00	0,00	152.539.750,00
-	CV Sriwijaya Consultan	0,00	185.794.400,00	0,00	185.794.400,00
-	PT Sayovi Karyatama	0,00	203.935.935,00	0,00	203.935.935,00
-	PT Agtifa Dwi Putri	0,00	100.499.160,00	0,00	100.499.160,00
-	PT.Sriwijaya Konsultan	0,00	157.865.400,00	0,00	157.865.400,00
-	PT.Sriwijaya Konsultan	0,00	139.345.800,00	0,00	139.345.800,00

No	Utang Belanja Modal BLUD	Utang BM BLUD Audited 2019	Mutasi Tambah Tahun 2020	Mutasi kurang Tahun 2020	Saldo Akhir Utang BM BLUD Tahun 2020
-	PT OSA PUTRA BATOM	0,00	1.798.085.800,00	0,00	1.798.085.800,00
-	PT Sayovi Karyatama	0,00	67.978.645,00	0,00	67.978.645,00
-	PT. Medison Jaya Raya	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Jumlah	0,00	8.232.646.365,00	0,00	8.232.646.365,00
3	RS. Khusus Paru				
-	CV. Platinum Consultant	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
-	CV. Tata P'Setya	0,00	94.985.000,00	0,00	94.985.000,00
	Jumlah	0,00	114.585.000,00	0,00	114.585.000,00
	Jumlah Utang Belanja Modal BLUD	207.609.013,33	8.347.231.365,00	207.609.013,33	8.347.231.365,00

- c. Utang belanja modal SKPD sebesar Rp258.955.701.685,26 adalah utang belanja modal pada SKPD yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 137. Rincian Mutasi Utang Belanja Modal SKPD

(dalam rupiah)

No	Utang Belanja Modal SKPD	Utang BM SKPD Audited 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang BM SKPD Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan	642.264.700,00	0,00	10.690.818.467,00	642.264.700,00	10.690.818.467,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	1.378.384.050,00	0,00	799.917.900,00	1.137.075.800,00	1.041.226.150,00
4	Rs. Dr Ernaldi Bahar (SKPD)	147.988.988,00	0,00	0,00	147.988.988,00	0,00
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	393.844.407.548,65	15,93	234.508.904.615,00	393.810.596.788,65	234.542.715.375,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	29.541.736.317,04	2,04	1.976.185.343,00	27.124.702.140,04	4.393.219.520,00
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	61.486.746.268,72	0,00	3.837.066.257,74	59.388.738.644,20	5.935.073.882,26
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	353.970.648,78	0,00	0,00	353.970.648,78	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (SKPD)	2.749.900.000,00	0,00	0,00	2.749.900.000,00	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	0,00	20.210.000,00	0,00	20.210.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	0,00	0,00	83.675.750,00	0,00	83.675.750,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	42.469.600,00	0,00	42.469.600,00
13	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	224.282.565,00	0,00	224.282.565,00
14	Sekretariat Daerah	485.221.252,00	0,00	1.667.452.750,00	485.221.252,00	1.667.452.750,00
15	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)	19.840.350,00	0,00	0,00	19.840.350,00	0,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	183.225.000,00	0,00	0,00	183.225.000,00	0,00
17	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	84.789.000,00	0,00	205.201.826,00	84.789.000,00	205.201.826,00

No	Utang Belanja Modal SKPD	Utang BM SKPD Audited 2020	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah Tahun 2021	Mutasi kurang Tahun 2021	Saldo Akhir Utang BM SKPD Tahun 2021
18	Sekretariat DPRD	3.372.357.123,00	0,00	84.503.800,00	3.372.357.123,00	84.503.800,00
19	Badan Penghubung	0,00	0,00	64.852.000,00		64.852.000,00
Jumlah		494.290.831.246,19	17,97	254.205.540.873,74	489.500.670.434,67	258.995.701.685,26

Dari nilai utang belanja modal SKPD sebesar Rp258.955.701.685,26 terdapat utang yang kegiatannya dibiayai dari pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp84.256.839.770,65 yang terdapat pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp75.067.555.047,21, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp2.283.554.427,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.905.730.296,44. Rincian Utang Belanja Modal SKPD per kegiatan terdapat pada **Lampiran 37**.

4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2021 adalah Rp404.037.583.195,22 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

- Pinjaman Daerah Tahun 2020 sebesar Rp410,096,078,267.71 terdiri dari Rp125.743.510.336,00 yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp125.675.197.122,71 dan pada sub rekening Kas daerah sebesar Rp68.313.213,29 pada Tahun 2020 dan Rp284.352.567.931,71 yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun 2021.

Pinjaman ini dengan jangka waktu ditetapkan selama 36 bulan yaitu dimulai sejak pencairan pinjaman pertama kali termasuk masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 18 bulan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pemberian pinjaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor PERJ-127/SMI/1020 tanggal 15 Oktober 2020.

Atas setiap pinjaman berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikenakan bunga sebesar 0% (nol persen) dan wajib membayar biaya pengelolaan pinjaman dan biaya provisi sebagaimana diatur dalam surat perjanjian tersebut.

- Pinjaman Daerah Tahun 2021 sebesar Rp209.213.608.831,00 merupakan pencairan tahap 1 dan tahap 2 yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah di Tahun 2021 dari total limit pinjaman yang disetujui setinggi-tingginya sebesar Rp301.048.770.000,00.

Pinjaman ini dengan jangka waktu ditetapkan selama 36 bulan yaitu dimulai sejak pencairan pinjaman pertama kali termasuk masa tenggang pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian pemberian pinjaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor PERJ-145/SMI/0921 tanggal 17 September 2021.

Atas setiap pinjaman berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikenakan bunga sebesar 5,30% (lima koma tiga puluh persen) dan wajib

membayar biaya pengelolaan pinjaman dan biaya provisi sebagaimana diatur dalam surat perjanjian tersebut.

Dari Total Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp619.309.687.098,71, sebesar Rp215.272.103.903,49 akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Sehingga saldo kewajiban jangka panjang Tahun 2021 sebesar Rp404.037.583.195,22.

Kewajiban Jangka Panjang ini digunakan untuk mendanai program/kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tahun 2021 sebesar Rp207.096.369.339,00. Rincian program/kegiatan yang didanai dari utang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terdapat pada **Lampiran 38**.

4.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp31.706.217.538.129,72 dan Rp31.142.490.750.017,20. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	: Rp33.095.976.107.530,92
Kewajiban	: (Rp 1.389.758.569.401,20)
Ekuitas	: Rp31.706.217.538.129,72

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.4.1.1 Pendapatan - LO

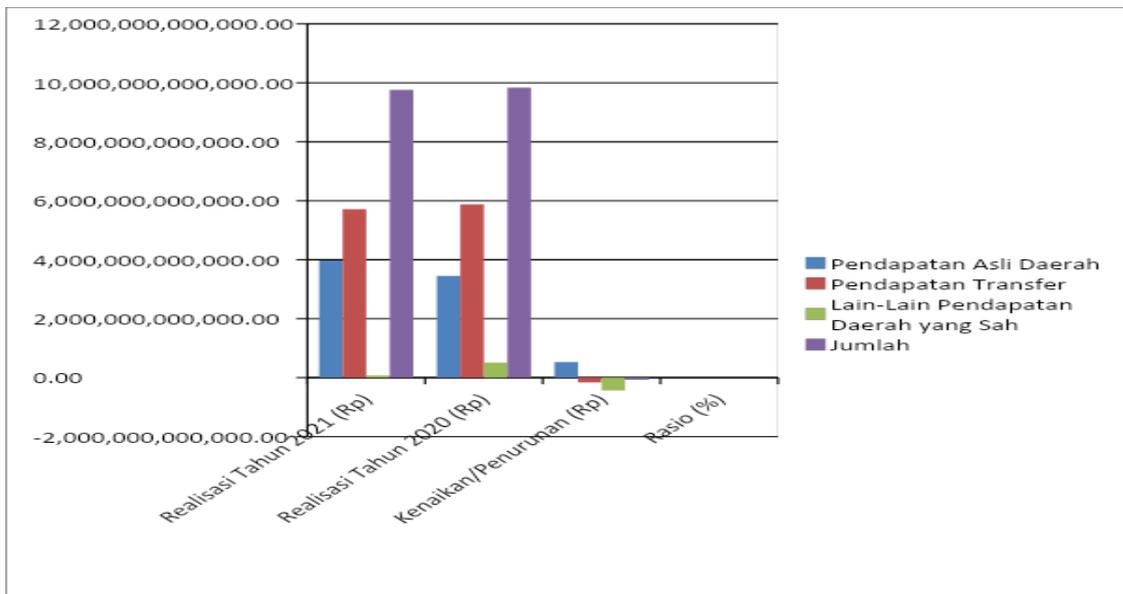
Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 138. Pendapatan - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/Penurunan	Rasio (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	3.978.222.693.041,08	3.449.433.620.638,05	528.789.072.403,03	15,33
2	Pendapatan Transfer	5.712.683.072.712,00	5.875.896.342.538,00	(163.213.269.826,00)	(2,78)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.188.397.383,67	509.293.587.108,61	(409.105.189.724,94)	(80,33)
Jumlah		9.791.094.163.136,75	9.834.623.550.284,66	(43.529.387.147,91)	(0,44)

Realisasi Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada Grafik 13 berikut.



Grafik 13. Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2021 dan 2020

Jumlah Pendapatan - LO Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp9.764.119.602.102,75, jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp9.611.291.244.667,17 terdapat perbedaan sebesar Rp154.201.809.890,51. Rincian Pendapatan - LO per kelompok pendapatan Tahun 2021 terdapat pada tabel dibawah:

Tabel 139. Pendapatan - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Asli Daerah	3.978.222.693.041,08	3.865.463.033.085,17	112.759.659.955,91
2	Pendapatan Transfer	5.712.683.072.712,00	5.712.683.072.712,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.188.397.383,67	33.145.138.870,00	67.043.258.513,67
	Jumlah	9.791.094.163.136,75	9.611.291.244.667,17	179.802.918.469,58

4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Provinsi Sumatera Selatan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.978.222.693.041,08 dengan rincian pada tabel di bawah.

Tabel 140. Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	PAD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.524.812.566.246,24	3.081.800.984.699,61	443.011.581.546,63	14,38

No	PAD	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.992.089.273,59	8.729.943.246,33	1.262.146.027,26	14,46
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.751.811.560,44	151.900.044.841,73	14.225.219.173,64	9,36
4	Lain-lain PAD Yang Sah	278.666.225.960,81	207.002.647.850,36	71.663.578.110,45	34,62
Jumlah		3.978.222.693.041,08	3.449.433.620.638,03	530.162.524.857,98	15,37

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp3.865.463.033.085,17 terdapat perbedaan dengan Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp114.133.112.410,84 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 141. Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	PAD	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.524.812.566.246,24	3.523.785.342.246,24	1.027.224.000,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.992.089.273,59	9.313.749.306,00	678.339.967,59
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.751.811.560,44	65.714.183.659,07	100.411.080.356,30
4	Lain-lain PAD Yang Sah	278.666.225.960,81	266.649.757.873,86	12.016.468.086,95
Jumlah		3.978.222.693.041,08	3.865.463.033.085,17	114.133.112.410,84

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp3.524.812.566.246,24. Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO antara Tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 142. Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.050.846.360.960,00	1.069.302.341.956,00	(18.455.980.996,00)	(1,73)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	957.251.353.845,00	664.861.456.250,00	292.389.897.595,00	43,98
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	940.804.251.499,04	751.357.346.082,81	189.446.905.416,23	25,21
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	12.628.973.571,20	12.595.457.344,80	33.516.226,40	0,27
5	Pajak Rokok	563.281.626.371,00	583.684.383.066,00	(20.402.756.695,00)	(3,50)
Jumlah		3.524.812.566.246,24	3.081.800.984.699,61	443.011.581.546,63	14,38

Jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp3.523.785.342.246,24, terdapat perbedaan sebesar Rp1.027.224.000,00 dengan pendapatan Pajak Daerah - LO seperti disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 143. Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.050.846.360.960,00	1.050.846.360.960,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	957.251.353.845,00	957.251.353.845,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	940.804.251.499,04	939.777.027.499,04	1.027.224.000,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	12.628.973.571,20	12.628.973.571,20	0,00
5	Pajak Rokok	563.281.626.371,00	563.281.626.371,00	0,00
Jumlah		3.524.812.566.246,24	3.523.785.342.246,24	1.027.224.000,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.992.089.273,59 dan Rp8.729.943.246,33 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 144. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan	Rasio (%)
1	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	1.090.000,00	(1.090.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.840.628.405,09	1.492.044.305,00	348.584.100,09	23,36
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
5	Retribusi Terminal	893.801.530,00	0,00	893.801.530,00	0,00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	383.050.000,00	114.452.000,00	268.598.000,00	234,68
7	Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	15.484.816,50	0,00	15.484.816,50	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	556.540.000,00	1.050.602.000,00	(494.062.000,00)	(47,03)
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.900.000,00	0,00	185.900.000,00	0,00
10	Retribusi Penyebrangan Air	0,00	11.614.000,00	(11.614.000,00)	(100,00)
11	Retribusi Izin Trayek	4.648.363.465,00	3.601.090.393,00	1.047.273.072,00	29,08
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	926.333.900,00	1.499.354.000,00	(573.020.100,00)	(38,22)
13	Retribusi Penyewaan Lahan	0,00	642.696.548,33	(642.696.548,33)	(100,00)
14	Retribusi Penjualan Bibit/Benih	0,00	121.260.000,00	(121.260.000,00)	(100,00)
15	Retribusi Pengawasan dan Pengujian Mutu	0,00	153.590.000,00	(153.590.000,00)	(100,00)
16	Retribusi Penjualan Semen Beku/Straw	0,00	42.150.000,00	(42.150.000,00)	(100,00)
17	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	521.987.157,00	0,00	521.987.157,00	0,00
Jumlah		9.992.089.273,59	8.729.943.246,33	1.262.146.027,26	14,46

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp9.313.749.306,00 terdapat perbedaan sebesar Rp678.339.967,59 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 145. Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.840.628.405,09	1.703.961.960,00	136.666.445,09
4	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
5	Retribusi Terminal	893.801.530,00	893.801.530,00	0,00
6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	383.050.000,00	383.050.000,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan ke Pelabuhan	15.484.816,50	10.798.451,00	4.686.365,50
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	556.540.000,00	556.540.000,00	0,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.900.000,00	185.900.000,00	0,00
10	Retribusi Penyebrangan Air	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Izin Trayek	4.648.363.465,00	4.648.363.465,00	0,00
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	926.333.900,00	926.333.900,00	0,00
13	Retribusi Penyewaan Lahan	0,00	0,00	0,00
14	Retribusi Penjualan Bibit/Benih	0,00	0,00	0,00
15	Retribusi Pengawasan dan Pengujian Mutu	0,00	0,00	0,00
16	Retribusi Penjualan Semen Beku/Straw	0,00	0,00	0,00
17	Retribusi Alat Berat	521.987.157,00	0,00	521.987.157,00
Jumlah		9.992.089.273,59	9.313.749.306,00	678.339.967,59

Penjelasan atas perbedaan pendapatan retribusi daerah LO dan LRA adalah sebagai berikut.

- 1) Perbedaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp136.666.445,09 pada Sekretariat Daerah yang merupakan:
 - a) Penyesuaian Piutang Retribusi 2021 Asrama Haji sebesar Rp200.000.000,00 dan PT Karya Manunggal sebesar Rp16.065.000,00;

- b) Penyesuaian perhitungan pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 sebesar Rp56.176.571,09;
 - c) Penyesuaian terhadap pembayaran piutang PT. Puti Ayu sebesar Rp5.000.000,00 dan CV. Karya Manunggal sebesar Rp16.065.000,00, PD. Swarna Dwipa (Asrama Haji) sebesar Rp30.000.000,00; dan
 - d) Penyesuaian atas penerimaan pendapatan di terima di muka Tahun 2021 sebesar Rp84.510.126,00.
- 2) Perbedaan Retribusi Pasar Grosir/atau Pertokoan sebesar Rp15.000.000,00 adalah koreksi tambah pada Dinas Perikanan dan Kelautan terkait sewa 4 lapak pasar yang disewakan kepada Koperasi yang belum dibayar namun telah diterbitkan SKRD nya.
 - 3) Perbedaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Dinas Perhubungan sebesar Rp4.686.365,50 adalah selisih antara Pendapatan - LO diterima dimuka sebesar Rp30.665.837,50 dan Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp25.979.472,00.
 - 4) Retribusi Alat Berat sebesar Rp521.987.157,00 terdiri dari Retribusi Alat Berat sebesar Rp506.687.157,00 dan Retribusi Laboratorium sebesar Rp15.300.000,00 akibat adanya koreksi tambah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 pada perusahaan milik daerah dan sektor swasta sebesar Rp164.751.811.560,44 mengalami kenaikan sebesar Rp12.851.766.718,71 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan - LO Tahun 2020 sebesar Rp151.900.044.841,73, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 146. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Investee	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	PT. Bank Sumsel Babel	133.128.974.716,00	114.982.955.645,59	18.146.019.070,41	15,78
2	PD. Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	943.721.770,00	1.000.000.000,00	(56.278.230,00)	(5,63)
3	PT Perhotelan Swarna Dwipa Gemilang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PD Prodexim	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BPR Sumatera Selatan	1.602.028.541,59	141.918.780,84	1.460.109.760,75	1.028,83
6	PT Penjamin Kredit Daerah	10.799.431.434,85	105.363.286,30	10.694.068.148,55	10.149,71
7	PT Asuransi Bangun Askrida	94.350.095,00	94.803.556,00	(453.461,00)	(0,48)
8	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	792.330.000,00	782.040.000,00	10.290.000,00	1,32
9	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam	7.960.554.081,00	34.792.963.573,00	(26.832.409.492,00)	(77,12)
10	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	9.430.420.922,00	0,00	9.430.420.922,00	0,00

No	Investee	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
11	PT Jakabaring Sport City	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		164,751,811,560,44	151.900.044.841,73	12.851.766.718,71	8,46

Mutasi tambah/kurang pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 147. Mutasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Investee	Realisasi LRA	Mutasi		Realisasi LO
			Tambah	Kurang	
1	PT. Bank Sumsel Babel	56.866.949.483,07	76.262.025.232,93	0,00	133.128.974.716,00
2	PD. Pertambangan dan Energi/PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	0,00	943.721.770,00	0,00	943.721.770,00
3	PT Perhotelan Swarna Dwipa Gemilang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PD Prodexim	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BPR Sumatera Selatan	0,00	1.602.028.541,59	0,00	1.602.028.541,59
6	PT Penjamin Kredit Daerah	0,00	10.799.431.434,85	0,00	10.799.431.434,85
7	PT Asuransi Bangun Askrida	94.350.095,00	0,00	0,00	94.350.095,00
8	PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	792.330.000,00	0,00	0,00	792.330.000,00
9	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam	7.960.554.081,00	0,00	0,00	7.960.554.081,00
10	PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	0,00	9.430.420.922,00	0,00	9.430.420.922,00
11	PT Jakabaring Sport City	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		65,714,183,659,07	99.037.627.901,37	0,00	164.751.811.560,44

Terdapat perbedaan Realisasi LRA dan Realisasi LO untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang berasal dari penambahan hak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas laba bersih yang dilaporkan dikurang laba yang dibagikan (dividen) dari BUMD dengan metode ekuitas.

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp278.666.225.960,81 dan Rp207.002.647.850,38 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 148. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.155.057.400,00	196.258.000,00	958.799.400,00	83,01
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.581.873.405,88	3.396.984.918,36	1.184.888.487,52	25,86
3	Hasil Kerja sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
4	Jasa Giro Kas Daerah	20.222.977.506,57	28.458.254.676,46	(8.235.277.169,89)	(40,72)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	27.160.402.677,85	0,00	27.160.402.677,85	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.292.484.565,48	195.323.769,76	1.097.160.795,72	84,89
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	45.478.524.730,80	41.614.935.477,20	3.863.589.253,60	8,50
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.305.364.843,00	401.517.314,40	903.847.528,60	69,24
10	Pendapatan BLUD	175.908.933.605,45	109.630.545.064,63	66.278.388.540,82	37,68
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.560.607.225,78	13.601.650.715,57	(12.041.043.489,79)	(771,56)
12	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	8.607.123.214,00	(8.607.123.214,00)	0,00
13	Pendapatan dari angsuran/cicilan	0,00	900.054.700,00	(900.054.700,00)	0,00
Jumlah		278.666.225.960,81	207.002.647.850,38	71.663.578.110,43	25,72

Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah - LRA sebesar Rp266.649.757.873,86 terdapat perbedaan sebesar Rp12.016.468.086,95 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 149. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.155.057.400,00	2.667.227.400,00	(1.512.170.000,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.581.873.405,88	3.667.302.897,88	914.570.508,00
3	Hasil Kerja sama Daerah	0,00	0,00	0,00
4	Jasa Giro Kas Daerah	20.222.977.506,57	20.222.977.506,57	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	8.600.000,00	(8.600.000,00)
6	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	27.160.402.677,85	27.164.590.818,85	(4.188.141,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.292.484.565,48	1.292.484.565,48	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	45.478.524.730,80	45.130.100.966,80	348.423.764,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.305.364.843,00	1.305.364.843,00	0,00
10	Pendapatan BLUD	175.908.933.605,45	165.191.108.875,28	10.717.824.730,17
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.560.607.225,78		1.560.607.225,78
12	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00

No	Lain-lain PAD yang Sah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
13	Pendapatan dari angsuran/cicilan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		278.666.225.960,81	266.649.757.873,86	12.016.468.086,95

Penjelasan atas perbedaan Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.512.170.000,00 adalah penyesuaian nilai pendapatan LLPAD yang merupakan penjualan aset lainnya (kayu onglon Dinas Kehutanan) disetor bulan Maret sebesar Rp1.510.000.000,00, penyesuaian pembayaran angsuran penjualan kendaraan an. Ahmad Gufron sebesar Rp1.000.000,00 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, koreksi nilai surplus penjualan peralatan dan mesin SMA 8 sebesar Rp832.500,00 (nilai jual Rp670.000,00-nilai buku Rp137.500,00) penjualan aset ini sebelumnya dicatat pada pendapatan lain-lain dan koreksi nilai surplus penjualan peralatan dan mesin badan penghubung sebesar Rp500.000,00.
2. Perbedaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp914.570.508,00 adalah koreksi tambah pendapatan kontribusi parkir bulan Desember atas BOT PT. Palembang Paragon Mall yang disetor pada bulan Januari 2022 sebesar Rp68.895.200,00, koreksi tambah pendapatan kontribusi tetap Sarana Pendidikan Sekolah Palembang Harapan atas BOT dengan PT Rajawali Jasa Pritama yang belum dicatat di Laporan Keuangan sebesar Rp363.000.000,00 dan koreksi tambah pendapatan Kontribusi Gedung Bowling Center atas kesalahan dalam menetapkan kontribusi pada Tahun 2019 sebesar Rp482.675.308,00.
3. Perbedaan Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp8.600.000,00 merupakan setor angsuran TGR an. Ahmad Nasir pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Perbedaan Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp4.188.144,00 merupakan Penyesuaian nilai Pendapatan LLPAD yang merupakan Komisi, Potongan dan/atau Bentuk lain (Dinas Kesehatan) yang disetor bulan Desember 2021.
5. Perbedaan Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp348.423.764,00 merupakan koreksi tambah Pendapatan Bunga PBB-KB sebesar Rp348.423.764,00 yang terdiri dari bunga CPE Rp308.167.200,00, bunga AKR Rp40.256.564,00 yang telah ditetapkan namun baru dibayarkan pada tanggal 12 April 2022.
6. Perbedaan Pendapatan BLUD sebesar Rp10.717.824.730,17 merupakan:
 - a) Mutasi tambah sebesar Rp36.649.513.494,03 dengan rincian:
 - Penyesuaian piutang pendapatan BLUD Tahun 2021 pada RS. Mata sebesar Rp1.961.561.940,00, penyesuaian Klaim Piutang BPJS dan TCM per 31 Desember 2021 pada RS Paru-paru sebesar Rp20.693.500,00,

- pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD) sebesar Rp3.916.255.000,00;
- Piutang pendapatan RSKGM Tahun 2021 pada RS Gigi dan Mulut sebesar Rp317.162.100,00;
 - Pengakuan Piutang Pelayanan Tahun 2021 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp6.480.864.900,50;
 - Penambahan piutang Tahun 2021 pada RS Erba (BLUD) sebesar Rp23.659.953.004,00;
 - Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp249.000.000,00;
 - Koreksi bertambah atas saldo piutang klaim TCM salah catat Tahun 2020 pada RS Paru-paru sebesar Rp8.610.000,00;
 - Koreksi kurang catat piutang IPWL pada RS Ernaldi Bahar sebesar Rp35.297.892,0;
 - Koreksi kurang catat piutang parkir RS Ernaldi Bahar sebesar Rp90.500,00; dan
 - Koreksi atas kelebihan pencatatan pendapatan diterima dimuka pada RS Siti Fatimah karena tidak menggunakan metode *cut of by date* atas perjanjian yang bukan awal bulan sebesar Rp24.657,53.
- b) Mutasi kurang sebesar Rp25.931.688.763,86 dengan rincian:
- Penyesuaian piutang klaim TCM Tahun 2020 yang sudah dibayarkan di Tahun 2021 pada RS Paru-paru (BLUD) sebesar Rp30.185.000,00, penyesuaian atas koreksi dan biaya kliring pada RS Ernaldi Bahar (BLUD) sebesar Rp110.484.190,00, penyesuaian piutang Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD) sebesar Rp3.146.891.400,00, penyesuaian piutang klaim BPJS Tahun 2020 yang sudah dibayarkan di Tahun 2021 pada RS Paru-paru sebesar Rp813.900,00;
 - Penerimaan pembayaran piutang pendapatan Tahun 2020 pada RS Mata (BLUD) sebesar Rp899.692.700,00, dan RS Gigi dan Mulut (BLUD) sebesar Rp341.325.800,00;
 - Penerimaan piutang pendapatan Tahun 2020 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp668.060.648,86;
 - Penerimaan pembayaran piutang Tahun 2020 pada RS Ernaldi Bahar sebesar Rp20.434.454.425,00
 - Penambahan pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp 288.000.000,00.
 - Koreksi lebih catat pendapatan hasil kerja sama (TCM) yang seharusnya menjadi pendapatan Tahun 2020 pada RSK Paru sebesar Rp8.610.000,00; dan

- Koreksi lebih catat piutang BPJS pada RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp3.170.700,00.

Mutasi pendapatan BLUD dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 150. Mutasi Pendapatan BLUD - LO

(dalam rupiah)

No	BLUD	Realisasi LRA	Mutasi		Realisasi LO
			Tambah	Kurang	
1	RS. Mata (BLUD)	22.619.042.381,00	1.961.561.940,00	899.692.700,00	23.680.911.621,00
2	RS. Paru (BLUD)	727.841.664,00	29.303.500,00	39.608.900,00	717.536.264,00
3	RS. Gigi dan Mulut (BLUD)	4.382.778.991,00	317.162.100,00	344.496.500,00	4.355.444.591,00
4	RS. Siti Fatimah (BLUD)	69.098.731.465,28	6.729.889.558,03	956.060.648,86	74.872.560.374,45
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD)	2.121.056.217,00	0,00	0,00	2.121.056.217,00
6	RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD)	25.209.819.926,00	23.695.341.396,00	20.544.938.615,00	28.360.222.707,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	19.697.732.597,00	3.916.255.000,00	3.146.891.400,00	20.467.096.197,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD)	21.334.105.634,00	0,00	0,00	21.334.105.634,00
Jumlah		165.191.108.875,28	36.649.513.494,03	25.931.688.763,86	175.908.933.605,45

- Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp1.560.607.225,78 merupakan pengurangan pendapatan diterima dimuka Tahun 2021 sebesar Rp320.446.463,78 dan penambahan piutang pendapatan sebesar Rp1.240.160.762,00 pada BPKAD.

4.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO berasal dari transfer pusat terealisasi sebesar Rp5.712.683.072.712,00, mengalami penurunan sebesar Rp163.213.269.826,00 atau 2,78% dibandingkan Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp5.875.896.342.538,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 151. Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/Penurunan	Rasio %
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.174.172.782.308,00	619.042.908.415,00	555.129.873.893,00	89,68

No	Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/Penurunan	Rasio %
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	717.561.667.273,00	1.314.226.460.685,00	(596.664.793.412,00)	(45,40)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.568.602.615.000,00	(5.561.328.000,00)	(0,35)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	220.514.359.267,00	203.718.863.552,00	16.795.495.715,00	8,24
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.037.392.976.864,00	2.130.083.845.886,00	(92.690.869.022,00)	(4,35)
6	Dana Penyesuaian	0,00	40.221.649.000,00	(40.221.649.000,00)	(100,00)
Jumlah		5.712.683.072.712,00	5.875.896.342.538,00	(163.213.269.826,00)	(2,78)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer - LRA sebesar Rp5.712.683.072.712,00, tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp5.712.683.072.712,00 disajikan ada tabel berikut.

Tabel 152. Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.174.172.782.308,00	1.174.172.782.308,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	717.561.667.273,00	717.561.667.273,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.563.041.287.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	220.514.359.267,00	220.514.359.267,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.037.392.976.864,00	2.037.392.976.864,00	0,00
6	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.712.683.072.712,00	5.712.683.072.712,00	0,00

4.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp100.188.397.383,67, mengalami penurunan sebesar Rp409.105.189.724,94 atau 80,33% apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp509.293.587.108,61 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 153. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	lain-lain Pendapatan Yang Sah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
1	Pendapatan Hibah	100.188.397.383,67	508.738.157.108,61	(408.549.759.724,94)	(80,31)
2	Pendapatan Lainnya	0,00	555.430.000,00	(555.430.000,00)	(100,00)
Jumlah		100.188.397.383,67	509.293.587.108,61	(409.105.189.724,94)	(80,33)

Realisasi Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp100.188.397.383,67 mengalami penurunan sebesar Rp408.549.759.724,94 atau 80,31% apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 154. Realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	82.592.674.056,00	476.441.470.833,79	(393.848.796.777,79)	(82,66)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	646.826.988,00	0,00	646.826.988,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	10.964.149.103,67	0,00	10.964.149.103,67	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	3.605.000.004,00	0,00	3.605.000.004,00	0,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.355.000.000,00	32.296.686.274,82	(29.941.686.274,82)	(92,71)
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	24.747.232,00	0,00	24.747.232,00	0,00
Jumlah		100.188.397.383,67	508.738.157.108,61	(408.549.759.724,94)	(80,31)

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp33.145.138.870,00, terdapat perbedaan sebesar Rp67.043.258.513,67 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 155. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Realisasi LO	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan
1	Pendapatan Hibah	100.188.397.383,67	33.145.138.870,00	67.043.258.513,67
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		100.188.397.383,67	33.145.138.870,00	67.043.258.513,67

Pendapatan Hibah - LO Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp33.145.138.870,00 terdapat perbedaan sebesar Rp66.498.458.513,67 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 156. Pendapatan Hibah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	82.592.674.056,00	28.268.138.866,00	54.324.535.190,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	646.826.988,00	0,00	646.826.988,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	10.964.149.103,67	0,00	10.964.149.103,67
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	3.605.000.004,00	3.605.000.004,00	0,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	2.355.000.000,00	1.272.000.000,00	1.083.000.000,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	24.747.232,00	0,00	24.747.232,00
Jumlah		100.188.397.383,67	33.145.138.870,00	67.043.258.513,67

Penjelasan atas perbedaan Pendapatan Hibah - LO dan LRA sebesar Rp67.043.258.513,67 adalah sebagai berikut.

- a. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap dan Persediaan sebesar Rp54.324.535.190,00 disebabkan adanya penambahan hibah Tahun 2021 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 157. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO dari Pemerintah Pusat
(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah
1	Dinas Pendidikan	15.846.372.166,00	Penambahan Set Tetap dan Hibah peralatan, Mesin, Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan 2021
2	RS. DR Ernaldi Bahar (SKPD)	4.892.895.790,00	Penyesuaian Penerimaan Hibah Peralatan Kesehatan dan penyesuaian penerimaan Hibah Obat dan BMHP
3	Badan Panangulangan Bencana Daerah	2.761.613.700,00	Penyesuaian Hibah BNPB Peralatan dan Mesin serta Penyesuaian Persediaan barang alat covid Tahun 2021 berupa Masker, Sabun Cair, Handsanitizer dll
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	98.440.000,00	Penambahan Hewan Ternak Potong yang berasal dari Hibah
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.100.000,00	Penyesuaian Tambahan Komputer
6	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	3.734.552.500,00	Penyesuaian terhadap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Hibah dari Kemenristek, Bibit Ternak Sapi hibah dari BPTU Sembawa ke STP
7	RSK Gigi dan Mulut (BLUD)	1.121.735.000,00	Koreksi tambah Beban persediaan Bahan Habis Pakai atas pendapatan Hibah (dropping dari Kemenkes)
8	RSK Gigi dan Mulut (BLUD)	118.436.600,00	Koreksi kurang catat beban persediaan Covid 19
9	Dinas Lingkungan Hidup (BLUD)	181.812.500,00	Koreksi pendapatan hibah yang kurang catat karena kesalahan input harga pada rekap mutasi farmasi pada Laboratorium DLHP
10	Dinas Kesehatan	25.007.776.934,00	Koreksi tambah atas persediaan obat dan BMHP yang diterima dari hibah dari kemenkes, BNPB dan Pihak Ketiga pada Dinkes belum dicatat
11	Bappeda	544.800.000,00	Koreksi salah catat hibah kendaraan dinas pada Bappeda
Jumlah		54,324,535,190,00	

- b. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp646.826.988,00 dalam bentuk Aset Tetap dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 158. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO dari Pemerintah Daerah Lainnya
(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah
1	RS. Paru-paru	193.732.000,00	Penyesuaian Nilai Persediaan APD dan Ales Lainnya Penerimaan Hibah dari Dinkes
2	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	93.749.000,00	Penambahan Aset Tanah dan Gedung Kantor karena Hibah Kantor UPTD Muara Enim
3	Badan Pendapatan Daerah	359.345.988,00	Mutasi Tambah Hibah Aset Tanah dari Pemkot Lubuklinggau Eks Dinkes Kab.Musi Rawas untuk UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lubuklinggau
Jumlah		646.826.988,00	

- c. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp10.964.149.103,67 dalam bentuk Aset Tetap dan Pengakuan Pendapatan Hibah Farmasi Tahun 2021 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 159. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah
1	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	10.964.149.103,67	Hibah Pralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Pengakuan Pendapatan Hibah Farmasi Tahun 2021
Jumlah		10.964.149.103,67	

- d. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp1.083.000.000,00 dalam bentuk Aset Bergerak Kendaraan Roda 4 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 160. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah
1	Sekretariat Daerah	1.083.000.000,00	Hibah Kendaraan Dinas R4 dari PT BA Hyunday Palisade
Jumlah		1.083.000.000,00	

- e. Perbedaan Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp24.747.232,00 dalam bentuk Aset Tetap dan Penerimaan dari Donatur dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 161. Rincian Penambahan Pendapatan Hibah - LO dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan Hibah	Pendapatan Hibah
1	RS. Paru-paru (Blud)	24.747.232,00	Penyesuaian Penerima Aset Tetap Hibah Tabung Oksigen Tahun 2021 sebesar Rp12.250.000,00 dan Penerimaan Hibah dari Donatur sebesar Rp12.497.232,00
Jumlah		24.747.232,00	

4.4.2 Beban Daerah

Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.619.270.966.983,23 dengan rincian kenaikan dan penurunan jika dibandingkan dengan beban Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 162. Realisasi Beban Daerah Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Beban	Beban Tahun 2021	Beban Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Beban Pegawai	1.954.168.534.064,00	1.772.022.884.804,00	182.145.649.260,00	10,28
Beban Persediaan	500.388.623.496,24	515.924.493.789,37	(15.535.870.293,13)	(3,01)
Beban Jasa	980.608.598.632,90	707.509.977.381,51	273.098.621.251,39	38,60

Beban	Beban Tahun 2021	Beban Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Beban Pemeliharaan	187.959.380.755,37	178.209.624.617,59	9.749.756.137,78	5,47
Beban Perjalanan Dinas	204.498.698.188,00	206.444.526.892,00	(1.945.828.704,00)	(0,94)
Beban Bunga	570.795.054,47	0,00	570.795.054,47	0,00
Beban Hibah	1.629.974.928.627,00	1.815.188.076.158,25	(185.213.147.531,25)	(10,20)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	946.520.311.742,54	975.194.316.716,61	(28.674.004.973,07)	(2,94)
Beban Penyisihan Piutang	846.786.797,07	362.462.358,55	484.324.438,52	133,62
Beban Lain-lain	76.036.084.181,69	98.302.014.691,23	(22.265.930.509,54)	(22,65)
Beban Transfer	3.137.698.225.442,95	2.605.770.515.953,35	531.927.709.489,60	20,41
Jumlah	9.619.270.966.983,23	8.874.928.893.362,46	744.342.073.619,77	8,39

4.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.954.168.534.064,00 mengalami kenaikan sebesar Rp182.145.649.260,00 atau 10,28% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.772.022.884.804,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 163. Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	766.514.659.643,00	778.625.623.040,00	(12.110.963.397,00)	(1,56)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	73.732.376.833,00	75.193.917.908,00	(1.461.541.075,00)	(1,94)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	14.302.277.986,00	16.502.247.450,00	(2.199.969.464,00)	(13,33)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	50.695.025.837,00	50.023.357.050,00	671.668.787,00	1,34
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.491.423.000,00	12.389.923.740,00	(898.500.740,00)	(7,25)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	43.180.615.001,00	38.062.911.000,00	5.117.704.001,00	13,45
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.084.500.618,00	3.088.726.262,00	(1.004.225.644,00)	(32,51)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	10.664.974,00	11.208.226,00	(543.252,00)	(4,85)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	62.780.028.762,00	38.462.689.654,00	24.317.339.108,00	63,22%
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.570.682.193,00	0,00	1.570.682.193,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.712.046.570,00	0,00	4.712.046.570,00	0,00
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.885.819.550,00	0,00	38.885.819.550,00	0,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.002.640.000,00	0,00	1.002.640.000,00	0,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	296.559.057.708,00	0,00	296.559.057.708,00	0,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	89.233.618.772,00	0,00	89.233.618.772,00	0,00
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	323.701.625.280,00	0,00	323.701.625.280,00	0,00

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.990.612.500,00	0,00	1.990.612.500,00	0,00
19	Beban Honorarium	11.503.457.951,00	0,00	11.503.457.951,00	0,00
20	Beban Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	62.640.000,00	(62.640.000,00)	(100,00)
21	Beban Tunjangan Komisi	0,00	130.369.500,00	(130.369.500,00)	(100,00)
22	Beban Tunjangan Badan Anggaran	0,00	63.423.000,00	(63.423.000,00)	(100,00)
23	Beban Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	14.355.000,00	(14.355.000,00)	(100,00)
24	Beban Uang Representasi DPRD	2.372.550.000,00	0,00	2.372.550.000,00	0,00
25	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	300.894.000,00	0,00	300.894.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Beras DPRD	228.340.260,00	0,00	228.340.260,00	0,00
27	Beban Uang Paket	0,00	202.365.000,00	(202.365.000,00)	(100,00)
28	Beban Uang Paket DPRD	203.265.000,00	0,00	203.265.000,00	0,00
29	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3.440.197.500,00	0,00	3.440.197.500,00	0,00
30	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	272.092.500,00	0,00	272.092.500,00	0,00
31	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.189.500,00	0,00	31.189.500,00	0,00
32	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	31.450.500,00	(31.450.500,00)	(100,00)
33	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.837.000.000,00	0,00	18.837.000.000,00	0,00
34	Beban Tunjangan Reses DPRD	4.707.150.000,00	0,00	4.707.150.000,00	0,00
35	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	1.027.090.320,00	0,00	1.027.090.320,00	0,00
36	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.756.206.240,00	0,00	19.756.206.240,00	0,00
37	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	16.980.000.000,00	0,00	16.980.000.000,00	0,00
38	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	70.200.000,00	0,00	70.200.000,00	0,00
39	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
40	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	126.360.000,00	0,00	126.360.000,00	0,00
41	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.707.300,00	0,00	4.707.300,00	0,00
42	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.801.602,00	0,00	7.801.602,00	0,00
43	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
44	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	0,00	561.600.000,00	0,00
45	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	5.593.000.000,00	0,00	5.593.000.000,00	0,00
46	Beban Tunjangan Perumahan - LO	0,00	15.981.000.000,00	(15.981.000.000,00)	(100,00)
47	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	(100,00)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
48	Beban Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD - LO	0,00	4.052.550.000,00	(4.052.550.000,00)	(100,00)
49	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	0,00	277.277.318.860,00	(277.277.318.860,00)	(100,00)
50	Beban Tunjangan Reses - LO	0,00	4.647.300.000,00	(4.647.300.000,00)	(100,00)
51	Beban Tunjangan Transport - LO	0,00	14.258.491.000,00	(14.258.491.000,00)	(100,00)
52	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	0,00	28.066.506.531,00	(28.066.506.531,00)	(100,00)
53	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	0,00	2.633.600.000,00	(2.633.600.000,00)	(100,00)
54	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO	0,00	300.890.032.083,00	(300.890.032.083,00)	(100,00)
55	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	0,00	18.753.000.000,00	(18.753.000.000,00)	(100,00)
56	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	0,00	4.391.000.000,00	(4.391.000.000,00)	(100,00)
57	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	0,00	561.600.000,00	(561.600.000,00)	(100,00)
58	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO	0,00	30.123.600.000,00	(30.123.600.000,00)	(100,00)
59	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	0,00	19.822.650.000,00	(19.822.650.000,00)	(100,00)
60	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0,00	21.600.000.000,00	(21.600.000.000,00)	(100,00)
61	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO	0,00	301.860.000,00	(301.860.000,00)	(100,00)
62	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO	0,00	15.790.419.000,00	(15.790.419.000,00)	(100,00)
63	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban Pegawai BOS	78.837.051.622,00	0,00	78.837.051.622,00	0,00
65	Beban Pegawai BLUD	6.852.903.742,00	0,00	6.852.903.742,00	0,00
Jumlah		1.954.168.534.064,00	1.772.022.884.804,00	182.145.649.260,00	10.28%

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.954.168.534.064,00, dapat diuraikan perincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 164. Realisasi Beban Pegawai - LO dan LRA Tahun 2021

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Rekening	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
1	Beban Gaji Pokok ASN	766.514.659.643,00	766.516.074.911,00	(1.415.268,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	73.732.376.833,00	73.732.542.995,00	(166.162,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	14.302.277.986,00	14.303.352.986,00	(1.075.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	50.695.025.837,00	50.695.025.837,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.491.423.000,00	11.491.423.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	43.180.615.001,00	43.181.411.701,00	(796.700,00)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.084.500.618,00	2.084.534.818,00	(34.200,00)

No	Rekening	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	10.664.974,00	10.665.230,00	(256,00)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	62.780.028.762,00	31.422.526.854,00	31.357.501.908,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.570.682.193,00	1.570.682.193,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.712.046.570,00	4.712.046.570,00	0,00
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	38.885.819.550,00	37.393.849.550,00	21.288.098.807,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.002.640.000,00	1.002.640.000,00	0,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	296.559.057.708,00	298.059.057.708,00	(21.296.128.807,00)
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	89.233.618.772,00	89.728.618.772,00	(495.000.000,00)
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	323.701.625.280,00	323.701.625.280,00	0,00
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.990.612.500,00	1.990.612.500,00	0,00
19	Beban Honorarium	11.503.457.951,00	11.476.457.951,00	27.000.000,00
20	Beban Uang Representasi DPRD	2.372.550.000,00	2.372.550.000,00	0,00
21	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	300.894.000,00	300.894.000,00	0,00
22	Beban Tunjangan Beras DPRD	228.340.260,00	228.340.260,00	0,00
23	Beban Uang Paket DPRD	203.265.000,00	203.265.000,00	0,00
24	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	3.440.197.500,00	3.440.197.500,00	0,00
25	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	272.092.500,00	272.092.500,00	0,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	31.189.500,00	31.189.500,00	0,00
27	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	18.837.000.000,00	18.837.000.000,00	0,00
28	Beban Tunjangan Reses DPRD	4.707.150.000,00	4.707.150.000,00	0,00
29	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	1.027.090.320,00	1.027.090.320,00	0,00
30	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.756.206.240,00	19.756.206.240,00	0,00
31	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	16.980.000.000,00	16.980.000.000,00	0,00
32	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00
33	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
34	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	126.360.000,00	126.360.000,00	0,00
35	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.707.300,00	4.707.300,00	0,00
36	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.801.602,00	7.801.602,00	0,00
37	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.300,00	1.300,00	0,00
38	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00
39	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	5.593.000.000,00	5.593.000.000,00	0,00
40	Beban Pegawai BOS	78.837.051.622,00	78.837.051.622,00	0,00
41	Beban Pegawai BLUD	6.852.903.742,00	6.852.903.742,00	0,00
Jumlah		1.954.168.534.064,00	1.923.290.549.742,00	30.877.984.322,00

Jika dibandingkan Belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp1.954.168.534.064,00 terdapat selisih sebesar Rp30.877.984.322,00 yang merupakan pembayaran utang gaji ASN pada SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020 sebesar Rp3.487.586,00,

pembayaran utang Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 sebesar Rp495.000.000,00, pembayaran utang beras ASN Tahun 2019 pada Dinas Perindustrian sebesar Rp8.030.000,00, reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD ke beban honorarium pada Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp27.000.000,00, serta perhitungan beban iuran jaminan kesehatan ASN Tahun 2021 yang diakui sebagai utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

4.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.873.455.301.072,51, mengalami kenaikan sebesar 16,41% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp1.608.088.622.680,47. Rincian beban barang dan jasa adalah sebagai berikut.

1. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp500.388.623.496,24, mengalami penurunan sebesar 3,01% dibandingkan Beban Persediaan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp515.924.493.789,37. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 165. Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	768.541.489,38	0,00	768.541.489,38	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	9.633.210.757,70	5.753.180.148,00	3.880.030.609,70	67,44
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.784.139.291,00	6.672.886.720,00	10.111.252.571,00	151,53
4	Beban Bahan-Bahan Baku	11.067.765.862,00	27.804.586.354,00	(16.736.820.492,00)	(60,19)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.766.871.551,00	440.185.600,00	1.326.685.951,00	301,39
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	184.118.978,00	216.137.895,00	(32.018.917,00)	(14,81)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	820.349.450,00	479.205.850,00	341.143.600,00	71,19
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	23.001.100,00	305.117.855,00	(282.116.755,00)	(92,46)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.589.073.615,00	69.313.646.962,01	(56.724.573.347,01)	(81,84)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.976.569.455,00	0,00	2.976.569.455,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	794.991.870,00	0,00	794.991.870,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	45.153.332,00	0,00	45.153.332,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	(14.986.519,00)	0,00	(14.986.519,00)	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.041.785.827,00	0,00	2.041.785.827,00	0,00
17	Beban Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	0,00	699.175.395,00	(699.175.395,00)	(0,98)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.496.950.460,78	71.159.182.509,00	(33.662.232.048,22)	(47,31)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	133.630.980,00	0,00	133.630.980,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.384.641.574,00	41.451.606.727,66	11.933.034.846,34	28,79
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	634.499.601,00	1.647.519.700,00	(1.013.020.099,00)	(61,49)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	173.463.730,00	89.727.500,00	83.736.230,00	93,32
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	847.029.350,00	0,00	847.029.350,00	0,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.934.159.516,00	41.197.689.949,00	(39.263.530.433,00)	(95,31)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.696.520.101,00	3.874.836.299,00	821.683.802,00	21,21
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	17.215.530.302,50	0,00	17.215.530.302,50	0,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	455.187.606,00	0,00	455.187.606,00	0,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.067.619.100,00	0,00	1.067.619.100,00	0,00
29	Beban Persediaan Souvenir/Cinderamata	0,00	67.600.000,00	(67.600.000,00)	(100,00)
30	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.865.049.370,00	0,00	31.865.049.370,00	0,00
31	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	10.704.912.507,00	(10.704.912.507,00)	(100,00)
32	Beban Persediaan Bahan/Perlengkapan Peserta Keterampilan	0,00	48.381.805.788,00	(48.381.805.788,00)	(100,00)
33	Beban Persediaan Materi Pameran	0,00	61.650.000,00	(61.650.000,00)	(100,00)
34	Beban Obat-Obatan-Obat	73.034.293.591,09	105.926.596.983,30	(32.892.303.392,21)	(31,05)
35	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.957.953.171,63	0,00	12.957.953.171,63	0,00
36	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.748.696.141,00	20.230.412.601,00	60.518.283.540,00	299,15
37	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.862.855.105,00	0,00	15.862.855.105,00	0,00
38	Beban Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga	0,00	(42.172.000,00)	42.172.000,00	(100,00)
39	Beban Barang yang akan diserahkan pada Pemerintah Daerah	0,00	48.010.500,00	(48.010.500,00)	(100,00)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
40	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	103.359.828,00	0,00	103.359.828,00	0,00
41	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	149.976.500,00	0,00	149.976.500,00	0,00
42	Beban Persediaan Bahan Makanan dan Minuman	0,00	6.116.839.589,00	(6.116.839.589,00)	(100,00)
43	Beban Persediaan Pakaian Pasien	0,00	201.781.600,00	(201.781.600,00)	(100,00)
44	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.945.660.894,16	18.479.142.951,40	(9.533.482.057,24)	(51,59)
45	Beban Natura dan Pakan-Pakan	175.521.169,00	0,00	175.521.169,00	0,00
46	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.528.243.600,00	0,00	2.528.243.600,00	0,00
47	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.190.348.406,00	6.165.238.991,00	10.025.109.415,00	162,61
48	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.084.628.208,00	4.617.741.781,00	13.466.886.427,00	291,63
49	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	2.536.881.457,00	(2.536.881.457,00)	(100,00)
50	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	363.522.400,00	(363.522.400,00)	(100,00)
51	Beban Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa	0,00	813.728.825,00	(813.728.825,00)	(100,00)
52	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	145.723.100,00	0,00	145.723.100,00	0,00
53	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	11.701.586.565,00	0,00	11.701.586.565,00	0,00
54	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.495.484.637,00	0,00	5.495.484.637,00	0,00
55	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.841.433.225,00	0,00	9.841.433.225,00	0,00
56	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.802.387.082,00	0,00	10.802.387.082,00	0,00
57	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.589.011.500,00	1.497.100.000,00	91.911.500,00	6,14
58	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	899.644.500,00	0,00	899.644.500,00	0,00
59	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.683.072.000,00	1.462.288.433,00	5.220.783.567,00	357,03
60	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	213.951.000,00	1.502.786.200,00	(1.288.835.200,00)	(85,76)
61	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.208.630.204,00	3.863.953.207,00	1.344.676.997,00	34,80
62	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	69.378.000,00	(69.378.000,00)	(100,00)
63	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.554.116.997,00	0,00	2.554.116.997,00	0,00

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
64	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	0,00
65	Beban Pakaian Penyelamatan	99.935.000,00	0,00	99.935.000,00	0,00
66	Beban Pakaian Siaga	159.030.000,00	0,00	159.030.000,00	0,00
67	Beban Pakaian Teknik	29.618.600,00	0,00	29.618.600,00	0,00
68	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	362.637.500,00	0,00	362.637.500,00	0,00
69	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	76.986.187,00	0,00	76.986.187,00	0,00
70	Beban Pakaian Kerja Bengkel	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
71	Beban Pakaian KORPRI	64.013.400,00	0,00	64.013.400,00	0,00
72	Beban Pakaian Adat Daerah	504.310.300,00	641.927.000,00	(137.616.700,00)	(21,44)
73	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.088.380.850,00	466.517.455,00	621.863.395,00	133,30
74	Beban Pakaian Olahraga	4.438.344.485,00	1.656.368.095,00	2.781.976.390,00	167,96
75	Beban Pakaian Paskibraka	199.547.000,00	85.340.000,00	114.207.000,00	133,83
76	Beban Pakaian Jas/Safari	37.800.000,00	0,00	37.800.000,00	0,00
77	Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	2.589.427.187,00	(2.589.427.187,00)	(100,00)
78	Beban Perlengkapan Pakaian Kerja	0,00	261.117.520,00	(261.117.520,00)	(100,00)
79	Beban Pakaian Peserta	0,00	6.049.911.255,00	(6.049.911.255,00)	(100,00)
80	Beban Komponen-Komponen Peralatan	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	0,00
Jumlah		500.388.623.496,24	515.924.493.789,37	(15.535.870.293,13)	(3,01)

Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp500.388.623.496,24, dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 166. Realisasi Beban Persediaan - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	768.541.489,38	428.767.000,00	339.774.489,38
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	9.633.210.757,70	5.779.360.248,00	3.853.850.509,70
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.784.139.291,00	15.164.871.701,00	1.619.267.590,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	11.067.765.862,00	366.316.462,00	10.701.449.400,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.766.871.551,00	1.766.871.551,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	184.118.978,00	36.485.000,00	147.633.978,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	820.349.450,00	281.554.500,00	538.794.950,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	23.001.100,00	118.740.000,00	(95.738.900,00)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.589.073.615,00	8.900.119.644,00	3.688.953.971,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.976.569.455,00	2.976.569.455,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	794.991.870,00	794.991.870,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	45.153.332,00	24.092.250,00	21.061.082,00

No.	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	(14.986.519,00)	19.413.481,00	(34.400.000,00)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2.041.785.827,00	1.903.943.327,00	137.842.500,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.496.950.460,78	34.431.973.005,00	3.064.977.455,78
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	133.630.980,00	115.998.660,00	17.632.320,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.384.641.574,00	51.293.149.494,00	2.091.492.080,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	634.499.601,00	567.932.684,00	66.566.917,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	173.463.730,00	173.463.730,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	847.029.350,00	847.029.350,00	0,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.934.159.516,00	1.933.912.940,00	246.576,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.696.520.101,00	4.119.670.020,00	576.850.081,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	17.215.530.302,50	17.235.409.052,50	(19.878.750,00)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	455.187.606,00	455.187.606,00	0,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.067.619.100,00	950.036.000,00	117.583.100,00
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.865.049.370,00	26.412.807.100,00	5.452.242.270,00
29	Beban Obat-Obatan-Obat	73.034.293.591,09	14.301.805.802,00	58.732.487.789,09
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.957.953.171,63	9.207.427.831,00	3.750.525.340,63
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.748.696.141,00	81.627.607.357,45	(878.911.216,45)
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.862.855.105,00	13.949.974.450,00	1.912.880.655,00
33	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	103.359.828,00	103.359.828,00	0,00
34	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	149.976.500,00	149.976.500,00	0,00
35	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.945.660.894,16	8.945.660.894,16	0,00
36	Beban Natura dan Pakan-Pakan	175.521.169,00	39.740.000,00	135.781.169,00
37	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.528.243.600,00	2.528.243.600,00	0,00
38	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.190.348.406,00	16.034.775.656,00	155.572.750,00
39	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.084.628.208,00	18.009.604.977,00	75.023.231,00
40	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	145.723.100,00	13.875.000,00	131.848.100,00
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	11.701.586.565,00	11.339.298.800,00	362.287.765,00

No.	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
42	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.495.484.637,00	2.963.288.040,00	2.532.196.597,00
43	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.841.433.225,00	9.831.184.525,00	10.248.700,00
44	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.802.387.082,00	9.557.816.505,00	1.244.570.577,00
45	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.589.011.500,00	1.579.150.000,00	9.861.500,00
46	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	899.644.500,00	899.644.500,00	0,00
47	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.683.072.000,00	6.680.147.000,00	2.925.000,00
48	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	213.951.000,00	213.951.000,00	0,00
49	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.208.630.204,00	4.665.544.204,00	543.086.000,00
50	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.554.116.997,00	2.363.896.997,00	190.220.000,00
51	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
52	Beban Pakaian Penyelamatan	99.935.000,00	99.935.000,00	0,00
53	Beban Pakaian Siaga	159.030.000,00	159.030.000,00	0,00
54	Beban Pakaian Teknik	29.618.600,00	29.618.600,00	0,00
55	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	362.637.500,00	362.637.500,00	0,00
56	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	76.986.187,00	18.000.000,00	58.986.187,00
57	Beban Pakaian Kerja Bengkel	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
58	Beban Pakaian KORPRI	64.013.400,00	64.013.400,00	0,00
59	Beban Pakaian Adat Daerah	504.310.300,00	504.310.300,00	0,00
60	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.088.380.850,00	955.180.850,00	133.200.000,00
61	Beban Pakaian Olahraga	4.438.344.485,00	3.778.424.485,00	659.920.000,00
62	Beban Pakaian Paskibraka	199.547.000,00	199.547.000,00	0,00
63	Beban Pakaian Jas/Safari	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
64	Beban Komponen-Komponen Peralatan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00
Jumlah		500.388.623.496,24	398.339.711.732,11	102.048.911.764,13

Mutasi Beban Persediaan dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Belanja Persediaan	Rp	398.339.711.732,11
2. Penambahan Dari BTT Covid	Rp	10.795.600.000,00
3. Kapitalisasi Aset	Rp	34.400.000,00
4. Persediaan Akhir Tahun 2020	Rp	93.859.642.792,57
5. Utang Akhir Tahun 2021.....	Rp	15.690.284.275,00
6. Belanja Modal Bukan Aset.....	Rp	527.240.139,38
7. Utang Akhir Tahun 2020.....	Rp	5.249.917.088,14
8. Reklas Belanja Barang Jasa BLUD.....	Rp	43.249.503.755,64
9. Penambahan Hibah	Rp	44.438.586.359,67
10. Koreksi/Reklasifikasi.....	Rp	1.652.677.930,00
11. Persediaan Akhir Tahun 2021.....	<u>Rp</u>	<u>99.574.950.539,99</u>
12. Beban Persediaan (1+2-3+4+5+6-7+8+9-10-11)	Rp	500.388.623.496,24

Reklas dari Beban Barang Jasa BLUD/BOS sebesar Rp43.249.503.755,64 dengan rincian sebagai berikut.

1. RS. Mata (BLUD)	Rp	5.817.328.843,00
2. RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp	256.706.813,00
3. RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp	560.026.314,00
4. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp	16.653.312.363,64

5. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD).....	Rp	214.622.540,00
6. RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp	9.722.095.147,00
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	Rp	6.005.580.935,00
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD).....	Rp	4.019.830.800,00
Jumlah	Rp	43.249.503.755,64

Mutasi Penambahan Hibah sebesar Rp44.438.586.359,67 dengan rincian sebagai berikut.

a. Dinas Kesehatan (SKPD).....	Rp	25.007.776.934,00
b. RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp	206.229.232,00
c. RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp	1.240.171.600,00
d. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp	10.987.359.103,67
e. RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp	4.666.225.790,00
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	Rp	2.168.823.700,00
g. Badan Penelitian Pengembangan Daerah.....	Rp	162.000.000,00
Jumlah	Rp	44.438.586.359,67

Realisasi Beban Persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 39**.

2. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp980.608.598.632,90, mengalami kenaikan sebesar 38,60% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp707.509.977.381,51. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 167. Realisasi Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.768.439.037,00	0,00	27.768.439.037,00	0,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.512.340.000,00	0,00	6.512.340.000,00	0,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	515.540.000,00	0,00	515.540.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	22.615.474.544,00	0,00	22.615.474.544,00	0,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	87.750.000,00	0,00	87.750.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	693.060.000,00	0,00	693.060.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.793.845.830,00	0,00	1.793.845.830,00	0,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.356.500.000,00	0,00	1.356.500.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
10	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.507.010.000,00	(9.507.010.000,00)	(100,00)

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
11	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.299.622.500,00	(3.299.622.500,00)	(100,00)
12	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	103.200.000,00	(103.200.000,00)	(100,00)
13	Beban Honorarium Bendahara	0,00	925.510.000,00	(925.510.000,00)	(100,00)
14	Beban Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	0,00	4.112.409.623,80	(4.112.409.623,80)	(100,00)
15	Beban Honorarium Tim PHO/FHO	0,00	110.400.000,00	(110.400.000,00)	(100,00)
16	Beban Honorarium Pengelola Barang Daerah	0,00	1.533.410.000,00	(1.533.410.000,00)	(100,00)
17	Beban Honor Juri/Wasit/Hakim	0,00	45.600.000,00	(45.600.000,00)	(100,00)
18	Beban Honor MC/Pemandu Acara/Pembaca Doa	0,00	61.050.000,00	(61.050.000,00)	(100,00)
19	Beban Honorarium Tim Pengelola Website	0,00	162.100.000,00	(162.100.000,00)	(100,00)
20	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	2.955.980.000,00	(2.955.980.000,00)	(100,00)
21	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	60.974.828.293,00	(60.974.828.293,00)	(100,00)
22	Beban Honor Juri/Wasit/Hakim	0,00	151.300.000,00	(151.300.000,00)	(100,00)
23	Beban Honor MC/Pemandu Acara/Pembaca Doa	0,00	30.150.000,00	(30.150.000,00)	(100,00)
24	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	178.278.183.636,00	0,00	178.278.183.636,00	0,00
25	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	32.075.038.025,00	0,00	32.075.038.025,00	0,00
26	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.353.305.860,00	0,00	1.353.305.860,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	206.750.000,00	0,00	206.750.000,00	0,00
28	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.208.000.000,00	0,00	2.208.000.000,00	0,00
29	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	783.000.000,00	0,00	783.000.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.583.040.000,00	0,00	1.583.040.000,00	0,00
31	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.683.970.000,00	0,00	1.683.970.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	704.668.800,00	0,00	704.668.800,00	0,00
33	Beban Jasa Tenaga Administrasi	79.670.757.720,00	0,00	79.670.757.720,00	0,00
34	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.651.542.991,00	0,00	7.651.542.991,00	0,00
35	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.726.983.324,80	0,00	27.726.983.324,80	0,00
36	Beban Jasa Tenaga Ahli	14.235.081.909,00	0,00	14.235.081.909,00	0,00
37	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	25.582.120.295,99	0,00	25.582.120.295,99	0,00
38	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.346.146.000,00	0,00	8.346.146.000,00	0,00
39	Beban Jasa Tenaga Supir	225.613.300,00	0,00	225.613.300,00	0,00
40	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	4.377.006.810,00	0,00	4.377.006.810,00	0,00
41	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	193.950.000,00	0,00	193.950.000,00	0,00
42	Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya	0,00	215.121.734.330,27	(215.121.734.330,27)	(100,00)
43	Beban Jasa Konsumsi	0,00	59.337.696.844,23	(59.337.696.844,23)	(100,00)
44	Beban Jasa Dekorasi	0,00	3.293.248.000,00	(3.293.248.000,00)	(100,00)

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
45	Beban Jasa Pemberian Hadiah Pemenang Lomba	0,00	730.102.000,00	(730.102.000,00)	(100,00)
46	Beban Jasa Perizinan	0,00	3.108.000,00	(3.108.000,00)	(100,00)
47	Beban Jasa Penghargaan Kepada PNS/Non PNS yang Berprestasi	0,00	14.450.000,00	(14.450.000,00)	(100,00)
48	Beban Jasa Pengobatan Kesehatan	0,00	42.990.817,00	(42.990.817,00)	(100,00)
49	Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0,00	128.731.196.727,00	(128.731.196.727,00)	(100,00)
50	Beban Jasa Event Organizer	0,00	968.639.800,00	(968.639.800,00)	(100,00)
51	Beban Jasa Kontribusi Peserta Assement	0,00	476.625.000,00	(476.625.000,00)	(100,00)
52	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	406.575.000,00	0,00	406.575.000,00	0,00
53	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	273.500.000,00	0,00	273.500.000,00	0,00
54	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.634.369.989,00	0,00	1.634.369.989,00	0,00
55	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	455.176.550,00	0,00	455.176.550,00	0,00
56	Beban Jasa Sertifikasi	0,00	360.255.137,00	(360.255.137,00)	(100,00)
57	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.010.320.958,00	2.725.220.672,61	3.285.100.285,39	120,54
58	Beban Jasa Akomodasi	0,00	3.872.765.179,64	(3.872.765.179,64)	(100,00)
59	Beban Jasa Transportasi Peserta Pelatihan/Pameran	0,00	2.527.876.800,00	(2.527.876.800,00)	(100,00)
60	Beban Jasa Publikasi	0,00	39.779.292.352,00	(39.779.292.352,00)	(100,00)
61	Beban Jasa Dokumentasi	0,00	2.473.790.314,00	(2.473.790.314,00)	(100,00)
62	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	493.491.876,60	0,00	493.491.876,60	0,00
63	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.786.215.086,00	0,00	2.786.215.086,00	0,00
64	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	540.658.881,00	0,00	540.658.881,00	0,00
65	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	99.470.000,00	0,00	99.470.000,00	0,00
66	Beban Jasa Kalibrasi	303.051.000,00	0,00	303.051.000,00	0,00
67	Beban Jasa Pengolahan Sampah	860.336.846,00	0,00	860.336.846,00	0,00
68	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	242.189.880,00	0,00	242.189.880,00	0,00
69	Beban Jasa Pengukuran Tanah	316.947.520,00	0,00	316.947.520,00	0,00
70	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.479.229.471,00	0,00	49.479.229.471,00	0,00
71	Beban Tagihan Telepon	2.091.577.135,00	2.045.360.308,00	46.216.827,00	2,26
72	Beban Tagihan Air	4.799.103.872,00	6.006.302.002,00	(1.207.198.130,00)	(20,10)
73	Beban Tagihan Listrik	24.819.493.047,00	30.188.169.959,00	(5.368.676.912,00)	(17,78)
74	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.812.809.971,00	4.320.439.100,00	(1.507.629.129,00)	(34,90)
75	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.098.850.680,00	25.179.090.761,00	(8.080.240.081,00)	(32,09)
76	Beban Paket/Pengiriman	3.354.686.082,00	3.178.265.838,00	176.420.244,00	5,55
77	Beban Penambahan Daya	346.460.800,00	0,00	346.460.800,00	0,00
78	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.709.435.051,00	0,00	1.709.435.051,00	0,00
79	Beban Pengolahan Air Limbah	44.361.867,00	0,00	44.361.867,00	0,00
80	Beban Medical Check Up	77.521.469,00	0,00	77.521.469,00	0,00

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
81	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	3.593.622.600,00	0,00	3.593.622.600,00	0,00
82	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	24.014.757.472,00	0,00	24.014.757.472,00	0,00
83	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	0,00
84	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	5.696.751.000,00	0,00	5.696.751.000,00	0,00
85	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	66.699.971.100,00	0,00	66.699.971.100,00	0,00
86	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	363.769.873,00	0,00	363.769.873,00	0,00
87	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.208.815,00	0,00	75.208.815,00	0,00
88	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	0,00	202.461.402,33	(202.461.402,33)	(100,00)
89	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	4.069.697.467,95	(4.069.697.467,95)	(100,00)
90	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	2.911.722.172,67	0,00	2.911.722.172,67	0,00
91	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	156.416.666,67	(156.416.666,67)	(100,00)
92	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	0,00	1.373.166.024,67	(1.373.166.024,67)	(100,00)
93	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	635.345.014,00	(635.345.014,00)	(100,00)
94	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	132.518.000,00	(132.518.000,00)	(100,00)
95	Beban Sewa <i>Save Deposit Box</i>	0,00	16.188.333,34	(16.188.333,34)	(100,00)
96	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.136.348.250,00	(1.136.348.250,00)	(100,00)
97	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	6.900.000,00	(6.900.000,00)	(100,00)
98	Beban Sewa Traktor	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
99	Beban Sewa Meja Kursi/Tenda/ <i>Sound System</i> /Generator	0,00	11.544.437.173,00	(11.544.437.173,00)	(100,00)
100	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	119.050.000,00	0,00	119.050.000,00	0,00
101	Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>	258.700.000,00	0,00	258.700.000,00	0,00
102	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	522.541.000,00	0,00	522.541.000,00	0,00
103	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	337.120.673,00	0,00	337.120.673,00	0,00
104	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	596.850.000,00	0,00	596.850.000,00	0,00
105	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.127.200.000,00	0,00	2.127.200.000,00	0,00
106	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	133.700.000,00	0,00	133.700.000,00	0,00
107	Beban Sewa Kapal Terbang	2.975.280.000,00	0,00	2.975.280.000,00	0,00
108	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Peralatan Bengkel/Laboratorium	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
109	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	295.500.000,00	0,00	295.500.000,00	0,00
110	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.482.400,00	0,00	1.800.482.400,00	0,00
111	Beban Sewa Alat Pendingin	135.300.000,00	0,00	135.300.000,00	0,00
112	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	378.109.000,00	0,00	378.109.000,00	0,00

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
113	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.044.635.000,00	0,00	1.044.635.000,00	0,00
114	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	0,00
115	Beban Sewa Peralatan Cetak	54.624.050,00	0,00	54.624.050,00	0,00
116	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	38.950.000,00	0,00	38.950.000,00	0,00
117	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00
118	Beban Sewa Peralatan Umum	13.775.402.700,00	0,00	13.775.402.700,00	0,00
119	Beban Sewa Komputer Jaringan	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
120	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	26.800.000,00	313.753.500,00	(286.953.500,00)	(91,46)
121	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	507.376.000,00	0,00	507.376.000,00	0,00
122	Beban Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>	12.773.474.200,00	3.886.956.625,00	8.886.517.575,00	228,62
123	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
124	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	69.850.000,00	0,00	69.850.000,00	0,00
125	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	143.046.000,00	(143.046.000,00)	0,00
126	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.598.090.892,32	0,00	2.598.090.892,32	0,00
127	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	177.500.000,00	0,00	177.500.000,00	0,00
128	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.892.922.800,38	0,00	1.892.922.800,38	0,00
129	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
130	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	391.374.000,00	0,00	391.374.000,00	0,00
131	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00
132	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.825.000,00	0,00	200.825.000,00	0,00
133	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	99.550.000,00	0,00	99.550.000,00	0,00
134	Beban Sewa Bangunan Parkir	(43.767.225,00)	0,00	(43.767.225,00)	0,00
135	Beban Sewa Taman	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	0,00
136	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	118.800.000,00	0,00	118.800.000,00	0,00
137	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	16.405.251,14	0,00	16.405.251,14	0,00
138	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.626.500.000,00	0,00	2.626.500.000,00	0,00
139	Beban Sewa Hotel	780.969.000,00	0,00	780.969.000,00	0,00
140	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.347.232.289,00	0,00	1.347.232.289,00	0,00
141	Beban Sewa Jalan Tol	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
142	Beban Sewa Instalasi Lain	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
143	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	136.950.000,00	0,00	136.950.000,00	0,00
144	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
145	Beban Sewa Audio Visual	204.700.000,00	0,00	204.700.000,00	0,00

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
146	Beban Sewa Musik Lainnya	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
147	Beban Sewa Alat Musik	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
148	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	1.405.037.250,00	(1.405.037.250,00)	(100,00)
149	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	13.619.454.820,00	(13.619.454.820,00)	(100,00)
150	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	7.934.161.675,00	(7.934.161.675,00)	(100,00)
151	Beban Jasa Konsultansi Survey Pemetaan dan Pemasangan Pilar Batas	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
152	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	426.314.200,00	0,00	426.314.200,00	0,00
153	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.564.550.740,00	0,00	2.564.550.740,00	0,00
154	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	869.363.500,00	0,00	869.363.500,00	0,00
155	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	59.216.900,00	0,00	59.216.900,00	0,00
156	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.645.855.990,00	0,00	4.645.855.990,00	0,00
157	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	449.093.700,00	0,00	449.093.700,00	0,00
158	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.607.904.075,00	0,00	5.607.904.075,00	0,00
159	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.962.708.800,00	0,00	2.962.708.800,00	0,00
160	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	93.104.000,00	0,00	93.104.000,00	0,00
161	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	228.059.000,00	0,00	228.059.000,00	0,00
164	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
165	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.559.883.540,00	0,00	1.559.883.540,00	0,00
167	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.729.202.685,00	0,00	2.729.202.685,00	0,00
168	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.169.150.000,00	0,00	1.169.150.000,00	0,00
169	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.906.019.510,00	0,00	1.906.019.510,00	0,00
170	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	43.407.500,00	0,00	43.407.500,00	0,00
171	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	24.460.000,00	0,00	24.460.000,00	0,00
172	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	305.026.150,00	0,00	305.026.150,00	0,00
173	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00
174	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	45.069.750,00	0,00	45.069.750,00	0,00
175	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	0,00
176	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	1.455.408.500,00	0,00	1.455.408.500,00	0,00
177	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	154.900.000,00	0,00	154.900.000,00	0,00
178	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	250.080.000,00	0,00	250.080.000,00	0,00
179	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
180	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	79.600.000,00	0,00	79.600.000,00	0,00
181	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	2.829.124.900,00	0,00	2.829.124.900,00	0,00
183	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00	0,00
184	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	369.200.000,00	0,00	369.200.000,00	0,00
185	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	59.300.000,00	0,00	59.300.000,00	0,00
186	Beban Jasa Pengujian/Laboratorium	0,00	296.849.300,00	(296.849.300,00)	(100,00)
187	Beban Jasa atas Promosi Kegiatan	0,00	689.970.000,00	(689.970.000,00)	(100,00)

No.	Beban	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
188	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	70.250.000,00	32.500.000,00	37.750.000,00	116,15
189	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	21.000.000,00	54.000.000,00	(33.000.000,00)	(61,11)
190	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.392.645.962,00	6.598.451.119,00	(1.205.805.157,00)	(18,27)
191	Beban Sosialisasi	320.110.200,00	0,00	320.110.200,00	0,00
192	Beban Bimbingan Teknis	386.030.000,00	435.811.000,00	(49.781.000,00)	(11,42)
193	Beban Diklat Kepemimpinan	846.920.000,00	0,00	846.920.000,00	0,00
194	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.872.037.000,00	0,00	3.872.037.000,00	0,00
195	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00
196	Beban Jasa Konsultasi Seleksi Non PNS		376.000.000,00	(376.000.000,00)	(100,00)
197	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
198	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.994.472.504,00	0,00	4.994.472.504,00	0,00
199	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.364.100.000,00	0,00	1.364.100.000,00	0,00
200	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	1.885.720.000,00	(1.885.720.000,00)	(100,00)
201	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	0,00	24.808.150.000,00	(24.808.150.000,00)	(100,00)
202	Beban Barang dan Jasa BOS	209.901.648.349,00	0,00	209.901.648.349,00	0,00
203	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	10.379.197.402,00	(10.379.197.402,00)	(100,00)
Jumlah		980.608.598.632,90	707.509.977.381,51	273.098.621.251,39	38,60

Beban Jasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp980.608.598.632,90 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 168. Realisasi Beban Jasa - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.768.439.037,00	23.209.764.037,00	4.558.675.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.512.340.000,00	5.632.880.000,00	879.460.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	515.540.000,00	515.540.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	22.615.474.544,00	22.336.420.000,00	279.054.544,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	87.750.000,00	2.000.000,00	85.750.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	693.060.000,00	693.060.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.793.845.830,00	165.000.000,00	1.628.845.830,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.356.500.000,00	1.356.500.000,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	178.278.183.636,00	178.278.183.636,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	32.075.038.025,00	16.641.230.000,00	15.433.808.025,00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.353.305.860,00	202.376.000,00	1.150.929.860,00

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	206.750.000,00	206.750.000,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.208.000.000,00	2.208.000.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	783.000.000,00	783.000.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.583.040.000,00	1.583.040.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.683.970.000,00	1.683.970.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	704.668.800,00	315.050.000,00	389.618.800,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	79.670.757.720,00	78.447.980.000,00	1.222.777.720,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	7.651.542.991,00	7.651.542.991,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.726.983.324,80	2.256.937.142,00	25.470.046.182,80
21	Beban Jasa Tenaga Ahli	14.235.081.909,00	12.290.989.067,00	1.944.092.842,00
22	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	25.582.120.295,99	23.423.432.608,03	2.158.687.687,96
23	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.346.146.000,00	7.637.900.000,00	708.246.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Supir	225.613.300,00	203.550.000,00	22.063.300,00
25	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	4.377.006.810,00	0,00	4.377.006.810,00
26	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	193.950.000,00	193.950.000,00	0,00
27	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	406.575.000,00	81.675.000,00	324.900.000,00
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	273.500.000,00	265.405.000,00	8.095.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.634.369.989,00	1.214.508.000,00	419.861.989,00
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	455.176.550,00	555.176.550,00	(100.000.000,00)
31	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	6.010.320.958,00	6.010.320.958,00	0,00
32	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	493.491.876,60	493.491.876,60	0,00
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.786.215.086,00	1.870.136.710,00	916.078.376,00
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	540.658.881,00	293.638.000,00	247.020.881,00
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	99.470.000,00	99.470.000,00	0,00
36	Beban Jasa Kalibrasi	303.051.000,00	303.051.000,00	0,00
37	Beban Jasa Pengolahan Sampah	860.336.846,00	19.053.100,00	841.283.746,00
38	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	242.189.880,00	183.906.880,00	58.283.000,00
39	Beban Jasa Pengukuran Tanah	316.947.520,00	281.945.520,00	35.002.000,00
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	49.479.229.471,00	48.209.764.541,00	1.269.464.930,00
41	Beban Tagihan Telepon	2.091.577.135,00	2.071.846.323,00	19.730.812,00
42	Beban Tagihan Air	4.799.103.872,00	4.716.985.396,00	82.118.476,00
43	Beban Tagihan Listrik	24.819.493.047,00	24.526.948.726,00	292.544.321,00
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.812.809.971,00	2.787.280.971,00	25.529.000,00
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.098.850.680,00	16.448.334.558,00	650.516.122,00
46	Beban Paket/Pengiriman	3.354.686.082,00	3.230.645.379,00	124.040.703,00
47	Beban Penambahan Daya	346.460.800,00	342.306.300,00	4.154.500,00
48	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.709.435.051,00	1.709.435.051,00	0,00
49	Beban Pengolahan Air Limbah	44.361.867,00	44.361.867,00	0,00
50	Beban Medical Check Up	77.521.469,00	77.521.469,00	0,00

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
51	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	3.593.622.600,00	3.593.622.600,00	0,00
52	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	24.014.757.472,00	23.906.757.472,00	108.000.000,00
53	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00
54	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	5.696.751.000,00	0,00	5.696.751.000,00
55	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	66.699.971.100,00	66.699.971.100,00	0,00
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	363.769.873,00	2.240.000,00	361.529.873,00
57	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	75.208.815,00	0,00	75.208.815,00
58	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	2.911.722.172,67	3.635.860.783,00	(724.138.610,33)
59	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	119.050.000,00	119.050.000,00	0,00
60	Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>	258.700.000,00	258.700.000,00	0,00
61	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	522.541.000,00	522.541.000,00	0,00
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	337.120.673,00	233.850.000,00	103.270.673,00
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	596.850.000,00	219.850.000,00	377.000.000,00
64	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.127.200.000,00	2.127.200.000,00	0,00
65	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	133.700.000,00	133.700.000,00	0,00
66	Beban Sewa Kapal Terbang	2.975.280.000,00	2.975.280.000,00	0,00
67	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
68	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	295.500.000,00	295.500.000,00	0,00
69	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.482.400,00	1.763.482.400,00	37.000.000,00
70	Beban Sewa Alat Pendingin	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00
71	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	378.109.000,00	378.109.000,00	0,00
72	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.044.635.000,00	1.044.635.000,00	0,00
73	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00
74	Beban Sewa Peralatan Cetak	54.624.050,00	54.624.050,00	0,00
75	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00
76	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
77	Beban Sewa Peralatan Umum	13.775.402.700,00	13.775.402.700,00	0,00
78	Beban Sewa Komputer Jaringan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
79	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00
80	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	507.376.000,00	420.396.000,00	86.980.000,00
81	Beban Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>	12.773.474.200,00	12.656.674.200,00	116.800.000,00
82	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
83	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00
84	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.598.090.892,32	2.628.989.744,00	(30.898.851,68)
85	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	177.500.000,00	177.500.000,00	0,00
86	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.892.922.800,38	1.893.409.000,00	(486.199,62)

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
87	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
88	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	391.374.000,00	391.374.000,00	0,00
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.825.000,00	200.825.000,00	0,00
91	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	99.550.000,00	99.550.000,00	0,00
92	Beban Sewa Bangunan Parkir	(43.767.225,00)	0,00	(43.767.225,00)
93	Beban Sewa Taman	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00
94	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
95	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	16.405.251,14	0,00	16.405.251,14
96	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	2.626.500.000,00	2.626.500.000,00	0,00
97	Beban Sewa Hotel	780.969.000,00	780.969.000,00	0,00
98	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.347.232.289,00	1.347.232.289,00	0,00
99	Beban Sewa Jalan Tol	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
100	Beban Sewa Instalasi Lain	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
101	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	136.950.000,00	136.950.000,00	0,00
102	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
103	Beban Sewa Audio Visual	204.700.000,00	204.700.000,00	0,00
104	Beban Sewa Musik Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
105	Beban Sewa Alat Musik	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
106	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	426.314.200,00	585.765.800,00	(159.451.600,00)
107	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.564.550.740,00	3.653.855.340,00	(1.089.304.600,00)
108	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	869.363.500,00	869.363.500,00	0,00
109	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	59.216.900,00	59.216.900,00	0,00
110	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.645.855.990,00	4.580.790.990,00	65.065.000,00
111	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	449.093.700,00	449.093.700,00	0,00
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.607.904.075,00	3.881.052.575,00	1.726.851.500,00
113	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.962.708.800,00	2.962.708.800,00	0,00
114	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	93.104.000,00	93.104.000,00	0,00
115	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	3.868.621.020,00	(3.868.621.020,00)
116	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	3.923.286.800,00	(3.923.286.800,00)

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
117	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	228.059.000,00	795.494.000,00	(567.435.000,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
119	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	1.682.450.000,00	(1.682.450.000,00)
120	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.559.883.540,00	1.634.857.190,00	(74.973.650,00)
121	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.729.202.685,00	2.607.343.300,00	121.859.385,00
122	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.169.150.000,00	1.119.450.000,00	49.700.000,00
123	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.906.019.510,00	1.187.000.100,00	719.019.410,00
124	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	43.407.500,00	43.407.500,00	0,00
125	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	24.460.000,00	24.460.000,00	0,00
126	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	305.026.150,00	3.807.761.850,00	(3.502.735.700,00)
127	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00
128	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	45.069.750,00	0,00	45.069.750,00
129	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
130	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	1.455.408.500,00	1.355.583.500,00	99.825.000,00
131	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi	154.900.000,00	154.900.000,00	0,00
132	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	250.080.000,00	0,00	250.080.000,00
133	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
134	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	79.600.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
135	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	710.474.900,00	(710.474.900,00)
136	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	2.829.124.900,00	2.430.442.000,00	398.682.900,00
137	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00
138	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	369.200.000,00	369.200.000,00	0,00
139	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	59.300.000,00	228.520.000,00	(169.220.000,00)
140	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00

No.	Uraian	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
141	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
142	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.392.645.962,00	4.081.777.000,00	1.310.868.962,00
143	Beban Sosialisasi	320.110.200,00	320.110.200,00	0,00
144	Beban Bimbingan Teknis	386.030.000,00	386.030.000,00	0,00
145	Beban Diklat Kepemimpinan	846.920.000,00	846.920.000,00	0,00
146	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.872.037.000,00	3.986.987.000,00	(114.950.000,00)
147	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
148	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
149	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.994.472.504,00	4.900.065.141,00	94.407.363,00
150	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.364.100.000,00	1.297.895.000,00	66.205.000,00
151	Beban Barang dan Jasa BOS	209.901.648.349,00	209.901.648.349,00	0,00
152	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	128.420.049.404,20	(128.420.049.404,20)
Jumlah		980.608.598.632,90	1.047.646.835.853,83	(67.038.237.220,93)

Mutasi Beban Jasa dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Belanja Jasa.....	Rp	1.047.646.835.853,83
2. Utang Akhir Tahun 2020.....	Rp	3.798.364.564,80
3. Utang Akhir Tahun 2021.....	Rp	8.606.485.337,00
4. Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun (2020)..	Rp	2.600.265.276,57
5. Beban Dibayar Dimuka Akhir Tahun (2021)..	Rp	3.718.075.722,06
6. Penambahan BTT Covid.....	Rp	770.750.000,00
7. Reklas dari Belanja Barang Jasa BLUD.....	Rp	56.049.215.857,64
8. Belanja Modal Bukan Aset.....	Rp	337.906.900,00
9. Koreksi/Reklasifikasi.....	Rp	45.069.750,00
10. Kapitalisasi Aset.....	Rp	15.833.058.340,00
11. Beban Jasa (10 = 1-2+3+4-5+6-7+8+9-10)	Rp	980.608.598.632,90

Reklas dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp56.049.215.857,64 dengan rincian sebagai berikut.

- RS. Mata (BLUD).....	Rp	6.636.114.937,00
- RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp	1.150.669.789,00
- RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp	383.629.162,00
- RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp	21.414.677.457,64
- Badan Pelatihan Kesehatan (BLUD).....	Rp	287.301.000,00
- RS. Dr Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp	11.091.099.845,00
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD).....	Rp	8.295.554.173,00
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BLUD).....	Rp	6.790.169.494,00

Realisasi Beban Jasa per SKPD disajikan pada **Lampiran 40**.

3. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021 adalah Rp187.959.380.755,37, mengalami kenaikan sebesar Rp9.749.756.137,78 atau 5,47% dibandingkan realisasi Tahun 2020 Rp178.209.624.617,59 rincian pada tabel berikut.

Tabel 169. Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
1	Beban Jasa <i>Service</i>	0,00	4.378.687.566,00	(4.378.687.566,00)	(100,00)
2	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	6.043.964.676,00	(6.043.964.676,00)	(100,00)
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	9.369.595.720,00	(9.369.595.720,00)	(100,00)
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	197.357.816,00	(197.357.816,00)	(100,00)
5	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.076.965.350,00	(1.076.965.350,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	348.606.071,00	0,00	348.606.071,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	199.819.551,00	0,00	199.819.551,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	124.261.000,00	0,00	124.261.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	10.646.684.113,00	(10.646.684.113,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>	160.712.020,00	0,00	160.712.020,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	288.281.449,00	0,00	288.281.449,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>	616.685.900,00	0,00	616.685.900,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	4.863.000,00	0,00	4.863.000,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.614.833.192,00	0,00	3.614.833.192,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.601.242.504,00	0,00	7.601.242.504,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	78.950.000,00	0,00	78.950.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	336.454.073,00	0,00	336.454.073,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel	153.802.000,00	0,00	153.802.000,00	0,00

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
	Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi				
21	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	50.251.250,00	0,00	50.251.250,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	95.880.000,00	0,00	95.880.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	174.920.000,00	0,00	174.920.000,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	443.285.000,00	0,00	443.285.000,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	261.143.500,00	0,00	261.143.500,00	0,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.281.430.611,00	0,00	3.281.430.611,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	792.236.244,00	0,00	792.236.244,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	585.983.425,00	0,00	585.983.425,00	0,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.659.382.935,00	0,00	3.659.382.935,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	83.817.500,00	0,00	83.817.500,00	0,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.593.010.240,00	0,00	1.593.010.240,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	74.868.100,00	0,00	74.868.100,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	2.115.266.456,00	0,00	2.115.266.456,00	0,00

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
	Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				
39	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	420.637.700,00	0,00	420.637.700,00	0,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	196.304.900,00	0,00	196.304.900,00	0,00
41	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	198.832.500,00	0,00	198.832.500,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	732.378.928,00	0,00	732.378.928,00	0,00
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	472.067.560,00	0,00	472.067.560,00	0,00
44	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	185.810.267,00	0,00	185.810.267,00	0,00
45	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	932.408.500,00	0,00	932.408.500,00	0,00
46	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	219.934.000,00	0,00	219.934.000,00	0,00
47	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	16.090.000,00	0,00	16.090.000,00	0,00
48	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.048.363,00	0,00	43.048.363,00	0,00
49	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	56.050.000,00	0,00	56.050.000,00	0,00
50	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	842.058.745,00	0,00	842.058.745,00	0,00
51	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	48.950.000,00	0,00	48.950.000,00	0,00
52	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.319.823.000,00	0,00	1.319.823.000,00	0,00
53	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	35.193.392.964,60	(35.193.392.964,60)	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.897.326.767,40	0,00	27.897.326.767,40	0,00
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	174.900.000,00	0,00	174.900.000,00	0,00
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	293.776.500,00	0,00	293.776.500,00	0,00

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	189.217.791,00	0,00	189.217.791,00	0,00
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	685.683.817,00	0,00	685.683.817,00	0,00
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	111.114.146,00	0,00	111.114.146,00	0,00
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	642.717.985,00	0,00	642.717.985,00	0,00
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	561.223.321,81	0,00	561.223.321,81	0,00
63	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	445.502.000,00	0,00	445.502.000,00	0,00
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	199.500.371,00	0,00	199.500.371,00	0,00
65	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	820.190.000,00	0,00	820.190.000,00	0,00
66	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	109.788.000,00	0,00	109.788.000,00	0,00
67	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	178.910.000,00	0,00	178.910.000,00	0,00
68	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	196.259.000,00	0,00	196.259.000,00	0,00
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.368.554.000,00	0,00	1.368.554.000,00	0,00
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(174.900.000,00)	0,00	(174.900.000,00)	0,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.069.295.600,00	0,00	1.069.295.600,00	0,00
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	66.793.102,00	0,00	66.793.102,00	0,00

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
73	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	210.900.000,00	0,00	210.900.000,00	0,00
74	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	36.350.984.219,00	0,00	36.350.984.219,00	0,00
75	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	17.001.531.588,10	0,00	17.001.531.588,10	0,00
76	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.794.498.850,00	0,00	1.794.498.850,00	0,00
77	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	29.749.275.906,00	0,00	29.749.275.906,00	0,00
78	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	28.634.461.666,00	0,00	28.634.461.666,00	0,00
79	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.148.235.434,00	0,00	2.148.235.434,00	0,00
80	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	135.518.526,00	0,00	135.518.526,00	0,00
81	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	2.632.000,00	0,00	2.632.000,00	0,00
82	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	43.220.391.993,00	(43.220.391.993,00)	(100,00)
83	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(43.619.193,94)	0,00	(43.619.193,94)	0,00
84	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.857.000,00	0,00	8.857.000,00	0,00
85	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	55.761.300,00	0,00	55.761.300,00	0,00
86	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	708.261.900,00	0,00	708.261.900,00	0,00
87	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	389.012.075,00	0,00	389.012.075,00	0,00
88	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	57.450.000,00	0,00	57.450.000,00	0,00
89	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
90	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	41.750.000,00	0,00	41.750.000,00	0,00
91	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan	64.549.100,00	0,00	64.549.100,00	0,00

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
	Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial				
92	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	39.424.000,00	0,00	39.424.000,00	0,00
93	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang	164.276.500,00	0,00	164.276.500,00	0,00
94	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	271.928.200,00	(271.928.200,00)	(100,00)
95	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	3.073.052.000,00	0,00	3.073.052.000,00	0,00
96	Beban Pemeliharaan Jembatan	0,00	5.379.102.359,00	(5.379.102.359,00)	(100,00)
97	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	879.134.000,00	(879.134.000,00)	(100,00)
98	Beban Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	25.711.069.546,00	(25.711.069.546,00)	(100,00)
99	Beban Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	7.051.343.716,00	(7.051.343.716,00)	(100,00)
100	Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	1.276.033.240,00	(1.276.033.240,00)	(100,00)
101	Beban Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	0,00	26.896.762.193,26	(26.896.762.193,26)	(100,00)
102	Belanja Pemeliharaan Venues/Sarana dan Prasarana Olah Raga	0,00	617.211.164,73	(617.211.164,73)	(100,00)
	Jumlah	187.959.380.755,37	178.209.624.617,59	9.749.756.137,78	5,47

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 adalah Rp187.959.380.755,37 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 170. Realisasi Beban Pemeliharaan - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	348.606.071,00	348.606.071,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	199.819.551,00	199.819.551,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	124.261.000,00	124.261.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	160.712.020,00	160.712.020,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	288.281.449,00	0,00	288.281.449,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	616.685.900,00	616.685.900,00	0,00

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
9	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan	4.863.000,00	4.863.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.614.833.192,00	3.170.901.070,00	443.932.122,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.601.242.504,00	7.522.242.504,00	79.000.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	336.454.073,00	336.454.073,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	153.802.000,00	153.802.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	50.251.250,00	50.251.250,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	95.880.000,00	108.380.000,00	(12.500.000,00)
19	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	174.920.000,00	174.920.000,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	443.285.000,00	443.285.000,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	261.143.500,00	261.143.500,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.281.430.611,00	3.901.432.191,00	(620.001.580,00)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	792.236.244,00	767.936.244,00	24.300.000,00

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
26	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	585.983.425,00	585.983.425,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.659.382.935,00	3.659.382.935,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	83.817.500,00	83.817.500,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.593.010.240,00	1.145.279.600,00	447.730.640,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	74.868.100,00	74.868.100,00	0,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	2.115.266.456,00	0,00	2.115.266.456,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	420.637.700,00	0,00	420.637.700,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	196.304.900,00	396.107.800,00	(199.802.900,00)
35	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	198.832.500,00	198.832.500,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	732.378.928,00	0,00	732.378.928,00
37	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	472.067.560,00	472.067.560,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	185.810.267,00	185.810.267,00	0,00
39	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	932.408.500,00	932.408.500,00	0,00
40	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	219.934.000,00	219.934.000,00	0,00
41	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	16.090.000,00	16.090.000,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.048.363,00	43.048.363,00	0,00
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	56.050.000,00	56.050.000,00	0,00

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
44	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	842.058.745,00	828.474.500,00	13.584.245,00
45	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00
46	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.319.823.000,00	0,00	1.319.823.000,00
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.897.326.767,40	35.337.731.282,55	(7.440.404.515,15)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	174.900.000,00	174.900.000,00	0,00
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	293.776.500,00	0,00	293.776.500,00
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	189.217.791,00	103.161.800,00	86.055.991,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	685.683.817,00	0,00	685.683.817,00
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	149.600.000,00	(149.600.000,00)
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	111.114.146,00	111.114.146,00	0,00
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	642.717.985,00	758.655.750,00	(115.937.765,00)
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	561.223.321,81	564.734.300,00	(3.510.978,19)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	445.502.000,00	445.502.000,00	0,00
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	199.500.371,00	199.500.371,00	0,00
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	820.190.000,00	544.745.600,00	275.444.400,00
59	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan	109.788.000,00	0,00	109.788.000,00

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
60	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	178.910.000,00	169.964.500,00	8.945.500,00
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	196.259.000,00	196.259.000,00	0,00
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	1.368.554.000,00	548.339.000,00	820.215.000,00
63	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(174.900.000,00)	0,00	(174.900.000,00)
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.069.295.600,00	1.069.295.600,00	0,00
65	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	66.793.102,00	66.793.102,00	0,00
66	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	210.900.000,00	370.800.000,00	(159.900.000,00)
67	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi	36.350.984.219,00	35.507.472.384,00	843.511.835,00
68	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	17.001.531.588,10	642.651.895,00	16.358.879.693,10
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.794.498.850,00	1.666.983.700,00	127.515.150,00
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	29.749.275.906,00	29.246.086.226,00	503.189.680,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	28.634.461.666,00	26.378.187.164,00	2.256.274.502,00
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.148.235.434,00	2.061.001.759,00	87.233.675,00
73	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	135.518.526,00	0,00	135.518.526,00
74	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	2.632.000,00	0,00	2.632.000,00
75	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(43.619.193,94)	0,00	(43.619.193,94)
76	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.857.000,00	8.857.000,00	0,00

No	Beban Pemeliharaan	Beban - LO	Belanja - LRA	Perbedaan
77	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	55.761.300,00	55.761.300,00	0,00
78	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	708.261.900,00	708.261.900,00	0,00
79	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	389.012.075,00	389.012.075,00	0,00
80	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00
81	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
82	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00
83	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	64.549.100,00	64.549.100,00	0,00
84	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	39.424.000,00	39.424.000,00	0,00
85	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang	164.276.500,00	164.276.500,00	0,00
86	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	3.073.052.000,00	3.048.652.350,00	24.399.650,00
Jumlah		187.959.380.755,37	168.370.559.228,55	19.588.821.526,82

Mutasi Beban Pemeliharaan dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD/BOS	Rp	6.539.341.183,00
2. Koreksi/Reklasifikasi	Rp	70.162.193,94
3. Penambahan Utang Pada Tahun 2021.....	Rp	5.507.795.938,17
4. Pembayaran Utang Pada Tahun 2020.....	Rp	5.085.044.750,63
5. Belanja Modal Bukan Aset.....	Rp	19.141.569.588,10
6. Kapitalisasi Aset	<u>Rp</u>	<u>6.444.678.237,88</u>
7. Beban Pemeliharaan (7 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	Rp	19.588.821.526,82

Koreksi dan reklasifikasi sebesar Rp70.162.193,94 dengan rincian sebagai berikut.

1. Terdapat Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.489.500,00;
2. Terdapat Pengurangan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan pada RS. Mata BLUD sebesar Rp4.053.500,00; dan
3. Terdapat Pengurangan Beban Pemeliharaan Instalasi Air Kotor Lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp43.619.193,94.

Realisasi Beban Pemeliharaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 41**.

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp204.498.698.188,00. Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp206.444.526.892,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.945.828.704,00 atau 0,94%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 171. Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Beban	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Kenaikan/penurunan	Rasio (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	182.006.255.560,00	0,00	182.006.255.560,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	6.890.274.886,00	0,00	6.890.274.886,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	109.928.671.983,00	(109.928.671.983,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	96.515.854.909,00	(96.515.854.909,00)	(100,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.511.658.861,00	0,00	7.511.658.861,00	0,00
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.817.320.422,00	0,00	4.817.320.422,00	0,00
7	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.273.188.459,00	0,00	3.273.188.459,00	0,00
Jumlah		204.498.698.188,00	206.444.526.892,00	(1.945.828.704,00)	(0,94)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 adalah Rp204.498.698.188,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 172. Realisasi Beban Perjalanan Dinas - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban-LO	Belanja-LRA	Perbedaan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	182.006.255.560,00	177.074.298.352,00	4.931.957.208,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	6.890.274.886,00	6.890.274.886,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.511.658.861,00	7.506.103.335,00	5.555.526,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.817.320.422,00	4.880.461.039,00	-63.140.617,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.273.188.459,00	1.176.964.991,00	2.096.223.468,00
Jumlah		204.498.698.188,00	197.528.102.603,00	6.970.595.585,00

Dari tabel diatas terdapat perbedaan sebesar Rp6.970.595.585,00 adalah:

1. Terdapat Biaya Tak Terduga Covid-19 pada Dinas Sosial sebesar Rp 581.020.000,00
2. Terdapat Belanja Modal Bukan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan SKPD sebesar Rp 136.645.450,00
3. Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan reklas dari belanja barang dan jasa BLUD/BOS pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.
 - a. RS. Mata (BLUD)..... Rp 22.763.512,00

b. RS. Paru-Paru (BLUD).....	Rp	10.949.671,00
c. RS. Gigi dan Mulut (BLUD).....	Rp	8.585.526,00
d. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).....	Rp	1.964.871.019,00
e. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi (BLUD).....	Rp	57.926.215,00
f. RS, Ernaldi Bahar (BLUD).....	Rp	125.296.179,00
g. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	Rp	1.471.538.319,00
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BLUD).....	Rp	2.590.999.694,00
		Rp6.252.930.135,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per SKPD disajikan pada **Lampiran 42**.

4.4.2.3 Beban Bunga

Beban Bunga Tahun 2021 teralisasi sebesar Rp570.795.054,47,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 173. Realisasi Beban Bunga Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	3.892.784,00	0,00	3.892.784,00	0,00
2	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	566.902.270,47	0,00	566.902.270,47	0,00
	Jumlah	570.795.054,47	0,00	570.795.054,47	0,00

Beban bunga Tahun 2021 adalah Rp570.795.054,47 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 174. Realisasi Beban Bunga - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	3.892.784,00	0,00	3.892.784,00
2	Beban Bunga Utang atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	566.902.270,47	566.902.270,47	0,00
	Jumlah	570.795.054,47	566.902.270,47	3.892.784,00

Selisih sebesar Rp3.892.784,00 merupakan utang bunga atas pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD).

4.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.629.974.928.627,00 dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.815.188.076.158,25, mengalami penurunan sebesar 10,12 % atau Rp185.213.147.531,25 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 175. Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	492.380.953,00	0,00	492.380.953,00	0,00
2	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah	0,00	359.554.000,00	(359.554.000,00)	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	198.959.552.406,00	0,00	198.959.552.406,00	0,00
4	Beban Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	0,00	93.023.213.814,25	(93.023.213.814,25)	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.425.009.480.000,00	0,00	1.425.009.480.000,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Pihak Ketiga	0,00	9.539.050.472,00	(9.539.050.472,00)	0,00
7	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	550.473.668,00	0,00	550.473.668,00	0,00
8	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	310.308.517.872,00	(310.308.517.872,00)	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.963.041.600,00	0,00	4.963.041.600,00	0,00
10	Beban Hibah Dana Bos ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	0,00	1.401.957.740.000,00	(1.401.957.740.000,00)	0,00
Jumlah		1.629.974.928.627,00	1.815.188.076.158,25	(185.213.147.531,25)	(10,12)

Beban Hibah Tahun 2021 adalah Rp1.629.974.928.627,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 176. Realisasi Beban Hibah - LO dan LRA Tahun 2021

(dalam rupiah)

Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	492.380.953,00	0,00	492.380.953,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,	198.959.552.406,00	198.950.652.406,00	8.900.000,00

Rekening	Realisasi LO (Rp)	Realisasi LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.425.009.480.000,00	1.425.009.480.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	550.473.668,00	550.473.668,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.963.041.600,00	4.963.041.600,00	0,00
Jumlah	1.629.974.928.627,00	1.629.473.647.674,00	501.280.953,00

Dari tabel di atas terdapat perbedaan dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

- Perbedaan Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp492.380.953,00 merupakan hibah kendaraan bermotor penumpang kepada Polda Sumatera Selatan tahun 2021.
- Perbedaan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp8.900.000,00 merupakan utang hibah pembangunan pagar SMK Setia Negara Kabupaten Banyuasin.

Tabel 177. Rincian Beban Hibah per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Hibah-LO (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.425.187.480.000,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	5.405.345.668,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.940.080.856,00
4	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	49.231.073.200,00
5	Sekretariat Daerah	143.247.907.303,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.963.041.600,00
	Jumlah	1.629.974.928.627,00

4.4.2.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 adalah Rp846.786.797,07 merupakan Beban Penyisihan Piutang Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat pada 6 SKPD, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 178. Realisasi Beban Penyisihan Piutang per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang-LO
1	Rs. Mata (Blud)	9.807.809,70
2	Rs. Paru-Paru (Blud)	145.266,50
3	Rs. Gigi Dan Mulut (Blud)	1.569.957,00

No	SKPD	Beban Penyisihan Piutang-LO
4	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (Blud)	47.012.062,50
5	Rs. Dr Ernaldi Bahar (Blud)	55.686.570,70
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2.900.270,00
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (Blud)	19.581.275,00
8	Sekretariat Daerah	251.080.325,00
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd)	451.182.204,88
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	2.609.935,79
12	Badan Pendapatan Daerah	5.136.120,00
Jumlah		846.786.797,07

4.4.2.6 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain pada Tahun 2021 dan 2020 terealisasi masing-masing sebesar Rp76.036.084.181,69 dan Rp98.302.014.691,23 yang merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp43.746.525.141,00 dan Beban lain-lain sebesar Rp.36.136.709.095,52 terdiri dari aset *ekstrakomptabel*, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 179. Realisasi Beban Lain-Lain Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Lain-Lain-LO
1	Dinas Pendidikan	24.381.633.380,77
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	291.056.050,00
3	Rs. Mata (BLUD)	19.932.395,00
4	Rs. Paru-Paru (BLUD)	53.576.713,00
5	Rs. Gigi Dan Mulut (BLUD)	121.341.883,00
6	Rs. Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD)	1.413.153.475,70
7	Rs. Dr Ernaldi Bahar (SKPD)	77.052.710,00
8	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	22.899.000,00
9	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	30.240.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	50.801.146,64
11	Satuan Polisi Pamong Praja	44.942.193,94
12	Dinas Sosial	60.217.500,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.350.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.886.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.000.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (BLUD)	27.425.200,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	850.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.300.000,00
20	Dinas Perhubungan	86.537.000,00
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	990.000,00
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.295.000,00
24	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.885.000,00
25	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8.550.000,00
26	Dinas Perpustakaan	176.270.367,00

No	SKPD	Beban Lain-Lain-LO
27	Dinas Kearsipan	68.911.369,56
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	37.800.000,00
30	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	5.000.000,00
32	Dinas Perindustrian	614.000,00
33	Sekretariat Daerah	613.815.957,00
34	Sekretariat Dprd	191.972.262,00
35	Inspektorat	362.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.500.000,00
37	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	274.736.900,00
38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	47.579.756.629,52
39	Badan Pendapatan Daerah	164.687.120,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	73.928.000,00
42	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	120.814.928,56
Jumlah		76.036.084.181,69

4.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp946.520.311.743,54. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp953.511.371.075,26 terdapat penurunan sebesar Rp6.991.059.331,72 dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel. 180 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap	939.761.472.341,54	953.684.672.238,55
2	Beban Penyusutan Aset Lainnya	71.451.960,00	45.056.293.526,95
3	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	6.687.387.442,00	(22.716.289.388,00)
Jumlah		946.520.311.743,54	953.511.371.075,26

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat pada **Lampiran 43**.

4.4.2.8 Beban Transfer

Beban Transfer pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.137.698.225.442,37 dan Rp2.605.770.515.953,35. Beban Transfer 2021 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 181. Rincian Beban Transfer Tahun 2021

(dalam rupiah)

No	Rekening	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.656.969.991.065,00	1.579.375.912.863,60	77.594.078.201,40
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.473.728.234.377,37	1.258.433.632.182,36	215.294.602.195,01
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
Jumlah		3.137.698.225.442,37	2.844.809.545.045,96	292.888.680.396,41

- a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.656.969.991.065,00
Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 182. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi DBH Pajak Rokok Tahun 2021	Realisasi DBH Pajak Kendaraan Tahun 2021	Pembayaran Utang Tahun 2020	Penambahan Utang Tahun 2021	Beban Transfer Yang Dipotong Piutang Jamsoskes	Beban Transfer
1	2	3	4	5	6	7	7 = 3 + 4 - 5 + 6
1	Palembang	53.977.139.866,39	282.491.356.545,60	25.696.763.406,00	37.519.464.942,61	20.396.537.658,40	368.687.835.607,00
2	Muba	26.808.246.310,01	85.108.536.355,00	6.721.718.851,00	10.510.608.961,99	0,00	115.705.672.776,00
3	Banyuasin	32.176.769.986,92	70.537.124.139,00	5.627.593.480,00	9.771.192.258,08	0,00	106.857.492.904,00
4	OKI	31.116.898.965,55	88.428.233.281,00	7.155.235.528,00	11.573.677.210,45	0,00	123.963.573.929,00
5	Ogan Ilir	20.606.916.993,85	50.904.059.651,00	4.173.164.535,00	6.769.245.712,15	0,00	74.107.057.822,00
6	OKU	18.813.450.118,95	56.561.829.764,00	4.802.777.647,00	7.222.801.405,05	0,00	77.795.303.641,00
7	OKU Selatan	16.958.309.111,09	37.969.676.760,00	3.109.813.406,00	4.857.843.749,91	0,00	56.676.016.215,00
8	OKU Timur	22.153.357.166,97	51.800.056.280,00	4.052.064.771,00	7.054.704.867,03	0,00	76.956.053.543,00
9	Muara Enim	26.010.373.806,25	117.615.765.988,00	8.293.802.828,00	15.271.973.693,75	0,00	150.604.310.660,00
10	Prabumulih	14.003.856.615,02	51.719.736.289,00	4.543.538.914,00	6.622.676.425,98	0,00	67.802.730.416,00
11	Lahat	20.170.252.795,41	69.923.511.801,00	5.815.617.723,00	9.136.458.752,59	0,00	93.414.605.626,00
12	Pagar Alam	12.965.065.807,40	37.590.940.858,00	3.119.849.544,00	4.557.031.694,60	0,00	51.993.188.816,00
13	MURA	20.104.688.078,40	49.124.047.342,00	4.026.590.515,00	6.400.595.096,60	0,00	71.602.740.002,00
14	Lubuklinggau	15.482.925.266,30	51.890.232.965,00	4.410.212.663,00	6.291.729.570,70	0,00	69.254.675.139,00
15	Empat Lawang	16.385.597.177,80	34.373.178.797,00	2.760.230.866,00	4.074.422.126,20	0,00	52.072.967.235,00
16	Muratarra	14.091.189.454,35	36.450.176.579,00	3.012.250.013,00	5.001.762.788,65	0,00	52.530.878.809,00
17	PALI	8.448.823.836,34	36.613.588.112,00	3.249.018.533,00	5.131.494.509,66	0,00	46.944.887.925,00
	Jumlah	370.273.861.357,00	1.209.102.051.506,60	100.570.243.223,00	157.767.683.766,00	20.396.537.658,40	1.656.969.991.065,00

Apabila dibandingkan antara Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.579.375.912.863,60 TA 2021 dan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.656.969.991.065,00 TA 2021 terdapat selisih sebesar Rp77.594.078.201,40 yang merupakan:

- 1) Penambahan beban dari penambahan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp137.662.115.490,00.
- 2) Penambahan Utang Atas Kurang Salur DBH Pajak Rokok Triwulan IV ke Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 197/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Kurang Salur Alokasi DBH Pajak Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.105.568.276,00;

- 3) Pengurangan beban atas pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Tahun 2020 sebesar Rp100.570.243.223,00;
 - 4) Penambahan beban dari kompensasi piutang jamsoskes Kota Palembang yang dipotong melalui Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar Rp.20.396.637.658,40.
- b. Beban Bantuan Keuangan terealisasi tahun 2021 sebesar Rp1.480.728.234.377,95. Rincian beban bantuan keuangan dijelaskan pada uraian sebagai berikut.
- 1) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp1.473.728.234.377,95. Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota terdapat pada tabel 171 berikut.

Tabel 183. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bankeu Khusus	Kurang Salur Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Kab/Kota	Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	Beban Transfer
1	2	3	4	5	5=3+4+5
1	Kota Palembang	91.704.827.670,00	6.580.006.691,00	50.730.640.430,00	149.015.474.791,00
2	Kab Muba	76.556.339.692,00	908.643.000,00	0,00	77.464.982.692,00
3	Kab Banyuasin	84.579.747.558,00	1.571.259.000,00	37.508.863.168,79	123.659.869.726,79
4	Kab OKI	65.068.050.000,00	1.624.446.500,00	4.974.000.000,00	71.666.496.500,00
5	Kab Ogan Ilir	59.374.023.208,25	1.263.383.500,00	12.811.000.000,00	73.448.406.708,25
6	Kab OKU	51.243.170.988,66	548.020.500,00	0,00	51.791.191.488,66
7	Kab OKU Selatan	26.593.940.767,93	1.767.991.500,00	3.462.377.526,21	31.824.309.794,14
8	Kab OKU Timur	264.071.088.266,00	1.318.936.500,00	50.365.940.588,11	315.755.965.354,11
9	Kab Muara Enim	7.121.505.690,00	2.041.480.500,00	16.616.846.610,00	25.779.832.800,00
10	Kota Prabumulih	22.111.658.800,00	699.643.500,00	12.543.061.200,00	35.354.363.500,00
11	Kab Lahat	98.012.595.662,00	0,00	2.204.990.400,00	100.217.586.062,00
12	Kota Pagar Alam	62.986.973.000,00	598.995.000,00	0,00	63.585.968.000,00
13	Kab MURA	48.366.504.600,00	808.637.000,00	8.309.000.000,00	57.484.141.600,00
14	Kota Lubuklinggau	41.430.397.725,00	434.708.000,00	0,00	41.865.105.725,00
15	Kab Empat Lawang	81.812.043.800,00	1.519.188.000,00	7.630.120.400,00	90.961.352.200,00
16	Kab Muratara	78.867.160.200,00	749.955.000,00	0,00	79.617.115.200,00
17	Kab. PALI	79.914.249.736,00	741.280.500,00	3.580.542.000,00	84.236.072.236,00
Jumlah		1.239.814.277.363,84	23.176.574.691,00	210.737.382.323,11	1.473.728.234.377,95

- 2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 yang merupakan transfer bantuan keuangan ke desa dan kelurahan di kabupaten/kota se-Sumsel. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Kelurahan per kabupaten/kota terdapat pada penjelasan tentang akun-akun LRA pada laporan keuangan ini.

Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa.

4.4.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pokok pemerintahan. Saldo dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 menunjukkan defisit sebesar Rp4.377.757.565,47 turun sebesar Rp6.175.257.416,85 dari Tahun 2020 surplus sebesar Rp1.797.499.851,38 dengan rincian sebagai berikut.

1. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp61.029.193.935,37, terdiri dari:
 - a. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang TGR Tahun 2021 pada BPKAD (PPKD) sebesar Rp8.600.000,00;
 - b. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang TKI pada BPKAD (PPKD) sebesar Rp10.000.000,00;
 - c. Surplus atas penjualan aset lainnya berupa lelang kayu onglan pada Dinas Kehutanan sebesar Rp418.135.600,00;
 - d. Surplus atas penghapusan penyisihan Piutang klaim BPJS Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp4.069,50;
 - e. Surplus atas penghapusan Penyisihan Piutang klaim TCM Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Paru sebesar Rp150.925,00;
 - f. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang BLUD Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Mata sebesar Rp4.498.463,50;
 - g. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang Tahun 2020 pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebesar Rp1.706.629,00;
 - h. Surplus atas penghapusan penyisihan piutang pendapatan atas pembayaran piutang pendapatan di Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp167.500.000,00;
 - i. Surplus atas penghapusan penyisihan Piutang Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup (BLUD) sebesar Rp13.165.782,00;
 - j. Surplus atas penghapusan Penyisihan Piutang Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah sebesar Rp3.128.466,37;
 - k. Penghapusan nilai utang karena selisih pembulatan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp15,93;
 - l. Surplus Penjualan peralatan dan mesin SMA 8 sebesar Rp670.000,00;
 - m. Surplus penjualan peralatan dan mesin Badan Penghubung sebesar Rp500.000,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga surplus sebesar Rp500.000,00; dan

- n. Penambahan aset yang diserahkan oleh PT ATS kepada Pemprov Sumsel (BPKAD) TA 2021 berdasarkan Dokumen No. No. 036/ATS/XII/2021 dan No. 050/BPKAD/2021 sebesar Rp60.401.134.000,00.
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, terdiri dari:

Penghapusan utang pihak ketiga yaitu: PT Mainmora Gumenta (Kegiatan Perkuatan Tebing Sungai Megang); dan CV Tiara Sukses (Kegiatan Rehabilitasi di Air Pangi) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp1.670.910.009,04;
3. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp67.078.892.346,81, terdiri dari:
 - a. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang an. Drh. Haifudin Nomor Reg.001/MPPPKD/2020 Tanggal 21 Desember 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp3.908.572,00;
 - b. Penghapusan Aset Tanah Tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp24.942.000.000,00;
 - c. Penghapusan Aset Gedung Tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp460.103.315,00;
 - d. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp930.000,00;
 - e. Penghapusan Hewan Ternak berupa kambing sebagai tindak lanjut temuan BPK Tahun 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp410.400.000,00;
 - f. Penghapusan Aset Jembatan Mulak karena bencana alam pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp1.210.007.883,00;
 - g. Penghapusan Aset Lain-Lain berupa bangunan rumah transmigrasi sebesar Rp9.398.403.103,00 dan jalan sebesar Rp3.805.211.450,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total Rp13.203.614.553,00;
 - h. Penghapusan aset peralatan dan mesin yang berasal dari ekstrakomptable Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp247.968.850,00;
 - i. Penghapusan aset Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp36.152.000,00;
 - j. Persediaan bahan kimia habis pakai yang ditemukan sudah *expired* pada laboratorium lingkungan DLHP sebesar Rp6.651.000,00;
 - k. Persediaan farmasi yang sudah kedaluarsa pada Tahun 2021 pada RSUD Siti Fatimah Rp1.667.176.234,00;
 - l. Pencatatan beban persediaan atas Persediaan Obat yang kedaluarsa Tahun 2021 di Dinkes yang telah dikeluarkan dari neraca menjadi defisit non operasional LO sebesar Rp215.418.186,00;
 - m. Pencatatan beban persediaan atas Persediaan Obat yang rusak tahun 2021 di Dinkes yang telah dikeluarkan dari neraca menjadi defisit non operasional LO sebesar Rp3.277.000,00;

- n. Penghapusan aset lainnya (bangunan gedung Poskesdes) pada Dinas kesehatan (SKPD) Hibah TA 2021 No 677/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp15.186.142.338,81;
- o. Koreksi kurang ekuitas pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.848.437.628,00 karena dihibahkan ke Jamkrida Palembang, yang merupakan hibah TA 2021 berdasarkan SK Gub Sumsel No: 560/KPTS/BPKAD/2021;
- p. Pengurang aset lainnya berupa ternak yang mati pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan TA 2021 berdasarkan SK Gub Sumsel No:303/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp52.626.000,00;
- q. Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp5.504.214.000,00 karena Penghapusan Aset CSR Hibah ke Kabupaten Kota pada BPKAD TA 2021 berdasarkan:
 - No. 061/HIBAH/BPKAD/2021 dan No. 2218/DIR/1.4/XI/2021 (RS Siti Khadijah)
 - No. 038/HIBAH/BPKAD/2021 dan No. 129/BA/BPKAD/2021 (Kota Palembang)
- r. Penghapusan aset tetap gedung bangunan pada Badan Penelitian Pengembangan Daerah TA 2021 sebesar Rp38.140.377,00, namun nilai yang dicatat adalah nilai buku seharusnya nilai perolehan dan menghapus nilai akumulasi penyusutan, hapus TA 2021 SK Gub Sumsel No. 840/KPTS/BPKAD/2021; dan
- s. Penghapusan aset pada PUBMTR yang sebelumnya dicatat sebagai koreksi atas kesalahan pembebanan pada koreksi ekuitas sebesar Rp41.724.410,00.

4.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp78.249.427,00 dan Rp0,00. Pos Luar Biasa Tahun 2021 merupakan pengembalian uang pembayaran pajak penerangan jalan PT. OKI Pulp & Paper Mills, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 288/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp63.992.127,00 dikarenakan salah setor ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan dan pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2020/2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov.Sumsel berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 813/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 14 Desember 2021 sebesar Rp14.257.300,00.

4.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.384.727.870.309,72 turun sebesar Rp40.529.705.149,96 atau 2,84% bila dibandingkan saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.425.257.575.459,68.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut.

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Pendapatan Pajak Daerah	3.523.785.342.246,24	3.081.800.984.699,61
Pendapatan Retribusi Daerah	9.313.749.306,00	8.234.552.913,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.714.183.659,07	82.836.132.369,66
Lain-lain PAD Yang Sah	263.982.530.473,86	202.029.556.859,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.712.683.072.712,00	5.835.674.693.538,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	40.221.649.000,00
Pendapatan Hibah	33.145.138.870,00	26.967.232.682,00
Pendapatan Lainnya	0,00	555.500.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	9.608.624.017.267,17	9.278.320.302.062,03
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Belanja Pegawai	1.923.290.549.742,00	1.771.524.397.218,00
Belanja Barang dan Jasa	1.811.885.209.417,49	1.392.760.537.519,30
Belanja Bunga	382.096.916,00	0,00
Belanja Hibah	1.629.473.647.674,00	1.873.445.636.520,56
Belanja Biaya Provisi	0,00	939.738.517,79
Belanja Tak Terduga	14.055.098.162,00	197.104.066.604,97
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.579.375.912.863,60	1.455.636.933.603,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.265.433.632.182,36	1.153.951.416.618,73
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	7.700.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	8.223.896.146.957,45	7.853.062.726.602,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.384.727.870.309,72	1.425.257.575.459,68

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.920.166.886.621,94) turun sebesar Rp141.550.975.706,40 atau 7,96% dari Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.778.615.910.915,54).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk

meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi disajikan sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	1.000.000,00	197.758.000,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.666.227.400,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	2.667.227.400,00	199.758.000,00
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Belanja Modal Tanah	70.853.405.527,00	14.597.408.000,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.834.883.969,24	181.062.816.387,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	289.050.835.757,28	201.564.960.984,78
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.107.398.086.860,42	904.310.171.568,49
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.696.901.908,00	53.768.783.085,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	215.967.588.496,51
Belanja Modal BLUD	0,00	12.330.403.046,38
Belanja Modal BOS	0,00	81.098.635.795,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	86.000.000.000,00	114.114.901.552,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	1.922.834.114.021,94	1.778.815.668.915,54
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	(1.920.166.886.621,94)	(1.778.615.910.915,54)

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp493.566.176.762,71 naik sebesar Rp367.822.666.426,71 atau 292,52% dibandingkan arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp125.743.510.336,00.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan pendanaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pendanaan, yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan disajikan sebagai berikut.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	493.566.176.762,71	125.743.510.336,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	493.566.176.762,71	125.743.510.336,00
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Pemerintah	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	493.566.176.762,71	125.743.510.336,00

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.815.944.233,02) turun sebesar Rp5.732.429.624,04 atau 196,55% dari Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris sebesar per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.916.485.391,02. Saldo arus kas bersih sebesar (Rp2.815.944.233,02) adalah penerimaan PFK dari penambahan utang pajak PSG sebesar Rp16.041.380,00 dan utang PFK lainnya sebesar Rp66.371.504,00 pada Dinas Pendidikan, dikurangi pengeluaran PFK utang pajak tahun 2020 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.830.302.617,02 dan utang PFK lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp68.054.500,00.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain adalah PFK dan PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Arus Kas Masuk</u>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	390.180.222.345,89	372.947.107.193,42
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	390.180.222.345,89	372.947.107.193,42
<u>Arus Kas Keluar</u>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	393.017.766.578,91	370.030.621.802,40
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	393.017.766.578,91	370.030.621.802,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.837.544.233,02)	2.916.485.391,02

Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 184. Penerimaan dan Pengeluaran PFK

(dalam rupiah)

No	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Iuran Wajib Pegawai	65.062.559.938,00	65.062.559.938,00
2	Taperum	0,00	0,00
3	Askes	74.872.225,00	74.872.225,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	72.885.787.738,00	73.710.755.658,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	4.086.561.352,00	4.194.013.152,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	3.148.317.040,00	3.180.171.743,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	41.914.392.254,00	41.915.692.845,00
8	Pajak Penghasilan Ps 15	48.686.400,00	48.686.400,00
9	Pajak Penghasilan Ps 26	21.550.253,00	21.550.253,00
10	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	192.196.686.042,00	194.045.372.265,02
11	Taspen	75.576.763,00	75.576.763,00
12	Denda Keterlambatan	1.051.728.085,44	1.051.728.085,44
13	Potongan Audit BPK	1.267.132.751,45	1.267.132.751,45
14	Tunjangan Komunikasi Insentif	2.825.550.000,00	2.825.550.000,00
15	Tunjangan Perumahan	2.929.050.000,00	2.929.050.000,00
16	Tunjangan Transportasi	2.547.000.000,00	2.547.000.000,00
17	PFK Lainnya	44.771.504,00	68.054.500,00
Jumlah		390.180.222.345,89	393.017.766.578,91

Rincian Saldo akhir Kas dalam Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(44.710.383.782,53)	(224.698.339.728,84)
Saldo Awal Kas di BUD	61.752.769.102,86	208.426.760.311,43
Kas di Bendahara Pengeluaran	76.450.634,00	10.355.271,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	24.959.467,00	11.803.458,00
Saldo Kas di Bendahara BOS	11.917.590.919,58	49.858.049.761,52
Koreksi Saldo Awal Kas di bendahara BOS	(26.170.690,46)	81.787.371,82
Saldo Awal Kas di BLUD	41.259.937.445,85	28.659.503.069,65
Saldo Kas Lainnya	9.505.398.945,29	62.187.187.000,00
Saldo Akhir Kas	79.800.552.041,59	124.537.106.514,58

Saldo Akhir Kas sebesar Rp79.800.552.041,59 terdiri dari:

- Saldo Akhir Kas di BUD	:Rp.	23.462.357.600,53
- Kas di Bendahara Pengeluaran	:Rp.	0,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	:Rp.	13.231.924,00
- Kas di Bendahara BOS	:Rp.	1.112.967.254,00
- Kas di BLUD	:Rp.	45.734.763.013,06
- Kas Lainnya	:Rp.	9.477.232.250,00

Jika dibandingkan dengan saldo kas di neraca sebesar Rp79.801.398.000,59 terdapat perbedaan sebesar Rp845.959,00 yang merupakan rekening pasif pada Dinas Kesehatan dengan rincian pada bab penjelasan kas lainnya.

4.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 185. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	31.142.490.750.017,20	25.566.960.490.904,10
Surplus/Defisit-LO	167.366.158.340,05	961.492.156.773,58
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
-Koreksi Nilai Persediaan	10.670.000,00	0,00
-Koreksi Ekuitas Lainnya	548.643.951.401,47	4.614.038.102.339,50
Koreksi Saldo Awal Kas	(26.170.690,46)	81.787.371,82
Koreksi Saldo Awal Piutang	(10.280.000,00)	540.000,00
Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	80.325,00	34.798.932,86
Koreksi Persediaan	246.460.990,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	86.338.633.613,14
Koreksi awal Pendapatan diterima dimuka	(276.050.399,14)	(848.195.333,33)
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	566.387.160.783,05	35.044.302.310,87
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	11.908.484.492,00	(20.972.889.546,90)
Penilaian Ulang berdasarkan NJOP	0,00	4.514.350.126.791,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	(1.170.500.000,00)	0,00
Koreksi Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Utang	0,00	0,04
Koreksi Beban Perjalanan Dinas	0,00	8.998.200,00
Koreksi Pendapatan	37.986.864,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(28.453.220.963,00)	0,00
Koreksi Lainnya	0,02	0,00
Total Koreksi	548.654.621.401,47	4.614.038.102.339,50
Ekuitas Akhir	31.858.511.529.758,72	31.142.490.750.017,20

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp31.858.511.529.758,72 naik sebesar Rp716.020.779.741,53 atau 2,30% dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp31.142.490.750.017,20 dengan rincian sebagai berikut.

4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp31.142.490.750.017,20 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2020.

4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp167.366.158.340,05.

4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp548.654.621.401,47 terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp10.670.000,00 yang merupakan koreksi penambahan beban persediaan untuk mengakui hibah K3 di Tahun 2018 dari pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah (BLUD) dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp548.643.951.401,47. Rincian koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp548.643.951.401,47 adalah sebagai berikut.

1. Koreksi kurang saldo awal kas sebesar Rp26.170.690,46 merupakan koreksi tambah saldo awal kas Bendahara BOS sebesar Rp52.509.949,52 dan koreksi kurang saldo awal kas di bendahara PSG sebesar Rp78.680.639,98.
2. Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp10.280.000,00 adalah koreksi kurang saldo awal piutang pada Rumah Sakit Paru dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Koreksi kurang saldo awal piutang pada RS. Paru karena salah catat klaim piutang TCM Tahun 2020 sebesar Rp250.000,00
 - b. Koreksi kurang saldo awal piutang TKI an. Helman Effendi yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) yang tercatat sebagai pendapatan lain-lain.
 - c. Koreksi kurang saldo awal piutang lainnya sebesar Rp30.000,00 pada PPKD yang sebelumnya telah diakui sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2020.
3. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp80.325,00 adalah pengurangan saldo awal atas penyisihan piutang retribusi PT Karya Manunggal pada Sekretariat Daerah.
4. Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp276.050.399,14 merupakan koreksi kurang saldo awal pendapatan diterima dimuka sebesar Rp297.831,00 pada Sekretariat Daerah dan sebesar Rp68.493,15 pada RSUD Siti Fatimah karena perbedaan metode perhitungan dan koreksi tambah saldo awal pendapatan diterima dimuka Rp276.416.723,29 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang belum tercatat pada Tahun 2020.
5. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp246.460.990,00 adalah koreksi tambah persediaan APBD Tahun sebelumnya yang belum tercatat pada Rumah Sakit Khusus Mata.
6. Koreksi tambah ekuitas atas mutasi aset tetap sebesar Rp354.282.446.283,05 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Penambahan dan pengurangan aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp44.585.382.855,00 yang terdiri dari:
 - Koreksi tambah aset tetap tanah karena penilaian Rp. 32.833.798.000,00 kembali oleh DJKN;

- Koreksi tambah aset tetap peralatan dan mesin dan bahan perpustakaan yang tahun sebelumnya diakui sebagai barang ekstrakomptabel; Rp. 147.467.500,00
 - Koreksi tambah aset tetap peralatan dan mesin sebagai tindak lanjut temuan BPKP Tahun 2021 atas pemeriksaan belanja BOS Tahun 2020; Rp. 246.069.100,00
 - Koreksi tambah aset tetap gedung bangunan sebagai tindak lanjut temuan BPKP Tahun 2021 atas pemeriksaan belanja BOS Tahun 2020; Rp. 25.000.000,00
 - Koreksi tambah aset tetap gedung bangunan yang belum tercatat; Rp. 11.073.805.785,00
 - Koreksi tambah aset tetap jalan irigasi jaringan yang belum tercatat; dan Rp. 161.000.000,00
 - Koreksi tambah aset tetap karena mapping yang tidak terbentuk di neraca. Rp. 98.242.470,00
- b. Koreksi tambah ekuitas karena perbedaan perhitungan dengan SIMDA BMD terkait aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp139,40
- c. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PSDA sebesar Rp324.891.150,00
- d. Koreksi tambah ekuitas karena pembulatan nilai SP2D pembayaran utang aset pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp0,08.
- e. Koreksi tambah ekuitas karena penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp930.000,00 pada Dinas Sosial.
- f. Koreksi kurang ekuitas karena penghapusan aset tetap peralatan mesin (Tangki air) yang dobel catat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp329.888.750,00.
- g. Koreksi penambahan dan pengurangan aset tetap pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp11.900.000,00 terdiri dari :
- Koreksi tambah ekuitas karena penambahan aset tetap gedung bangunan dari ekstrakomptabel tahun sebelumnya. Rp. 14.900.000,00
 - Koreksi kurang ekuitas karena koreksi kurang saldo awal aset tetap peralatan dan mesin. Rp. (3.000.000,00)
- h. Koreksi tambah ekuitas karena penambahan aset tetap tanah Danau OPI karena penilaian kembali oleh DJKN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp306.648.036.428,57.
- i. Koreksi tambah ekuitas karena penambahan aset tetap gedung bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.987.000,00.
- j. Mutasi aset tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.031.207.460,00 terdiri dari:
- Koreksi tambah ekuitas karena penambahan Aset gedung Darma Wanita yang berlokasi di Jl. Rp. 3.076.607.460,00

Kakak Tua semula ekstrakomptabel menjadi intrakomptabel;

- Koreksi kurang ekuitas karena pengurangan aset tetap gedung bangunan yang menjadi ekstrakomptabel berupa rumah genset, 2 unit WC, 2 unit pos jaga di Griya Agung; dan Rp. (41.500.000,00)
- Koreksi kurang ekuitas karena koreksi pencatatan pos jaga. Rp. (3.900.000,00)

7. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp11.908.484.492,00 adalah:
 - a. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp4.906.484.295,00 karena koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp100.063.183,00 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan seperti Rp4.806.421.112,00 pada Dinas Pendidikan.
 - b. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp32.662.187,00 karena koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan gedung bangunan sebesar Rp32.662.187,00 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.
 - d. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp231.707.573,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung bangunan sebesar Rp440.653.736,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - f. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung bangunan pada Dinas Perindustrian sebesar Rp15.361.500,00.
 - g. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp6.281.615.201,00 adalah koreksi saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada Sekretariat Daerah.
8. Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp1.170.500.000,00 adalah penghapusan aset lainnya yang dikerja samakan dengan PT ATS pada Tahun 2020 pada BPKAD.
9. Koreksi tambah ekuitas sebesar Rp37.986.864,00 karena koreksi lebih catat pendapatan hasil kerja sama (TCM) yang seharusnya menjadi pendapatan Tahun 2020 pada RSK Paru sebesar Rp8.610.000,00 dan koreksi tambah pendapatan kontribusi Gedung Bowling Center atas kesalahan dalam menetapkan besaran kontribusi pada Tahun 2019 dan 2020 dan pendapatan Tahun 2021 yang belum dibayar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp29.376.864,00
10. Koreksi tambah ekuitas untuk menyesuaikan selisih saldo akun *reciprocal* sebesar Rp0,02.
11. Koreksi tambah Aset Tetap Tanah Penialain bernilai Rp0,00 dengan NJOP sebesar Rp212.104.714.500,00 antara lain pada Dinas Perhubungan sebesar Rp157.807.820.000,00, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp10.996.800.000,00, BPKAD sebesar Rp42.782.996.000,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp5.517.098.500,00.

12. Koreksi tambah Kewajiban Jangka Pendek – Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sebelumnya tidak memperhitungkan komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi sebagai dasar perhitungan pembayaran jaminan kesehatan BPJS TA 2020 pada BPKAD sebesar Rp28.453.220.963,00

Dari uraian tersebut di atas maka total koreksi ekuitas lainnya ditambah koreksi nilai persediaan adalah sebesar Rp548.654.621.401,47.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp31.858.511.529.758,72 adalah saldo akhir Ekuitas Tahun 2021.

V. PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 Informasi Tambahan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada 17 Kabupaten/Kota sebesar Rp1.486.479.729.000,00. Realisasi nilai kontrak sebesar Rp1.450.551.659.685,37 dan telah disalurkan sebesar Rp1.239.814.277.363,25 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 186. Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Anggaran	Nilai Kontrak	Jumlah Penyaluran	Sisa Penyaluran berdasarkan Nilai Kontrak
1	Palembang	144.950.000.000,00	142.435.468.100,00	91.704.827.670,00	50.730.640.430,00
2	Musi Banyuasin	110.000.000.000,00	109.366.199.560,00	109.366.199.560,00	-
3	Banyuasin	90.456.083.000,00	89.278.750.858,79	51.769.887.690,00	37.508.863.168,79
4	Ogan Komering Ilir	71.000.000.000,00	70.042.050.000,00	65.068.050.000,00	4.974.000.000,00
5	Ogan Ilir	73.000.000.000,00	72.185.023.208,25	59.374.023.208,25	12.811.000.000,00
6	Ogan Komering Ulu	52.500.000.000,00	51.243.170.987,66	51.243.170.987,66	-
7	OKU Selatan	30.500.000.000,00	30.056.318.294,15	26.593.940.767,94	3.462.377.526,21
8	OKU Timur	319.100.000.000,00	314.437.028.853,52	264.071.088.266,41	50.365.940.588,11
9	Muara Enim	25.000.000.000,00	23.738.352.300,00	7.121.505.690,00	16.616.846.610,00
10	Prabumulih	35.500.000.000,00	34.654.720.000,00	22.111.658.800,00	12.543.061.200,00
11	Lahat	101.800.000.000,00	100.217.586.062,00	98.012.595.662,00	2.204.990.400,00
12	Pagar Alam	63.550.268.000,00	62.986.973.000,00	62.986.973.000,00	-
13	Musi Rawas	61.000.000.000,00	59.248.853.000,00	50.939.853.000,00	8.309.000.000,00
14	Lubuklinggau	41.500.000.000,00	41.430.397.725,00	41.430.397.725,00	-
15	Empat Lawang	113.600.000.000,00	112.845.976.000,00	105.215.855.600,00	7.630.120.400,00
16	Musi Rawas Utara	69.000.000.000,00	52.890.000.000,00	52.890.000.000,00	-
17	PALI	84.023.378.000,00	83.494.791.736,00	79.914.249.736,00	3.580.542.000,00
	Total	1.486.479.729.000,00	1.450.551.659.685,37	1.239.814.277.363,26	210.737.382.323,11

Sisa penyaluran bantuan keuangan sebesar Rp210.737.382.323,11 direncanakan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2022 agar dapat dilakukan pembayaran atas sejumlah tersebut.

VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya. untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan.